Audited TA. 2022



# PEMERINTAH

KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

# LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

# **DAFTAR ISI**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 (Audited) Daftar Isi Daftar Tabel Daftar Lampiran

Pernyataan Tanggung Jawab

		Halaman
Lapora	n Realisasi Anggaran	i
Lapora	n Perubahan Saldo Anggaran Lebih	iii
	n Operasional	
	n Arus Kas	
•	n Perubahan Ekuitas	
	PENDAHULUAN	
1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	
1.2	Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	
1.3	Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	3
BAB II	EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIA	AN
TARGI	ET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	5
2.1	Ekonomi Makro	5
2.1.1	Tingkat Kemiskinan	5
2.1.2	Tingkat Pengangguran Terbuka	6
2.1.3	Indek Gini (Gini Ratio)	7
2.1.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	8
2.1.5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	9
2.1.6	Inflasi	9
2.1.7	Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat	10
2.2	Kebijakan Keuangan	
2.2.1	Kebijakan Pendapatan Daerah	
2.2.2	Kebijakan Belanja Daerah	14
2.2.3	Kebijakan Pembiayaan Daerah	
2.3	Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD	18
BAB II	II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN	20
3.1	Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan	20
3.2	Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan	
3.2.1	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan	21
3.2.2	Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja	28
BAB IV	V KEBIJAKAN AKUNTANSI	71
4.1	Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	
4.2	Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.2.1	Proses Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3	Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	
4.3.1	Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO	
4.3.2	Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban	
4.3.3	Kebijakan Akuntansi Pembiayaan	
4.3.4	Kebijakan Akuntansi Aset	

4.3.5	Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas	75
4.3.6	Kebijakan Akuntansi Konsolidasi	76
4.3.7	Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas	77
4.4	Penerapan Kebijakan Akuntansi	78
BAB V PE	NJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	82
5.1	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	82
5.1.1	Pendapatan	
5.1.1.1	Pendapatan Asli Daerah	
5.1.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	
5.1.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah	
5.1.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	
5.1.1.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	
5.1.1.2	Pendapatan Transfer	
5.1.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	
5.1.1.2.1.1	Dana Perimbangan	
	Dana Insentif Daerah (DID)	
	Dana Desa	
5.1.1.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	
	Pendapatan Bagi Hasil	
	Bantuan Keuangan	
5.1.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
-	Pendapatan Hibah	
5.1.1.3.2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	
5.1.2	Belanja	
5.1.2.1	Belanja Operasi	
5.1.2.1.1	Belanja Pegawai	
5.1.2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	
5.1.2.1.3	Belanja Bunga	
5.1.2.1.4	Belanja Hibah	
5.1.2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	
5.1.2.2	Belanja Modal	
5.1.2.2.1	Belanja Modal Tanah	
_	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
5.1.2.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	
5.1.2.2.4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
5.1.2.2.5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	
5.1.2.3	Belanja Tidak Terduga	
5.1.2.4	Belanja Transfer	
5.1.2.4.1	Belanja Bagi Hasil	
5.1.2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	
5.1.2.4.2	Surplus/Defisit	
5.1.4	Pembiayaan Netto	
5.1.4.1	Penerimaan Pembiayaan	
5.1.4.1	•	
5.1.4.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	
5.1.4.1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	
-		
5.1.4.2.1	Pembentukan Dana Cadangan  Pempentukan Modal Daerah	
5.1.4.2.2	Penyertaan Modal Daerah	
5.1.4.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	. 113

5.1.5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)	.113
5.2	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	.115
5.2.1	Saldo Anggaran Lebih Awal	.115
5.2.2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	.115
5.2.3	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	
5.2.4	Saldo Anggaran Lebih Akhir	.116
5.3	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca	.117
5.3.1	Aset	
5.3.1.1	Aset Lancar	.117
5.3.1.1.1	Kas di Kas Daerah	.118
5.3.1.1.2	Kas di Bendahara Pengeluaran	.119
5.3.1.1.3	Kas di Bendahara Penerimaan	
5.3.1.1.4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	.120
5.3.1.1.5	Kas di BLUD.	
5.3.1.1.6	Kas Dana BOS	.121
5.3.1.1.7	Kas Lainnya-Dana BOP	
5.3.1.1.8	Piutang Pajak Daerah	
5.3.1.1.9	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
	Piutang Retribusi Daerah	
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah.	
	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan	
0.0.1.1.12	Pasal 21	126
5 3 1 1 13	Piutang Bagi Hasil	
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
	Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	
	Beban Dibayar Di Muka	
	Persediaan	
5.3.1.2	Investasi Jangka Panjang	
5.3.1.2.1	Investasi Non Permanen (nilai bersih yang dapat direalisasikan)	
	Investasi Non Permanen	
	Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen	
5.3.1.2.2	Investasi Permanen	
5.3.1.3	Aset Tetap	
5.3.1.3.1	Tanah	
5.3.1.3.1	Peralatan dan Mesin	
5.3.1.3.3	Gedung dan Bangunan	
5.3.1.3.4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	
5.3.1.3.5	Aset Tetap Lainnya	
5.3.1.3.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	
5.3.1.3.7	Akumulasi Penyusutan	
5.3.1.4	Dana Cadangan	
5.3.1.4	Aset Lainnya	
	•	
5.3.1.5.1 5.3.1.5.2	Tagihan Lainnya	
5.3.1.5.2	Aset Tak Porganiad	
5.3.1.5.4	Aset Tak Berwujud Amortisasi	
5.3.1.5.5	Amorusasi Aset Lain-lain (setelah penyusutan)	
J.J.1.J.J.1	Aset Lain-lain	. 102

5.3.1.5.5.2	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	164
5.3.1.5.6	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	165
5.3.1.6	Properti Investasi (setelah penyusutan)	166
5.3.1.6.1	Properti Investasi	166
5.3.1.6.2	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	166
5.3.2	Kewajiban	167
5.3.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	167
5.3.2.1.1	Pendapatan Diterima Di Muka	167
5.3.2.1.2	Utang Belanja	167
5.3.2.1.3	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMI	)-
	Jangka Menengah	168
5.3.2.2	Kewajiban Jangka Panjang	168
5.3.3	Ekuitas	168
5.4	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional	169
5.4.1	Pendapatan – LO	169
5.4.1.1	Pendapatan Asli Daerah-LO	170
5.4.1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah-LO	170
5.4.1.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah-LO	170
5.4.1.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	171
5.4.1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	172
5.4.1.2	Pendapatan Transfer-LO	172
5.4.1.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	173
5.4.1.2.1.1	Dana Perimbangan-LO	173
5.4.1.2.1.1	.1 Dana Bagi Hasil-LO 173	
5.4.1.2.1.1	.2 Dana Alokasi Umum-LO	174
5.4.1.2.1.1	.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	174
	.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	
5.4.1.2.1.2	2 Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	175
	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	
	Pendapatan Bagi Hasil-LO	
	Bantuan Keuangan-LO	
5.4.1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
5.4.1.3.1	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	
5.4.1.3.2	Pendapatan Hibah-LO	
5.4.2	Beban-LO	
5.4.2.1	Beban Operasi	178
5.4.2.1.1	Beban Pegawai	
5.4.2.1.2	Beban Barang dan Jasa	
5.4.2.1.2.1	Beban Barang/Persediaan	
	Beban Jasa	
5.4.2.1.2.3	Beban Pemeliharaan	183
5.4.2.1.2.4	Beban Perjalanan Dinas	184
	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
5.4.2.1.3	Beban Bunga	
5.4.2.1.4	Beban Hibah	
5.4.2.1.5	Beban Bantuan Sosial	
5.4.2.1.6	Beban Penyisihan Piutang	
5.4.2.1.7	Beban Penyusutan	
	-	

5.4.2.1.7.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	189
5.4.2.1.7.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	190
	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
5.4.2.1.8	Beban Amortisasi	193
5.4.2.1.9	Beban Penyusutan Properti Investasi	
5.4.2.1.10	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir	194
5.4.2.2	Beban Transfer	194
5.4.2.2.1	Beban Bagi Hasil	194
5.4.2.2.2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	194
5.4.2.3	Beban Tak Terduga	
5.4.3	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasi	195
5.4.4	Surplus Non-Operasional	195
5.4.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	195
5.4.4.2	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	195
5.4.5	Defisit Non-Operasional	196
5.4.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	196
5.4.5.2	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	196
5.4.6	Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional	196
5.4.7	Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	196
5.4.8	Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa	197
5.4.9	Surplus/(Defisit) – LO	197
5.5	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas	198
5.5.1	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	198
5.5.1.1	Penerimaan Pajak Daerah	199
5.5.1.2	Penerimaan Retribusi Daerah	199
5.5.1.3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	199
5.5.1.4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	
5.5.1.5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	200
5.5.1.6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	200
5.5.1.7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	
5.5.1.8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	200
5.5.1.9	Penerimaan Dana Desa	
5.5.1.10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	200
5.5.1.11	Penerimaan Bantuan Keuangan	201
5.5.1.12	Penerimaan Pendapatan Hibah	201
5.5.1.13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	201
5.5.2	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	201
5.5.2.1	Pembayaran Pegawai	202
5.5.2.2	Pembayaran Barang dan Jasa	202
5.5.2.3	Pembayaran Bunga	202
5.5.2.4	Pembayaran Hibah	202
5.5.2.5	Pembayaran Bantuan Sosial	202
5.5.2.6	Pembayaran Tak Terduga	202
5.5.2.7	Pembayaran Bagi Hasil	203
5.5.2.8	Pembayaran Bantuan Keuangan	203
5.5.3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	
5.5.4	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	203
5.5.4.1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	204
5.5.4.2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	
5.5.4.3	Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	204

5.5.4.4	Penjualan Aset Lainnya	204
5.5.5	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	204
5.5.5.1	Pembentukan Dana Cadangan	205
5.5.5.2	Perolehan Tanah	205
5.5.5.3	Perolehan Peralatan dan Mesin	205
5.5.5.4	Perolehan Gedung dan Bangunan	205
5.5.5.5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	
5.5.5.6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	
5.5.5.7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	206
5.5.6	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	
5.5.7	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	206
5.5.8	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan	207
5.5.8.1	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	207
5.5.9	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	207
5.5.10	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris	207
5.5.10.1	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah	207
5.5.11	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris	208
5.5.11.1	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	208
5.5.11.2	Kiriman Uang Keluar/Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum	
	Dipertanggungjawabkan (UP/TUP)	208
5.5.12	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	208
5.5.13	Saldo Akhir Kas	208
5.6	Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	210
5.6.1	Ekuitas Awal	210
5.6.2	Surplus/Defisit-LO	210
5.6.3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	210
5.6.3.1	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	211
5.6.3.2	Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak	211
5.6.3.3	Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya	211
5.6.3.4	Koreksi Saldo Awal Persediaan	211
5.6.3.5	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen	211
5.6.3.6	Koreksi Saldo Awal Tanah	212
5.6.3.7	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin	212
5.6.3.8	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan	212
5.6.3.9	Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	213
5.6.3.10	Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya	
5.6.3.11	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka	213
5.6.3.12	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	213
5.6.3.13	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi	213
5.6.3.14	Koreksi Nilai Utang	215
5.6.3.15	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	215
5.6.4	Ekuitas Akhir	216
BAB VI	PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	217
BAB VII	PENUTUP	218
LAMPIR	AN	204

# **DAFTAR TABEL**

	нагатап
Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat	6
Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat	7
Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia	8
Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat	9
Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat	10
Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha	
(dalam Juta Rupiah)	10
Tabel 2.10 Mandatory Spending APBD-P TA. 2022	14
Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat	
Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	82
Tabel 5.2 Rincian Pendapatan	83
Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah	83
Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Pajak Daerah	84
Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah	85
Tabel 5.6 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD	85
Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	86
Tabel 5.8 Rincian Lain-lain PAD yang Sah	87
Tabel 5.9 Daftar Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD	87
Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer	88
Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan	
Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil	90
Tabel 5.13 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	91
Tabel 5.14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	92
Tabel 5.15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil	94
Tabel 5.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	94
Tabel 5.17 Rincian Belanja	95
Tabel 5.18 Rincian Belanja Operasi	96
Tabel 5.19 Rincian Belanja Pegawai	96
Tabel 5.20 Daftar Belanja Pegawai pada SKPD	97
Tabel 5.21 Rincian Belanja Barang dan Jasa	98
Tabel 5.22 Daftar Belanja Barang dan Jasa pada SKPD	99
Tabel 5.23 Rincian Belanja Hibah	101
Tabel 5.24 Rincian Belanja Bantuan Sosial.	101
Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal	102
Tabel 5.26 Daftar Belanja Modal Tanah pada SKPD	102
Tabel 5.27 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	
Tabel 5.28 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD	103
Tabel 5.29 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan	105
Tabel 5.30 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD	105
Tabel 5.31 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Tabel 5.32 Daftar Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD	107

Tabel 5.33 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	107
Tabel 5.34 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD	108
Tabel 5.35 Rincian Belanja Transfer	109
Tabel 5.36 Rincian Belanja Transfer	
Tabel 5.37 Perhitungan Pembiayaan Netto	111
Tabel 5.38 Rincian Penerimaan Pembiayaan	111
Tabel 5.39 Rincian Pengeluaran Pembiayaan	112
Tabel 5.40 Rincian SiLPA	
Tabel 5.41 Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih	115
Tabel 5.42 Ringkasan Neraca	117
Tabel 5.43 Rincian Aset	117
Tabel 5.44 Rincian Aset Lancar	
Tabel 5.45 Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah	118
Tabel 5.46 Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran	119
Tabel 5.47 Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan	120
Tabel 5.48 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP	120
Tabel 5.49 Rincian Kas Dana BOS	121
Tabel 5.50 Rincian Kas Lainnya	122
Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Daerah	122
Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak Daerah per Tahun	122
Tabel 5.53 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah	123
Tabel 5.54 Rincian Piutang Retribusi Daerah pada SKPD	124
Tabel 5.55 Daftar Piutang Retribusi Daerah per Tahun	125
Tabel 5.56 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada SKPD	125
Tabel 5.57 Rincian Piutang Bagi Hasil	127
Tabel 5.58 Rincian Beban Dibayar Di Muka	128
Tabel 5.59 Rincian Persediaan	128
Tabel 5.60 Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD	129
Tabel 5.61 Rincian Investasi Non Permanen	131
Tabel 5.62 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen	131
Tabel 5.63 Rincian Investasi Permanen	131
Tabel 5.64 Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (Cost Method)	132
Tabel 5.65 Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (Equity Method)	132
Tabel 5.66 Investasi Permanen pada PDAM Tirta Arut (Equity Method)	133
Tabel 5.67 Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (Equity Method)	133
Tabel 5.68 Investasi Permanen pada PT Jamkrida (Cost Method)	133
Tabel 5.69 Rincian Aset Tetap	134
Tabel 5.70 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Tanah	135
Tabel 5.71 Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan	
Tabel 5.72 Rincian Saldo Aset Tetap – Tanah Berdasarkan Jenisnya	137
Tabel 5.73 Daftar Saldo Aset Tetap – Tanah pada SKPD	137
Tabel 5.74 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin	
Tabel 5.75 Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD	143
Tabel 5.76 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan	
Tabel 5.77 Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD	148
Tabel 5.78 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi	
Tabel 5.79 Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD	
Tabel 5.80 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya	
· · ·	

Tabel 5.81 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD	152
Tabel 5.82 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan	153
Tabel 5.83 Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD	154
Tabel 5.84 Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap	155
Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya	
Tabel 5.86 Daftar Saldo Aset Lainnya pada SKPD	
Tabel 5.87 Rincian Tagihan Lainnya	
Tabel 5.88 Daftar Saldo Tagihan Lainnya pada SKPD	158
Tabel 5.89 Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya	
Tabel 5.90 Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud	159
Tabel 5.91 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD	160
Tabel 5.92 Daftar Amortisasi pada SKPD	
Tabel 5.93 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain	
Tabel 5.94 Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD	
Tabel 5.95 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD	
Tabel 5.96 Rincian Dana Transfer TDF	
Tabel 5.97 Jenis Kewajiban	
Tabel 5.98 Jenis Utang Belanja	
Tabel 5.99 Ringkasan Laporan Operasional	
Tabel 5.100 Rincian Pendapatan-LO	
Tabel 5.101 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO	
Tabel 5.102 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO	
Tabel 5.103 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	
Tabel 5.104 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO	
Tabel 5.105 Rincian Pendapatan Transfer-LO	
Tabel 5.106 Rincian Dana Perimbangan-LO	
Tabel 5.107 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	
Tabel 5.108 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	
Tabel 5.109 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
Tabel 5.110 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO	
Tabel 5.111 Jenis Beban-LO	
Tabel 5.112 Rincian Beban Operasi	
Tabel 5.113 Rincian Beban Pegawai	
Tabel 5.114 Daftar Beban Pegawai pada SKPD	
Tabel 5.115 Rincian Beban Barang dan Jasa	
Tabel 5.116 Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD	
Tabel 5.117 Daftar Beban Jasa pada SKPD	
Tabel 5.118 Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD	
Tabel 5.120 Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	104
pada SKPDpada SKPD	195
Tabel 5.121 Daftar Beban Hibah pada SKPD	
Tabel 5.122 Daftar Beban Bantuan Sosial pada SKPD	
Tabel 5.123 Jenis Beban Penyisihan Piutang	
Tabel 5.124 Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD	
Tabel 5.125 Jenis Beban Penyusutan	
Tabel 5.126 Daftar Beban Penyusutan pada SKPD	
Tabel 5.127 Daftar Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD	
14001 0112 / Datas Doom 1 on abatas 1 otalatas dan 1910011 pada 0131 D	107

Tabel 5.128 Daftar Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada SKPD	191
Tabel 5.129 Daftar Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD	192
Tabel 5.130 Daftar Beban Amortisasi pada SKPD	193
Tabel 5.131 Rincian Beban Transfer	194
Tabel 5.132 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	198
Tabel 5.133 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi	198
Tabel 5.134 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi	201
Tabel 5.135 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi	203
Tabel 5.136 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi	204
Tabel 5.137 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan	206
Tabel 5.138 Rincian Saldo Akhir Kas	209
Tabel 5.139 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas	210
Tabel 5.140 Daftar Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD	214
Tabel 5.141 Daftar Koreksi Nilai Utang pada SKPD	215

# DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 5.1	Rincian Penyaluran Dana Desa Tahun 2022				
Lampiran 5.2	Rincian Penerima Hibah Tahun 2022				
Lampiran 5.3	Rincian Penerima Bantuan Sosial Tahun 2022				
Lampiran 5.4	Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2022				
Lampiran 5.5	Penerimaan dan Pengeluaran Dana BLUD Tahun 2022				
Lampiran 5.6	Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS Tahun 2022				
Lampiran 5.7	Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan (Kas				
	Lainnya) Tahun 2022				
Lampiran 5.8	Daftar Aset Tanah Bermasalah Tahun 2022				
Lampiran 5.9	Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022				
Lampiran 5.10	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022				
Lampiran 5.11	Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi				
Lampiran 5.12	Rincian Utang Belanja Tahun 2022				
Lampiran 5.13	Rekapitulasi Laporan APBDes				
Lampiran 5.14	Laporan Keuangan BUMD				



### **BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

Pangkalan Bun, 5 Mei 2023

Nomor : 963/500 /V/BKAD/2023

Lampiran:

Perihal : <u>Surat Representasi Manaj</u>emen

Kepada Yth. Kepala Perwakilan BPK-RI

Provinsi Kalimantan Tengah

Di –

Palangka Raya

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2022, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL), Neraca per 31 Desember 2022, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Surat representasi ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK-RI selama pemeriksaan:

- 1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah kami sajikan sesuai dengan SAP.
- 2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK-RI.
- 3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
- 4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 5. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
- 6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
- 8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
- 9. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.
- 10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2022 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- 11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja, penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
- Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara Sistem Pengendalian Intern.
- Kami telah menilai efektifitas Sistem Pengendalian Intern dalam hal:
  - a) Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
  - Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
- 14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
- Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
- Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
- Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku.
- 18. Berkaitan dengan dampak pandemi Covid-19:
  - a) Kami telah mengidentifikasi, menilai, mengevaluasi, dan mempertimbangkan semua dampak keuangan dari pandemi Covid-19 dan dampak peristiwa signifikan lainnya pada Laporan Keuangan per 31 Desember 2022.
  - Kami telah menyajikan dalam Laporan Keuangan dan/atau telah mengungkapkan semua yang diperlukan terkait dengan dampak dari pandemi Covid-19 tersebut.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK-RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

PL BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.



# BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

### PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

> Pangkalan Bun, Mei 2023 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

> > ANANG DIRJO, SP., MM.



### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

			Anggaran Perubahan	Realisasi		(dalam Rupian)  Realisasi
No.	Uraian	Ref.	2022	2022	(%)	2021
1	PENDAPATAN	5.1.1	1.433.623.122.600,00	1.412.981.759.684,52	98,56	
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	283.646.085.100,00	233.177.455.634,65	82,21	392.164.379.004,55
3	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	97.150.000.000,00	81.575.790.318,70	83,97	70.389.757.706,05
4	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	28.048.063.900,00	15.794.350.037,00	56,31	12.611.932.516,30
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	12.970.000.000,00	12.940.075.581,00	99,77	12.470.117.812,00
6	Lain-Lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	145.478.021.200,00	122.867.239.697,95	84,46	296.692.570.970,20
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.073.865.408.500,00	1.107.583.678.376,87	103,14	1.203.708.747.726,33
8	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	5.1.1.2.1	980.791.986.500,00	995.446.393.184,00	101,49	1.123.614.847.716,00
9	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	896.946.456.500,00	912.417.968.098,00	101,72	1.038.859.842.934,00
10	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	5.1.1.2.1.1.1	112.892.541.000,00	138.520.194.506,00	122,70	135.229.818.254,00
11	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	5.1.1.2.1.1.2	593.355.915.000,00	591.800.383.800,00	99,74	593.260.006.000,00
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	5.1.1.2.1.1.3	112.235.300.000,00	110.134.562.916,00	98,13	230.385.941.118,00
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	5.1.1.2.1.1.4	78.462.700.500,00	71.962.826.876,00	91,72	79.984.077.562,00
14	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	13.214.332.000,00	13.214.332.000,00	100,00	-
15	Dana Desa	5.1.1.2.1.3	70.631.198.000,00	69.814.093.086,00	98,84	84.755.004.782,00
16	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	5.1.1.2.2	93.073.422.000,00	112.137.285.192,87	120,48	80.093.900.010,33
18	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	92.923.422.000,00	111.987.285.192,87	120,52	80.093.900.010,33
19	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	76.111.629.000,00	72.220.625.673,00	94,89	38.099.339.397,06
21	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	26.287.419.000,00	25.124.419.000,00	95,58	-
22	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.1.3.2	49.824.210.000,00	47.096.206.673,00	94,52	38.099.339.397,06
	<u> </u>					
23	BELANJA	5.1.2	1.563.223.468.525,00	1.420.053.654.390,20	90,84	1.461.583.803.894,41
24	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	1.095.560.882.544,00	992.718.034.981,20	90,61	886.809.604.687,83
25	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	646.615.341.452,00	573.130.613.844,05	88,64	533.526.478.475,48
26	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	406.861.944.120,00	378.837.074.585,15	93,11	331.364.771.908,23
27	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	563.500.000,00	563.499.999,00	100,00	847.000.000,00
28	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	39.493.096.972,00	38.161.646.553,00	96,63	19.304.426.304,12
29	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.5	2.027.000.000,00	2.025.200.000,00	99,91	1.766.928.000,00
33	BELANJA MODAL	5.1.2.2	303.284.543.381,00	270.539.145.420,00	89,20	413.698.499.168,58
34	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	55.399.200,00	1.061.200,00	1,92	100.900.000,00

No.	Uraian	Ref.	Anggaran Perubahan 2022	Realisasi 2022	(%)	Realisasi 2021
35	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	79.195.810.588,00	75.230.158.868,00	94,99	69.514.111.613,00
36	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	91.099.303.077,00	89.604.333.064,00	98,36	171.955.314.980,00
37	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.1.2.2.4	129.972.018.987,00	102.987.368.793,00	79,24	167.205.556.475,58
38	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	2.962.011.529,00	2.716.223.495,00	91,70	4.922.616.100,00
39	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	3.340.010.000,00	2,800.989.203,00	83,86	1.547.938.856,00
40	Belanja Tak Terduga		3.340.010.000,00	2.800.989.203,00	83,86	1.547.938.856,00
41	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63	159.527.761.182,00
42	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	13.675.814.000,00	10.267.531.800,00	75,08	7.632.280.400,00
43	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	147.362.218.600,00	143.727.952.986,00	97,53	151.895.480.782,00
44	SURPLUS/DEFISI	T 5.1.3	(129.600,345.925,00)	(7.071,894,705,68)	5,46	172.388.662.233,63
45	PEMBIAYAAN					
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	100,00	130.531.350.426,37
47	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	261 920 012 659,00	261.920.012.659,90	100,00	97.531.350.426,37
48	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	-	-	- 1	33.000.000.000,00
49	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100,00	41.000.000.000,00
50	Pembentukan Dana Cadangan	5.1.4.2.1	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	
51	Penyertaan Modal Daerah	51422	15,000,000,000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
52	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.4.2.3	33,000,000,000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
53	PEMBIAYAAN NETT	0 5,1.4	208,920.012.659,00	208.920.012.659,90	100,00	89.531.350.426,37
54	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN DAERAH TAHUN BERKENAAN	5.1.5	79.319.666.734,00	201.848.117.954,22		261.920.012.659,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.

A HOURINGIN



### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

		Promount Lindbarged		
No	URAIAN	Ref.	Per 31 Desember 2022	Per 31 Desember 2021
1	Saido Anggaran Lebih Awal	5.2.1	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	522	(261,920,012,659,90)	(97.531.350.426,37)
3	Subtotal (1 + 2)			
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.3	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
5	Subtotal (3 + 4)		201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
6	Lain-lain			
7	Saldo Anggaran Lebih Akhir (5 + 6)	5.2.4	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 5 Mei 2023

PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.



# PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NERACA PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

				(dalam Rupiah)
No.	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	ASET	5.3.1		
1.1	ASET LANCAR	5.3.1.1		
	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.2	17.389.789,00	5.095.194,00
	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.3	12.191.100,00	20.277.093,00
	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	5.3.1.1.4	200.186.748,00	533.961,00
	Kas di BLUD	5.3.1.1.5	99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
	Kas Dana BOS	5.3.1.1.6	65.946.613,38	198.943.550,53
	Kas Lainnya-BOP PAUD	5.3.1.1.7	6.699,00	-
	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	49.552.603.804,10	44.711.059.810,17
	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.9	(34.890.103.912,60)	(31.572.099.488,31)
	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.10	3.351.962.234,50	2.905.509.406,50
	Penyisihan Piutang Retribusi	5.3.1.1.11	(2.027.667.398,88)	(1.096.421.324,98)
	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	5.3.1.1.12	84.974,00	170.247.730,00
	Piutang Bagi Hasil	5.3.1.1.13	37.692.763.745,55	34.625.557.401,92
	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.14	11.180.355.723,00	22.897.522.223,00
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	5.3.1.1.15	(1.467.630.183,85)	(2.221.254.721,00)
	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.3.1.1.16	21.096.474,00	40.570.143,00
	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	5.3.1.1.17	(21.096.474,00)	(40.570.143,00)
	Beban Dibayar Di Muka	5.3.1.1.18	480.749.278,28	335.234.824,33
	Persediaan	5.3.1.1.19	42.022.804.839,41	52.174.386.169,87
	Jumlah Aset Lancar		299.450.512.413,73	359.195.622.322,60
1.2	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2		
	Investasi Non Permanen (nilai bersih yang dapat direalisasikan)	5.3.1.2.1	-	218.705.204,00
	Investasi Permanen	5.3.1.2.4	150.901.062.447,39	135.616.458.860,45
	Jumlah Investasi Jangka Panjang		150.901.062.447,39	135.835.164.064,45
1.3	ASET TETAP	5.3.1.3		
	Tanah	5.3.1.3.1	574.040.012.618,07	573.976.967.018,07
	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	754.300.745.839,36	679.967.382.463,55
	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.344.533.308.602,87	1.232.792.193.621,29
	Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.3.1.3.4	3.217.565.720.299,30	3.059.391.512.388,30
	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	44.373.397.712,40	43.770.873.560,40
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	131.395.530.091,36	136.022.753.529,36
	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(3.179.655.738.786,93)	(2.882.550.861.308,94)
	Jumlah Aset Tetap		2.886.552.976.376,43	2.843.370.821.272,03
1.4	DANA CADANGAN	5.3.1.4	5.000.000.000,00	_
	Dana Cadangan		5.000.000.000,00	-
	-		· · ·	
1.5	ASET LAINNYA	5.3.1.5		
	Tagihan Lainnya	5.3.1.5.1	175.342.231,00	175.342.231,00
		1	,	,

No.	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Aset Yang dibatasi Penggunaannya	5.3.1.5.2	8.293.528.644,00	25.654.132.368.80
	Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.3	52.526.725.717,00	51.356.828.667,00
	Akumutasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.3.1.5.4	(46,466,415,153,80)	(42.402.028.557,40)
	Aset Lain-lain (setelah Penyusutan)	5.3.1.5.5	19.139.041.268,67	14.781.454.784,83
	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	5.3.1.5.6	55,514,150,100,00	
	Jumlah Aset Lainnya		89.182.372.806,87	49.565.729.494,23
	PROPERTI INVESTASI	5,3,1.6	439.609.507,20	
	Properti Investasi	5.3.1.6.1	500.881.000,00	
	Akumulasi Penyusutan Properti Investasi	5.3.1.6.2	(61.271.492,80)	24
	JUMLAH ASET		3.431.526.533.551,62	3.387.967.337.153,31
2	KEWAJIBAN	5.3.2		
2.1	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	27.064.327.055,25	116.879.838.917,43
	Pendapatan Diterime Di Muka	5.3.2.1.1	305,756,383,20	115.639.302,19
	Utang Belanja	5.3.2.1.2	26.758.570.672,05	83.764.199.615,24
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah	5.3.2.1.3	¥	33.000.000.000,00
2.2	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		
	JUMLAH KEWAJIBAN		27.075.225.305,25	116.879.838.917,43
3	EKUITAS	5.3.3	3.404.462.206.496,37	3,271,087,498,235,88
_	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		3.431.526.533.551,62	3,387,967,337,153,31

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.

WARING



### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

		l			(dalam Rupiah) <b>Kenaikan</b> /
No.	URAIAN	Ref.	2022	2021	Penurunan
1	KEGIATAN OPERASIONAL				
2	PENDAPATAN-LO	5.4.1	1.458.642.764.072,76	1.552.401.516.068,48	(93.758.751.995,72)
3	PENDAPATAN ASLI DAERAH-LO	5.4.1.1	214.170.554.561,57	331.547.556.916,60	(117.377.002.355,03)
4	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	86.823.991.920,63	74.740.551.967,77	12.083.439.952,86
5	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	16.242.177.865,00	13.928.596.779,80	2.313.581.085,20
6	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	12.357.228.709,00	11.919.901.185,00	437.327.524,00
7	Lain-lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	98.747.156.066,94	230.958.506.984,03	(132.211.350.917,09)
8	PENDAPATAN TRANSFER -LO	5.4.1.2	1.097.232.561.734,50	1.120.942.150.470,96	(23.709.588.736,46)
	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-		,	,	, , ,
9	LO	5.4.1.2.1	982.028.070.198,00	1.038.859.842.934,00	(56.831.772.736,00)
10	Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1.1	968.813.738.198,00	1.038.859.842.934,00	(70.046.104.736,00)
11	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	5.4.1.2.1.1.1	194.034.344.606,00	135.229.818.254,00	58.804.526.352,00
12	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	5.4.1.2.1.1.2	592.682.003.800,00	593.260.006.000,00	(578.002.200,00)
13	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	5.4.1.2.1.1.3	110.134.562.916,00	230.385.941.118,00	(120.251.378.202,00)
14	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	5.4.1.2.1.1.4	71.962.826.876,00	79.984.077.562,00	(8.021.250.686,00)
15	Dana Desa-LO		-	-	-
16	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	5.4.1.2.1.2	13.214.332.000,00	-	13.214.332.000,00
17	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.2	115.204.491.536,50	82.082.307.536,96	33.122.183.999,54
18	Pendapatan Bagi Hasil -LO	5.4.1.2.2.1	115.054.491.536,50	82.082.307.536,96	32.972.183.999,54
19	Bantuan Keuangan-LO	5.4.1.2.2.2	150.000.000,00	-	150.000.000,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	5.4.1.3	147.239.647.776,69	99.911.808.680,92	47.327.839.095,77
21	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan- LO	5.4.1.3.1	47.096.206.673,00	99.911.808.680,92	(52.815.602.007,92)
22	Pendapatan Hibah-LO	5.4.1.3.2	100.143.441.103,69	-	100.143.441.103,69
23	BEBAN	5.4.2	1.338.364.519.255,67	1.273.606.510.310,78	64.758.008.944,89
24	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	1.253.672.933.552,67	1.197.147.712.554,78	56.525.220.997,89
25	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	476.755.034.690,00	443.723.077.127,00	33.031.957.563,00
26	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	449.473.541.803,40	442.004.112.401,25	7.469.429.402,15
27	Beban Barang/Persediaan	5.4.2.1.2.1	163.898.674.605,57	143.028.416.060,42	20.870.258.545,15
28	Beban Jasa	5.4.2.1.2.2	201.260.676.985,81	254.339.261.676,33	(53.078.584.690,52)
29	Beban Pemeliharaan	5.4.2.1.2.3	24.563.395.122,02	15.400.201.844,00	9.163.193.278,02
30	Beban Perjalanan Dinas	5.4.2.1.2.4	48.465.722.754,00	28.308.282.820,50	20.157.439.933,50
31	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.4.2.1.2.5	11.285.072.336,00	927.950.000,00	10.357.122.336,00

No.	URAIAN	Ref.	2022	2021	Kenaikan / Penurunan
32	Beban Bunga	5.4.2.1.3	563.499.999,00	897.000.000,00	(333.500.001,00)
33	Beban Hibah	5.4.2.1.4	36.954.453.903,00	17.668.503.094,00	19.285.950.809,00
34	Beban Bantuan Sosial	5.4.2.1.5	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00	258.272.000,00
35	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.6	4.877.408.103,44	5.381.790.441,53	(504.382.338,09)
36	Beban Penyusutan dan Amortisasi	5.4.2.1.7	282.805.089.849,83	285.706.301.491,00	(2.901.211.641,17)
37	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.2.1.7.1	70.471.801.165,53	69.741.109.771,88	730.691.393,65
38	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.2.1.7.2	26.943.490.125,21	25.418.561.704,98	1.524.928.420,23
39	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.4.2.1.7.3	181.296.701.154,08	185.952.078.117,74	(4.655.376.963,66)
40	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	5.4.2.1.8	4.083.086.596,40	4.594.551.896,40	(511.465.300,00)
41	Beban Penyusutan Properti Investasi	5.4.2.1.9	10.010.808,61	-	10.010.808,61
42	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir	5.4.2.1.10	218.705.204,00	-	218.705.204,00
43	BEBAN TRANSFER	5.4.2.2	81.890.596.500,00	75.440.651.400,00	6.449.945.100,00
44	Beban Bagi Hasil	5.4.2.2.1	9.735.824.900,00	8.300.175.400,00	1.435.649.500,00
45	Beban Transfer Bantuan Keuangan	5.4.2.2.2	72.154.771.600,00	67.140.476.000,00	5.014.295.600,00
46	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.3	2.800.989.203,00	1.018.146.356,00	1.782.842.847,00
47	Beban Tak Terduga		2.800.989.203,00	1.018.146.356,00	1.782.842.847,00
48	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	5.4.3	120.278.244.817,09	278.795.005.757,70	(158.516.760.940,61)
49	KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO				
50	SURPLUS NON OPERASIONAL-LO				
51	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan	5.4.4.1	257.168.748,96	628.178.232,25	(371.009.483,29)
52	Aset Non Lancar-LO Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnva	5.4.4.2	2.830.733.904,40	1.707.297.071,27	1.123.436.833,13
53	Jumlah Surplus Non Operasional	5.4.4	3.087.902.653,36	2.335.475.303,52	752.427.349,84
54	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO				-
55	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar	5.4.5.1	3.378.679.200,38	1.461.963.159,28	1.916.716.041,10
56	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.5.2	330.516.248,83	605.174.537,06	(274.658.288,23)
57	Jumlah Defisit Non Operasional	5.4.5	3.709.195.449,21	2.067.137.696,34	1.642.057.752,87
58	JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.6	(621.292.795,85)	268.337.607,18	(889.630.403,03)
59	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.7	119.656.952.021,24	279.063.343.364,88	(159.406.391.343,64)
60	POS LUAR BIASA	5.4.8			
61	PENDAPATAN LUAR BIASA				
62	Pendapatan Luar Biasa		-	-	-
63	Jumlah Pendapatan Luar Biasa		_	-	_

68	SURPLUS/DEFISIT - LO	5.4.9	119.656.952.021,24	279.063.343.364,88	(159.406.391.343,64)
67	POS LUAR BIASA			*)	
66	Jumlah Beban Luar Biasa				
65	Beban Luar Biasa		+.		
64	BEBAN LUAR BIASA				
No.	URAIAN	Ref.	2022	2021	Kenaikan / Penurunan

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.



### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LAPORAN ARUS KAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

				(dalam Rupiah)
No	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
а	Arus Kas Masuk :	5.5.1		
	Penerimaan Pajak Daerah	5.5.1.1	81.575.790.318,70	70.389.757.706,05
	Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.1.2	15.794.350.037,00	12.611.932.516,30
	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.1.3	12.444.212.677,00	12.470.117.812,00
	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.1.4	122.867.239.697,95	295.952.911.970,20
	Penerimaan Dana Bagi Hasil	5.5.1.5	138.520.194.506,00	135.229.818.254,00
	Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.1.6	591.800.383.800,00	593.260.006.000,00
	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.1.7	182.097.389.792,00	310.370.018.680,00
	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	5.5.1.8	13.214.332.000,00	-
	Penerimaan Dana Desa	5.5.1.9	69.814.093.086,00	84.755.004.782,00
	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	5.5.1.10	111.987.285.192,87	80.093.900.010,33
	Penerimaan Bantuan Keuangan	5.5.1.11	150.000.000,00	-
	Penerimaan Pendapatan Hibah	5.5.1.12	25.124.419.000,00	-
	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan	5.5.1.13	47.096.206.673,00	38.099.339.397,06
	Jumlah		1.412.485.896.780,52	1.633.232.807.127,94
b	Arus Kas Keluar :	5.5.2		
	Pembayaran Pegawai	5.5.2.1	573.130.613.844,05	533.526.478.475,48
	Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.2.2	378.837.074.585,15	331.364.771.908,23
	Pembayaran Bunga	5.5.2.3	563.499.999,00	847.000.000,00
	Pembayaran Hibah	5.5.2.4	38.161.646.553,00	19.304.426.304,12
	Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.2.5	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00
	Pembayaran Tak Terduga	5.5.2.6	2.800.989.203,00	1.547.938.856,00
	Pembayaran Bagi Hasil	5.5.2.7	10.267.531.800,00	7.632.280.400,00
	Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.2.8	143.727.952.986,00	151.895.480.782,00
	Jumlah		1.149.514.508.970,20	1.047.885.304.725,83
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	5.5.3	262.971.387.810,32	585.347.502.402,11
2	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			_
	Arus Kas Masuk :	5.5.4		
	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.4.1	-	567.565.000,00
	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.4.2	_	68.599.000,00
	Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.4.3	_	18.657.000,00
	Penjualan Aset Lainnya	5.5.4.4	495.862.904,00	84.838.000,00
	Jumlah	0.0.1.1	495.862.904,00	739.659.000,00
b	Arus Keluar Kas	5.5.5	400.002.004,00	700.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	5.5.5.1	5.000.000.000,00	
	Perolehan Tanah	5.5.5.2	1.061.200,00	100.900.000,00
	Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.5.3	75.230.158.868,00	69.514.111.613,00
	Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.5.4	89.604.333.064,00	171.955.314.980,00
	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.5.5.5	102.987.368.793,00	167.205.556.475,58
	Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.5.6	2.716.223.495,00	4.922.616.100,00
	1 Croinfail Aset Tetap Lailinya	0.0.0.0	2.1 10.223.433,00	4.922.010.100,00

No	Uraian	Ref.	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Penyertaan Model Pemerintah Daerah	5.5.5.7	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	100000000000000000000000000000000000000	290,539,145,420,00	418.698.499.168,58
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	5,5.6	(290.043.282.516,00)	(417.958.840.168,58)
3	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
	Arus Masuk Kas	5.5.7		
447	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank			33.000.000.000,00
	Jumlah			33,000,000,000,00
b	Arus Keluar Kas	5.5.8		
	Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	5.5.8.1	33.000.000.000.00	36.000.000.000.00
	Jumlah		33,000,000,000,00	36,000,000,000,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	5,5,9	(33.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
4	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS			
2	Arus Masuk Kas	5.5.10		
-	Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah	5.5.10.1	88.371.168.787.01	102,684,651,055,00
-	Jumlah	2.0.70.1	88,371,168,787,01	102.684.651.055.00
b	Arus Keluar Kas	5.5.11	30001111301101121	Take to the take to the take to
-	Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.11.1	88.371.168.787.01	102 684 651 055 00
	Kiriman Uang Keluar/Kas Di Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawahkan (UP/TUP)	5.5.11.2		59.074.500,00
	Jumiah		88.371.168.787,01	102.743.728.555,00
	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	5.5.12		(59.074.500,00
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	-	(60.071.894.705,68)	164.329.587.733,53
	Saldo Awai Kas di BUD, BLUD, BOS dan JKN		261.920.012.659,90	97.590.424.926,37
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan, Dana Desa dan JKN		201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
	Saldo Akhir Kas di BUD, BLUD, BOS, BOP PAUD, BOP Pendidikan Kesetaraan dan JKN Terdiri dari :			
	<ol> <li>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)</li> </ol>		93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
	<ol> <li>Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaanya</li> </ol>		8.293.528.644,00	25.654.132.368,80
	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Penerimaan		12.191.100,00	20.277.093,00
	Saldo Akhir Kas Di Bendahara Pengeluaran		17,389,789,00	5.095.194,00
	Saldo Akhir Kas Dana Kapitasi pada FKTP		200.186.748,00	533.961,00
	Saldo Akhir Kas Di BLUD RSUD Sultan Imanuddin		99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
	Saldo Akhir Kas Lainnya-BOP PAUD		6.699,00	
	Saldo Akhir Kas Dana BOS		65.946.613,38	198.943.550,53
	Saldo Akhir Kas	5.5.13	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 Pj. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.



### PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021 (Audited)

(dalam Rupiah)

No	URAIAN	Ref.	31 DESEMBER 2022	31 DESEMBER 2021
1	EKUITAS AWAL	5.6.1	3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57
2	SURPLUS/DEFISIT-LO	5.6.2	119.656.952.021,24	279.063,343,364,88
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:	5.6.3	13.717.756.239,25	53.965.719.868,43
	Koreksi Saldo Awal Kas BLUD	5.6.3.1	+	(500,00)
	Koreksi Saido Awal Plutang Pajak	5.6.3.2	(406.657.608,00)	(733.470.615,00)
	Koreksi Saldo Awal Plutang Lainnya	5,6.3.3	11.525.925.721,00	(9.713.688.124,56)
	Koreksi Saldo Awal Persediaan	5.6.3.4	(880,00)	(79.214.060,42)
	Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen	5,6.3.5	(410.976.276,06)	
	Koreksi Saldo Awal Tanah	5.6.3.6	311,175.650,00	59,378,023,500,00
	Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin	5.6.3.7	1.184.789,150,95	831.000.000,00
	Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan	5.6.3.8	782.764.000,00	1.807.913.000,00
	Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.6.3.9	429,480,500,00	
	Koreksi Saldo Awai Aset Tetap Lainnya	5.6.3.10	(9.850.000,00)	
	Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka	5.6.3.11	+	(95,739,000,00)
	Koreksi Nilai Penyisihan Piutang	5.6.3.12		4.265.428.471,87
	Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi	5.6.3.13	216.479.279,36	(1.595.051.518,43)
	Koreksi Nilai Utang	5.6.3.14	94.626.702,00	254.939.699,31
	Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain	5.6.3.15		(354.420.984,34)
4	EKUITAS AKHIR	5,6,4	3.404.462.206.496,37	3.271,087,498,235,88

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan ini.

A Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 PJ BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

ANANG DIRJO, SP., MM.

PHARINGIN

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Sesuai dengan amanat Undang-Undang (UU) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta seiring dengan paradigma penyelenggaraan Pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan kepemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun seluruh komponen pemerintahan agar pelayanan kepada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Daerah mencapai tingkat efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah Pusat-Daerah, antar Pemerintah Daerah serta potensi daerah itu sendiri, salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek keuangan daerah meliputi penggalian potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 32 bahwa bentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), dimana Laporan Keuangan yang disusun sebanyak 7 (tujuh) laporan terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan SILPA (SAL), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Laporan tersebut merupakan laporan pokok dan selanjutnya dilampiri dengan Laporan Keuangan BUMD.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini yaitu:

- a. untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas;
- c. untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sebagai perwujudan dalam menilai akuntabilitas, transparansi entitas yang berguna untuk pengambilan keputusan baik di bidang ekonomi, sosial maupun politik bagi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- b. menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah;
- c. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

Dalam proses penyusunan Laporan Keuangan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Di sisi lain, penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

### 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan negara;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
- e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- q. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- r. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Pendapatan Hibah Daerah;
- s. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- t. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- u. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;
- v. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

### 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

### BAB I Pendahuluan

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
- BAB II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD
  - 2.1. Ekonomi Makro
  - 2.2. Kebijakan Keuangan
  - 2.3. Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

# BAB III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

- 3.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala yang Ada Dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

# BAB IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

### BAB V Penjelasan Pos – pos Laporan Keuangan

- 5.1. Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3. Neraca
- 5.4. Laporan Operasional

5.5. Laporan Arus Kas

5.6. Laporan Perubahan Ekuitas

BAB VI Penjelasan Atas Informasi - informasi Non Keuangan

BAB VII Penutup

# BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

### 2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Selain menciptakan perekonomian yang seimbang dan ideal, tentunya masih ada banyak tujuan lainnya. Beberapa tujuan dari kebijakan ekonomi makro adalah sebagai berikut:

- a. menciptakan pertumbuhan ekonomi
- b. meningkatkan pendapatan
- c. menstabilkan keadaan perekonomian
- d. meratakan distribusi pendapatan
- e. mengembangkan kapasitas produksi
- f. membuat neraca pembayaran seimbang
- g. meningkatkan kesempatan kerja
- h. mengendalikan inflasi

Asumsi makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P) Tahun Anggaran 2022 mengacu pada indikator sosial ekonomi Pemerintah Daerah Tahun 2022 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu:

- a. Tingkat Kemiskinan sebesar 3,93 persen
- b. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,51 persen
- c. Gini Ratio sebesar 0,315 persen
- d. Indeks Pembangunan Manusia sebesar 73,41 poin
- e. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 6,01 persen
- f. Tingkat Inflasi sebesar 5,99 persen (sesuai tingkat inflasi Kota Sampit sebagai acuan)
- g. Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku (PDRB ADHB) sebesar Rp26.265,06 (Miliar Rupiah)

### 2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan - kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dalam persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan. Tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapat perhatian sekaligus pemahaman yang memadai dari pemerintah. Kedalaman kemiskinan menggambarkan seberapa jauh beda pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan, sedangkan keparahan kemiskinan adalah seberapa

jauh jarak pengeluaran orang termiskin di satu wilayah tertentu relatif terhadap pengeluaran rata-rata kelompok miskin di daerah bersangkutan. Makin tinggi angkanya, makin parah tingkat kemiskinannya.

Tabel 2.1 Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat (%)	3,95	3,93	-0,02
2	Kabupaten Kotawaringin Barat (Ribu Orang)	12,29	12,44	0,15
3	Provinsi Kalimantan Tengah (%)	5,61	5,28	-0,33
4	Nasional (%)	10,14	9,54	-0,6
5	Peringkat Provinsi	4	4	
6	Peringkat Nasional	N/A	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Persentase penduduk miskin Kabupaten Kotawaringin Barat pada Tahun 2021 sebesar 3,95 persen mengalami penurunan pada Tahun 2022 menjadi 3,93 persen. Meskipun secara persentase terhadap total penduduk menurun, namun jika dilihat secara jumlah, maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 0,15 persen. Tingkat Kedalaman Kemiskinan jika dibandingkan dengan tahun lalu, angkanya mengalami penurunan, namun untuk Tingkat Keparahan Kemiskinan angkanya masih sama dengan tahun lalu, yaitu 0,09 persen serta masih di bawah Provinsi Kalimantan Tengah dan Nasional. Oleh karena itu, dalam perencanaan dan penganggaran tahun mendatang harus mendapatkan prioritas untuk menekan angka kemiskinan.

Tabel 2.2 Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Kabupaten	0,48	0,47	-0,01
2	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Provinsi	0,71	0,91	0,20
3	Tingkat Kedalaman Kemiskinan Nasional	1,71	1,59	-0,12
4	Peringkat Provinsi	4	4	
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Tabel 2.3 Tingkat Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Keparahan Kemiskinan Kab	0,09	0,09	0,00
2	Tingkat Keparahan Kemiskinan Provinsi	0,15	0,27	0,12
3	Tingkat Keparahan Kemiskinan Nasional	0,42	0,39	-0,03
4	Peringkat Provinsi	4	2	
5	Peringkat Nasional	N/A	N/A	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

### 2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

**TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)** adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. **Penganggur terbuka**, terdiri dari: 1) mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, 2) mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, 3) mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin

mendapatkan pekerjaan, dan 4) mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebesar 4,51 persen, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)	4,70	4,51	-0,19
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,53	4,26	-0,27
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	6,49	5,86	-0,63
4	Peringkat Provinsi	9	10	
5	Peringkat Nasional	N/A	NA	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Pada Tahun 2022, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Kotawaringin Barat menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 4,51 persen, sedangkan TPT pada Tahun 2021 adalah sebesar 4,70 persen atau menurun dibandingkan dengan angka TPT pada Tahun 2021. Namun demikian, TPT Kabupaten Kotawaringin Barat masih lebih tinggi dibandingkan TPT Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 4,26 persen dan lebih rendah dibandingkan TPT Nasional sebesar 5,86 persen.

### 2.1.3 Indek Gini (Gini Ratio)

Indek Gini atau *Gini Ratio* adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada kurva *Lorenz*, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai pengeluaran konsumsi dengan distribusi *uniform* (seragam) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indek Gini berkisar antara 0 dan 1, dimana:

- a. Indek Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- b. Indek Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Realisasi pencapaian *Gini Ratio* Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebesar 0,315 poin, sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.5 Gini Ratio Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Kabupaten	0,317	0,315	-0,002
2	Tingkat Provinsi	0,323	0,319	-0,004
3	Tingkat Nasional	0,384	0,384	0,00
3	Peringkat Provinsi	N/A	11	
4	Peringkat Nasional	N/A	NA	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Pada Tahun 2022, tingkat ketimpangan pendapatan penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat yang diukur oleh *Gini Ratio* adalah sebesar 0,315 poin. Angka ini turun 0,002 poin jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Tahun 2021 yang sebesar 0,317. Meskipun penurunannya relatif kecil, namun angka ini masih lebih kecil jika dibandingkan dengan *Gini Ratio* Provinsi dan Nasional.

### 2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standart of living). Sesuai dengan UNDP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- a. Rendah (< 60)
- b. Sedang (60≤IPM<70)
- c. Tinggi (70 ≤IPM<80)
- d. Sangat Tinggi (>80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat realisasi pencapaian IPM Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 adalah sebesar 73,41 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 2.6 Indeks Pembangunan Manusia

No	Tingkat IPM	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Kabupaten Kotawaringin Barat	73,07	73,41	0,34
2	Provinsi	71,25	71,63	0,38
3	Indonesia/Nasional	72,29	72,91	0,62
4	Peringkat Provinsi	2	2	
5	Peringkat Nasional	N/A	NA	

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Realisasi pencapaian IPM Tahun 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebesar 73,41 poin, jika dibandingkan pada Tahun 2021 sebesar 73,07 poin mengalami kenaikan sebesar 0,34 poin. Peningkatan IPM tersebut disebabkan meningkatnya umur harapan hidup saat lahir (AHH), harapan lama sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), atau standar hidup, berkaitan dengan PNB per kapita. Umur harapan hidup saat lahir mencapai 70,98 tahun, angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan Tahun 2021, yang mengindikasikan bahwa tingkat kesehatan di Kabupaten Kotawaringin Barat kualitasnya relatif meningkat dari tahun ke tahun. Komponen penghitungan IPM lainnya adalah angka Harapan Lama Sekolah. Capaian angka inipun jika dibandingkan Tahun 2021 mengalami kenaikan, yaitu sebesar 0,16 persen dan pada tahun 2022 sebesar 12,75 tahun. Untuk melihat kualitas Pendidikan selain dari angka harapan lama sekolah adalah rata-rata lama sekolah. Pada Tahun 2022 juga mengalami kenaikan meskipun relatif tidak signifikan, yaitu sebesar 8,54 tahun (meningkat 0,01 poin). Komponen penghitung IPM untuk mengukur kualitas ekonomi adalah pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Pada Tahun 2022 angka inipun mengalami kenaikan sebesar 1,79 persen, yaitu meningkat dari 13.117 ribu rupiah menjadi 13.352 ribu rupiah di Tahun 2022.

IPM di Kabupaten Kotawaringin Barat pada saat ini berada pada urutan ke-2 (dua) dari 14 Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.

### 2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan balas jasa. Oleh karena itu dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat sebab masyarakat adalah pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PDRB atas dasar harga konstan 2010.

Tabel 2.7 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat

		Kabupaten/Kota			Provinsi	Nasional
No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021*	Tahun 2022**	Tahun 2022	Tahun 2022
1	PDRB (harga konstan 2010) (Rp)	13.004,13	23.708,75	26.265,06	199.947,89	19.588.445,60
2	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	0,98	5,61	6,01	6,45	5,31
3	Peringkat Provinsi	5	1	10	NA	NA
4	Peringkat Nasional (Indonesia)*	45	NA	NA	NA	NA

Sumber Dokumen: BPS Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah dan Indonesia, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Dalam skala provinsi, pada Tahun 2020 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 5 dari Laju Pertumbuhan Kota atau Kabupaten lain dalam wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan skala nasional Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan 45 dari Laju Pertumbuhan Provinsi/Kabupaten/Kota di wilayah Indonesia. Pada Tahun 2021, Laju Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kotawaringin Barat menempati urutan pertama dibandingkan 14 Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah, namun pada Tahun 2022, urutan Laju Pertumbuhan Ekonomi menjadi ke-10. Jika dilihat berdasarkan nilai PDRB (harga konstan 2010), nilainya naik dari tahun ke tahun seperti terlihat pada tabel di atas.

### 2.1.6 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan.

Berdasarkan sifatnya, inflasi terbagi menjadi 4 kategori yang meliputi: 1) **Inflasi Ringan** (*Creeping Inflation*) Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, persentasenya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun, 2) **Inflasi Sedang** (*Galloping Inflation*) Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun, 3) **Inflasi Berat** (*High Inflation*) Kategori inflasi ini termasuk yang berat yang mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan. 4) **Hiperinflasi** (*Hyper Inflation*) Jenis inflasi ini sangat dirasakan pengaruhnya karena terjadi secara besarbesaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat, Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 (dengan menggunakan angka penghitungan inflasi di Sampit) sebesar 5,99 persen, Tingkat Inflasi Provinsi 6,32 persen, dan Tingkat Inflasi Nasional 5,51 persen. Rata-rata Inflasi meningkat jika dibandingkan pada tahun 2021, namun masih dalam kategori ringan sebagaimana dijelaskan di tabel 2.8.

Tabel 2.8 Tingkat Inflasi Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Uraian	Tahun 2021	Tahun 2022	Naik/Turun (%)
1	Tingkat Inflasi Kabupaten (%)	4,62	5,99	1,37
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	3,32	6,32	3
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	1,87	5,51	3,64
4	Peringkat Provinsi*	N/A	N/A	
5	Peringkat Nasional	18	44	

<sup>\*</sup>Berdasarkan Inflasi Kota Sampit, Tingkat Inflasi di wilayah Kalteng hanya Kota Palangka Raya dan Sampit yang menjadi acuan

Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kallimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

Tingkat inflasi di Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 5,99 persen (data Inflasi kota Sampit sebagai acuan), sedangkan tingkat inflasi pada tahun 2021 adalah sebesar 4,62 persen atau meningkat sebesar 1,37 persen dibandingkan dengan angka inflasi pada tahun sebelumnya. Kenaikan angka inflasi ini pada tahun 2022 relatif tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan inflasi Kalimantan Tengah yaitu sebesar 3 persen dan secara Nasional sebesar 3,64 persen.

### 2.1.7 Struktur Perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat

Struktur perekonomian Kabupaten Kotawaringin Barat dalam menunjang PDRB dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.9 PDRB Seri 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (dalam Juta Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1	Pertanian, Kehutanan, dan perikanan	5.197.153,4	6.233.229,9	6.969.126,0
2	Industri Pengolahan	5.211.494,9	6.411.977,5	7.094.975,5
3	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2.881.234,0	3.110.382,0	3.459.028,0
4	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)	20.521.899,9	23.708.753,6	26.265.064,0
5	Produk Domestik Regional Bruto tanpa Migas*	20.521.899,9	23.708.753,6	26.265.064,0

No	Uraian	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
6	PDRB Provinsi	152 187 394,25	169 654 310,89	199 947 895,91
7	PDRB Nasional	15 443 353,20	16 976 690,80	19 588 445,60
8	Peringkat Provinsi	2	2	2
9	Peringkat Nasional	172	N/A	NA

\*PDRB Non Migas = PDRB Total karena Kabupaten Kotawaringin Barat tidak mengelola sektor Migas Sumber Dokumen: BPS Kabupaten Kotawaringin Barat, BPS Kalimantan Tengah dan BPS Nasional Tahun 2022

# 2.2 Kebijakan Keuangan

# 2.2.1 Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah merupakan salah satu komponen keuangan daerah yang terdampak *Covid-19*. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 diproyeksikan masih lebih rendah dibandingkan dengan realisasi yang terjadi pada tahun 2021, mengingat pada tahun ini masih berada dalam masa *recovery* atau pemulihan kondisi ekonomi maupun kehidupan sosial masyarakat setelah terjadinya pandemi *Covid-19*, selain itu perkiraan adanya gelombang 3 *Covid-19* juga turut mempengaruhi pertumbuhan ekonomi pada tahun-tahun mendatang, serta menjadi tantangan dalam pengelolaan Pendapatan Daerah.

Upaya peningkatan penerimaan daerah dilakukan dengan 1) optimalisasi pendapatan daerah sesuai kondisi daerah dan peraturan yang berlaku; 2) peningkatan kemampuan dan keterampilan sumber daya manusia pengelola pendapatan daerah; dan 3) peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara proporsional. Kebijakan perubahan target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas perhitungan potensi dan ketercapaian target sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2022 serta mempertimbangkan realisasi semester I Tahun 2022.

Kebijakan perubahan target pendapatan daerah berdasarkan jenis pendapatan daerah sebagai berikut:

# 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pada beberapa lapangan usaha yang terdampak *Covid-19*, terjadi penurunan kegiatan perekonomian. Pelaku usaha yang menjadi wajib pajak mengurangi produksi sebagai respon dari berkurangnya permintaan (konsumsi) pasar. Menurunnya omzet usaha ini mengakibatkan wajib pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga menyebabkan turunnya penerimaan daerah dari sektor PAD.

- a. Penganggaran perubahan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:
  - Target PAD pada 2022 terkoreksi terdapat penyesuaian dengan cara melakukan penghitungan ulang terhadap potensi pajak daerah dan retribusi daerah serta memperhatikan perkiraan asumsi makro yang dapat mempengaruhi target pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah, seperti pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi tahun 2022.
  - Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah melakukan kegiatan pemungutan dengan rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya

pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan sesuai dengan sumber penerimaan masing-masing jenis retribusi yang bersangkutan.
- Larangan Pemerintah Daerah melakukan pungutan:
  - yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi;
  - menghambat mobilitas penduduk;
  - lalu lintas barang dan jasa antar daerah; dan
  - kegiatan impor/ekspor yang merupakan program strategis nasional

# b. Penganggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Perubahan target pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan didasarkan atas realisasi penerimaan dividen dan bagi hasil atas investasi (penyertaan modal) pemerintah daerah pada Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari:

- PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah
- PD BPR "Marunting Sejahtera"
- PD Jaminan Kredit Daerah Kalimantan Tengah

# c. Penganggaran Lain-lain PAD yang Sah

Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dengan kebijakan perubahan target didasarkan atas realisasi semester I Tahun 2022, perhitungan potensi serta relaksasi pembayaran pajak daerah dengan rincian kebijakan berdasarkan objek lain-lain PAD yang sah sebagai berikut:

# Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan

Perubahan target menyesuaikan dengan rencana peralatan dan mesin serta aset lainnya yang telah masuk dalam usulan penghapusan barang dikarenakan rusak berat, umur ekonomis telah habis, tidak dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang selanjutnya diusulkan untuk dilelang dengan perhitungan harga berdasarkan penilaian dari KPKNL Pangkalan Bun.

Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan merupakan pemanfaatan Barang
Milik Daerah oleh pihak ketiga yang ditarget berdasarkan realisasi sewa BMD
yang telah diterima oleh Pemerintah Daerah, diantaranya sewa tanah dan bangunan.

# Jasa Giro

Pendapatan jasa giro bersumber dari penempatan uang pada kas daerah dan uang bendahara pengeluaran atas pengelolaan dana BLUD pada RSUD. Perubahan target didasarkan atas kebijakan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi anggaran belanja daerah sebagai salah satu upaya percepatan pemulihan ekonomi daerah serta untuk percepatan penanganan pandemi *Covid-19* sehingga dengan menurunnya jumlah dana mengendap dalam kas daerah berpengaruh terhadap penurunan jasa giro yang akan diterima.

## Pendapatan Bunga

Pendapatan bunga bersumber dari penempatan kas yang belum digunakan untuk pengeluaran daerah dalam bentuk *Deposito On Call* (DOC). Kebijakan perubahan

target didasarkan atas upaya percepatan realisasi belanja daerah yang menyebabkan pemerintah daerah tidak dapat lagi menempatkan uang dalam bentuk DOC dalam jumlah yang cukup untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

- Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah Kebijakan anggaran penerimaan dari TGR didasarkan atas realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara/Pejabat Lain.
- Pendapatan Denda Pajak Daerah
- Pendapatan Denda Retribusi Daerah
- Pendapatan Hasil Eksekusi Atas Jaminan
- Pendapatan Dari Pengembalian
   Penetapan target didasarkan atas realisasi pendapatan dari kelebihan pembayaran atas belanja daerah.
- Pendapatan BLUD
   Pendapatan dari BLUD, merupakan pendapatan atas layanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh RSUD Sultan Imanuddin Pangkalan Bun
- Pendapatan Lainnya
   Pendapatan lainnya didasarkan atas realisasi pendapatan denda administrasi penegakan peraturan daerah.
  - Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah mengoptimalisasikan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa.

# 2) Pendapatan Transfer

Pendapatan transfer adalah dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah lainnya. Kebijakan perubahan target pendapatan transfer didasarkan atas:

- a. Pendapatan Transfer dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022, dengan memperhatikan trend realisasi penyaluran tahun sebelumnya khususnya yang bersumber dari Dana Bagi Hasil.
- b. Perubahan target DAK Nonfisik berdasarkan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dengan sisa dana yang terdapat pada kas daerah. Hal ini sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik yang menyatakan Sisa DAK Nonfisik yang terdapat di RKUD sampai dengan akhir tahun wajib dianggarkan kembali oleh Pemerintah Daerah dalam APBD/perubahan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan diperhitungkan dengan penyaluran masing-masing dana pada tahun anggaran berikutnya.
- c. Perubahan target Pendapatan Transfer Antar Daerah yang bersumber dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak Daerah Pemerintah Provinsi didasarkan pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dalam APBD pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2022. Pendapatan bagi hasil dari Pemerintah terdiri dari:
  - Bagi hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
  - Bagi hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)

- Bagi hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)
- Bagi hasil dari Pajak Air Permukaan
- Bagi hasil dari Pajak Rokok
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Kebijakan perubahan lain-lain pendapatan daerah yang sah didasarkan atas:

- a. Perubahan target penerimaan yang bersumber dari Pendapatan Hibah Air Limbah Setempat akibat adanya penyesuian volume.
- b. Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah (RKAS) Tahun Anggaran 2022 yang disusun berdasarkan alokasi Bantuan Operasional Sekolah dari Pemerintah.
- c. Penyesuaian Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik Pemerintah Daerah yang belum menerapkan BLUD.

# 2.2.2 Kebijakan Belanja Daerah

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undangundang. Tujuan mandatory spending ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Mandatory spending dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- 1) Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No.36 Tahun 2009 tentang Kesehatan).
- 3) Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
- 4) Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa).

Berikut ini adalah perhitungan pemenuhan *mandatory spending* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah-Perubahan TA. 2022 Kabupaten Kotawaringin Barat:

No.	Mandatory Spending		Anggaran Perubahan 2022		Realisasi 2022	
	Alokasi	%	Rp	%	Rp	%
1	Pendidikan	20,00	341.970.083.881,00	21,88	325.350.918.665,15	22,91
	Pendidikan		330.232.519.185,00		314.054.580.290,15	
	Kepemudaan dan Olahraga		7.710.531.928,00		7.449.292.488,00	
	Kebudayaan		3.147.610.815,00		3.010.049.335,00	
	Perpustakaan		879.421.953,00		836.996.552,00	
2	Kesehatan	10,00	432.568.845.600,00	33,63	360.318.675.806,05	31,37
	Kesehatan		428.206.021.000,00		356.901.901.747,05	
	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		4.362.824.600,00		3.416.774.059,00	

Tabel 2.10 Mandatory Spending APBD-P TA. 2022

No.	Mandatory Spending		Anggaran Perubahan 2022		Realisasi 2022	
NO.	Alokasi	%	Rp	%	Rp	%
3	Infrastruktur Daerah	25,00	524.658.026.991,00	33,56	486.457.282.007,00	34,26
	Belanja Modal Tanah		55.399.200,00		1.061.200,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		79.195.810.588,00		75.230.158.868,00	
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan		91.099.303.077,00		89.604.333.064,00	
	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi		129.972.018.987,00		102.987.368.793,00	
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		2.962.011.529,00		2.716.223.495,00	
	Belanja Pemeliharaan		21.195.639.610,00		20.719.969.252,00	
	Belanja Hibah		39.493.096.972,00		38.161.646.553,00	
	Belanja Bantuan Sosial		2.027.000.000,00		2.025.200.000,00	
	Belanja Bantuan Keuangan		147.362.218.600,00		143.727.952.986,00	
	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		11.295.528.428,00		11.283.367.796,00	
4	Alokasi Dana Desa	10,00	70.631.198.000,00	10,00	69.814.093.086,00	8,88

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan. Belanja Daerah disusun sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Anggaran Belanja Daerah dibatasi kemampuan keuangan daerah yang didasarkan atas anggaran penerimaan daerah yang terdiri atas Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah.

Dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2022 guna melaksanakan amanat peraturan perundang-undangan serta keperluan mendesak telah dilakukan perubahan Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022 sebanyak 2 (dua) kali, yakni dengan:

- 1) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 58 Tahun 2022 Tanggal 20 Mei 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.
- 2) Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 62 Tahun 2022 Tanggal 15 Juli 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 50 Tahun 2021 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022.

Kebijakan belanja daerah Kabupaten Kotawaringin Barat pada perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 adalah:

- Mempertahankan alokasi belanja daerah untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, terdiri dari:
  - a. Alokasi anggaran fungsi pendidikan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari belanja daerah, yang dialokasikan untuk peningkatan pelayanan bidang pendidikan, Pemerintah Daerah secara konsisten dan berkesinambungan.

- b. Alokasi anggaran kesehatan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari total belanja APBD diluar gaji yang dialokasikan untuk peningkatan bidang kesehatan.
- c. Penggunaan dana transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat umum, diarahkan penggunaannya untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari belanja daerah.
- d. Alokasi anggaran pengawasan paling sedikit 0,75% (nol koma tujuh puluh lima persen) dari belanja daerah yang dialokasikan mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan pembinaan dalam rangka penguatan Pembinaan dan Pengawasan Inspektorat Daerah.
- e. Alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah
- f. Alokasi Dana Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari Dana Perimbangan Diluar DAK.
- g. Alokasi Dana Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah paling sedikit 10% dari target pajak daerah dan retribusi daerah.
- 2) Penganggaran belanja yang bersumber dari dana SiLPA DBH SDA DR dengan penggunaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 216/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan, Dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Dana Reboisasi, yakni untuk membiayai kegiatan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - a. Penanaman DAS Kritis penanaman pada kawasan perlindungan setempat, dan pembuatan bangunan konservasi tanah dan air;
  - b. Pembangunan dan pengelolaan ruang terbuka hijau;
  - c. Pembangunan dan pengelolaan taman hutan raya;
  - d. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan;
  - e. Penanganan pasca kebakaran hutan dan lahan di taan hutan raya;
  - f. Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
  - g. Pengelolaan keanekaragaman hayati;
  - h. Penyuluhan lingkungan hidup; dan/atau
  - i. Strategis lainnya.
- 3) Penganggaran belanja yang bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya, baik SiLPA yang dibatasi penggunaannya maupun SiLPA yang bersifat umum.
- 4) Penyesuaian anggaran belanja gaji dan tunjangan berdasarkan realisasi anggaran semester I Tahun 2022 dengan kebijakan:
  - a. Gaji dan tunjangan diperhitungkan berdasarkan realisasi bulan Juni 2022;
  - b. Menyesuaikan perhitungan kebutuhan anggaran iuran jaminan Kesehatan sebesar 4% dari penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD, KDH dan ASN, iuran JKK dan JKM masing-masing sebesar 0,24% dan 0,72% dari gaji pokok.
  - c. Tambahan Penghasilan ASN diperhitungkan berdasarkan realisasi dari pembayaran bulan Januari sampai dengan Juni 2022 dengan perhitungan 80% dari basic TPP.
  - d. Acress untuk kebutuhan kenaikan pangkat, penambahan keluarga, mutasi ASN diperhitungkan sebesar 1%

- e. Penyesuaian Gaji dan Tunjangan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD.
- f. Penganggaran iuran Jaminan Kesehatan 4% dari Tunjangan Profesi Guru.
- 5) Penambahan anggaran belanja tidak terduga untuk keperluan Pencadangan anggaran untuk kebutuhan kegiatan darurat dan mendesak lainnya.
- 6) Dalam rangka dukungan penanganan *Covid-19* yang dilaksanakan oleh unsur TNI/Polri sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 34/KM.7/2021 menggunakan dana talangan yang bersumber dari APBN dan diperhitungkan dalam penyaluran DAU/DBH.
- Penyediaan dukungan dana persiapan penyelenggaraan Pekan Daerah (PEDA) XIII Provinsi Kalimantan Tengah yang bertempat di Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023.
- 8) Penyediaan anggaran untuk pengamanan aset Barang Milik Daerah sebagai tindaklanjut dari arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- 9) Penyediaan anggaran untuk pemenuhan kurang salur Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan Tahun 2020, Kurang salur Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2021;
- 10) Melakukan pergeseran anggaran antar SKPD untuk memenuhi kebutuhan anggaran prioritas dan mendesak.
- 11) Penyediaan anggaran bersifat wajib dan mengikat.

# 2.2.3 Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, yang terdiri atas:

1) Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Defisit APBD dalam rancangan Perubahan APBD TA. 2022 didanai dari perubahan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya. Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) pada Perubahan APBD TA. 2022 didasarkan atas Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 yang telah disetujui bersama dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2021, yakni sebesar Rp261.920.012.659,90 bertambah sebesar Rp240.795.155.459,90 dari anggaran semula sebesar Rp21.124.857.200,00.

Dari jumlah SiLPA sebesar Rp261.920.012.659,90 yang digunakan untuk pembiayaan Belanja Daerah pada APBD murni TA. 2022 sebesar Rp21.124.857.200,00 pada perubahan APBD TA. 2022 bertambah sebesar Rp180.051.673.200,00 sehingga yang digunakan untuk pembiayaan belanja menjadi sebesar Rp201.176.530.400,00. Selisih antara jumlah SiLPA Rp261.920.012.659,90 dengan jumlah yang dialokasikan untuk belanja daerah sebesar Rp201.176.530.400,00 pada perubahan APBD TA. 2022 adalah sebesar Rp60.743.482.259,90, jumlah ini merupakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Berkenaan (tidak dialokasikan untuk pembiayaan belanja), yang terdiri dari:

- a. SiLPA DBH SDA-DR sebesar Rp1.043.670.812,00

  Jumlah ini akan diusulkan setelah ada petunjuk lebih lanjut terkait penggunaan dana tersebut dari Pemerintah yang direncanakan pada APBD Tahun Anggaran 2023.
- b. SiLPA BLUD sebesar Rp59.305.919.858,64

- c. SiLPA DAK Fisik sebesar Rp355.718.569,00 belum dapat dialokasikan karena sistem pelaporan untuk penggunaan SiLPA DAK Fisik Tahun sebelumnya belum tersedia dari Pemerintah.
- d. SiLPA DAK Nonfisik Pelayanan Kepariwisataan sebesar Rp12.800.000 telah dianggarkan pada Tahun 2021 namun tidak dapat direalisasikan.
- e. SiLPA Umum sebesar Rp733,26
- f. SiLPA pada Kas Bendahara sebesar Rp25.372.287,00
- 2) Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Kebijakan pengeluaran pembiayaan tidak mengalami perubahan sebagaimana kebijakan dalam APBD murni TA. 2022, yakni sebesar Rp53.000.000.000,00 untuk keperluan dengan rincian sebagai berikut:
  - a. Pembentukan Dana Cadangan sebesar Rp5.000.000.000,00.
  - b. Penyertaan Modal Daerah kepada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalteng sebesar Rp15.000.000.000,000.
  - c. Pembayaran pokok pinjaman Tahun 2021 sebesar Rp33.000.000.000,000.

# 2.3 Strategi Pencapaian Target Kinerja APBD

Strategi merupakan serangkaian upaya yang berisikan gambaran proses pencapaian sasaran strategis pembangunan. Strategi memperhatikan faktor internal dan eksternal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Untuk itu strategi menjadi salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (*strategy focussed-management*). Rumusan strategi juga menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Pemerintah Daerah berupaya menciptakan nilai tambah bagi stakeholder pembangunan daerah untuk meningkatkan kontribusi secara aktif dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Hal ini penting mengingat peran dan fungsi pemerintah yang semakin bergeser kearah fasilitator, regulator, dan pembinaan seluruh stakeholder pembangunan daerah.

Melihat arsitektur arah kebijakan serta uraian arah kebijakan yang ada pada RPJMD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2017-2022, maka arah kebijakan pada tahun 2022 adalah "Stabilitasi Kemandirian Perekonomian Daerah disertai dengan Penurunan Kesenjangan dan Peningkatan IPM Kotawaringin Barat".

Arah kebijakan tersebut menaungi beberapa penekanan pada implementasi strategi karena pada tahun 2022, semua strategi masih dalam proses implementasi. Dari 5 strategi yang diimplementasikan, terdapat 3 strategi yang memiliki perhatian lebih. Berikut merupakan 3 strategi yang masih perlu menjadi perhatian utama:

- Strategi 2 : Menciptakan Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang Mandiri melalui Peningkatan Ekstensifikasi Sektor Pertanian Terpadu dan Potensi Unggulan Lainnya dengan memperhatikan Kearifan Lokal dan Konsep *Green Economy*.
- Strategi 3 : Membangun Generasi Muda Berkualitas dan Dinamis melalui Komitmen Afirmasi terhadap Akses Pendidikan dan Media Pembelajaran Lainnya yang berorientasi pada kreativitas pengelolaan potensi lokal.
- Strategi 5 : Preservasi Nilai, Situs Budaya dan Kearifan Lokal melalui pengelolaan even kepariwisataan dan Penguatan Modal Sosial yang Berwawasan Kebangsaan, Berwawasan Lingkungan dan Berbudaya

Adapun strategi dan upaya untuk pencapaian target pendapatan daerah Tahun Anggaran 2022, adalah sebagai berikut:

- 1. Melakukan optimalisasi pengelolaan jenis-jenis pendapatan yang dapat dikendalikan oleh Pemerintah Daerah, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditempuh dengan mengawal target pajak dan retribusi daerah, difokuskan pada upaya:
  - a. Tetap menjaga ketaatan wajib pajak dan wajib retribusi daerah dengan melakukan komunikasi persuasif kepada wajib pajak dan wajib retribusi;
  - b. Memberikan dispensasi kepada wajib pajak tertentu;
  - c. Peningkatkan efektifitas pengendalian dan pengawasan dalam pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
  - d. Perluasan basis pungutan pajak daerah sesuai dengan potensi dan kewenangan daerah dan penetapan kantong-kantong potensial penerimaan retribusi daerah;
  - e. Penetapan obyek kena pajak baru harus dilaksanakan secara hati-hati dan obyektif untuk tetap menjaga terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi berkembangnya dunia usaha dan masyarakat, dengan mempertimbangkan kemampuan dunia usaha dan masyarakat untuk membayar pajak;
  - f. Melakukan kajian terhadap regulasi yang dapat meningkatkan potensi PAD;
  - g. Perbaikan mekanisme penerimaan pajak dan retribusi daerah, terutama menyangkut Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah dan prosedur pengelolaan pajak dan retribusi daerah;
  - h. Pemutakhiran data potensi pajak dan retribusi daerah dengan memanfaatkan Pengembangan Teknologi Informasi (TI);
  - i. Peningkatan kerjasama dengan Pemerintah Pusat, Propinsi dan lembaga keuangan lainnya:
  - j. Peningkatan kinerja BUMD melalui pemberian penyertaan modal yang dikaitkan dengan penerimaan deviden yang akan diperoleh;
  - k. Pemasangan tapping box pada beberapa jenis usaha.
- 2. Memperkuat posisi tawar (*bargaining position*) pemerintah daerah dalam mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan daerah yang tidak dapat dikendalikan secara langsung oleh Pemerintah Daerah, seperti Pendapatan transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah disamping tetap memperhatikan serta mempertimbangkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Strategi operasional yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai target pendapatan tersebut di atas adalah sebagai berikut:
  - a. Review Perda-Perda yang sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini;
  - b. Peningkatan koordinasi antar SKPD dalam upaya meningkatkan PAD.

# BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

# 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan menggambarkan pencapaian kinerja keuangan masingmasing program pada Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama Tahun Anggaran 2022. Uraian kinerja program dan kegiatan dari masing-masing urusan tersebut disajikan terpisah dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022, sedangkan untuk Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Fisik dan Keuangan Kabupaten Kotawaringin Barat APBD Perubahan Tahun Anggaran 2022

			Realisasi			
No	Perangkat Daerah	Anggaran	Keuangan	Fisik		
		Perubahan	(Rp)	(%)	(%)	
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	333.380.130.000	317.064.629.625,15	95,11	99,21	
2	Dinas Kesehatan	428.206.021.000	356.901.901.747,05	83,35	97,46	
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.589.092.000	166.589.291.133,00	99,40	100,00	
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	28.751.085.000,00	27.924.614.506,00	97,13	94,76	
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	14.837.157.000	14.130.169.542,00	95,24	99,78	
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	9.338.823.000,00	9.170.379.313,00	98,20	99,65	
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	39.897.637.000,00	12.122.068.247,00	30,38	30,38	
8	Dinas Sosial	8.080.131.000,00	7.866.315.395,00	97,35	100,00	
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.656.595.500,00	7.491.756.529,00	97,85	100,00	
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana	11.629.637.000,00	10.287.258.807,00	88,46	98,63	
11	Dinas Ketahanan Pangan	4.786.190.000,00	4.587.335.180,00	95,85	100,00	
12	Dinas Lingkungan Hidup	25.381.616.000,00	24.423.213.743,00	96,22	99,84	
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7.387.047.000,00	6.906.184.212,00	93,49	97,80	
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	7.628.850.000,00	7.443.488.091,00	97,57	97,59	
15	Dinas Perhubungan	14.144.574.000,00	13.511.110.767,00	95,52	97,24	
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	10.157.868.000,00	10.024.761.011,00	98,69	99,82	
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	17.537.852.535,00	16.677.742.424,00	95,10	98,66	
18	Dinas Penanamam Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	7.031.509.000,00	6.705.812.752,00	95,37	100,00	
19	Dinas Kepemudaan dan Olahraga	12.716.307.000,00	12.278.801.705,00	96,56	98,12	
20	Dinas Perpustakaan & Kearsipan	6.541.356.000,00	6.360.360.217,00	97,23	99,75	
21	Dinas Perikanan	15.630.738.290,00	15.393.793.932,00	98,48	100,00	
22	Dinas Pariwisata	6.783.418.000,00	6.634.582.905,00	97,81	100,00	
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	26.254.742.000,00	25.356.751.306,00	96,58	98,73	
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	12.380.938.000	11.576.748.112,00	93,50	96,56	
25	Sekretariat Daerah	45.218.264.000	42.446.951.523,00	93,87	98,23	
26	Sekretariat DPRD	35.535.750.000	33.386.810.724,00	93,95	98,68	
27	Kecamatan Arut Selatan	15.084.493.000	14.079.901.972,00	93,34	93,05	

	Perangkat Daerah	Anggaran Perubahan	Realisasi		
No			Keuangan		Fisik
		reiubaliali	(Rp)	(%)	(%)
28	Kecamatan Arut Utara	4.181.416.000	4.130.816.700,00	98,79	99,02
29	Kecamatan Kumai	7.906.126.000	7.684.768.127,00	97,20	99,45
30	Kecamatan Kotawaringin Lama	6.452.116.000	6.346.979.325,00	98,37	99,99
31	Kecamatan Pangkalan Lada	2.840.487.000	2.599.731.491,00	91,52	100,00
32	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.242.039.000	3.142.977.676,00	96,94	99,04
33	Inspektorat Daerah	11.479.278.000	10.944.117.853,00	95,34	99,93
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	11.088.417.000,00	10.747.344.687,00	96,92	98,54
35	Badan Pendapatan Daerah	9.926.704.000,00	9.003.912.532,00	90,70	95,31
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	176.882.590.200,00	168.668.504.467,00	95,36	99,58
37	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	9.656.474.000,00	9.441.766.112,00	97,78	98,66
	Jumlah	1.563.223.468.525,00	1.420.053.654.390,20	90,84	97,08

Sumber: Laporan Tepra per 31 Desember 2022

Secara ringkas, capaian kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 digambarkan sebagai berikut:

- a. Pendapatan Daerah terealisasi sebesar Rp1.412.981.759.684,52 atau 98,56 persen dari anggaran Rp1.433.623.122.600,00 sehingga terdapat realisasi kurang sebesar (Rp20.641.362.915,48). Jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah tahun 2021 Rp1.633.972.466.127,94, terjadi penurunan sebesar (Rp220.990.706.443,42).
- b. Belanja Daerah terealisasi sebesar Rp1.420.053.654.390,20 atau 90,84 persen dari anggaran Rp1.563.223.468.525,00 sehingga terdapat realisasi kurang sebesar (Rp143.169.814.134,80). Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Daerah tahun 2021 Rp1.461.583.803.894,41, terjadi penurunan sebesar (Rp41.530.149.504,21).
- c. Pembiayaan Netto terealisasi sebesar Rp208.920.012.659,90 merupakan selisih lebih antara Penerimaan Pembiayaan Rp261.920.012.659,90 berupa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2021 dengan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp53.000.000.000,000 yang terdiri dari Pembentukan Dana Cadangan Rp5.000.000.000,00, Penyertaan Modal Daerah Rp15.000.000.000,00 dan Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp33.000.000.000,00.

## 3.2 Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan

# 3.2.1 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Pendapatan

Pada kelompok Pendapatan Asli Daerah terdapat beberapa pendapatan SKPD yang tidak mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen). Berikut ini adalah penjelasan hambatan maupun kendala masing-masing SKPD dalam pencapaian target pendapatan.

## 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Pada tahun 2022, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 1 (satu) jenis pendapatan yakni Retribusi Rumah Dinas, dengan realisasi sebesar Rp186.155.000,00 atau 37,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp500.000.000,00 hal ini terjadi karena dari 397 rumah dinas, yang berpenghuni hanya

214 unit dan masih terdapat penghuni rumah dinas yang belum membayar tagihan sewa rumah dinas.

## 2. Dinas Kesehatan

- a. Retribusi Pelayanan Kesehatan, realisasi sebesar Rp3.400.996.700,00 atau 77,29% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.400.000.000,00, hal ini terjadi karena dengan adanya program UHC yang sudah mencover 95% dari jumlah masyarakat sehingga masyarakat yang berobat tidak dipungut retribusi.
- b. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp243.450.000,00 atau 69,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp350.000.000,00, hal ini terjadi karena masih banyak pengguna rumah dinas dari tahun 2019 s.d 2021 yang masih belum melakukan pelunasan sewa rumah dinas.

# 3. Dinas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp2.078.062.258,00 atau 46,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00. Hal ini terjadi karena menjamurnya pengusaha rental swasta alat berat serta menurunnya permintaan sewa alat berat untuk pekerjaan infrastruktur diperkebunan dan diluar kabupaten kotawaringin barat.
- b. Persetujuan Bangunan Gedung, realisasi sebesar Rp691.638.650,00 atau 13,83% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00. Hal ini terjadi karena pengelolaan retrebusi persetujuan bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang baru dimulai pada tiga bulan terakhir tahun anggaran 2022, yaitu bulan oktober sampai dengan desember 2022 yang mana sebelumnya dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

## 4. Dinas Lingkungan Hidup

- a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebesar Rp108.520.000,00 atau 72,35 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp150.000.000, hal ini terjadi karena ada beberapa wajib retribusi yang belum membayar retribusi daerah berdasarkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) yang telah diterbitkan dan sebagian pembayaran dari wajib retribusi yang sering terlambat atau melampaui masa jatuh tempo dari SKRD.
- b. Retribusi Penyewaan Tanah sebesar Rp72.420.000 atau 120,70 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp60.000.000,00, hal ini terjadi karena event kegiatan yang dilaksanakan oleh para penyewa Taman Kota Manis dan bertambahnya lapak pedagang UMKM.
- c. Retribusi Pemakaian Laboratorium sebesar Rp40.416.500 atau 161,67 persen dari target yang ditetapkan sebesar Rp25.000.000, hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah permintaan pengujian sampel tanah, air dan ambien udara oleh pengguna jasa layanan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### 5. Dinas Perhubungan

a. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan, realisasi sebesar Rp760.172.100,00 atau 108,60% dari target yang ditetapkan sebesar Rp700.000.000,00 karena adanya peningkatan jumlah kendaraan yang keluar masuk pelabuhanan dan peningkatan

- jumlah penumpang yang menggunakan kapal kalibodri serta meningkatnya jumlah kapal yang tambat labuh di dermaga ASDP Kumai Hulu.
- b. Retribusi Parkir Khusus, realisasi sebesar Rp1.115.593.200,00 atau 47,47% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.350.000.000,00 hal ini terjadi karena adanya target yang ditetapkan terlalu besar dari capaian realisasi parkir di lapangan.
- c. Retribusi Parkir Umum, realisasi sebesar Rp1.056.329.799,00 atau 52.82% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 hal ini terjadi karena adanya target yang ditetapkan terlalu besar dari capaian realisasi parkir di lapangan.
- d. Retribusi Izin Trayek, realisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau 53,90% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.453.000,00 hal ini terjadi karena telah berakhirnya batas perpanjangan ijin trayek tahun 2022.

## 6. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

Pada Tahun Angaran 2022 Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persaandian mengelola 1 jenis pendapatan yaitu Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dengan realisasi sebesar Rp367.637.360,00 atau 111,56% dari target yang ditetapkan sebesar Rp329.528.000,00. Secara realisasi menunjukkan ada peningkatan pendapatan sebesar 111,56% atau sebesar Rp38.109.360,00 namun secara jumlah SKRD yang diterbitkan masih terdapat 1 SKRD senilai Rp946.154,00 per 31 Desember 2022 belum dibayar dengan nomor SKRD 128/RETR/MENARA/2022 an. An. PT. Solusi Tunas Pratama Site Name Pasir Panjang PBU.

# 7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

- a. Retribusi pelayanan pasar sebesar Rp2.713.814.725,00 atau 77,92% dari yang ditargetkan sebesar Rp3.482.949.000,00. Hal tersebut dikarenakan:
  - Kenaikan retribusi pelayanan pasar 10% sesuai Perbup Kobar No. 49 Tahun 2021 tentang Dispensasi Pembayaran Retribusi Pelayanan Pasar dalam rangka pemulihan ekonomi daerah baru dilaksanakan dibulan April 2022.
  - Bangunan kios dan lapak kosong dan ditingkat pedagang sepi oleh pengunjung karena dampak pandemic Covid-19 sangat tinggi.
  - Pada bulan September s/d November 2022 selama 3 bulan lokasi pasar yaitu pasar Indra Sari, Saik Indra Kencana dan Pasar Sungai Bulin terdampak bencana alam banjir sehingga pedagang tidak berjualan.
- b. Retribusi pelayanan tera/tera ulang sebesar Rp64.855.150,00 atau 103,68% dari yang ditargetkan sebesar Rp62.904.800,00. Hal tersebut dikarenakan permintaan tera ulang tahun 2022 melebihi target yang direncanakan sehingga mengakibatkan adanya peningkatan pelayanan tera/tera ulang.
- c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan denda retribusi Jasa umum sebesar Rp1.489.540,00 atau 28,03 persen dari yang ditargetkan sebesar Rp4.202.000,00. Pendapatan tersebut berasal dari adanya pembayaran denda retribusi pelayanan pasar sebesar Rp340.190,00, kas di Bendahara penerimaaan sebesar Rp1.126.100,00 dan setoran shodaqoh sebesar Rp23.250,00 yang dikarenakan adanya kelebihan setoran.

# 8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pada tahun 2022, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin barat mengelola 1 jenis Pendapatan (Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)) sebesar Rp663.790.247,00 dan mengalami penurunan pendapatan di

bandingkan Pendapatan tahun 2021, dikarenakan berdasarkan surat dari Kepala DPMPTSP Kabupaten Kotawaringin Barat nomor 800/717/DPMPTSP.D tentang Penjelasan atas pengalihan Target Pendapatan Tahun 2022 ke PUPR Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan maksud antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pada Pasal 14 ayat (3) bahwa DPMPTS tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2);
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomo 138 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, pada Pasal 19 bahwa Dalam Pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan Perizinan dan Non perizinan, DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (2);
- c. Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 6 tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan dan Non Perizinan di Daerah Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat, pada Pasal 13 ayat (5) bahwa Dalam pelaksanaan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

# 9. Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Pada tahun 2022, Dinas kepemudaan dan olahraga mengelola retribusi tempat rekreasi dan tempat olahraga dengan total realisasi sebesar Rp15.000.000,00 atau 30,19% target seberar Rp57.964.900,00. Terdapat penurunan realisasi pendapatan asli daerah dari sewa gedung olahraga di tahun 2022 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2021. Pedapatan asli daerah lebih rendah dikarenakan pada tahun 2022 sarana dan prasarana olahraga yang dimiliki Dinas Kepemudaan dan Olahraga tidak memenuhi standar mutu untuk kegiatan olahraga, sarana yang dimaksud adalah lapangan sampuraga dan gedung koni yang sedang direhab.

# 10. Dinas Perikanan

- a. Retribusi Penyewaan Bangunan, realisasi sebesar Rp64.450.000,00 atau 80,66% dari target yang ditetapkan sebesar Rp79.900.000,00 hal ini terjadi karena tidak terealisasinya PAD Pabrik Es teluk Bogam dari target disebabkan karena terjadi kerusakan pada mesin *Evaporator* dan *Condensing* sehingga berdampak pada proses pembekuan es balok yang dihasilkan, dimana waktu normal yang dibutuhkan untuk proses pembekuan es balok adalah 7 s.d 10 hari namun pada saat terjadi kerusakan pada item mesin tersebut maka proses pembekuan es balok menjadi 28 hari, tentunya dengan lamanya proses pembekuan ini akan menambah tagihan beban listrik dan jika diteruskan akan merugikan pihak pengelola. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan melalui DPA TA 2022 telah dilaksanakan pemeliharaan mesin pabrik es sehingga ke depannya bisa termanfaatkan.
- b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah, realisasi sebesar Rp244.504.500,00 atau 81,50% dari target yang ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 hal ini terjadi karena realisasi tidak sesuai dengan target diakibatkan oleh banjir berkali-kali yang mengakibatkan kolam-kolam tergenang air sehingga kualitas air tidak bisa terkontrol dengan baik, hal ini berakibat pada benih serta indukan mengalami banyak kematian,

selain itu kegiatan pembenihan banyak terjadi penghentian karena menunggu kualitas air membaik dan pada akhirnya mengakibatkan penurunan jumlah produksi benih secara signifikan. adapun target produksi 2.160.000 ekor dan realisasi 2.082.337 ekor.

#### 11. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Retribusi Rumah Potong Hewan realisasi sebesar Rp111.100.000,00 atau 55,55% dari target yang ditetapkan sebesar Rp200.000.00,00. Hal ini terjadi karena timbangan tidak direalisasikan karena harga di pasar lebih tinggi.

## 12. Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutura dan Perkebunan

Pada tahun 2022 Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat mengelola 1 (satu) jenis pendapatan yaitu retribusi daerah yang berasal dari penjualan produksi usaha daerah. Realisasi retribusi daerah dari penjualan produksi usaha daerah (penjualan benih padi Inpari 32) pada Tahun 2022 yakni sebesar Rp15.000.000,00 atau 15,87% dari target yang ditetapkan sebesar Rp94.500.000,00, hal ini terjadi karena:

- a. tingginya curah hujan sehingga belum bisa dilakukan pertanaman terutama di Lahan Balai Benih Tanjung Terantang (lahan dalam kondisi banjir sepanjang tahun).
- b. kurangnya Petani Penangkar yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat.
- c. belum adanya kepastian pasar untuk hasil benih padi yang ada di petani penangkar sehingga banyak benih padi yang akhirnya dijual jadi beras.
- d. tingginya serangan Hama dan Penyakit Tanaman pada tanaman padi karena kurangnya luas pertanaman padi.

#### 13. Sekretariat Daerah

#### a. Retribusi Daerah

Retribusi daerah berasal dari retribusi rumah dinas, retribusi aula kantor bupati serta retribusi rumah betang realisasi sebesar Rp121.332.000,00 atau 48,68% dari target yang ditetapkan sebesar Rp249.250.000,00. Hal ini terjadi karena banyaknya penghuni rumah dinas yang belum melunasi pembayaran retribusi di tahun 2022 sehingga terhutang dan adanya kenaikan tarif baru untuk rumah dinas golongan III dari Rp1.200.000,00 menjadi Rp1.500.000,00. Selan itu hal ini terjadi karena adanya pengalihan obyek retribusi yang sebelumnya dikelola Sekretariat Daerah Kotawaringin Barat melalui surat Sekretariat Daerah Nomor 032/131/IV.III/SK/BPKAD/2021 tanggal 22 Juli 2021 telah diserahkan kepada Dinas Kepemudaan dan Olahraga agar pemungutan dapat lebih dioptimalkan.

# b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Hasil pemanfaatan BMD dari sewa tanah sebanyak 3 titik di Jl. H.M Rafi'I terealisasi sebesar Rp167.040.000,00 sesuai dengan surat perjanjian kontrak sewa untuk periode 01 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2026.

## 14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp38.400.000,00 atau 41,07% dari target yang ditetapkan sebesar Rp93.500.000,00. Hal ini terjadi karena:

- a. Tarif pendapatan (dalam hal ini retribusi pemakaian kekayaan daerah) dinilai masih terlalu kecil.
- b. Penyewaan Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat bukan bertujuan untuk komersil. Penggunaan Aula lebih diutamakan untuk keperluan lingkup Bappeda dan

- keperluan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sehingga SKPD yang menggunakan Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat dalam DPA SKPD nya tidak dianggarkan karena tidak dikenakan biaya sewa aula.
- c. Pihak swasta hanya diperbolehkan menggunakan/menyewa Aula Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat diluar jam kerja/hari libur.

# 15. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Retribusi Daerah
  - Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, realisasi sebesar Rp3.970.000,00 atau 79,40% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.000.000,00 hal ini terjadi karena menurunnya tingkat pemakaian kekayaan daerah berupa sewa aula kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat oleh pihak ketiga.
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
   Lain lain PAD yang Sah realisasi sebesar Rp4.997.288.413,47 atau 110,03% dari
   target yang ditetapkan sebesar Rp4.541.839.000,00.
- c. Pendapatan Transfer Pusat tidak tercapai 100% antara lain karena:
  - Adanya pemotongan DAU sebesar Rp673.911.200,00 karena terdapat sisa dana DAK Non Fisik s.d. 31 Desember 2021 pada Kas Daerah yang terdiri dari BOP PAUD dan BOP Kesetaraan, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 10/KM.7/2022 tentang Pemotongan Dana Alokasi Umum Tahun Anggaran 2022 Tahap Pertama Atas Sisa Dana Alokasi Khusus Nonfisik di Rekening Kas Umum Daerah sampai dengan Tahun Anggaran 2021.
  - DAK Fisik disalurkan berdasarkan nilai kontrak belanja, dimana kontrak yang dilaksanakan oleh SKPD dengan pihak ketiga nilainya di bawah alokasi DAK Fisik, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik
  - DAK Nonfisik khususnya BOK tidak tercapai karena adanya perubahan petunjuk teknis penggunaan BOK Puskesmas terutama untuk penanganan Covid-19 namun dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya dapat menyesuaikan

# 16. Badan Pendapatan Daerah

- a. Pajak Daerah
  - 1) Pajak Hotel, realisasi sebesar Rp1.945.458.674,10 atau 43,23% dari target yang ditetapkan sebesar Rp4.500.000.000,00 Hal ini terjadi karenakan Masih terbatas aktivitas masyarakat dan kunjungan wisatawan dampak dari resesi dunia terutama pada semester I tahun 2022 dan adanya upaya hotel untuk menarik minat pengunjung dengan memberikan kemudahan dalam pemesanan hotel dan penurunan tarif sehingga berpengaruh terhadap mendapatan hotel dan pemenuhan kewajiban pembayaran pajak.
  - 2) Pajak Restoran, realisasi sebesar Rp3.553.174.603,40 atau 62,34% dari target yang ditetapkan sebesar Rp5.700.000.000,00 hal ini terjadi karena tingkat kesadaran masyarakat dalam melaporkan pajaknya sangat rendah dan juga karena masih masa pemulihan ekonomi pasca dampak bencana *Covid*-19, karena dampak dari bencana *Covid*-19 banyak restoran dan warung makan mengalami kebangkrutan/tutup sementara terutama pada restoran-restoran besar.
  - 3) Pajak Hiburan, realisasi sebesar Rp802.754.530,20 atau 107,03% dari target yang ditetapkan sebesar Rp750.000.000,00 tercapainya penerimaan dari target yang

- ditentukan sangat dipengaruhi oleh perubahan pola hidup masyarakat akibat bencana *Covid*-19 yang lebih mengutamakan kesehatan dan hiburan dalam mengisi aktivitasnya.
- 4) Pajak Reklame, realisasi sebesar Rp1.016.063.546,00 atau 40,64% dari target yang ditetapkan sebesar Rp2.500.000.000,00 hal ini terjadi karena hambatan dan kendala yang dihadapi untuk pencapaian target pada jenis pajak ini adalah kesulitan dalam mengidentifikasi kepemilikan (vendor), karena saat pergantian kepemilikan (vendor) wajib pajak jarang melakukan pelaporan.
- 5) Pajak Penerangan Jalan Umun, realisasi sebesar Rp25.124.635.681,60 atau 93,05% dari target yang di tetapkan sebesar Rp27.000.000.000,00 hambatan dan kendala yang dihadapi dari jenis pajak ini adalah kurang akuratnya dalam penentuan target karena tidak adanya data yang valid terkait jumlah pelanggan yang ada di Kabupaten Kotawaringin Barat. Khusus untuk Pajak Penerangan Jalan dihasilkan sendiri tidak tercapainya target adanya keputusan MK Nomor 80/PUU-XV/2017 yang menyatakan bahwa pemungutan PPJ berdasarkan UU Pajak Dan Retribusi Daerah No. 28 Tahun 2009 hanya dapat dipungut hingga 12 Desember 2021 atau 3 tahun sejak putusan terersebut dibacakan.
- 6) Pajak Parkir, realisasi sebesar Rp115.936.500,00 atau 11,59% dari target yang di tetapkan sebesar Rp1.000.000.000,00 hal ini terjadi karena menurunya tingkat kunjungan masyarakat ke objek pajak akibat perubahan pola hidup masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan secara online dan tidak adanya penambahan objek pajak.
- 7) Pajak Air Tanah, realisasi sebesar Rp56.904.910,00 atau 28,45% dari target yang di tetapkan sebesar Rp200.000.000,00 hal ini terjadi karena kendala utama dari tidak tercapainya realisasi penerimaan dari pajak ini adalah belum terpasang alat untuk mengetahui seberapa besar penggunaan air untuk usaha wajib pajak serta kesulitan dalam mendapatkan informasi penggunaan/pemakaian air untuk aktivitas wajib pajak, terutama pada usaha-usaha isi ulang, kolam renang maupun cuci mobil. Kendala lain adalah laju pertumbuhan objek pajak sangat lambat tidak berbanding lurus dengan target yang ditetapkan, karena masyarakat berusaha menghindar dengan beralih ke sumber air lain yang lebih menguntungkan.
- 8) Pajak Sarang Burung Walet, realisasi sebesar Rp1.110.301.729,40 dari target yang di tetapkan sebesar Rp5.000.000.000,00 hal ini terjadi karena tidak kesadaran wajib pajak dalam melaporkan dan membayar belum sesuai dengan riil di lapangan. Kesulitan dalam mengetahui informasi jumlah produksi dan harga jual dan kepemilikan gedung yang sesungguhnya.
- 9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya, realisasi sebesar Rp2.224.103.102,00 dari target yang di tetapkan sebesar Rp8.000.000.000,00 hal ini terjadi karena Tidak tercapaian pajak ini adalah terkait dengan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan dan menghitungkan pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan riil dilapangan. Selain itu objek pajak sudah beroperasi untuk tahun 2022 baru 2 (dua) perusahaan.
- 10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2), realisasi sebesar Rp10.871.761.738,00 dari target yang di tetapkan sebesar Rp16.000.000.000,00 hal ini terjadi karena kondisi ekonomi masyarakat masih tahap pemulihan paska *Covid*-19 dan bencana banjir di Kotawaringin Barat juga tingkat kesadaran

- masyarakat yang masih rendah serta basis data PBB P2 yang belum seluruhnya dimutakhirkan sehingga kesulitan dalam melakukan tindakan penagihan.
- 11) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), realisasi sebesar Rp34.754.695.304,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp26.500.000.000,00 karena BPHTB merupakan jenis pajak yang perhitungkan didasarkan pada pemindahan hak dan pemberian hak baru sehingga semakin banyak masyarakat melakukan transaksi jual beli atau pemindahan hak akan berpengaruh positif terhadap penerimaan BPHTB. Adanya sistem pelayanan BPHTB yang berintegrasi dengan pertanahan (BPN) dalam pengurusan sertifikasi memudahan Bapenda melakukan pengawasan karena setiap transaksi yang terjadi harus melalui proses penginput pada sistem untuk mendapatan nomor objek wajib pajak daerah sebelum proses dilanjutkan ke BPN.
- b. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Pendapatan Denda Pajak realisasi Rp277.941.355,48 atau 77,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp358.856.200,00 hal ini terjadi karena berkurangnya transaksi pembayaran yang berpengaruh terhadap penerimaan denda pajak.

# 17. Kecamatan Pangkalan Banteng

Pada tahun 2022, Kecamatan Pangkalan Banteng mengelola 2 jenis pendapatan, akan tetapi terdapat 1 jenis pendapatan melebihi target (di atas 105%) yaitu Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan, realisasi sebesar Rp17.975.000,00 atau 118,65% dari target yang ditetapkan sebesar Rp15.150.000,00, hal ini terjadi karena semua rumah dinas telah ditempati oleh pegawai.

# 3.2.2 Hambatan dan Kendala dalam Pencapaian Target Belanja

Jika dilihat lebih rinci, terdapat belanja dari program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target yang telah ditetapkan (pencapaian kurang dari 95 persen), antara lain:

#### 1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp10.043.000,00 atau 73,66% dari anggaran sebesar Rp13.635.000,00 karena efisien anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan belanja.
- b. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD realisasi sebesar Rp14.094.500,00 atau 88,40% dari anggaran sebesar Rp15.944.871,00 karena efisiensi anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan belanja.
- c. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp118.819.853,00 atau 91,42% dari anggaran sebesar Rp129.970.550,00 karena anggaran dengan menyesuaikan kebutuhan belanja.
- d. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi sebesar Rp198.854.233,895,00 atau 94,32% dari anggaran sebesar Rp210.823.357.609,00 karena alokasi gaji untuk Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tersedia untuk setahun (12 bulan), namun PPPK baru mulai bekerja sejak bulan April 2022.
- e. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp92.692.711,00 atau 87.45% dari anggaran sebesar

- Rp106.000.000,00 karena terdapat sisa dana tiket pesawat, namun seluruh kegiatan telah dilaksanakan.
- f. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp376.516.770,00 atau 75,30% dari anggaran sebesar Rp500.000.000,00 karena terdapat sisa dana dalam proses pengadaan dan distribusi barang tak habis pakai berupa patok tanah dan papan nama.
- g. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp159.922.154,00 atau 89,14% dari anggaran sebesar Rp179.407.600,00 karena efisien anggaran menyesuaikan kebutuhan.
- h. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp154.279.070,00 atau 87,68% dari anggaran sebesar Rp175.952.323,00 karena efisien anggaran meyesuaikan kebutuhan kantor.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp178.209.430,00 atau 74,02% dari anggaran sebesar Rp240.774.674,00 karena efisien anggaran sesuai dengan tagihan yang diterima dari Penyedia Jasa.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp13.835.232,00 atau 69,40% dari anggaran sebesar Rp19.935.400,00 karena pembayaran pajak dilakukan sesuai sejumlah tagihan yang keluar dari kantor SAMSAT setempat dan pembayaran biaya pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang dioperasikan.
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp119.518.093,00 atau 88,74% dari anggaran sebesar Rp134.678.000,00 karena pembayaran pajak dilakukan sesuai sejumlah tagihan yang keluar dari kantor SAMSAT setempat dan pembayaran biaya pemeliharaan sesuai dengan kebutuhan kendaraan yang dioperasikan.
- 1. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp63.727.000,00 atau 81,70% dari anggaran sebesar Rp77.997.900,00 karena terdapat efisiensi sesuai dengan peralatan dan mesin yang mengalami kerusakan.
- m. Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik realisasi sebesar Rp151.202.780,00 atau 94,77% dari anggaran sebesar Rp159.541.780,00 karena menyesuaikan kebutuhan/efiensi biaya perjalanan dinas.
- n. Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar realisasi sebesar Rp22.560.000,00 atau 89,13% dari anggaran sebesar Rp25.310.000,00 karena menyesuaikan kebutuhan /efiensi biaya perjalanan dinas.
- o. Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp22.782.750,00 atau 75,94% dari anggaran sebesar Rp29.999.750,00 karena menyesuaikan kebutuhan /efiensi biaya perjalanan dinas.
- p. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah realisasi sebesar Rp19.380.431,00 atau 64,60% dari anggaran sebesar Rp30.000.000,00 karena terdapat efisiensi anggaran perjalanan dinas/narasumber kegiatan pusat yang berasal dari BPMP Kalteng di Palangka Raya.
- q. Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp27.024.849.771,00 atau 93,96% dari anggaran sebesar Rp28.763.101.304,00 karena realisasi sebesar 93,96% berasal dari Dana BOS Sekolah Dasar Negeri,

- sedangkan sisanya merupakan realisasi Sekolah Dasar Swasta / belanja hibah yang tidak masuk dalam realisasi APBD.
- r. Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar realisasi sebesar Rp95.792.750,00 atau 83,30% dari anggaran sebesar Rp114.999.750,00 karena menyesuaikan kebutuhan /efiensi biaya perjalanan dinas.
- s. Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah realisasi sebesar Rp1.461.821.249,00 atau 93,41% dari anggaran sebesar Rp1.564.880.812,00 karena terdapat kegiatan Pembangunan WC SMP Negeri 9 Arut Selatan yang tidak dapat dilaksanakan, disebabkan kondisi alam/force majeure berupa kondisi lapangan yang terdampak banjir mulai dari bulan september 2022.
- t. Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa realisasi sebesar Rp1.797.152.900,00 atau 80,96% dari anggaran sebesar Rp2.219.900.000,00 karena adanya sisa penawaran pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (IPA, Fisika dan TIK) melalui E-Purchasing.
- u. Kegiatan Penyelengaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik realisasi sebessar Rp54.872.250,00 atau 89,27% dari anggaran sebesar Rp61.470.250,00 karena terdapat efiensi biaya perjalanan dinas.
- v. Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp17.284.850,00 atau 67,69% dari anggaran sebesar Rp25.534.850,00 karena terdapat satu kegiatan di kecamatan Kotawaringin Lama yang tidak terlaksana disebabkan terkendala akses jalan yang terdampak banjir.
- w. Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama realisasi sebesar Rp13.186.300,00 atau 44,85% dari anggaran sebesar Rp29.403.300,00 karena terdapat kegiatan di kecamatan Kotawaringin Lama yang tidak terlaksana disebabkan terkendala akses jalan yang terdampak banjir.
- x. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah realisasi sebesar Rp12.843.000,00 atau 40,19% dari anggaran sebesar Rp31.955.000,00 karena terdapat kegiatan di kecamatan Kotawaringin Lama yang tidak terlaksana disebabkan terkendala akses jalan yang terdampak banjir.
- y. Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD realisasi sebesar Rp45.328.406,00 atau 90,66% dari anggaran sebesar Rp49.999.590,00 karena adanya efisiensi /sisa belanja.
- z. Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD realisasi sebesar Rp25.761.600,00 atau 85,87 % dari anggaran sebesar Rp29.999.600,00 karena adanya efiensi biaya perjalanan dinas.
- aa. Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD realisasi sebesar Rp106.005.411,00 atau 85,63% dari anggaran sebesar Rp123.793.700,00 karena karena adanya efiensi biaya perjalanan dinas
- bb.Kegiatan Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp1.110.230.000,00 atau 77,76% dari anggaran sebesar Rp1.427.850.000,00 karena adanya penyesuaian transfer dana dari pusat ke satuan pendidikan non formal berdasarkan verifikasi warga belajar.
- cc. Kegiatan Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal realisasi sebesar Rp16.923.400,00 atau 84,62% dari anggaran sebesar Rp20.000.000,00 karena efisiensi biaya sewa gedung.

- dd.Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan realisasi sebesar Rp33.015.900,00 atau 82,73% dari anggaran sebesar Rp39.909.900,00 karena adanya efisiensi sesuai kebutuhan belanja.
- ee. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan realisasi sebesar Rp858.031.014,00 atau 90,21% dari anggaran sebesar Rp951.199.850,00 karena terdapat satu belanja pengadaan TV di Anjungan Kotawaringin Barat Taman Mini Indonesia Indah yang tidak dilaksanakan.
- ff. Kegiatan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya realisasi sebesar Rp75.053.000,00 atau 69,36% dari anggaran sebesar Rp108.202.750,00 karena efisiensi belanja.

#### 2. Dinas Kesehatan

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp127.049.576,00 atau 92,36% dari anggaran sebesar Rp137.560.000,00 karena perjalanan dinas luar daerah yang semula direncanakan untuk kegiatan desk dana DAK secara offline tetapi dari pusat ternyata pelaksanaannya melalui daring.
- b. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp109.196.000,00 atau 70,78% dari anggaran sebesar Rp154.279.800,00 karena anggaran tersedia pada anggaran perubahan (Tw 4), perubahan jadwal yang semula 1 tempat menjadi 2 tempat untuk pemasangan patok,
- c. Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai realisasi sebesar Rp9.566.000,00 atau 78,34% dari anggaran sebesar Rp12.198.000,00 karena terjadi kesalahan pengambilan kode rekening kegiatan yang seharusnya anggaran Monev dan kinerja pegawai ke kode sub kegiatan Pengamanan Barang Milik Daera
- d. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp115.878.875,00 atau 93,99% dari anggaran sebesar Rp123.283.200,00 karena merupakan sisa dari kegiatan yang sudah dilaksanakan.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp505.304.696,00 atau 81,07% dari anggaran sebesar Rp623.306.956,00 karena anggaran dinaikkan disesuaikan dengan estimasi kenaikan tarif listrik dan dibayarkan sesuai dengan tagihan.
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan Mesin dan Lainnya realisasi sebesar Rp53.866.886,00 atau 85,99% dari anggaran sebesar Rp62.646.000,00 karena pada awalnya anggaran direncanakan untuk pemeliharaan mesin. Namun, ada pengadaan alat mesin potong rumput yang baru.
- g. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp6.824.443.110,00 atau 90,04% dari anggaran sebesar Rp7.578.954.434,00 karena ada efisiensi negosiasi ongkos kirim.
- h. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Vaksin realisasi sebesar Rp1.363.981.903,00 atau 71,58% dari anggaran sebesar Rp1.905.553.000,00 karena dalam proses pengadaan barang dan jasa penyedia tidak seluruhnya melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak disebabkan kondisi ketersediaan bahan baku dan kondisi stok nasional.
- i. Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan realisasi sebesar Rp86.548.970,00 atau 82,66% dari anggaran sebesar Rp104.707.800,00 karena terdapat efisiensi pada penginapan teknisi

- yang menggunakan tempat penginapan yang masih di bawah harga standar selama delapan hari.
- j. Sub Kegiatan Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Vaksin, Bahan Medis Habis Pakai (BMHP), Makanan dan Minuman ke Puskesmas serta Fasilitas Kesehatan Lainnya realisasi sebesar Rp156.485.500,00 atau 92,59% dari anggaran sebesar Rp169.017.955,00 karena ada belanja alat/bahan untuk kegiatan kantor/kertas dan cover (belanja bahan pengepakan tidak bisa terealisasi 100% karena harga satuan di satuan standar harga pada SIPD terlalu tinggi.
- k. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil realisasi sebesar Rp925.765.380,00 atau 90,99% dari anggaran sebesar Rp1.017.472.310,00 karena untuk transport narasumber dari luar daerah telah direncanakan untuk 3 orang tetapi yang hadir hanya 1 orang, pengiriman Sampel SHK tidak di laksanakan karena Juknis tentang SHK terbit akhir bulan Oktober serta kegiatan orientasi di laksanakan secara Zoom Meeting oleh Kemenkes pada bulan November 2022.
- 1. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir realisasi sebesar Rp60.964.650,00 atau 91,81% dari anggaran sebesar Rp66.399.770,00 karena terdapat efisiensi anggaran sewa Rumah Tunggu Kelahiran, rujukan untuk ibu hamil ke Rumah Sakit rujukan sebagian besar menggunakan BPJS sehingga anggaran untuk transportasi rujukan ibu hamil tidak terserap keseluruhan.
- m. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita realisasi sebesar Rp245.947.000,00 atau 92,35% dari anggaran sebesar Rp266.320.000,00 karena untuk belanja cetak Kohor MTBS tidak terealisasi karena kurang teliti membaca DPA.
- n. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat realisasi sebesar Rp143.485.000,00 atau 92,26% dari anggaran sebesar Rp155.530.000,00 karena terbatasnya sasaran orang dengan gangguan jiwa berat yang ada di wilayah kerja puskesmas.
- o. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis realisasi sebesar Rp26.858.000,00 atau 78,32% dari anggaran sebesar Rp34.291.900,00 karena anggaran dibuat berdasarkan jumlah sasaran sedangkan jumlah sasaran terlalu tinggi sehingga tidak sesuai dengan data riil.
- p. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana realisasi sebesar Rp3.489.808.100,00 atau 81,47% dari anggaran sebesar Rp 4.283.342.500,00 karena pelaksanaan vaksinasi *Covid-19* lebih banyak dilaksanakan di dalam gedung, tidak terdapat kasus KIPI yang memerlukan perlu perawatan intensif serta terjadinya penurunan kasus terkonfirmasi *Covid-19*.
- q. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat realisasi sebesar Rp1.301.753.650,00 atau 92,02% dari anggaran sebesar Rp1.414.578.100,00 karena pada awal tahun 2022 masih kondisi pandemic sehingga kegiatan UKM sebagian tidak dilaksanakan serta beberapa kegiatan tidak terlaksana karena banjir.
- r. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga sebesar Rp136.497.850,00 atau 75,77% dari anggaran sebesar Rp180.149.850,00 karena rangkaian Kegiatan Stunting ada di 1 kecamatan yang dilakukan dengan *Zoom Meeting* karena terdampak banjir.

- s. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan sebesar Rp1.221.244.200,00 atau 89,47% dari anggaran sebesar Rp1.364.982.670,00 karena anggaran dibuat berdasarkan jumlah sasaran sedangkan jumlah sasaran terlalu tinggi.
- t. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan sebesar Rp634.878.000,00 atau 89,29% dari anggaran sebesar Rp711.014.400,00 karena ada beberapa kegiatan di sekolah yang belum sempat terlaksana karena tempat kegiatan terkena musibah banjir.
- u. Sub Kegiatan Pengelolaan Surveilans Kesehatan sebesar Rp142.797.000,00 atau 76,19% dari anggaran sebesar Rp187.416.950,00 karena penyerapan anggaran sesuai dengan kasus yang terjadi di wilayah masing-masing Puskesmas.
- v. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) sebesar Rp4.504.000,00 atau 90,08% dari anggaran sebesar Rp5.000.000,00 karena eifsiensi anggaran.
- w. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA sebesar Rp138.144.000,00 atau 89,20% dari anggaran sebesar Rp154.871.000,00 karena tidak ada kasus.
- x. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus sebesar Rp50.054.000,00 atau 90,55% dari anggaran sebesar Rp55.280.000,00 karena di dalam kegiatan kesehatan khusus ada dua, yang pertama untuk kegiatan haji dan kesehatan indera. Pada kegiatan haji terdapat efisiensi anggaran penginapan sedangkan pada kesehatan indera disebabkan karena bencana banjir sehingga ada dua Puskesmas yang tidak bisa dilakukan monitoring dan evaluasi.
- y. Sub Kegiatan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular sebesar Rp2.845.114.100,00 atau 93,38% dari anggaran sebesar Rp3.046.698.006,00 karena terdapat Puskesmas yang berada di wilayah Kecamatan Arut Utara dan Kecamatan Kotawaringin Lama yang belum dikunjungi untuk dilakukan monitoring dan evaluasi program gangguan indera fungsional dikarenakan akses menuju ke lokasi yang tidak dapat dijangkau pada saat itu (banjir) serta adanya efisiensi anggaran penginapan.
- z. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat sebesar Rp152.713.265,00 atau 94,91% dari anggaran sebesar Rp160.909.100,00 karena kegiatan sudah terlaksana semua dan anggaran yang tersisa merupakan efisiensi dari kegiatan yang sudah terlaksana.
- aa. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Rumah Sakit sebesar Rp2.802.976.057,00 atau 95,43% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 karena untuk harga obat masih diperoleh harga di bawah DPA dan untuk pembayaran internet dimulai dari pertengahan tahun.
- bb.Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas sebesar Rp7.173.162.023,00 atau 92,90% dari anggaran sebesar Rp7.721.341.084,00 karena pembayaran berdasarkan tagihan dari pihak ketiga seperti listrik, air, internet, telepon, serta untuk pembayaran gaji tenaga honorarium.
- cc. Sub Kegiatan Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota sebesar Rp0,00 atau 0,00% dari anggaran sebesar Rp111.420.000,00 karena tidak ada penilaian akreditasi dari komisi akreditasi,
- dd.Sub Kegiatan Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal) sebesar Rp80.670.000,00 atau 66,17% dari

- anggaran sebesar Rp121.905.000,00 karena jumlah anggaran disiapkan sesuai dengan jumlah sasaran tetapi sasaran yang ditetapkan terlalu tinggi.
- ee. Sub Kegiatan Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah sebesar Rp99.808.720 atau 86,56% dari anggaran sebesar Rp115.300.000,00 karena dalam pelaksanaannya mengikuti petunjuk dan ketentuan dari Kementerian Kesehatan yang mengalami perubahan kebijakan atau aturan pelaksanaannya sehingga tidak terlaksana.
- ff. Sub Kegiatan Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan sebesar Rp10.213.000,00 atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp11.899.760,00 karena kesulitan dalam menentukan jadwal tim.
- gg.Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan sebesar Rp9.072.000,00 atau 90,72% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 karena kegiatan lebih banyak dilakukan melalui telekomunikasi.
- hh.Sub Kegiatan Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp9.454.000,00 atau 94,54% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 karena ada anggaran untuk belanja alat tulis kantor yang terlewatkan untuk direalisasikan.
- ii. Sub Kegiatan Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan sebesar Rp64.947.950,00 atau 77,26% dari anggaran sebesar Rp84.069.000,00 karena kegiatan monitorin dan evaluasi tidak dapat dilakukan ke wilayah terdampak banjir karena dalam situasi bencana banjir.
- jj. Sub Kegiatan Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan sebesar Rp15.724.000,00 atau 87,36% dari anggaran sebesar Rp17.999.750,00 karena puskesmas tidak menklaim dana BBM untuk rujukan pasien tidak mampu.
- kk. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) sebesar Rp138.274.000,00 atau 86,76% dari anggaran sebesar Rp159.370.000,00 karena kegiatan dilaksanakan per triwulan yang rencana awal akan dilaksanakan tiap bulan.

# 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp766.989.960,00 atau 87,45% dari anggaran sebesar Rp877.012.360,00 karena belanja direalisasikan berdasarkan tagihan listrik, tagihan telpon dan tagihan air perbulannya, Terdapat Tenaga Kontrak Daerah (TKD) dan Satuan Tugas (Satgas) yang mengundurkan diri sehingga Iuran Jaminan / Asuransi Kesehatan bagi Non ASN (TKD) Belanja tidak dibayarkan.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp75.073.800,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp79.929.200,00 karena Belanja direalisasikan berdasarkan bukti riil tiket pesawat, Bill Hotel dan bukti transportasi darat.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi realisasi sebesar Rp288.437.495,00 atau 85,14% dari anggaran sebesar Rp338.781.320,00 karena pada belanja perjalanan dinas tidak terealisasi sehingga masih banyak sisa dari pagu anggaran
- d. Kegiatan Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi realisasi sebesar Rp131.528.358,00 atau 91,96% dari anggaran

- sebesar Rp143.029.142,00 karena pada belanja perjalanan dinas tidak terealisasi sehingga masih banyak sisa dari pagu anggaran.
- e. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp109.692.000,00 atau 92,61% dari anggaran sebesar Rp118.447.900,00 karena adanya pengganjian tenaga honorer yang tidak 100% terkait dengan ijin dan cuti..
- f. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp155.910.100,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp166.759.900,00 karena adanya penggajian tenaga honorer yang tidak 100% terkait dengan ijin dan cuti.

# 4. Dinas Permukiman dan Perumahan Rakyat

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.924.614.506,00 atau 97,13% dari Rp28.751.085.000,00. ditetapkan yaitu sebesar **Terdapat** target yang belanja/program/kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (kurang dari 95%) yaitu Kegiatan Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian realisasi sebesar Umum di Rp7.186.349.246,00 atau 92,42% dari anggaran sebesar Rp7.775.775.180,00 karena dalam pelaksanaan pekerjaan hujan terus-menerus/cuaca tidak mendukung yang mengakibatkan banjir sehingga pihak ketiga tidak bisa menyelesaikan secara fisik/pekerjaan tidak terlaksana 100% sehingga pembayaran di realisasikan sebesar kemajuan pekerjaan yang tercatat.

# 5. Satuan Polisi Pramong Praja dan Pemadam Kebakaran

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
  - 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
    - Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD realisasi sebesar Rp2.070.000,00 atau 92,57% dari target anggaran sebesar Rp2.250.000,00 karena untuk realisasi belanja transaksi keuangan realisasi sebesar Rp70.000,00 dari Rp250.000,00 atau 28,00% karena di tahun anggaran 2022 cuma mengganti 1 buah buku BG dan 1 buah buku cek.
    - Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun realisasi sebesar Rp29.969.000,00 atau 86,75% dari target anggaran sebesar Rp34.048.000,00 karena Perjalanan Dinas biasa hanya terealisasi sebesar Rp20.750.000 atau 83,13% dari target anggaran sebesar Rp24.960.000,00 karena pada rincian biaya perjalanan dinas ini terdapat biaya PCR yang cukup besar yakni Rp4.400.000,00 dan pada saat konsinyering dilaksanakan sudah tidak mewajibkan PCR dan hanya rapid tes sehingga biaya PCR sebesar Rp4.400.000,00 tidak terealisasi.

# 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan pakaian dinas peserta atribut kelengkapannya realisasi sebesar Rp139.915.500,00 atau 88,16% dari target anggaran sebesar Rp158.700.000,00 karena belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) di DPA SKPD tahun 2022 tersedia anggaran 131 stel pakaian sedangkan terdapat pegawai mutasi dan pensiun sehingga realisasinya hanya 116 stel pakaian sehingga realisasi anggaran tidak tercapai secara optimal.
- Bimbingan Teknis Implementasi dan Perundang Undangan realisasi sebesar Rp63.123.863,00 atau 83,70% dari target anggaran sebesar Rp75.419.024,00

karena ada rencana bimtek yang batal dan adanya terdapat biaya PCR yang tidak terealisasi karena pada saat bimtek dilaksanakan sudah tidak mewajibkan PCR cukup dengan rapid tes saja.

# 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah, Penyediaan jasa surat menyurat terealisasi sebesar Rp392.050,00 atau 44,81% dari target anggaran sebesar Rp875.000,00 karena sebagian besar data dikirim lewat media elektronik seperti WA, Email dan hanya untuk dokumen dokumen yang memerlukan bukti fisik saja yang dikirim lewat layanan pengiriman paket pos.
- Penyediaan jasa komunikasi listrik dan air, terealisasi sebesar Rp53.170.248,00 atau 89,52% dari target anggaran sebesar Rp59.175.320. Belanja telepon teralisasi sebesar Rp9.613.382,00 atau 90,18% dari target anggaran sebesar Rp10.660.000,00 karena pada tahun 2022 sambungan telepon kantor jarang dipergunakan dan sempat terjadi kerusakan pada jaringan telepon kantor. Belanja tagihan listrik terealisasi sebesar Rp35.434.416 atau 88,59% dari target anggaran sebesar Rp40.000.000 karena pada tahun 2022 terdapat beberapa AC yang mengalami kerusakan, terjadi pemadaman aliran listrik. Belanja langganan surat kabar kabar/majalah terealisasi sebesar Rp3.000.000 atau 92,59% dari target anggaran Rp3.240.000 karena sudah sesuai dengan realisasi belanja.
- b. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketertiban umum, Biaya perjalanan dinas realisasi sebesar Rp5.600.000,00 atau sebesar 84,85% dari target anggaran sebesar Rp6.600.000,00 karena jumlah realisasi sudah memenuhi kebutuhan.
- c. Program pencegahan, penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran.
  - 1) Pemadaman dan Pengendalian kebakaran daerah dalam daerah kabupaten/kota
    - Belanja Bahan Bakar dan Pelumas terealisasi sebesar Rp0,00 atau sebesar 0% dari target anggaran sebesar Rp50.000.000,00 karena anggaran BBM ini khusus untuk penanganan Kebakaran hutan dan lahan sedangkan pada tahun 2022 tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan sehingga anggaran ini tidak terealisasi.
    - Belanja jasa tenaga supir terealisasi sebesar Rp64.956.448,00 atau 80,19% dari target sebesar Rp81.000.000,00 karena jumlah realisasi belanja sudah memenuhi kebutuhan yang ada.
    - Pengadaan sarana dan prasana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri, Belanja modal kendaraan bermotor khusus terealisasi sebesar Rp1.870.350.000,00 atau sebesar 81,32% dari target sebesar Rp2.300.000.000,00 karena pada saat proses lelang 2 unit mobil minilog harus ada penyesuaian standar harga yang dikeluarkan oleh pihak penyedia sehingga harga yang tertera di DPA SKPD berubah.

## 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

- a. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor terealisasi sebesar Rp4.637.000,00 atau 90,21% dari anggaran sebesar Rp5.140.243,00 karena pembelian barang sesuai dengan harga dipasaran.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp69.562.466,00 atau 94,83% dari anggaran sebesar Rp73.357.879,00 karena adanya penghematan pemakaian listrik sehingga biaya pembayaran tagihan listrik lebih kecil atau lebih efisien.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar Rp50.413.891,00 atau 76,75% dari anggaran sebesar Rp65.682.500,00 karena pembayaran pajak kendaraan berdasarkan jumlah pertahun dan pemeliharaan kendaraan sesuai dengan kebutuhan perbaikan dalam setahun.
- d. Kegiatan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota sebesar Rp32.459.480,00 atau 57,36% dari anggaran sebesar Rp56.593.376,00 karena kegiatan dilaksanakan selama 2,5 hari dari target selama 3 hari dan honorariuam narasumber disesuaikan dengan harga satuan pejabat eselon III yang disetarakan.
- e. Kegiatan Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp28.425.219,00 atau 3,42% dari anggaran sebesar Rp831.734.380,00. Kegiatan yang terealisasi tersebut berupa belanja perjalanan dinas biasa dan dalam kota. Untuk Belanja Modal Pengawasan Pembangunan Jembatan di 11 (sebelas) Desa yang tidak terserap sebesar Rp763.306.530,00 dikarenakan Belanja Modal Pembangunan Jembatan dilaksanakan pada tahun anggaran 2023 bersumber dari dana Hibah Pemerintah Pusat melalui BNPB dan dana transfer baru diterima pada bulan Desember 2022.
- f. Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp515.778.350,00 atau 39,83% dari anggaran sebesar Rp1.295.106.753,00 karena kecilnya jumlah kejadian Kebakaran Hutan dan Lahan sepanjang tahun 2022, mengakibatkan kecilnya pelaksanaan Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga biaya pelaksanaan Kegiatan Pemadaman Langsung dapat di efisiensi.
- g. Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri sebesar Rp2.749.795.008,00 atau 79,87% dari anggaran sebesar Rp3.442.746.866,00 karena realisasi fisik tercapai secara penuh, hanya saja terjadi efisiensi anggaran pada pengadaan Mobil Pemadam Kebakaran, Peralatan Pemadam Kebakaran, dan Pembangunan Posko Induk Karhutla.
- h. Kegiatan Penyelenggaraan Kerjasama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan antar Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran sebesar Rp34.772.247,00 atau 65,02% dari anggaran sebesar Rp53.479.000,00 karena tidak terlaksananya Kegiatan Supervisi dan Evaluasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait Pelaksanaan Pemadaman Langsung Kebakaran Hutan dan Lahan, sehingga terjadi efisiensi anggaran untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah.
- i. Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat sebesar Rp1.389.298.500,00 atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp1.581.651.254,00 karena kegiatan apel siaga tidak dilaksanakan sehingga belanja-belanja terkait Apel Siaga tidak direalisasikan.

- j. Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran sebesar Rp69.294.450,00 atau 94,28% dari anggaran sebesar Rp73.449.450,00 karena Kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA) Mendawai Seberang dan Raja Seberang yang ditarget pelaksanaannya di 2 (dua) lokasi namun dalam pelaksanaannya dilaksanakan sekaligus dalam 1 (satu) lokasi yaitu di Aula Kantor Kelurahan Mendawai Seberang sehingga terjadi efisiensi anggaran untuk 1 (satu) kegiatan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA).
- k. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak terealisasi dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp25.887.725.530 dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - Pencantuman anggaran dalam DPA BPBD merupakan salah satu syarat penyaluran dana Hibah dari Pemerintah sehingga untuk mendapatkan dana tersebut wajib dianggarkan pada Tahun Anggaran 2022
  - Memperhatikan tanggal penetapan SPPH RR dan persetujuan RKA Penggunaan Hibah RR, yakni Tanggal 6 dan 7 Oktober 2022 dilanjutkan penyusunan perubahan APBD TA.2022 sebagai dasar penetapan DPA BPBD untuk pencantuman anggaran belanja, maka kegiatan tidak dapat dilaksanakan pada TA.2022
  - Alokasi anggaran belanja penggunaan Hibah RR TA.2022 telah dianggarkan kembali dalam APBD TA.2023 untuk dilaksanakan pada Tahun 2023.
  - Pengalokasian anggaran belanja yang bersumber dari Hibah RR TA.2022 dalam Perubahan APBD dan tidak terealisasinya anggaran tersebut serta menganggarkan kembali dalam APBD TA.2023 merupakan kebijakan Pemerintah Daerah untuk mengamankan penyaluran dana Hibah dari Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan bahwa batas waktu pelaksanaan kegiatan adalah 12 bulan sejak Dana diterima RKUD.

# 7. Dinas Sosial

- a. Kegiatan Pengadaan Meubel realisasi sebesar Rp65.556.600 atau 94,62% dari anggaran sebesar Rp69.520.000,00 karena harga penawaran yang diajukan pihak kedua/penyedia untuk pengadaan barang meubel (kursi rapat dan kursi kerja) senilai 65.878.500,00 dan setelah melakukan negoisasi untuk tujuan memaksimalkan efesiensi menjadi senilai Rp65.556.600,00.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dana Listrik realisasi sebesar Rp89.608.613,00 atau 78,12% dari anggaran sebesar Rp114.712.120 karena realisasi sesuai dengan tagihan yang ada.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp60.000.000,00 atau 93,26 dari anggaran sebesar Rp64.334.050 karena kesalahan dalam pengambilan kode rekening belanja.
- d. Sub Kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat, Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.501.166.699,00 atau 92,44% dari anggaran sebesar Rp1.623.982.480,00 karena adanya honor petugas Front Office SLRT, TKSK dan PSM yang mengundurkan diri sampai akhir tahun tidak ada gantinya.
- e. Kegiatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenagan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.023.695.649 atau 90% dari anggaran sebesar Rp1.136.410.710,00 karena adanya efisiensi pada kegiatan bantuan sosial yang diserahkan kepada masyarakat, Tidak ada pengajuan dari Karang

Taruna Kabupaten untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas, kegiatan rapat bulanan dan rapat – rapat koordinasi di tingkat Kecamatan, Belum adanya pemesangan wifi dikarenakan ruang Sekretariat Karang Taruna belum dimanfaatkan dengan optimal dan saat ini masih digunakan sebagai Gudang sembako, adanya pegawai TKD yang mengundurkan diri dan sampai akhir tahun belum ada pengantinya. Serta adanya efisiensi pada belanja modal untuk sekertariat Karang Taruna.

- f. Kegiatan Pengelola Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp105.117,931,00 atau 93% dari anggaran sebesar Rp112.936.150,00 karena kelebihan pada anggaran biaya tiket pesawat dan penginapan.
- g. Sub Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp43.399.650,00 atau 88,66% dari anggaran sebesar Rp48.952.250,00 karena belanja perjalanan dinas dalam kota sosialisasi upaya pengurangan resiko bencana tidak dapat dilaksanakan karena dalam DPA hanya ada biaya transportasi tidak ada biaya uang perjalanan dinas. Penyaluran barang logistik bencana sudah dilaksanakan sudah diajukan SPP/SPM tetapi SP2D tidak keluar.
- h. Kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Kampung Siaga Bencana realisasi sebesar Rp11.590.000,00 atau 88% dari anggaran sebesar Rp13.220.000,00 karena perjalanan dinas dalam kota Wilayah Kecamatan Arut Selatan tidak dapat di SPK kan karena jarak tempuh kurang dari 8 jam (wilayah kota).

# 8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

- a. Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja ikhtisar realisasi kinerja SKPD realisasi sebesar Rp52.054.042,00 atau 94,25% dari anggaran sebesar Rp55.232.250,00 karena sisa anggaran gaji TKD yang tidak terealisasikan disebabkan potongan cuti.
- b. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp80.018.913,00 atau 70,51% dari anggaran sebesar Rp113.471.100,00 karena berdasarkan surat edaran dari PT. PLN perihal kenaikan pembayaran listrik bulan september 2022 sehingga pada saat APBD perubahan ada penambahan anggaran untuk pembayaran listrik sedangkan realisasi menyesuaikan tagihan yang ternyata kenaikan tidak sebesar prediksi surat pt pln dan anggaran untuk zoom meeting tidak terealisasi dikarenakan jarang rapat menggunakan zoom meeting.
- c. Sub kegiatan penyusunan rencana tenaga kerja makro realisasi sebesar Rp43.680.296,00 atau 71,91% dari anggaran sebesar Rp60.742.728,00 karena honorarium tim penyusun RTK makro tidak terealisasi dikarenakan dokumen masih belum selesai tersusun yang harus menyesuaikan dengan renstra 2023-2026 sehingga penyusunan melewati batas akhir penyusunan pada bulan Oktober 2022.
- d. Sub kegiatan koordinasi lintas lembaga dan kerja sama dengan sektor swasta untuk penyediaan instruktur serta sarana dan prasarana lembaga pelatihan kerja realisasi sebesar Rp17.005.465,00 atau 90,09% dari anggaran sebesar Rp18.876.000,00 karena sisa anggaran lumpsum perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap 100% disebabkan transportasi yang digunakan adalah sistem sewa sehingga pengamprahan lumpsum hanya sebesar 80% dari penganggaran. Serta biaya akomodasi Instruktur/Narasumber yang terserap hanya sesuai tagihan.
- e. Sub kegiatan pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta realisasi sebesar Rp10.457.732,00 atau sebesar 90,98% dari anggaran sebesar Rp11.493.960,00 karena sisa anggaran lumpsum perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap 100%

- disebabkan transportasi yang digunakan adalah sistem sewa sehingga pengamprahan lumpsum hanya sebesar 80% dari penganggaran.
- f. Sub kegiatan penyediaan sumber daya perizinan lembaga pelatihan kerja secara terintegrasi realisasi sebesar Rp17.376.840,00 atau 86,88% dari anggaran sebesar Rp19.999.950,00 karena sisa anggaran lumpsum perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap 100% disebabkan transportasi yang digunakan adalah system sewa sehingga pengamprahan lumpsum hanya sebesar 80% dari penganggaran. Serta biaya akomodasi Instruktur/Narasumber yang hanya terserap sesuai tagihan.
- g. Sub kegiatan pengukuran kompetensi dan produktivitas tenaga kerja realisasi sebesar Rp17.550.000,00 atau sebesar 90,32% dari anggaran sebesar Rp19.430.400,00 karena sisa anggaran lumpsum perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap 100% disebabkan transportasi yang digunakan adalah sistem sewa sehingga pengamprahan lumpsum hanya sebesar 80% dari penganggaran. Serta biaya akomodasi Instruktur/Narasumber yang terserap hanya sesuai tagihan.
- h. Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan IMTA yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp18.799.560,00 atau sebesar 93,99% dari anggaran Rp20.000.000,00 karena pada pelaksanaan perjalanan dinas untuk biaya akomodasi berupa biaya penginapan hanya menggunakan lumpsum penginapan sebesar 30% dari standar SBU dan untuk biaya makan dan minum rapat tidak bisa realisasi karena kegiatan rapat tentang sosialisasi retribusi penggunaan TKA tidak dijalankan terkait belum disahkannya Perda tentang Retribusi Penggunaan TKA.
- i. Sub kegiatan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja, dan penutupan perusahaan yang berakibat/berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp11.995.350,00 atau sebesar 93,74% dari anggaran Rp12.797.010,00 karena pada pelaksanaan perjalanan dinas untuk biaya akomodasi berupa biaya penginapan hanya menggunakan lumpsum penginapan sebesar 30% dari standar SBU.
- j. Sub kegiatan identifikasi potensi kawasan transmigrasi realisasi sebesar Rp14.061.500,00 atau sebesar 87,85% dari anggaran Rp16.005.800,00 karena perjalanan dinas ke desa gandis dan desa pandau tidak terlaksana dikarenakan lokasi yang dituju terkendala bencana banjir.
- k. Sub kegiatan penyediaan tanah untuk pembangunan kawasan transmigrasi realisasi sebesar Rp18.816.200,00 atau sebesar 94,81% dari anggaran Rp19.846.000,00 karena sisa anggaran lumpsum perjalanan dinas dalam kota yang tidak terserap 100% disebabkan transportasi yang digunakan adalah sistem sewa sehingga pengamprahan lumpsum hanya sebesar 80% dari penganggaran.
- Sub kegiatan koordinasi dan sinkronisasi kerjasama pembangunan transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp18.666.423,00 atau sebesar 93,74% dari anggaran Rp19.913.850,00 karena pada pelaksanaan perjalanan dinas untuk biaya akomodasi berupa biaya penginapan hanya menggunakan lumpsum penginapan sebesar 30% dari standar SBU.
- m. Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (BLK) realisasi sebesar Rp20.821.957,00 atau sebesar 82,69% dari anggaran Rp25.178.940,00 karena berdasarkan surat edaran dari PT. PLN perihal kenaikan pembayaran listrik tanggal September 2022 pada saat APBD Perubahan ada penambahan anggaran untuk

pembayaran listrik dan anggaran untuk zoom meeting tidak terealisasi dikarenakan sudah jarang penggunaan rapat menggunakan zoom meeting.

# 9. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

- a. Kegiatan administrasi umum perangkat daerah realisasi sebesar Rp226.889.205,00 atau 93,86 % dari anggaran sebesar Rp241.722.961,00 karena pada belanja perjalanan dinas dalam daerah tidak terserap seluruhnya dikarenakan perjalanan musrenbang kecamatan hanya menggunakan surat tugas, serta kegiatan monitoring dan evalauasi program dan kegiatan dilaksanakan bersamaan dengan monev bidang. Pada belanja makan minum rapat tidak terserap maksimal dikarenakan banyak rapat yang melibatkan lintas sector telah tersedia di bidang dengan DAK, kesimpulannya tidak terserap maksimal belanja ini adalah efisiensi anggaran.
- b. Kegiatan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah realisasi sebesar Rp303.107.975,00 atau 87,44% dari anggaran sebesar Rp346.660.761,00 karena efisensi anggaran pada belanja listrik dikarenakan pembayaran listrik disesuaikan dengan tagihan PLN dan ada perintah penghematan penggunaan listrik di SKPD.
- c. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp212.915.412,00 atau 82,10% dari anggaran sebesar Rp259.334.427,00 karena efisensi anggaran pada belanja BBM dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan kendaraan dinas operasional karena anggaran dipergunakan sesuai dengan kebutuhan.
- d. Kegiatan pelembagaan pengarusutamaan gender (PUG) pada lembaga realisasi sebesar Rp39.934.325,00 atau 78,17% dari anggaran sebesar Rp51.085.000,00 karena belanja perjalanan dinas tidak terserap maksimal disebabkan efisiensi pada pembayaran penginapan yang hanya dipergunakan 30% saja.
- e. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp60.832.826,00 atau 78,18% dari anggaran sebesar Rp77.807.600,00 karena tidak terserap maksimal belanja honorarium narasumber, perjalanan dinas dalam daerah untuk uang saku peserta dan makan minum perserta disebabkan pertemuan lintas sektor dilaksanakan bergabung dengan bidang perlindungan anak karena sasaran kegiatannya sama saja sehingga terjadi efisiensi anggaran pada belanja ini.
- f. Kegiatan penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan realisasi sebesar Rp14.969.364,00 atau 27,48% dari anggaran sebesar Rp54.465.000,00 karena tidak maksimal penyerapan pada belanja Medical legal, Gelar kasus, honorarium tenaga ahli, makan minum, biaya penjangkauan dan pendampingan dan uang harian disebabkan belanja tersebut hanya dapat dipergunakan sesuai jumlah penanganan korban perempuan yang ditangani, tahun 2022 hanya 13 kasus yang ditangani.
- g. Kegiatan penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak kewenangan kabupaten realisasi sebesar Rp114.243.569,00 atau 89,03% dari anggaran sebesar Rp128.317.200,00 karena ada efisiensi anggaran pada belanja makan, yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
- h. Kegiatan pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup kabupaten/kota realisasi sebesar Rp97.611.286,00 atau 89,76% dari anggaran sebesar

- Rp108.747.400,00 karena ada efisiensi anggaran pada belanja makan, dan honorarium narasumber yang dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.
- i. Kegiatan penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp81.285.850,00 atau 39,16% dari anggaran sebesar Rp207.579.00,00 karena tidak maksimal penyerapan pada belanja medical legal, gelar kasus, honorarium tenaga ahli, makan minum, biaya penjangkauan dan pendampingan dan uang harian disebabkan belanja tersebut hanya dapat dipergunakan sesuai jumlah penanganan korban anak yang ditangani, tahun 2022 hanya 53 kasus yang ditangani.
- j. Kegiatan pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana sesuai dengan kearifan lokal realisasi sebesar Rp537.195.598,00 atau 91,27% dari anggaran sebesar Rp572.131.200,00 karena penyelenggaraan loka karya mini (lokmin) kegiatannya menjadi tanggung jawab dengan system pembayaran LS dan tidak semua kecamatan mau melaksanakan kegiatan dengan membiayai di awal.
- k. Kegiatan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelaksanaan pelayanan KB di daerah kabupaten/kota realisasi sebesar Rp815.902.990,00 atau 83,73% dari anggaran sebesar Rp974.473.400,00 karena belanja pengiriman dan perjalanan dinas tidak maksimal terserap disebabkan keterlambatan distribusi alokon KB dari Provinsi ke Kabupaten, sehingga tidak tersedia stock alokon KB yang akan didistribusikan ke Faskes dan Jejaringnya, serta sebagian besar faskes mengambil sendiri Alokon ke gudang alokon KB di Kabupaten.
- l. Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesehakteraan Keluarga realisasi sebesar Rp928.082.790,00 atau 55.72% dari anggaran sebesar Rp1.665.560.000,00 karena adapun kendala di permasalahan antara lain sebagai berikut:
  - Klaim pendampingan tpk di mulai setelah kegiatan orientasi terkait tpk di bulan juni 2022 dan pendampingan keluarga mulai pada bulan Agustus (keterlambatan Orientasi Teknis dari Provinsi)
  - Syarat klaim data harus masuk di google form sementara tidak semua Desa mempunyai sinyal/ aplikasi yang baik.
  - Biaya transportasi TPK untuk penyerapan data/lampiran di SPJ pada daerah sulit tidak sebanding dengan dana klaim yang di terima.
  - Penyelenggaraan Loka Karya Mini (Lokmin) kegiatannya menjadi tanggung jawab dengan system pembayaran LS.

# 10.Dinas Ketahanan Pangan

- a. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi keuangan sebesar Rp168.825.883,00 atau 90,12% dari target anggaran sebesar Rp187.332.799,00 karena adanya efisiensi sisa belanja dari pembayaran rutin tagihan Air PDAM,Telpon, dan Listrik yang dibayarkan berdasarkan pemakaian.
- b. Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar Rp13.482.400,00 atau 79,02% dari target anggaran sebesar Rp17.062.000 karena adanya efisiensi belanja:
  - Kegiatan belanja perjalanan dinas biasa, Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan

- kegiatan penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
- Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota, Sehingga hanya terserap 80%.
- c. Koordinasi dan Sikronisasi Penyediaan Infrastrukstur Logistik, realisasi keuangan sebesar Rp16.952.800,00 atau 61,70% dari target anggaran sebesar Rp27.474.000,00 karena adanya efisiensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota, Sehingga hanya terserap 80%.
- d. Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan, realisasi keuangan sebesar Rp60.943.400,00 atau 86,79% dari target anggaran sebesar Rp70.216.000,00 karena adanya efisisensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota. Sehingga hanya terserap 80%.
- e. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Cadangan Pangan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan sebesar Rp4.705.800,00 atau 41,45% dari target anggaran sebesar Rp11.354.000 karena adanya efisiensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam kota tidak di spikan oleh PPTK.
- f. Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi, realisasi keuangan sebesar Rp640.236.220,00 atau 87,62% dari target anggaran sebesar Rp730.677.710,00 karena adanya efisisensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota. Sehingga hanya terserap 80%.

- Honorarium tidak terserap 100% karena beberapa kegiatan memakai NaraSumber dari intern dinas sehingga honorarium tidak diSPJ kan tetapi hanya diinput di EKinerja TPP Pegawai.
- Sisa Belanja Makan Minum Rapat.
- g. Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota, realisasi keuangan sebesar Rp28.276.950,00 atau 94,26% dari target anggaran sebesar Rp30.000.000,00 karena adanya efisiensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota. Sehingga hanya terserap 80%.
  - Sisa realisasi keuangan Honorarium narasumber pelatihan.
- h. Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota, realisasi keuangan sebesar Rp47.394.675,00 atau 85,23% dari target anggaran sebesar Rp55.611.154,00 karena adanya efisisensi belanja:
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Biasa Harga real transport perjalanan tidak sama dengan pagu belanja operasi sehingga hanya terserap 75% dan dalam pelaksanaan kegiatan Penginapan dipotong 30% dikarenakan tidak mengunakan jasa penginapan/hotel, sehingga hanya terserap 30%.
  - Kegiatan Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota, terdapat potongan 80% uang harian dari orang yang melakukan perjalanan dinas dalam kota. Sehingga hanya terserap 80%.
  - Honorarium tidak terserap 100% karena beberapa kegiatan memakai Narasumber dari intern dinas sehingga honorarium tidak diSPJkan tetapi hanya diinput di EKinerja TPP Pegawai.

# 11.Dinas Lingkungan Hidup

- a. Kegiatan bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan realisasi sebesar Rp43.154.912,00 atau 89,27% dari anggaran sebesar Rp48.344.388,00 karena terdapat sisa pagu anggaran perjalanan dinas bimtek dari alokasi biaya tiket pesawat melebihi dari riil harga tiket pesawat yang ada.
- b. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp122.450,00 atau 49,98% dari anggaran sebesar Rp245.000,00 karena penyediaan jasa surat menyurat menyesuaikan dengan keperluan, dan pengiriman surat sebagian besar menggunakan surat elektronik dan aplikasi pesan Whatsapp.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp70.046.318,00 atau 90,27% dari anggaran sebesar Rp77.595.656,00 karena penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik menyesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan atau menyesuaikan tagihan pembayaran yang diterima dari penyedia jasa.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp25.128.061,00 atau 95,62% dari anggaran sebesar Rp26.278.861,00 karena pembayaran pajak kendaraan dinas dan operasional menyesuaikan dengan keperluan/sesuai tagihan.

- e. Kegiatan Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan realisasi sebesar Rp1.210.000,00 atau 4,11% dari anggaran sebesar Rp29.470.000,00 karena sub kegiatan ini direncanakan akan dilakukan penanaman/penyulaman bibit bambu dalam rangka pemeliharaan tanaman bibit bambu di daerah DAS kritis yang telah tertanam pada tahun 2021, tetapi berdasarkan hasil evaluasi dan monitoring di lapangan, lokasi penanaman bibit bambu yaitu di sungai Beguruh dan sungai Rengas Desa Sebuai Kecamatan Kumai tidak cocok sehingga tanaman bibit bambu yang telah tertanam di tahun 2021 sebanyak 1.000 bibit hanya tumbuh 275 bibit, dikarenakan tingkat keasaman tanah di lokasi tersebut sangat tinggi dan kondisi lingkungan sekitar dimana kebiasaan warga sekitar sungai yang membebasliarkan sapi (peliharaan ternak) untuk mencari makan sendiri, sehingga banyak bibit tanaman bambu yang menjadi makanan bagi sapi ternak peliharaan warga sekitar. Sehingga guna efisiensi anggaran kegiatan penyulaman/pembibitan tanaman bambu yang didanai dari dana DBH-DR pada tahun 2022 ini tidak dilaksanakan.
- f. Kegiatan Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) realisasi sebesar Rp5.715.767.779,00 atau 92,45% dari anggaran sebesar Rp6.182.329.598,00 karena adanya sisa kontrak dari pengadaan Mobil Pemeliharaan RTH (Dump Truck) dan pengadaan Mobil Skywalker bersumber dari dan DBH-DR yang relatif besar. Serta adanya alokasi anggaran pembayaran honorarium, iuran jaminan kesehatan, kematian dan kecelakaan kerja supir sebanyak 2 orang yang bersumber dari dana DBH-DR untuk 12 bulan tetapi dikarenakan pengadaan mobil Skywalker dan mobil Dump Truck pengelolaan RTH pengadaan baru selesai di bulan desember sehingga alokasi anggaran untuk supir tidak terealisasi.
- g. Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik realisasi sebesar Rp44.213.746,00 atau 94,39% dari anggaran sebesar Rp46.842.536,00 karena pada perjalanan dinas untuk narasumber sosialisasi dianggarkan biaya penginapan sebanyak 2 malam tetapi pada saat kegiatan narasumber yang bersangkutan tidak menggunakan penginapan tersebut/narasumber tidak bermalam di Pangkalan Bun.
- h. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam Rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan realisasi sebesar Rp11.346.000,00 atau 49,61 % dari anggaran sebesar Rp22.868.500,00 karena adanya keterlambatan dalam pelaksanaan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan dan penghapusan merkuri (RADPPM) Kabupaten. Dimana pelaksanaan kegiatan penyusunan RADPPM Kabupaten menunggu RAD Provinsi telah disahkan terlebih dahulu. Sedangkan penyampaian Rencana Aksi Daerah (RAD) dari provinsi ke kabupaten baru tersampaikan ke kabupaten pada Triwulan IV. Sedangkan tahapan pelaksanaan kegiatan penyusunan RADPPM meliputi rapat pendampingan, pengumpulan data/survei ke lokasi dan selanjutnya pembahasan hasil survei oleh tim teknis dari Dinas Provinsi. Dikarenakan rapat pendampingan penyusunan dan pengumpulan data/survei ke lokasi baru terlaksana di bulan november sehingga untuk pembahasan hasil oleh tim teknis dari Palangka Raya yang seharusnya dilaksanakan di Kotawaringin Barat tidak dapat dilaksanakan dikarenakan waktu yang terbatas.

- i. Kegiatan Pengawasan Usaha dan Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp61.742.000,00 atau 95,97% dari anggaran sebesar Rp48.344.388,00 karena sisa dari pagu belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota dalam rangka Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah. Daerah Kabupaten/Kota ke pelaku usaha/kegiatan di Kecamatan-Kecamatan, pelaksanaan pengawasan dilakukan sesuai target pelaku usaha/kegiatan yang akan diawasi yaitu sebanyak 28 pelaku usaha/kegiatan, pada tahun 2022 ini untuk fisik telah terlaksana 100% dimana sebanyak 28 pelaku usaha/kegiatan yang direncanakan telah diawasi dan terlaksana keseluruhan. Sedangkan untuk SPJ perjalanan dinas dalam kota menyesuaikan total keperluan dari 28 pengawasan yang telah dilaksanakan.
- j. Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebesar Rp77.482.300,00 atau 88,03% dari anggaran sebesar Rp88.016.660,00 karena terdapat sisa pagu anggaran perjalanan dinas biasa dan sisa pagu anggaran sewa bangunan gedung tempat pertemuan untuk kegiatan sosialisasi/pelatihan gerakan PBLHS (Adiwiyata) dimana pagu yang dianggarkan melebihi dari besaran yang di-SPJ atau yang dibutuhkan.
- k. Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp21.212.000,00 atau 87,48% dari anggaran sebesar Rp24.248.500,00 karena belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota belum di-SPJ-kan sampai akhir tahun berjalan sementara fisik kegiatan telah terlaksana 100%.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan Sanksi Administrasi, Penyelesaian Sengketa, dan/atau Penyidikan Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan atau melalui Pengadilan realisasi sebesar Rp62.327.800,00 atau 64,70% dari anggaran sebesar Rp96.337.600,00 karena pelaksanaan sub kegiatan ini menyesuaikan jumlah pengaduan yang masuk dan teregistrasi dari masyarakat/pihak pelaku usaha, karena sifatnya berupa pelayanan.
- m. Kegiatan Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali realisasi sebesar Rp77.309.600,00 atau 95,37% dari anggaran sebesar Rp81.065.720,00 karena kekurangtepatan dalam pemilihan kode rekening Belanja Sewa Hotel seharusnya Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan sehingga tidak dapat di-SPJ-kan, selain itu adanya sisa dari Satuan Biaya Uang Saku Peserta Kegiatan Sosialisasi dimana peserta yang direncanakan hadir sebanyak 100 orang namun ketika pelaksanaan kegiatan peserta yang hadir hanya 80 orang.
- n. Kegiatan Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan realisasi sebesar Rp17.402.300,00 atau 89,78% dari anggaran sebesar Rp19.382.300,00 karena jumlah peserta sosialisasi tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dikarenakan banyak peserta yang tidak hadir sehingga uang saku peserta yang telah dianggarkan banyak tidak terserap.
- o. Kegiatan Perencanaan Pengelolaan TAHURA realisasi sebesar Rp533.854.709,00 atau 88,24% dari anggaran sebesar Rp605.000.000,00 karena adanya perubahan teknis pelaksanaan kegiatan dimana rapat yang semula dilaksanakan di Kabupaten/Daerah berubah pelaksanaannya menjadi di Jakarta, sehingga Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota yang telah teranggarkan tidak terserap/tidak dapat direalisasikan.

## 12.Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran,dan Evaluasi Kinerja Penganggaran Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp16.907.650,00 atau 86,78% dari anggaran sebesar Rp19.483.700,00 karena adanya efisiensi biaya perjalanan dinas dalam rangka penyusunan perencanaan perangkat daerah.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp73.102.118,00 atau 54,69% dari anggaran sebesar Rp73.102.188,00 karena adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan bagi petugas pelayanan adminduk tidak dilaksanakan, serta terbatasnya pelaksanaan kegiatan bimbingan teknis yang diselenggaran institusi luar daerah.
- c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp523.434.857,00 atau 84,20% dari anggaran sebesar Rp621.653.735,00 karena adanya kegiatan perjalanan dinas dalam rangka penyelenggaraan rapat koordinas dan konsultasi keluar daerah tidak terlaksana secara maksimal berhubung terbatasnya pelaksanaan kegiatan dimaksud yang diselenggarakan institusi luar daerah.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa urusan Pemerintahan Daerah ralisasi sebesar Rp318.680.171,00 atau 84,20% dari anggaran sebesar Rp378.476.181,00 karena pengiriman surat maupun laporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil tidak menggunakan jasa pengiriman berupa fisik tapi melalui media elektronik, efisiensi belanja rekening listrik dan kurang terserapnya honorarium tenaga supir karena berhentinya tenaga supir dan tidak ada pengangkatan kembali tenaga supir.
- e. Kegiatan Pelayanan Pendaftaran penduduk realisasi sebesar Rp82.460.500,00 atau 92,67% dari anggaran sebesar Rp88.982.500,00 karena dari besaran anggaran perjalanan dinas yang disediakan untuk biaya transposrtasi dibayarkan secara biaya rill, biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum sebesar 30% karena tidak menggunakan biaya penginapan, dan biaya uang harian perjalanan dinas hanya dibayarkan 80% karena komponen transportasi local sudah terakomodir pada biaya sewa transportasi.
- f. Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil realisasi sebesar Rp43.602.800,00 atau 89,90% dari anggaran sebesar Rp48.499.800,00 karena dari besaran anggaran perjalanan dinas yang disediakan untuk biaya transportasi dibayarkan secara biaya rill, biaya penginapan dibayarkan secara lumpsum sebesar 30% karena tidak menggunakan biaya penginapan, dan biaya uang harian perjalanan dinas hanya dibayarkan 80% karena komponen transportasi local sudah terakomodir pada biaya sewa transportasi.
- g. Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan realisasi sebesar Rp32.345.000,00 atau 78,01% dari anggaran sebesar Rp41.460.000,00 karena besaran anggaran honorarium narasumber yang disediakan dibayarkan 50% sesuai standar biaya umum serta tidak terserapnya biaya perjalanan dinas dalam rangka pemasangan baliho, karena pengalihan pemasangan baliho pada acara Kobar Expo 2022 di Pangkalan Bun Park.
- h. Kegiatan Penyusunan Profil Kependudukan realisasi sebesar Rp525.112.020,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp560.213.092,00 karena adanya efisiensi pengadaan.

## 13.Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp111.404.292,00 atau 92,84% dari anggaran sebesar Rp119.999.750,00 karena Naskah

Akademik Ranperda dan Perbup Pilkades belum selesai atau tidak jadi dilaksanakan sehingga menyebabkan beberapa kegiatan yang sudah dianggarakan Sebagian tidak bisa terealisasi diantaranya penggandaan sebesar Rp1.884.750,00 makan minum rapat Tim Penyusunan NA Ranperda Pilkades sebesar Rp1.760.000,00 dan untuk Honorarium tim penyusun NA Ranperda dan Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh Penjabat Kepala Daerah dianggarkan 2 orang dan tetapi hanya dipertanggungjawabkan untuk 1 orang.

#### 14.Dinas Perhubungan

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp44.613.209,00 atau 45,55% dari anggaran sebesar Rp97.941.700,00 karena adanya surat pembatalan kegiatan Diklat PPNS dari Badan Pengembangan SDM Perhubungan Politeknik Transportasi Darat Indonesia—STTD Nomor UM 006/28/11/PTDI-STTD-2022 Tanggal 08 September 2022 tentang Penyampaian Diklat PPNS yang tidak dapat dilaksanakan.
- b. Kegiatan penyediaan bahan logistik kantor realisasi sebesar Rp510.000,00 atau 60% dari anggaran sebesar Rp850.000,00 karena menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan kantor.
- c. Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat realisasi sebesar Rp0 atau 0% dari anggaran sebesar Rp245.000,00 karena menyesuaikan dengan jumlah kebutuhan kantor.
- d. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp132.653.587,00 atau 72,50% dari anggaran sebesar Rp182.975.264,00 karena menyesuaikan dengan tagihan telepon, internet dan tagihan air kantor
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp229.583.100,00 atau 92,05% dari anggaran sebesar Rp249.417.499,00 karena menyesuaikan dengan kerusakan atau pemeliharaan kendaraan dinas lapangan Dinas Perhubungan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp57.436.800,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp62.386.800,00 karena menyesuaikan dengan pemeliharaan peralatan kantor.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp57.436.800,00 atau 92,07% dari anggaran sebesar Rp62.386.800,00 karena menyesuaikan dengan pemeliharaan peralatan kantor.
- h. Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota sebesar Rp590.859.100,00 atau 75,32% dari anggaran sebesar Rp786.104.894,00 karena adanya satu belanja pengadaan dan pemasangan jaringan listrik tenaga rendah (JTR) Jl. Kobar Mandiri Kelurahan Raja Seberang yang tidak bisa terlaksana.
- i. Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp2.400.000,00 atau 42,11% dari anggaran sebesar Rp5.700.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan perjalanan dinas dengan kebutuhan kegiatan makan dan minum rapat.
- j. Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp1.546.000,00 atau 72,58% dari anggaran sebesar Rp2.130.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan perjalanan dinas.
- k. Kegiatan Fasilitas pemenuhan bersyarat perolehan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek kewenangan kabupaten/kota dalam sistem pelayanan perizinan

- berusaha terintergrasi secara elektronik realisasi sebesar Rp2.760.000,00 atau 62,41% dari anggaran sebesar Rp4.422.500,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan fotocopy dan kebutuhan kegiatan rapat penyelenggaraan angkutan dalam trayek.
- 1. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai realisasi sebesar Rp35.999.147,00 atau 52.57% dari anggaran sebesar Rp68.477.172,00 karena menyesuaikan dengan tagihan listrik, air, telepon dan internet UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai.
- m. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan pada UPT Pelabuhan Penyeberangan Kumai realisasi sebesar Rp40.451.900 atau 94,87% dan anggaran sebesar Rp42.640.660 karena kendaraan masih dalam kondisi baik.
- n. Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik pada UPT Dermaga Inderasari realisasi sebesar Rp18.192.514 atau 54,74% dari anggaran sebesar Rp33.235.632 karena menyesuaikan dengan tagihan listrik, air, telepon dan internet UPT Dermaga Indrasari.

## 15.Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuagan Akhir Tahun SKPD, realisasi sebesar Rp19.950.606,00 atau 79,60% dari anggaran sebesar Rp25.063.050,00 karena sebelumnya direncanakan sebanyak 4 orang yang akan mengikuti konsenyering penyusunan laporan keuangan yang dilaksanakan di luar daerah (Kota Malang) dan hanya diikuti sebanyak 3 orang sehingga tersisa anggaran belanja perjalanan dinas biasa sebesar Rp5.112.444,00 atau 20,60%. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp15.869.614,00 atau 66,01% dari anggaran sebesar Rp24.041.400,00 karena beberapa kendaraan dinas masih dalam kondisi baik.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, realisasi sebesar Rp18.647.239,00 atau 57,06% dari anggaran sebesar Rp32.680.000,00 atau sebesar 33,25% dari pagu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar Rp56.080.000,00 karena anggaran Sub Kegiatan Bimbingan Teknis/Sosialisasi hanya digunakan sebanyak 3 orang yang sebelumnya direncakan untuk 4 orang. Capaian realisasi sub kegiatan ini cukup mempengaruhi capaian realisasi Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terealisasi sebesar Rp42.047.239,00 atau 74,98% dari anggaran sebesar Rp56.080.000,00.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp23.192.960,00 atau 90,88% dari anggaran sebesar Rp25.519.585,00 karena adanya belanja komponen peralatan berupa catridge printer yang cukup mempengaruhi realisasi belanja yaitu sebesar Rp1.898.100,00 atau 7,44% tidak dibelanjakan karena printer yang masih tersedia sudah menggunakan metode infuse yang permanen.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp23.220.744,00 atau 87,12% dari anggaran sebesar Rp26.653.143,00 karena capaian realisasi belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp5.160.000 atau 65,83% dari anggaran sebesar Rp7.837.900,00 serta capaian realisasi Belanja Pemeliharaan Alat

Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Penumpang sebesar Rp1.875.000,00 atau 73,93% dari anggaran sebesar Rp2.536.243,00 sehingga dari 2 (dua) belanja tersebut terdapat sisa anggaran sebesar Rp3.339.143,00 atau 12,53% dari pagu anggaran Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Rp26.653.143,00.Sehingga capaian realisasi Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sebesar 87,12% sangat dipengaruhi oleh realisasi ke 2 (dua) belanja tersebut atas, yang mana kedua belanja ini untuk membiayai pemeliharaan sebanyak 2 kendaraan roda 4 jabatan dan operasional yang kondisinya sudah baik (layak pakai).

- e. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp15.213.000,00 atau 70,07% dari anggaran sebesar Rp21.711.720,00 karena peralatan dan mesin yang direncanakan pemeliharaannya yaitu genset sebanyak 1 unit, AC sebanyak 3 unit, personal computer/notebook sebanyak 7 unit, printer sebanyak 5 unit sampai dengan laporan ini, kondisinya sudah baik (layak pakai).
- f. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas realisasi sebesar Rp19.440.000,00 atau 94,06% dari anggaran sebesar Rp20.668.000,00 karena pada belanja honorarium narasumber terdapat sisa anggaran sebesar Rp500.000,00 atau 16,67% dari anggaran sebesar Rp3.000.000,00 karena narasumber berasal dari instansi yang bersangkutan hanya mendapatkan 50% sesuai dengan standar biaya umum, Serta terdapat anggaran belanja perjalanan dinas biasa (transport) untuk narasumber sebesar Rp616.000,00 atau 28,41% dari anggaran sebesar Rp2.168.000,00.
- g. Sub Kegiatan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp51.043.082,00 atau 85,787% dari anggaran sebesar Rp59.500.000,00 karena pada belanja Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika terdapat sisa anggaran sebesar Rp4.456.918,00 atau 28,75% karena:
  - 1) Pembayaran Domain

Invoice pembayaran perpanjangan nama domain hanya dapat dicetak 1 bulan menjelang masa jatuh tempo yang dilakukan melalui web portal domain.go.id milik kominfo RI. sedangkan pada bulan november dan desember portal tersebut sedang dalam masa maintenance sehingga tidak dapat cetak invoice pembayaran. pembayaran yang tertunda akibat masa maintenance tersebut tidak dikenakan suspend pada domain.

- 2) Sewa VPS
  - Harga sewa VPS menyesuaikan dengan spesifikasinya, sedangkan sisa anggaran yang ada tidak mencukupi untuk upgrade spesifikasi yang lebih tinggi.
- 3) Lisensi Web Sisa anggaran terjadi karena hanya terdapat 1 lisensi yang sesuai dengan platform VPS yang tersedia yang sebelumnya direncanakan 2, sehingga ada 1 lisensi tidak dibelanjakan karena tidak akan bisa dilakukan instalasi atau tidak dapat digunakan.
- 4) Terdapat sisa anggaran dari Belanja Kursus Singkat/Pelatihan sebesar Rp4.000.000,00 atau 9,09% yaitu pelatihan/bimbingan teknis singkat yang diikuti secara online semula direncanakan untuk 8 orang dengan estimasi biaya

Rp5.500.000,00 per orang dengan 2 materi. Namun dalam penawaran oleh penyedia biaya untuk 1 orang peserta dengan 2 materi sebesar Rp5.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp500.000,00 per orang atau Rp4.000.000,00 dari 8 orang peserta yang direncanakan sebelumnya sebesar Rp5.500.000,00.

- h. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral realisasi sebesar Rp29.450.000,00 atau 79,70% dari anggaran sebesar Rp36.950.000,00 karena terdapat sisa anggaran sebesar Rp7.500.000,00 atau 32,26% dari belanja cetak Buku Meta Data. Buku Metadata belum dapat dicetak dikarenakan data-data yang akan dipublis dalam buku meta data tersebut harus mendapat rekomendasi oleh BPS Kabupaten Kobar dan kondisi sampai akhir tahun hanya 2 SKPD (Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan) yang mendapat rekomendasi untuk dapat publis.Sehingga buku Meta Data dengan anggaran sebesar Rp7.500.000,00 belum dapat dicetak.
- i. Sub Kegiatan Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp2.750.000,00 atau 62,50% dari anggaran sebesar Rp4.400.000,00 karena terdapat sisa anggaran sebesar Rp1.650.000,00 atau 37,50% anggaran ini direncakan untuk biaya makan dan minum rapat *Computer Security Incident Response Team* (CSRIT) yang direncanakan 4 kali dan terlaksana sebanyak 2 kali.

# 16.Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

- a. Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi sebesar Rp61.446.000,00 atau 88,90% dari anggaran sebesar Rp69.119.800,00 karena adanya biaya persertifikatan tanah dari Pemda yang digratiskan sehingga tidak terserap.
- b. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya realisasi sebesar Rp82.573.000,00 atau 85,83% dari anggaran sebesar Rp96.200.000,00 karena adanya kebijakan bahwa penggunaan belanja pengadaan pakaian dinas tidak diperkenankan TKD Administrasi Umum Kantor sedangkan petugas keamanan pasar dan kebersihan pasar masih diperbolehkan untuk diadakan.
- c. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp94.748.369,00 atau 71,05% dari anggaran sebesar Rp133.347.000,00 karena dialokasikan untuk keikutsertaan bimtek peningkatan SDM kemitrologian namun pelaksanaannya dilakukan secara online.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp59.500,00 atau 2,98% dari anggaran sebesar Rp1.995.000,00 karena sesuai permintaan dan tidak ada paket yang dikirim.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp261.176.131,00 atau 79,96% dari anggaran sebesar Rp326.625.672,00 karena sesuai dengan kebutuhan.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp224.292.000,00 atau 91,65% dari anggaran sebesar Rp24.474.000,00 karena sesuai dengan kebutuhan.
- g. Kegiatan Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar

- Rp16.216.760,00 atau 81,22% dari anggaran sebesar Rp19.965.760,00 karena untuk laporan monev Koperasi USP (biaya jasa kantor lainnya : fotocopy/penggandaan) dan penjilidan biasa.
- h. Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan realisasi sebesar Rp22.850.000,00 atau 71,02% dari anggaran sebesar Rp32.175.000,00 karena tidak terlaksananya pembentukan asosiasi di Pasar Indra Kencana dikarenakan tidak aktifnya pedagang untuk menjadi pengurus asosiasi.
- i. Kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp242.466.941,00 atau 93,15% dari anggaran sebesar Rp260.288.955,00 karena anggaran perjalanan pasar murah murni, ada perubahan jadwal kegiatan menjadi dialokasikan sebagian untuk penanganan inflasi yang dilaksanakan di Kec. Arsel. Dimana yang seharusnya kegiatan dilakukan dapat dilaksanakan diluar kota tapi dilakukan di Arsel sehingga biaya truk dan perjalanan dinas tidak terserap.
- j. Kegiatan Pameran Dagang Lokal realisasi sebesar Rp119.522.520,00 atau 20,93% dari anggaran sebesar Rp571.105.500,00 karena anggaran antigen yang tidak terpakai karena sudah tidak diperlukan antigen lagi.
- k. Kegiatan Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor realisasi sebesar Rp14.050.000,00 atau 75,54% dari anggaran sebesar Rp18.598.450,00 dikarenakan 2 kali gagal tender, sehingga anggaran dialokasikan untuk dana Silpa.
- Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri Dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp13.836.000,00 atau 92,24% dari anggaran sebesar Rp14.999.700,00 karena efisiensi penggunaan anggaran dan ouput kegiatan sudah tercapai.

## 17.Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Prangkat daerah realisasi sebesar Rp107.638.280,00 atau 86,60% dari anggaran sebesar Rp124.300.717,00 karena di karenakan pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan hanya terealisasi sebesar Rp86.938.280,00 atau 83,92% dari target yang dianggarkan sebesar Rp103.598.440,00 hal ini disebabkan adanya Kegiatan Bimtek tetapi tidak menggunakan Biaya Konstribusi.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp295.581.129,00 atau 89,65% dari anggaran sebesar Rp329.716.774,00 karena adanya Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD terealisasi sebesar Rp161.914.749,00 atau 82,71% dari target anggaran sebesar Rp195.758.263,00 dikarenakan beberapa Kegiataan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD dilaksanakan secara Daring (*Zoom Meeting*).
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah realisasi sebesar Rp251.897.227,00 atau 82,44% dari anggaran sebesar Rp305.540.512,00 karena adanya efisiensi penggunaan Jasa Sumber Daya Listrik/Jasa Komunikasi dan Sumber Daya Air dan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor teralisasi Rp156.470.811,00 atau 92,30% dari anggran sebesar Rp169.527.000,00 dikarenakan Jasa Keamanan Kantor yang mengharuskan mengundurkan diri sementara dikarenakan adanya permasalahan pribadi.
- d. Kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp133.021.688,00

- atau 85,08% dari anggaran sebesar Rp156.350.000,00 untuk belanja makan dan minum rapat kegiatan MPP telah dilaksanakan secara maksimal sehingga tidak diperlukan lagi rapat pembahasan selanjutnya.
- e. Kegiatan Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp247.500.845,00 atau 91,32% dari anggaran sebesar Rp271.024.300,00 dalam hal ini dalam Sub Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota terealisasi sebesar Rp171.224.386,00 atau 88,02% dari yang dianggarakan sebesar Rp194.518.100,00 dikarenakan efisiensi untuk pelaksanaan Perjalanan Dinas Penyelenggaraan Expo Nasional (APKASI).
- f. Kegiatan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp326.085.460,00 atau 76,12% dari anggaran sebesar Rp428.369,200,00 dikarenakan perbedaan Standar Biaya pusat dan Daerah dimana SBU Pusat yang mengatur penggunaan Dana DAK-NF lebih tinggi dibanding SBU Daerah.

## 18.Dinas Kepemudaan dan Olah Raga

- a. Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun Dinas kepemudaan dan olahraga realisasi sebesar Rp56.261.800,00 atau 83% dari anggaran sebesar Rp67.293.720,00 karena disesuaikan dengan kebutuhan.
- b. Kegiatan penyedia jasa komonikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp65.594.931,00 atau 100% dari anggaran sebesar Rp74.582.000,00 karena tagihan listrik dan air dibayarkan melalui GU dan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan kebutuhan.
- c. Kegiatan Peningkatan kapasitas pemuda dan organisasi kepemudaan kabupaten/kota realisasi sebesar Rp447.487.137,00 atau 89,50% dari Anggaran sebesar Rp499.999.540,00 dikarenakan efesiensi dalam kegiatan berkaitan dengan jumlah peserta yang hadir tidak sesuai dengan undangan dan efisiensi dalam perjalanan dinas
- d. Kegiatan pembinaan dan pengembangan atlet berprestasi kabupaten/kota realisasi sebesar Rp2.061.720.175,00 atau 93,61% dari anggaran sebesar Rp2.202.559.076,00 karena dari jumlah cabor prestasi sebanyak 33 cabor yang dibina ada beberapa cabor yang regulasi kejuaraan tidak terlaksana di tingkat daerah atau karena tidak adanya kejuaraan di tingkat daerah cabor tersebut yaitu: IMI, PERSEROSI, PERTINA, PTMSI, PBFI dan FASI karena cabor tersebut hanya melakukan kegiatan latihan biasa dikarenakan tidak adanya kejuaraan yang terjadwal di tingkat kabupaten, provinsi hingga ke tingkat nasional hal tersebut merupakan faktor tidak tercapainya target yang ditentukan.

# 19.Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Kegiatan Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp549.800,00 atau 28,94% dari anggaran sebesar Rp1.899.800,00 karena kegiatan pertemuan atas penyusunan dokumen perencanaan hanya dilakukan bersifat intern (bidang sekretariat).

#### 20.Dinas Perikanan

Realisasi belanja Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.393.793.932,00 atau 98,48% dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp15.630.738.290,00. Terdapat belanja/program/

kegiatan yang mengalami kendala/hambatan dalam mencapai target belanja (kurang dari 95%) antara lain Kegiatan Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota realisasi sebesar Rp58.600.800,00 atau 92,94% dari anggaran sebesar Rp63.050.000,00 karena belanja bahan cetak dan makan minum rapat realisasi menyesuaikan dengan kebutuhan kegiatan.

#### 21. Dinas Pariwisata

- a. Kegiatan Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota realisasi keuangan sebesar Rp185.530.036,00 atau 90,60% dari anggaran sebesar Rp204.789.050,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp19.259.014,00 hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:
  - 1) Program pengembangan ekonomi kreatif melalui pemanfaatan dan perlindungan hak kekayaan intelektual realisasi keuangan sebesar Rp26.919.800,00 atau 86,01% dari anggaran sebesar Rp31.299.800,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp4.380.000,00. Sisa anggaran tersebut merupakan sisa belanja perjalanan dinas dalam kota. Belanja tersebut tidak terserap semuanya karena adanya efisiensi jumlah orang yang melakukan perjalanan dinas, yang semula direncanakan sebanyak 7 orang untuk sekali perjalanan menjadi 4 orang saja.
  - 2) Program pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif realisasi keuangan sebesar Rp279.593.005,00 atau 89,50% dari anggaran sebesar Rp312.382.087,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp32.789.082,00. Sisa anggaran tersebut terdiri dari:
    - Sub Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar realisasi keuangan sebesar Rp26.584.575,00 atau 88,62% dari anggaran sebesar Rp29.999.010,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp3.414.435,00. Sisa anggaran tersebut dikarenakan honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan melebihi Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan sehingga tidak terserap seluruhnya. Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang juga dianggarkan melebihi Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan sehingga tidak terserap seluruhnya.
    - Sub Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata realisasi keuangan sebesar Rp64.030.365,00 atau 91,47% dari anggaran sebesar Rp69.999.400,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp5.969.035,00. Sisa anggaran tersebut dikarenakan Belanja Makanan dan Minuman Rapat tidak terserap seluruhnya karena adanya konfirmasi ketidakhadiran sebagian peserta rapat sehingga panitia mengurangi jumlah porsi makan yang disediakan. Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia dianggarkan melebihi Standar Biaya Umum (SBU) yang telah ditetapkan sehingga tidak terserap seluruhnya. Sebesar Rp2.256.035,00 merupakan sisa dari realisasi Belanja Jasa Tenaga Administrasi, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN dan Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN. Hal tersebut karena adanya libur karena ijin atau sakit. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota karena adanya efisiensi jumlah orang yang

melakukan perjalanan dinas, yang semula direncanakan sebanyak 7 orang untuk sekali perjalanan menjadi 4 orang saja.

3) Sub kegiatan Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif realisasi keuangan sebesar Rp22.343.600,00 atau 74,31% dari anggaran sebesar Rp30.069.000,00. Terdapat sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp7.725.400,00. Sisa anggaran tersebut dikarenakan belanja makanan dan minuman rapat tidak terserap seluruhnya karena adanya konfirmasi ketidakhadiran sebagian peserta rapat sehingga panitia mengurangi jumlah porsi makan yang disediakan. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Anggaran yang tidak terserap sebesar Rp2.130.400,00 merupakan efisiensi biaya yang bersumber dari serapan biaya penginapan. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota tidak terserap seluruhnya karena adanya arahan pimpinan untuk efisiensi kegiatan dimana untuk kegiatan di wilayah kecamatan Kumai yang direncanakan sebanyak 2 kegiatan menjadi 1 kegiatan dan Kegiatan di wilayah Kecamatan Pangkalan Lada dan Pangkalan Banteng yang sedianya direncanakan masing-masing satu kali kegiatan digabungkan menjadi 1 kali kegiatan.

#### 22.Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

- a. Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp5.196.400,00 atau 51,96% dari anggaran sebesar Rp10.000.000,00 karena adanya efisiensi anggaran.
- b. Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp1.674.000,00 atau 83,70% dari anggaran sebesar Rp2.000.000,00 karena adanya Evisiensi Anggaran.
- c. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD realisasi sebesar Rp8.457.650,00 atau 84,58% dari anggaran sebesar Rp9.999.750,00 karena adanya efisiensi anggaran.
- d. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang Undangan realisasi sebesar Rp53.542.797,00 atau 82,08% dari anggaran sebesar Rp65.232.000,00, karena adanya efisiensi anggaran.
- e. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor realisasi sebesar Rp7.362.200,00 atau 73,68% dari anggaran sebesar Rp9.992.506,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- f. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp49.864.688,00 atau 51,33 % dari anggaran sebesar Rp97.145.166,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan realisasi sebesar Rp26.947.700,00 atau 76,20% dari anggaran sebesar Rp35.366.057,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp64.718.955,00 atau 66,72% dari anggaran sebesar Rp97.000.000,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- i. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp29.501.000,00 atau 73,77% dari anggaran sebesar Rp39.990.400,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- j. Kegiatan Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak,Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil realisasi sebesar Rp36.633.752,00 atau 69,60% dari anggaran sebesar Rp55.505.200,00 karena adanya TKD yang keluar di bulan Juli 2022.

- k. Kegiatan Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota lain realisasi sebesar Rp2.457.256.300,00 atau 89,91% dari anggaran sebesar Rp2.732.970.870,00 karena adanya paket pekerjaan yang tidak ada penawarnya.
- Kegiatan Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner realisasi sebesar Rp407.838.496,00 atau 71,04% dari anggaran sebesar Rp574.119.200,00 karena kegiatan yang terkait PMK (Penyakit Mulut dan Kuku) yang tidak dilaksanakan karena status Kabupaten Kotawaringin Barat Zero Case.
- m. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor untuk Rumah Potong Hewan realisasi sebesar Rp7.530.000,00 atau 75,40% dari anggaran sebesar Rp9.986.981,00 karena Menyesuaikan dengan Kebutuhan dinas.
- n. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Untuk rumah potong hewan realisasi sebesar Rp27.869.149,00 atau 79,63% dari anggaran sebesar Rp34.999.672,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.
- o. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik Untuk UPT-Pengembangan Pakan dan Ternak Unggul realisasi sebesar Rp9.409.036,00 atau 40,91% dari anggaran sebesar Rp22.999.325,00 karena menyesuaikan dengan kebutuhan dinas.

### 23. Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat pada Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi sebesar Rp32.832.154,00 atau 84,43% dari anggaran sebesar Rp38.888.200,00 karena honorium pada bulan Januari s/d Februari 2022 yang bersangkutan tenaga kerja daerah (TKD) verifikator melaksanakan cuti melahirkan selama 2 (dua) bulan. Jadi selama dua bulan tersebut gaji, jaminan kesehatan dan JKK JKM tidak dibayarkan.
- b. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp61.560.000,00 atau 89,89% dari anggaran sebesar Rp68.483.000,00. Pada kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, 1 (satu) Sub Kegiatan terealisasi lebih dari 95%, namun 2 Sub Kegiatan dibawah 95% yaitu pada Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp34.426.000,00 atau 86,40% dari anggaran sebesar Rp39.843.000,00 karena tidak terlaksananya perjalanan dinas dalam kota dalam rangka plotting tanah karena tidak ada jawaban/kepastian dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) terkait jadwal pelaksanaan plotting lanjutan pada BPP Pangkalan Banteng, BPP Pangkalan Lada dan Balai Benih Purbasari dan Eks kantor Dinas Perkebunan di Jl. Pakunegara (Kantor BNN saat ini). Pada Sub Kegiatan Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi sebesar Rp22.814.000,00 atau 94,47% dari anggaran sebesar Rp24.150.000,00 karena kegiatan perjalanan dinas monev dan inventarisasi aset ke BPP Kotawaringin Lama yang tidak bisa dilaksanakan yang diakibatkan kondisi jalan menuju lokasi yang tidak memeungkinkan untuk dilalui karena rusak terdampak banjir.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp568.588.444,00 atau 88,78% dari anggaran sebesar Rp640.478.600,00. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, Ketiga-tiganya realisasi dibawah 95% yaitu pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp263.400,00 atau 37,63% dari anggaran sebesar Rp700.000,00 karena proses pengiriman berkas atau arsip pada tahun 2022 cuma beberapa kali. Pada Sub Kegiatan

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp150.857.442,00 atau 81,88% dari anggaran sebesar Rp184.246.000,00 karena ada perubahan data tagihan untuk belanja token listrik dikurangi karena pada tahun sebelumnya tagihan token terlalu besar sehingga dilakukan perhitungan ulang untuk dikurangi untuk belanja token tersebut. Pada Sub Kegiatan yang ke 2 yaitu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp417.467.602,00 atau 81,88% dari anggaran sebesar Rp455.532.600,00 karena TKD jasa Kebersihan salah satunya mengundurkan diri per 1 Mei 2022 sehingga gaji, jaminan kesehatan dan JKK JKM tidak dibayarkan dari Juni s/d Desember 2022.

- d. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp781.321.050 atau 96,99% dari anggaran sebesar Rp805.604.160. Pada Kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan, namun ada 1 (satu) sub kegiatan yang mempunyai realisasi dibawah 95% yaitu sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp49.411.000,00 atau 74,70% dari anggaran sebesar Rp66.143.500,00 karena terdapat belanja pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan yang tertunggak selama 7 tahun lebih kecil dari pagu yang telah dianggarkan disebabkan karena kurang validnya informasi biaya pajak yang tertunggak dari Kantor Samsat Pangkalan Bun pada saat penganggaran sehingga penyerapan anggaran tidak optimal.
- e. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme realisasi sebesar Rp2.932.743.605,00 atau 90,07% dari anggaran sebesar Rp3.255.916.313,00. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, terdapat 2 (dua) sub kegiatan realisasi dibawah 95% yaitu pada Sub Kegiatan Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG hewan/Tanaman realisasi sebesar Rp89.962.641,00 atau 91,90% dari anggaran sebesar Rp97.887.780,00 karena terdapat belanja upah kerja petani untuk penangkaran benih padi di Balai Benih Tanjung Terantang yg tidak diserap, hal ini disebabkan bencana banjir selama musim tanam sehingga tidak dilakukan penanaman selama musim tanamTahun 2022. Sedangkan pada sub kegiatan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan/Tumbuhan realisasi sebesar Rp566.589.903,00 atau 82,92% dari anggaran sebesar Rp683.331.396,00 karena terdapat belanja bahan kimia dan obat-obatan dan upah kerja tidak dilaksanakan karena kondisi kebun induk perkebunan masih terawat sehingga tidak dibelanjakan dan juga belanja perjalanan dinas dalam kota dalam rangka registrasi STDB kelapa sawit tidak diserap secara optimal dikarenakan besarnya anggaran APBD perubahan dan terbatasanya waktu di akhir tahun.
- f. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian realisasi sebesar Rp2.112.291.635,00 atau 92,12% dari anggaran sebesar Rp2.293.067.241,00. Pada Kegiatan ini terdapat 3 (tiga) Sub Kegiatan, hanya pada sub kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta sarana pendukungnya yang dibawah 95% dengan realisasi Rp407.489.304,00 atau 71,22% dari anggaran Rp572.170.560,00 karena penyedia jasa tidak mampu menyelesaikan pekerjaan 100% setelah diberikan kesempatan perpenjangan waktu selama 8 (delapan) hari mengingat telah mendekati akhir tahun sehingga perpanjangan waktu tidak bisa maksimal selama 50 (lima puluh).

g. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian realisasi sebesar Rp641.509.142,00 atau 92,38% dari anggaran sebesar Rp694.445.406,00. Pada kegiatan ini terdapat 4 (empat) Sub Kegiatan. Terdapat 3 sub kegiatan yang dibawah 95% yaitu pada sub kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa realisasi sebesar Rp401.182.209,00 atau 93,49% dari anggaran sebesar Rp429.130.096,00 karena belanja honorarium tenaga profesional pada kegiatan ini tidak memenuhi kriteria di dalam syarat pertanggungjawaban sehingga tidak bias dispjkan dan juga pertemuan di 2 (dua) Desa tidak dilaksanakan karena lokasi tidak bias dijangkau dengan biaya transportasi yang tersedia. Pada sub kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa realisasi sebesar Rp74.431.876,00 atau 87,31% dari anggaran sebesar Rp85.254.090,00 karena rapat persiapan PEDA dan PENAS termasuk anggaran perubahan dan sebagian rapat terlaksana di batas akhir SPJ tangggal 20 Desember 2022 sehingga tidak bisa diserap. Sedangka pada sub kegiatan yang ke-3 yaitu sub kegiatan Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian karena belanja makan dan minum rapat pada acara Farm Field Day tidap dapat terserap karena proses panen dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2022 sehingga biaya makan dan minum tidak bisa diserap.

#### 24. Sekretariat Daerah

- a. Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD realisasi sebesar Rp313.087.500,00 atau 93,25% dari anggaran sebesar Rp335.744.000,00 karena terdapat belanja untuk pembayaran gaji TKD yang tidak terealisasi akibat perhitungannya berdasarkan tingkat kehadiran.
- b. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp37.843.792,00 atau 92,96 % dari anggaran sebesar Rp40.710.000,00 karena ada 1 aset yang tidak terasuransikan akibat alih fungsi bangunan rumah tinggal menjadi kantor (Rumdin Jabatan Sekda dipinjampakaikan menjadi Kantor Imigrasi).
- c. Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD realisasi sebesar Rp10.951.250,00 atau 60,68% dari anggaran sebesar Rp18.048.700,00 karena kegiatan perjalanan dinas untuk pengecekan lokasi dan pengukuran telah di bayarkan oleh bidang asset BPKAD.
- d. Kegiatan Penyediaan Logistik Kantor realisasi sebesar Rp7.425.000,00 atau 79,07% dari anggaran sebesar Rp9.390.000,00 karena tidak ada pemakaian tabung APAR untuk kondisi darutat atau musibah, sehingga Pengisian tabung APAR tidak terealisasi.
- e. Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu realisasi sebesar Rp254.674.500,00 atau 89,81% dari anggaran Rp283.585.000,00 karena menyesuaikan dengan kegiatan pimpinan dan jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp3.985.000,00 atau 66,58% dari anggaran sebesar Rp5.985.000,00 karena pengiriman surat menyurat banyak dialihkan menggunakan email.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp3.952.622.444,00 atau 90,96% dari anggaran sebesar Rp4.345.432.049,00 karena pengunaannya menyesuaikan dengan tagihan listrik air dan internet.
- h. Kegiatan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor realisasi sebesar Rp284.931.000,00 atau 92,87% dari anggaran sebesar Rp306.800.000,00 karena

- menyesuaikan kegiatan kabupaten untuk acara yang melibatkan tamu daerah serta masyarakat.
- i. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp2.008.792.662,00 atau 93,93% dari anggaran sebesar Rp2.138.571.400,00 karena terdapat belanja jasa tenaga administrasi yang tidak mencapai target akibat pembayarannya menyesuaikan tingkat kehadiran tenaga kontrak daerah dan adanya sanksi pemotongan akibat keterlambatan.
- j. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas jabatan realisasi sebesar Rp183.062.061,00 atau 66,46% dari anggaran sebesar Rp275.463.053,00 karena Pemeliharaan dan penyediaan BBM mobil Jabatan Bupati dan Wakil Bupati hanya terealisasi sebanyak 2 unit, hal ini terkait dengan masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati yang berakhir pada Bulan Mei 2022.
- k. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp239.302.000,00 atau 53,77% dari anggaran sebesar Rp445.045.365,00 karena Pemeliharaan dan Penyediaan BBM mobil operasional dan pemeliharaan kendaraan dinas bersifat konsumtif dan kondisional sesuai dengan keperluan dan kondisi kerusakan ringan atau berat sehingga keperluan BBM maupun pemeliharaan harus tetap teranggarkan untuk antisipasi kebutuhan pemeliharaan yang bersifat berat.
- 1. Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp149.397.000,00 atau 80,81% dari anggaran sebesar Rp184.882.654,00 karena Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya bersifat kondisional, apabila unit barang tersebut dalam kondisi baik maka tidak dilakukan pemeliharaan, sedangkan biaya pemeliharaannya harus tetap dianggarkan karena untuk antisipasi kerusakan unit barang.
- m. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp857.373.120,00 atau 85,96% dari anggaran sebesar Rp997.357.163,00 karena perencanaan untuk penambahan daya listrik di lingkungan kantor tidak bisa terealisasi akibat travo dari PLN tidak tersedia.
- n. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp49.839.000,00 atau 76,68% dari anggaran sebesar Rp64.999.968,00 karena Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya bersifat kondisional sesuai kebutuhan.
- o. Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah realisasi sebesar Rp74.603.850,00 atau 68,00% dari anggaran sebesar Rp109.707.000,00 karena sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah per Mei 2022 dan tidak adanya pembayaran Tunjangan Jabatan Penjabat Kepala Daerah.
- p. Kegiatan Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah realisasi sebesar Rp0,00 atau 0% karena pada tahun 2022 tidak ada pengajuan *medical check up* Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah.
- q. Kegiatan Fasilitasi Keprotokolan realisasi sebesar Rp594.923.042,00 atau 68,00% dari anggaran sebesar Rp699.248.686,00 karena menyesuaikan agenda pimpinan untuk perjalanan dinas dalam dan luar daerah.

- r. Kegiatan Penataan Administrasi Pemerintahaan realisasi sebesar Rp41.041.792,00 atau 92,60% dari anggaran sebesar Rp44.319.650,00 karena menyesuaikan pengajuan riil cost perjalanan dinas.
- s. Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual realisasi sebesar Rp3.224.859.363,00 atau 94,36% dari anggaran sebesar Rp3.417.718.450,00 karena tidak ada pelaksanaan kegiatan sebelum dan setelah penyelenggaraan ibadah haji dari provinsi sehingga perjalanan dinas untuk kegiatan tersebut tidak terealisasi, selain itu pada saat pengantaran/penjemputan tim patwal dan beberapa pejabat berhalangan karena mengikuti acara pimpinan, dan anggaran untuk belanja sewa mobil hanya sebagian terealisasi akibat pejabat yang mendampingi ada yang menggunakan mobil dinas.
- t. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial realisasi sebesar Rp55.488.500,00 atau 92,48% dari anggaran sebesar Rp59.999.900,00 karena menyesuaikan pengajuan riil cost perjalanan dinas.
- u. Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat realisasi sebesar Rp2.491.329.450,00 atau 96,79% dari anggaran sebesar Rp2.573.956.750,00 karena terdapat 2 lembaga yang tidak mengajukan permohonan pencairan hibah hingga batas waktu yang ditentukan.
- v. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan realisasi sebesar Rp49.268.100,00 atau 12,32% dari anggaran sebesar Rp399.999.450,00 karena saat pemilihan penyedia terdapat gagal lelang karena peserta yang lulus pembuktian kualifikasi kurang dari 3 sehingga prakualifikasi dinyatakan gagal.
- w. Kegiatan Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp265.062.100,00 atau 87,00% dari anggaran sebesar Rp304.674.800,00 karena terdapat belanja Honorarium Pokja Pemilihan tidak terealisasi dikarenakan adanya pembatalan tender/tender gagal.
- x. Kegiatan Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik realisasi sebesar Rp54.391.991,00 atau 72,52% dari anggaran sebesar Rp74.999.500,00 karena menyesuaikan pengajuan riil cost perjalanan dinas dan terdapat belanja gaji tenaga operator komputer yang tidak terserap akibat pembayarannya menyesuaikan tingkat kehadiran.
- y. Kegiatan Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa realisasi sebesar Rp137.982.404,00 atau 79,03% dari anggaran sebesar Rp174.599.750,00 Pengalihan kegiatan dari luring menjadi daring dan penggunaan narasumber internal.
- z. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan realisasi sebesar Rp57.107.005,00 atau 89,30% dari anggaran sebesar Rp63.949.950,00 karena terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terlaksana pada bulan oktober saat terjadi banjir.
- aa. Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup realisasi sebesar Rp44.031.130,00 atau 73,39% dari anggaran sebesar Rp59.999.800,00 karena terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terlaksana pada bulan oktober saat terjadi banjir.
- bb.Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air realisasi sebesar Rp32.778.150,00 atau 68,57% dari anggaran sebesar Rp47.799.550,00 karena terdapat belanja perjalanan dinas yang tidak terlaksana pada bulan Oktober saat terjadi banjir.

#### 25.Inspektorat Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp7.284.600,00 atau 53,57% dari anggaran sebesar Rp13.599.000,00 karena Sebagian besar Dokumen DPA-SKPD dan Dokumen RKA-SKPD ada yang disampaikan dalam bentuk *softcopy* dan sebagian dokumen juga dicetak dan digandakan dengan menggunakan printer.
- b. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah realisasi Rp519.226.577,00 atau 90,31% dari anggaran sebesar Rp574.951.680,00 karena sebagian peserta Diklat atau Bimtek yang sudah mendaftar di BPKP tidak mendapatkan pemanggilan.
- c. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal realisasi sebesar Rp77.317.523,00 atau 80,84% dari anggaran sebesar Rp957.826.750,00 karena pada saat pelaksanaan kegiatan ada penugasan lain pada beberapa anggota Tim dan untuk pelaksanaan kegiatan pemantauan TLHP dan kegiatan rapat yang disebabkan penugasan, pengawasan sesuai PKPT juga karena adanya kegiatan pengawasan mandatori diluar PKPT.

### 26.Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

- a. Program koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah, kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan realisasi sebesar Rp69.251.528,00 atau 81,46% dari anggaran sebesar Rp373.591.400,00:
  - 1) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realisasi sebesar Rp66.046.529,00 atau 97,61% dari anggaran sebesar Rp67.664.050,00 karena keterbatasan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban, sementara di akhir tahun 2022 masih melaksanakan rapat dengan mitra kerja bidang sarpras, agenda rapat padat di akhir tahun namun sudah tidak bisa dibayarkan sehingga anggaran tidak terserap.
  - 2) Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur realisasi sebesar Rp17.900.100,00 atau 67,74% dari anggaran sebesar Rp26.425.100,00 karena keterbatasan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban, sementara di akhir tahun 2022 masih melaksanakan rapat dengan mitra kerja bidang sarpras, agenda rapat padat di akhir tahun namun sudah tidak bisa dibayarkan sehingga anggaran tidak terserap.
  - 3) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur realisasi sebesar Rp10.781.850,00 atau 59,55% dari anggaran sebesar Rp18.105.850,00, karena padatnya jadwal rapat internal dan eksternal baik secara ofline maupun online (*zoom meeting*) sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan monitoring turun kelapangan, agenda rapat padat diakhir tahun yg mana tidak bisa di SPJ kan mengakibatkan anggaran tidak terserap.
  - 4) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur realisasi sebesar Rp125.505.603,00 atau 81,26% dari anggaran sebesar Rp154.445.750,00, karena tidak terserapnya honorarium narasumber karena tidak mendatangkan narasumber untuk menghadiri acara Rapat penyusunan dokumen SSK secara *ofline*, agenda rapat padat di akhir tahun yg mana tidak bisa di SPJ kan mengakibatkan anggaran tidak terserap.

- 5) Sub Kegiatan Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD) realisasi sebesar Rp29.707.850,00 atau 82,74% dari anggaran sebesar Rp35.905.950,00 karena keterbatasan waktu didalam melakukan pengSPJan sementara di akhir tahun 2022 masih melaksanakan rapat dengan mitra kerja bidang sarpras.
- 6) Sub Kegiatan Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan realisasi sebesar Rp9.800.000,00 atau 75,04% dari anggaran sebesar Rp13.060.150,00, karena padatnya jadwal rapat internal dan eksternal baik secara ofline maupun online (*zoom meeting*) sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan monitoring turun ke lapangan, agenda rapat padat di akhir tahun yg mana tidak bisa di SPJ kan mengakibatkan anggaran tidak terserap.
- 7) Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan realisasi sebesar Rp13.558.000,00 atau 74,01% dari anggaran sebesar Rp18.320.000,00, karena padatnya jadwal rapat internal dan eksternal baik secara ofline maupun online (*zoom meeting*) sehingga tidak bisa melaksanakan kegiatan monitoring turun kelapangan, agenda rapat padat diakhir tahun yg mana tidak bisa di SPJ kan mengakibatkan anggaran tidak terserap.
- 8) Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan realisasi sebesar Rp31.039.940,00 atau 78,26% dari anggaran sebesar Rp39.664.500,00, karena keterbatasan waktu dalam melakukan pertanggungjawaban, sementara di akhir tahun 2022 masih melaksanakan rapat dengan mitra kerja bidang sarpras, agenda rapat padat di akhir tahun namun sudah tidak bisa dibayarkan sehingga anggaran tidak terserap.

#### 27.Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

- a. Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp14.804.060,00 atau 53,24% dari anggaran sebesar Rp27.805.500,00 karena kegiatan Bimbingan Teknis proses Bisnis dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta yang rencananya diikuti oleh 2 (dua) orang melalui belanja perjalanan dinas tidak dilaksanakan.
- b. Kegiatan Penyusunan Standar Harga realisasi sebesar Rp.24.573.900,00 atau 86,22% dari anggaran sebesar Rp28.500.000,00 karena pagu anggaran yang disediakan untuk *fotocopy*/cetak adalah 3 (tiga) standar yaitu standar harga murni Tahun Anggaran 2023, standar harga perubahan Tahun Anggaran 2022 dan standar harga penyesuaian akun pada SIPD seperti tahun sebelumnya(Tahun Anggaran 2022). Namun untuk tahun anggaran 2022 yang terserap hanya untuk standar harga murni tahun anggaran 2023 dan standar harga perubahan tahun anggaran 2022, sedangkan standar harga penyesuaian SIPD tidak dilaksanakan karena tidak diperlukan sehingga terdapat sisa dana *fotocopy*/cetak untuk standar harga penyesuaian dalam SIPD.
- c. Kegiatan Inventarisasi Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp8.640.000,00 atau 38,08% dari anggaran sebesar Rp22.686.900,00 karena sampai tahun anggaran berakhir permohonan pensertifikatan tanah ex. Balai Benih Dinas Pertanian Dan Peternakan yang menjadi antara Pemerintah Daerah dengan masyarakat belum dapat dilaksanakan karena menunggu petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pagu anggaran tidak terserap.

- d. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah realisasi sebesar Rp280.450.059,00 atau 74,98% dari anggaran sebesar Rp374.036.250,00 karena pagu anggaran disiapkan untuk kegiatan pensertifikatan tanah pemda,namun pada tahun anggaran 2022 terdapat aturan baru dari Badan Pertanahan Nasional bahwa untuk tanah pemerintah tidak membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sehingga anggaran tersebut tidak terserap. Demikian juga pagu anggaran yang direncanakan untuk pengamanan tanah ex. Balai Benih Dinas Pertanian dan Peternakan apabila dilakukan pengukuran untuk pensertifikatan namun sampai dengan tahun anggaran berakhir kegiatan tersebut tidak dilaksanakan karena menunggu petunjuk dari Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah sehingga pagu anggaran tidak terserap.
- e. Kegiatan Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD realisasi sebesar Rp64.700.000,00 atau 87,14% dari anggaran sebesar Rp74.250.000,00 karena pada tahun 2023 jumlah bidang Dana Alokasi Khusus (DAK) yang diterima kabupaten kotawaringin barat dibawah proyeksi sehingga kegiatan verifikasi dibawah dari alokasi anggaran yang disediakan.

## 28.Badan Pendapatan Daerah

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp14.560.000,00 atau 86,59% dari anggaran sebesar Rp16.815.000,00 karena Efisiensi Anggaran (untuk belanja perjalanan dinas tidak menggunakan anggaran yang tersedia)
- b. Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD realisasi sebesar Rp990.192,00 atau 79,22% dari anggaran sebesar Rp1.1250.000,00 karena perhitungan Premi dari Objek Pertanggungan yaitu bangunan kantor Bapenda dan Ruang arsip tidak mengalami kenaikan sehingga terdapat efisiensi dana.
- c. Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp18.622.783,00 atau 74,49% dari anggaran sebesar Rp25.000.000,00 karena pertimbangan pimpinan pembelian motor dinas yang lebih Simpel dan efisien dalam penggunaan.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat realisasi sebesar Rp165.000,00 atau 15,71% dari anggaran sebesar Rp1.050.000,00 karena dokumen surat sebagian besar di kirim lewat email dan WA.
- e. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp216.084.294,00 atau 92, 65% dari anggaran sebesar Rp233.235.549,00 karena Anggaran untuk belanja listrik di siapkan berdasarkan peraturan Menteri Energi dan sumber Daya Mineral No. 28 tahun 2016 sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 3 Tahun 2020 tentang tarif tenaga Listrik yang telah di Prediksi untuk masing masing SKPD. Periode Juli s/d Desember 2022 sesuai Golongan tarif P1/6.600VA s.d 200KVA dan tagihan Pemakainan PLN di bawah nilai yang telah dianggarkan
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor realisasi sebesar Rp222.842.442,00 atau 94,17% dari anggaran sebesar Rp236.636.400,00 karena ada satu orang tenaga Kontrak yang cuti melahirkan sehingga anggaran tidak terserap.
- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp18.559.300,00 atau 80,71% dari anggaran sebesar Rp22.994.720,00 karena Pembelian BBM di sesuaikan dengan kebutuhan.

- h. Kegiatan Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah realisai sebesar Rp379.167.022 atau 85% dari anggaran sebesar Rp446.065.900,00 karena adanya perubahan /pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan penyerapan keuangan kurang maksimal.
- i. Kegiatan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp93.294.035,00 atau 86,53% dari anggaran sebesar Rp107.811.035,00 karena Pelaksanaan penyuluhan menyesuaikan jadwal wajib pajak dan kondisi personil yang terbatas menyebabkan lebil dari satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- j. Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah realisasi sebesar Rp460.091.500,00 atau 53,21% dari anggaran sebesar Rp864.609.965,00 karena pekerjaan jasa Konsultansi Kajian Potensi Pajak Daerah Kab. Ktw. Barat tahun 2022 sebesar Rp400.000.000,00 tidak dilaksanakan yaitu lelang gagal, sesuai Surat dari Sekretariat Daerah An. Pokja Pemilihan PBJ Pemkab KOBAR dengan Nomor Surat: 9/127.1/POKMIL-PBJ/2022 tanggal 31 Oktober 2022.
- k. Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasi sebesar Rp22.621.750,00 atau 94,26% dari Anggaran sebesar Rp23.999.800,00 karena telah dilaksanakan kegiatan kegiatan sesuai dengan permintaan penilaian kembali BPHTB dan tidak semua Permintaan Penilaian dilaksanakan pengecekan lapangan.
- 1. Kegiatan Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp122.072.590,00 atau 76,95% dari Anggaran sebesar Rp158.636.700,00 karena tidak semua permohonan keberatan pajak daerah dilakukan pemeriksaan lapangan, adakalanya terhadap permohonan keberatan pajak daerah dari wajib pajak dalam penyelesaiannya cukup dengan dilakukan pemeriksaan kantor, pelaksanaan pemeriksaan lapangan dilakukan jika masih terhadap keraguan ataupun perlu dilakukan konfirmasi ke lokasi objek pajak, baik ke kantor desa/Kelurahan maupun kediaman wajib pajak.
- m. Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah realisasi sebesar Rp50.796.000,00 atau 87,84% dari anggaran sebesar Rp57.830.000,00 karena kondisi lapangan yang terjadi bencana alam/banjir menyebabkan monitoring tidak dapat dilaksanakan di beberapa lokasi dan kondisi personil yang terbatas menyebabkan lebih dari satu kegiatan tidak dapat dilaksanakan secara bersamaan.
- n. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah realisasi sebesar Rp6.300.000,00 atau 88,86% dari anggaran sebesar Rp7.090.000,00 karena perubahan besaran pajak menyebabkan adanya perubahan/pergeseran jadwal pelaksanaan kegiatan yang menyebabkan penyerapan keuangan kurang maksimal.

## 29. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan

- a. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp60.751.799,00 atau 79,22% dari anggaran sebesar Rp76.692.000,00 karena Rencana Kegiatan Bimtek Evaluasi dan Pelaporan yang dianggarkan untuk Pengiriman Peserta sebanyak 3 (Tiga) orang, hanya terealisasi sebanyak 2 (dua) orang dikarenakan Pelaksanaan Bimtek berbarengan dengan rangkaian kegiatan HUT Kobar.
- b. Administrasi Umum Perangkat Daerah pada Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp140.209.281,00 atau 85,77%

- dari anggaran sebesar Rp163.472.000,00 karena Kegiatan Rapat Koordinasi dilaksanakan sesuai dengan undangan dari Kemendagri, Kemenpan, BKN ataupun BKPSDM.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat anggaran terealisasi sebesar Rp1.309.450,00 atau 93,53% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.400.000,00 dikarenakan untuk pengiriman surat lebih banyak dilakukan via *e-mail* dan *whatshapp*.
- d. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah pada Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp102.960.841,00 atau 94.75% dari anggaran sebesar Rp108.662.083,00 karena adanya perubahan rekanan untuk belanja internet yang semula menggunakan Telkom berubah ke SBTV sehingga ada penghematan untuk pembayaran jasa Internet.
- e. Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN pada Sub Kegiatan Kegiatan Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN realisasi sebesar Rp103.233.309,00 atau 74.58% dari anggaran sebesar Rp138.414.250,00 karena Pelaksanaan Seleksi PPPK mengalami perubahan Pola Seleksi menggunakan seleksi Kompetensi berbasis UNBK, sehingga tidak melibatkan kepanitiaan yang besar. Selain itu jumlah pelamar yang mengikuti seleksi Pengadakaan PPPK Kesehatan tidak sebanyak tahun sebelumnya.Karena adanya pembatasan syarat pelamar yang dapat mengikuti seleksi. Untuk seleksi pengadaan PPPK teknis tidak selesai terlaksana karena penjadwalan dari panitia seleksi (Panselnas) mundur, sehingga rangkaian seleksi dilanjutkan di tahun 2023.
- f. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN realisasi sebesar Rp492.747.435,00 atau 92.95% dari anggaran sebesar Rp530.129.000,00 karena Rincian biaya hidup dan operasional serta bantuan uang buku pembayarannya menyesuaikan dengan penetapan SK Tugas Belajar yaitu TMT masuk perkuliahan. Untuk bantuan biaya wisuda tidak dapat terserap secara maksimal dikarenakan tidak ada pembayaran/iuran yang dipungut oleh Perguruan Tinggi.
- g. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai realisasi sebesar Rp27.666.260,00 atau 92,22% dari anggaran sebesar Rp29.999.800,00 karena Pengurusan Karpeg sudah dilaksanakan melalui Aplikasi sehingga perjalanan dinas untuk pelaksanaan kegiatan tersebut tidak dilaksanakan.
- h. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur pada Sub Kegiatan Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai realisasi sebesar Rp2.628.850,00 atau 89,76% dari anggaran sebesar Rp2.928.850,00 karena untuk Penasehat Perceraian/Mediasi Perceraian ASN saat ini diambil alih oleh Kemenag sehingga belanja makan dan minum untuk kegiatan rapat tersebut tidak terealisasi sebesar Rp300.000,00.

#### 30.Sekretariat DPRD

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp14.560.000,00 atau 86,59% dari anggaran sebesar Rp16.815.000,00 karena Efisiensi Anggaran (untuk belanja perjalanan dinas tidak menggunakan anggaran yang tersedia).

- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah realisasi sebesar Rp2.785.647.247,00 atau 94,81% dari anggaran sebesar Rp2.938.116.833,00 karena efisiensi anggaran.
- c. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah realisasi sebesar Rp834.286.315,00 atau 93,73% dari anggaran sebesar Rp890.086.245,00 karena efisiensi anggaran.
- d. Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD realisasi sebesar Rp287.239.540,00 atau 41,13% dari anggaran sebesar Rp.698.327.400,00 karena efisiensi anggaran dengan melakukan pemadatan kegiatan rapat-rapat.
- e. Kegiatan Pembahasan Kebijakan Anggaran realisasi sebesar Rp222.352.450,00 atau 92,34% dari anggaran sebesar Rp240.799.800,00 karena efisiensi anggaran.
- f. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan realisasi sebesar Rp100.819.000,00 atau 92,58% dari anggaran sebesar Rp108.899.900,00 karena efisiensi anggaran.
- g. Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD realisasi sebesar Rp.7.368.310.897,00 atau 88,13% dari anggaran sebesar Rp8.361.151.620,00 karena tidak semua anggota DPRD hadir mengikuti Bimtek yang dijadwalkan karena berbenturan dengan kegiatan partai dan terdapat 2 media yang tidak memenuhi target melaksanakan publikasi.
- h. Kegiatan Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat realisasi sebesar Rp487.657.276,00 atau 70,65% dari anggaran sebesar Rp690.205.000,00 karena efisiensi anggaran dan kegiatan monitoring disesuaikan kebutuhan.

#### 31. Kecamatan Kumai

- a. Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa realisasi sebesar Rp19.926.000 atau 78,98% dari anggaran sebesar Rp25.228.000,00 karena ada kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota di beberapa desa tidak bisa dilaksanakan karena situasi cuaca buruk/tidak mendukung terkaid transportasi laut seperti Desa Sungai Sekonyer, Desa Sungai Cabang dan Desa Teluk Pulai sehingga anggaran tidak terserap sepenuhnya.
- b. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa realisasi sebesar Rp1.197.500,00 atau 28,87% dari anggaran sebesar Rp4.147.500,00 karena untuk efisiensi anggaran maka kegiatan rapat rapat koordinasi dalam hal belanja makanan dan minuman rapat tidak menggunakan makan hanya berupa kudapan/snack saja.
- c. Kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan realisasi sebesar Rp95.826.800,00 atau 63,26% dari anggaran sebesar Rp151.488.800,00 karena ada kegiatan Perjalanan Dinas Dalam Kota di beberapa desa tidak bisa dilaksanakan karena situasi cuaca buruk/tidak mendukung terkait transportasi laut dan karena adanya juga Perjalanan Dinas Biasa yang berbenturan dengan kegiatan lain sehingga kegiatannya menggunakan anggaran seksi lainnya.
- d. Kegiatan Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya sebesar Rp70.000,00 atau 13,46% dari anggaran sebesar Rp520.000,00 karena kegiatan rapat rapat koordinasi pendampingan desa di dalam kota dilaksanakan tetapi tidak menggunakan anggaran untuk efesiensi anggaran.

#### 32. Kecamatan Arut Selatan

- a. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp77.828.300,00 atau 86,26% dari anggaran sebesar Rp67.135.015,00 karena adanya satu orang peserta yang dianggarkan tidak bisa mengikuti kegiatan bimbingan teknis.
- b. Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi dan konsultasi SKPD realisasi sebesar Rp167.868.578,00 atau 82,26% dari anggaran sebesar Rp204.073.660,00 karena tidak terealisasinya uang penginapan untuk eselon 3 golongan IV, sebanyak 16 kali perjalanan dinas yang dilaksanakan hanya 3 kali uang penginapan yang direalisasikan.
- c. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp150.689.486,00 atau 85,73% dari anggaran sebesar Rp175.763.230,00 karena pagu anggaran dilebihkan untuk antisipasi apabila di kemudian hari ada kenaikan tarif dasar listrik, telepon, internet, surat kabar dan air.
- d. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan realisasi sebesar Rp42.575.000,00 atau 89,64% dari anggaran sebesar Rp47.496.325,00 karena adanya kenaikan harga BBM (harga real lebih tinggi dari pada harga yang tercantum di DPA, bisa direalisasikan tetapi mengurangi volume yang ada di DPA).
- e. Kegiatan Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya realisasi sebesar Rp63.380.000,00 atau 62,47% dari anggaran sebesar Rp101,454,500,00 karena perencanaan pemeliharaan peralatan dan mesin kantor dianggarkan sesuai dengan jumlah peralatan yang menjadi aset kantor kecamatan dengan pagu anggaran sesuai standar, akan tetapi pada kenyataanya tidak semua peralatan mengalami kerusakan dan sebagian peralatan hanya mengalami perbaikan ringan.
- f. Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp267.262.868,00 atau 34,77% dari anggaran sebesar Rp768.751.036,00 karena Pembangunan Gedung Kantor Kelurahan Mendawai Seberang gagal tender, pemenang tender tidak bisa melengkapi berkas yang di syaratkan oleh LPSE Kabupaten Kotawaringin Barat dan apabila dilakukan lelang ulang waktu tidak mencukupi karena dianggarkan di Anggaran Perubahan.
- g. Kegiatan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di wilayah kecamatan realisasi sebesar Rp46.650.000,00 atau 91,02% dari anggaran sebesar Rp51.250.000,00 karena kegiatan makan dan minum rapat pagu anggaran dilebihkan untuk antisipasi jumlah peserta rapat yang hadir.

#### 33.Kecamatan Kotawaringin Lama

Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada Camat realisasi sebesar Rp15.556.000,00 atau 89,48% dari anggaran sebesar Rp17.385.000,00 karena efisiensi pagu anggaran belanja perjalanan dinas, kegiatan tersebut dilaksanakan dalam satu kali pertemuan sosialisasi FKM di aula Kantor Kecamatan Kotawaringin Lama.

#### 34. Kecamatan Arut Utara

a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun realisasi sebesar Rp18.165.805,00 atau 87,46% dari anggaran sebesar Rp20.770.500,00 karena Target peserta sebanyak 3 OK sedangkan yang mengikuti kegiatan hanya 2 OK. b. Kegiatan Administrasi Kepegawiaan Perangkat daerah sub kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan realisasi sebesar Rp38.471.639,00 atau 90,06% dari anggaran sebesar Rp42.719.600,00 karena anggaran transportasi kegiatan Bimtek yang diikuti berbenturan dengan kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun.

## 35. Kecamatan Pangkalan Lada

- a. Kegiatan belanja pegawai realisasi sebesar Rp906.988.092,00 atau 93,67% dari anggaran sebesar Rp2.035.772.000,00 karena ada 2 orang pegawai yang pensiun an. Budie, S.Pd.SD yang mengajukan pensiun dini, yang seharusnya pensiun per 1 Maret 2023 diajukan per 1 Agustus 2022 dan ada pegawai pensiun per 1 Mei 2022 an. Drs, Ideham yang menyebabkan penyerapan realisasi berkurang.
- b. Kegiatan belanja bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan Belanja perjalanan dinas biasa realisasi sebesar Rp40.632.251,00 atau 79,52% dari anggaran sebesar Rp51.098.000,00 karena efisiensi dan optimalisasi kegiatan dan sudah dibayarkan sesuai bukti yang ada.
- c. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD /belanja makan minum rapat realisasi sebesar Rp13.075.000,00 atau 77,83% dari anggaran sebesar Rp16.800.000,00 karena efisiensi undangan sudah dipenuhi.
- d. Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD /belanja perjalanan dinas biasa realisasi sebesar Rp27.454.939,00 atau 78,02% dari anggaran sebesar Rp35.190.000,00 karena efisiensi dan semua undanngan sudah dihadiri.
- e. Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik realisasi sebesar Rp23.739.997,00 atau 55,61% dari anggaran sebesar Rp42.690.600,00 karena sesuai tagihan dan 100 persen terbayar.
- f. Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor/belanja honor keamanan realisasi sebesar Rp28.509.400,00 atau 78,41 % dari anggaran sebesar Rp36.360.000,00 karena 100 persen sudah terbayar sesuai tingkat kehadiran.
- g. Kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah realisasi sebesar Rp40.071.042,00 atau 83,65% dari anggaran sebesar Rp47.902.015,00 karena pengeluaran pembiayaan sesuai kebutuhan.
- h. Kegiatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa realisasi sebesar Rp16.965.000,00 atau 75,86% dari anggaran sebesar Rp22.365.000,00 karena efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan evaluasi APBDes ke beberapa desa sekaligus dalam setiap kegiatan.
- i. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas Kepala Desa dan perangkat Desa realisasi sebesar Rp4.732.400,00 atau 55,30% dari anggaran sebesar Rp8.557.400,00 karena karena efisiensi dan optimalisasi dalam pelaksanaan pembinaan ke beberapa desa sekaligus dalam setiap kegiatan.
- j. Kegiatan fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan realisasi sebesar Rp48.004.180,00 atau 84,97% dari anggaran sebesar Rp56.493.000,00 karena sudah dibayarkan sesuai bukti yang ada.
- k. Kegiatan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa realisasi sebesar Rp2.776.400,00 atau 29,14% dari anggaran sebesar Rp9.526.400,00 karena Kasi Tata Pemerintahan yang menangani batas desa pensiun per 1 Mei 2022 dan kosong sampai saat ini.

 Kegiatan koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya realisasi sebesar Rp5.885.750,00 atau 23,53% dari anggaran sebesar Rp25.010.750,00 karena ada beberapa kegiatan yang biasanya dilaksanakan di tahun-tahun sebelumnya dan di tahun ini ditiadakan.

#### 36.Kecamatan Pangkalan Banteng

- a. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD realisasi sebesar Rp2.483.050,00 atau 94,84% dari anggaran sebesar Rp2.618.100,00 karena penyerapan anggaran menyesuaikan dengan undangan rapat koordinasi dari evaluator.
- b. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan realisasi sebesar Rp57.487.460,00 atau 78,30% dari anggaran sebesar Rp73.424.000,00 karena adanya 2 orang pegawai yang tidak jadi mengikuti kegiatan bimbingan teknis karena ada alasan pribadi.
- c. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi sebesar Rp55.583.781,00 atau 91,58% dari anggaran sebesar Rp60.693.611,00 karena pada saat penganggaran disediakan pagu anggaran pajak, namun dalam pelaksanaannya, penyedia merupakan non PKP.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp64.570.468 atau 90,32% dari anggaran sebesar Rp71.487.415 karena adanya surat dari PT. PLN tentang perkiraan anggaran pembayaran tagihan PLN sampai dengan akhir tahun, karena adanya kenaikan tarif PLN, sehingga dianggarkan dengan mempertimbangkan surat tersebut, namun dalam pelaksanaannya pembayaran lebih rendah dari perkiraan yang telah dibuat oleh PT PLN.
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi sebesar Rp2.742.100,00 atau 80,65% dari anggaran sebesar Rp3.400.000,00 karena adanya kebijakan penghapusan denda pajak daerah atas keterlambatan pembayaran perpanjangan STNK mobil jabatan dan seoeda motor operasional.
- f. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya realisasi sebesar Rp46.964.500,00 atau 64,68% dari anggaran sebesar Rp71.824.500 karena pekerjaan rehabilitasi papan nama kantor tidak bisa dilaksanakan karena pagu anggaran yang tidak mencukupi.
- g. Sub Kegiatan Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa realisasi sebesar Rp3.250.000 atau 84,35% dari anggaran sebesar Rp3.853.000 karena sebagian koordinasi dilakukan tanpa harus turun ke desa-desa, sehingga anggaran perjalanan dinas masih tersisa.

# 37.Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

- a. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi sebesar Rp60.104.657,00 atau 80,49% dari anggaran sebesar Rp74.669.540,00 karena pada Sub Kegiatan ini untuk Sumber Daya Air dan Listrik pembayaran menyesuaikan tagihan dalam pemakaian setiap bulannya.
- b. Kegiatan Pelaksaan Kebijakan Teknis dan PemantapanPelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan, Sub Kegiatan Pelaksanaan kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran

- Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, realisasi sebesar Rp181.174.700,00 atau 93,27% dari anggaran sebesar Rp194.251.900,00 Sub Kegiatan belum tercapainya target karena ada 3 kegiatan monitoring terkait partisipasi menyemarakan HUT ke-77 RI tahun 2022 tanpa menggunakan Rekening Belanja Perjalanan Dinas dalam kota, karena melibatkan mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam monitoring atau pemantauan tersebut.
- c. Kegiatan Penyusunan Program kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi di Daerah, realisasi sebesar Rp105.453.310,00 atau 93,30% dari anggaran sebesar Rp113.024.400,00 belum tercapainya target pada Sub Kegiatan ini dikarenakan Rekening belanja perjalanan dinas dalam kota untuk persiapan sosialisasi ke Kecamatan Kotawaringin Lama tidak seluruhnya dilaksanakan karena masih dalam situasi banjir.
- d. Kegiatan Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta pemantauan situasi di Daerah, realisasi sebesar Rp47.161.800,00 atau 89,81% dari anggaran sebesar Rp52.510.100,00 pada Sub Kegiatan ini belum mencapai target dikarenakan Honorarium pemantauan perkembangan politik berkaitan dengan pelaksanaan monitoring ke Kecamatan dalam rangka perkembangan dinamika politik tidak terealisasi karena ada beberapa kegiatan monitoring yang tidak terlaksana.

# BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan. Kebijakan Akuntansi yang dipergunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 ini sebagian besar mengacu dan berpedoman pada: (1) Kebijakan Akuntansi yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 17 termasuk Kerangka Konseptual Akuntansi Pemerintahan serta Interpretasi PSAP dan Buletin Teknis yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SAP, serta (2) Praktik-praktik Akuntansi yang selama ini dilaksanakan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan antar periode dan anggaran yang tertuang dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 120 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.

# 4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Informasi Keuangan disajikan dalam laporan keuangan satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat/Daerah atau organisasi lainnya. Jika menurut peraturan perundangundangan, satu organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban. Satuan organisasi di Pemerintah Daerah disebut SKPD dan yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan disebut dengan entitas. Entitas yang menyusun laporan terdiri dari 2 (dua) jenis yaitu Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan.

- a. Entitas Akuntansi adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) seluruh Kabupaten Kotawaringin Barat yang mempunyai kewajiban menyusun laporan keuangan pada masing masing SKPD sesuai dengan tanggung jawabnya. Laporan keuangan SKPD terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan yang untuk selanjutnya disampaikan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) untuk digabungkan menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- b. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan, dalam hal ini entitas pelaporan adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD). Laporan keuangan dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

### 4.2 Prinsip Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada delapan prinsip, yaitu:

- a. Prinsip Nilai Historis
- b. Prinsip Realisasi

- c. Prinsip Subtansi Mengungguli Bentuk Formal
- d. Prinsip Periodisasi
- e. Prinsip Konsistensi
- f. Prinsip Pengungkapan Lengkap
- g. Prinsip Penyajian Wajar

## 4.2.1 Proses Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yaitu PPKD sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) yang dijabat oleh Kepala BPKAD Kabupaten Kotawaringin Barat. PPKD menyusun LKPD berdasarkan konsolidasi laporan keuangan SKPD dan data serta catatan lainnya dari unit-unit yang terkait selaku entitas akuntansi.

Entitas akuntansi yang dicakup dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 meliputi 37 (tiga puluh tujuh) SKPD yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, yakni: 2 Sekretariat, 1 Inspektorat, 6 Badan, 21 Dinas, 1 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran serta 6 Kecamatan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 didasarkan atas data dan informasi yang disediakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD) yakni SKPKD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan pengelolaan APBD dan seluruh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku Pengguna Anggaran.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan ini berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 1 s.d 11. Proses penyusunan Laporan Keuangan dilakukan melalui proses konsolidasi atau penggabungan keseluruhan Laporan Keuangan entitas pelaporan dan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal. Dalam proses konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Bendahara Umum Daerah (BUD) tetap menyediakan catatan dan dokumen serta informasi lain yang diperlukan. Penggabungan keseluruhan yang telah disajikan oleh Bendahara Umum Daerah dan Laporan Keuangan SKPD disertai dengan beberapa penyesuaian (adjustment) yang perlu dilakukan maupun penelaahan terhadap buku besar, catatan, dokumen sumber maupun dokumen lainnya yang diperlukan dengan tujuan untuk menjaga keandalan data dan informasi yang disajikan dalam Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 telah selesai dilakukan audit oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, sedangkan LKPD TA. 2021 berhasil meraih opini "Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)" untuk yang ke-8 (delapan) kalinya berturut-turut.

# 4.3 Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang, agar memungkinkan dilakukan analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan

memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pengukuran pada masing-masing pos Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

# 4.3.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan Pendapatan-LO

**Pendapatan LRA** adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan, yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah, sedangkan **Pendapatan-LO** adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pendapatan-LO diakui pada saat:

- a. Pemerintah Daerah memiliki hak atas pendapatan
- b. pendapatan direalisasi artinya, ada aliran masuk sumber daya ekonomi baik yang sudah diterima pembayaran secara tunai (*realized*) maupun masih berupa piutang (*realizable*)
- c. dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh Pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke Rekening Kas Umum Daerah

### 4.3.2 Kebijakan Akuntansi Belanja dan Beban

*Belanja* adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah, sedangkan *Beban* adalah penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Belanja diakui pada saat:

- a. diterbitkan SP2D LS
- b. khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh pengguna anggaran;
- c. dalam hal Badan Layanan Umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Belanja disajikan dalam mata uang rupiah. Apabila pengeluaran kas atas belanja dalam mata uang asing, maka pengeluaran tersebut dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing tersebut menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada saat pengakuan belanja.

Beban diakui pada saat:

- a. timbulnya kewajiban
- b. terjadinya konsumsi aset
- c. terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa

Saat timbulnya kewajiban adalah beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat

pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah.

Terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalunya waktu. Contohnya adalah penyusutan atau amortisasi. Dalam hal Badan Layanan Umum, beban diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

Beban diukur dan dicatat berdasarkan nilai perolehan dan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang dikeluarkan dan atau akan dikeluarkan. Beban yang diukur dengan mata uang asing dikonversikan ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada saat pengakuan beban.

### 4.3.3 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

**Pembiayaan** (financing) adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah, sedangkan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan pada Rekening Kas Umum Daerah. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Sedangkan akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan dengan asas bruto. Akuntansi pembiayaan netto adalah Selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurang pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu. Selisih lebih atau kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam pos Pembiayaan Netto.

Sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan. Selisih lebih atau kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama 1 (satu) periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA atau SiKPA.

#### 4.3.4 Kebijakan Akuntansi Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumbersumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Aset diakui pada saat:

- a. potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal
- b. diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah

#### Aset diukur pada saat:

- a. kas dicatat sebesar nilai nominal
- b. investasi jangka pendek dicatat sebesar nilai perolehan
- c. piutang dicatat sebesar nilai nominal

#### Persediaan dicatat sebesar:

- a. Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga perolehan, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- b. Harga pokok produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- c. Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).
- d. Untuk barang kuasi (contoh: meterai, perangko) dinilai sebesar harga nominal yang tercetak dalam barang cetakan tersebut.
- e. Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis dinilai dengan biaya perolehan terakhir apabila belum porporasi.
- f. Persediaan hewan dan tanaman yang akan dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan harga perolehan.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari 12 (dua belas) bulan. Investasi jangka panjang terdiri dari investasi non permanen dan investasi permanen. Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau yang tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Yang termasuk dalam Investasi permanen di Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah, yaitu:

- a. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Arut
- b. PD Bank Pengkreditan Rakyat Marunting Sejahtera
- c. PT Bank Kalteng
- d. PT Jamkrida

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 4.3.5 Kebijakan Akuntansi Kewajiban dan Ekuitas

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat

pelaporan, dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban dapat timbul dari:

- a. Transaksi dengan pertukaran (exchange transactions)
- b. Transaksi tanpa pertukaran (no-exchange transactions), sesuai hukum yang berlaku dan kebijakan yang diterapkan belum lunas dibayar sampai dengan saat tanggal pelaporan
- c. Kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (government-related events)
- d. Kejadian yang diakui pemerintah (government-acknowledged events)

Perhitungan Fihak Ketiga, selanjutnya disebut PFK, merupakan utang Pemerintah kepada pihak lain yang disebabkan kedudukan Pemerintah sebagai pemotong pajak atau pungutan lainnya, seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Iuran Askes, Taspen, dan Taperum. *Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)* adalah pungutan/potongan PFK yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yang harus diserahkan kepada pihak lain. PFK diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh Bendahara Umum (BUD) atas pengeluaran dari Kas Daerah untuk pembayaran seperti gaji dan tunjangan.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya.

Utang jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada Pemerintah Daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa perhitungan pihak ketiga (PFK) yang belum disetorkan ke pihak lain harus dicatat sebagai utang perhitungan pihak ketiga pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Termasuk dalam kategori bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah bagian utang jangka panjang yang akan jatuh tempo dan harus dibayarkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

*Ekuitas* adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

## 4.3.6 Kebijakan Akuntansi Konsolidasi

*Entitas pelaporan* adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi yang secara organisatoris berada di bawahnya.

*Entitas akuntansi* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

*Laporan keuangan konsolidasian* adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Laporan keuangan konsolidasian pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai entitas pelaporan mencakup laporan keuangan semua entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD.

**Prosedur Konsolidasi** dilaksanakan dengan cara menggabungkan dan menjumlahkan akun yang diselenggarakan oleh entitas akuntansi yang meliputi SKPD dan PPKD dengan mengeliminasi akun timbal balik di Neraca. Akun-akun yang dieliminasi adalah RK-SKPD dan RK-PPKD.

### 4.3.7 Kebijakan Penyajian Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi Kas sehubungan dengan kegiatan operasional, Investasi Aset Non Keuangan, Pembiayaan dan Transaksi Non Anggaran yang menggambarkan Saldo Awal, Penerimaan, Pengeluaran dan Saldo Akhir Kas Pemerintah pada periode tertentu. Yang dimaksud dengan penerimaan adalah semua peneriman kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan, sedangkan pengeluaran adalah semua pengeluaran kas daerah yang dibukukan dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

# a. Klasifikasi Penyajian

Arus Kas disajikan ke dalam 4 (empat) kelompok aktivitas berikut:

#### 1) Aktivitas Operasi

Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto yang ditujukan untuk aktivitas operasional pemerintah selama satu periode akuntansi.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Operasi terutama diperoleh dari: (a) Penerimaan Pajak Daerah; (b) Penerimaan Retribusi Daerah; (c) Penerimaan Hibah; (d) Penerimaan Bagian Laba Perusahaan Negara/Daerah dan Investasi Lainnya; (e) Lain-lain PAD yang Sah, dan (f) Transfer Masuk.

Arus keluar Kas untuk Aktivitas Operasi terutama digunakan untuk pengeluaran: (a) Belanja Pegawai; (b)Belanja Barang dan Jasa; (c) Belanja Bunga; (d) Belanja Subsidi; (e) Belanja Hibah; (f) Belanja Bantuan Sosial; (g) Belanja Lain-lain/Tak Terduga; dan (h) Transfer Keluar.

### 2) Aktivitas Investasi

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Penjualan Aset Tetap; dan (b) Penjualan Aset Lainnya. Arus keluar kas dari Aktivitas Investasi terdiri dari: (a) Perolehan Aset Tetap; (b) Perolehan Aset Lainnya; dan (c) Penyertaan Modal.

#### 3) Aktivitas Pendanaan

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto sehubungan dengan pendanaan defisit anggaran atau penggunaan surplus anggaran, yang bertujuan untuk memprediksi klaim pihak lain terhadap Arus Kas pemerintah atau klaim pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Penerimaan Pinjaman; (b) Penerimaan Hasil Penjualan Obligasi/Surat Utang Negara; (c) Penerimaan Kembali Pinjaman. Arus keluar Kas dari Aktivitas Pendanaan antara lain: (a) Pembayaran Pokok Pinjaman; (c) Pemberian Pinjaman.

#### 4) Aktivitas Transitoris

Arus Kas dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran Kas Bruto yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah. Arus Kas dari Aktivitas Transitoris antara lain Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Kiriman/Transfer Uang.

PFK menggambarkan Kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga. Adapun Kiriman Uang menggambarkan mutasi Kas antar rekening Kas Umum Daerah.

Arus masuk Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi penerimaan PFK dan kiriman uang masuk. Arus keluar Kas dari Aktivitas Transitoris meliputi pengeluaran PFK dan kiriman uang keluar.

#### b. Metode Penyajian

Entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Arus Kas dengan menggunakan cara:

### 1) Metode Langsung

Metode ini mengungkapkan pengelompokan utama atas Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto.

# 2) Metode Tidak Langsung

Dalam metode ini, surplus atau defisit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional Non Kas, penangguhan (deferral) atau pengakuan (accrual) penerimaan Kas atau pembayaran yang lalu/yang akan datang, serta unsur pendapatan dan belanja dalam bentuk Kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi Aset Non Keuangan dan Pembiayaan. Terkait dengan penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mempergunakan metode langsung dalam menyusun Laporan Arus Kas sebagaimana yang disajikan pada lembar muka (on the face) Laporan Keuangan dengan pertimbangan bahwa penggunaan metode langsung ini:

- menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasikan Arus Kas di masa yang akan datang
- lebih mudah dipahami oleh pengguna laporan
- data tentang kelompok Penerimaan dan Pengeluaran Kas Bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi

#### 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi

Dalam melaksanakan kebijakan akuntansi, ada beberapa hal khusus yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain sebagai berikut:

#### a. Pencatatan Persediaan

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yaitu metode pencatatan persediaan yang dilakukan setiap terjadi transaksi perolehan/penerimaan dan pengeluaran persediaan.

Fungsi akuntansi pada entitas akuntansi/entitas pelaporan selalu mengkinikan nilai persediaan setiap akhir bulan.

Pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode masuk pertama keluar pertama atau First In First Out (FIFO). Pada akhir periode pengurus barang melakukan Penghitungan fisik (Stock Opname) terhadap barang yang dibeli dan belum digunakan, kecuali barang yang tidak termasuk dalam barang persediaan.

## b. Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Penyisihan piutang tidak tertagih atau penyisihan/cadangan kerugian piutang dengan besaran prosentase sesuai dengan umur piutang tertentu sesuai dengan prosentase cadangan penyisihan piutang. Penggolongan kualitas piutang dilakukan dengan ketentuan:

## 1) Piutang Pajak

No	Kualitas Piutang Pajak	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (kurang dari 1 tahun)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 2 tahun)	10%
3.	Diragukan (2 s/d 3 tahun)	50%
4.	Macet (di atas 3 tahun)	100%

## 2) Piutang Retribusi

No	Kualitas Piutang Retribusi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 6 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (7 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 12 bulan setelah jatuh tempo)	100%

#### 3) Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No	Kualitas Piutang Tuntutan Ganti Rugi	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (1 s/d 12 bulan setelah jatuh tempo)	10%
3.	Diragukan (13 s/d 24 bulan setelah jatuh tempo)	50%
4.	Macet (lebih dari 24 bulan setelah jatuh tempo)	100%

#### 4) Piutang Karena Perikatan Perjanjian

No	Kualitas Piutang Karena Perikatan Perjanjian	Taksiran Piutang Tak Tertagih (Penyisihan Piutang)
1.	Lancar (sampai dengan jatuh tempo)	5%
2.	Kurang Lancar (satu bulan sejak tagihan pertama)	10%
3.	Diragukan (satu bulan sejak tagihan kedua)	50%
4.	Macet (satu bulan sejak tagihan ketiga)	100%

### c. Pengakuan Belanja Modal

Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

1) Manfaat ekonomi barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan

- 2) Perolehan barang tersebut untuk operasional dan pelayanan, serta tidak untuk dijual
- 3) Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan. Khusus untuk tanah dan konstruksi dalam pengerjaan berapapun nilai perolehannya harus dikapitalisasi. Penetapan nilai minimal materialitas pada saat proses penganggaran di DPA.

# d. Pengakuan Belanja Pemeliharaan

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitaliasi sebagai aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara
- Bertambah ekonomis/efisien, dan/atau, bertambah umur ekonomis, dan/atau, bertambah volume, dan/atau, bertambah kapasitas produksi, bertambah estetika/keindahan/ kenyamanan
- 3) Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap tersebut melebihi 1 tahun (jangka panjang)
- 4) Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang telah ditetapkan
- 5) Bila ada pengeluaran bersifat rutin untuk memperbaiki/memelihara aset tetap meskipun jumlahnya material, tetap digolongkan sebagai *revenue expenditure*. *Revenue expenditure* mempunyai makna pengeluaran untuk mempertahankan kapasitas yang ada saat ini *(current year)*

#### e. Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap

Kapitalisasi adalah Penentuan nilai buku terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai, untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Pengeluaran-pengeluaran dalam rangka perolehan aset merupakan belanja modal apabila memenuhi batasan jumlah biaya kapitalisasi perolehan awal aset tetap berikut:

- 1) Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap peralatan dan mesin adalah pengeluaran pengadaan baru untuk per satuan atau per unit peralatan dan mesin sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00
- 2) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk gedung dan bangunan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian gedung dan bangunan seperti: teralis, sekat partisi, plafon, tambah daya listrik/instalasi listrik, keramik, pagar dll berapapun nilainya dikapitalisasi
- 3) Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi untuk jalan/irigasi/jaringan yang nilainya pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 dikecualikan untuk pengeluaran bertahap/lanjutan yang secara substansi merupakan perolehan atau bagian jalan/irigasi/jaringan seperti: trotoar, plangson dll
- 4) Sedangkan untuk aset tetap renovasi yang nilai pengeluarannya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00

### f. Penyusutan Aset Tetap

Suatu aset disebut sebagai aset tetap adalah karena manfaatnya dapat dinikmati lebih dari 12 bulan atau 1 periode akuntansi. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Metode Penyusutan adalah Penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset serta bukan alokasi biaya. Metode Penyusutan yang digunakan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah metode Garis Lurus dengan rumusan:

# Penyusutan per periode = <u>Nilai yang Dapat Disusutkan</u> Masa Manfaat

Pengakuan Peyusutan untuk perolehan aset tetap sebelum tahun 2015 atau sebelum diberlakukan akuntansi basis akrual, dimulai awal tahun berikutnya. Sedangkan untuk perolehan aset tetap mulai tahun 2015 atau setelah diberlakukan basis akrual, pengakuan penyusutan dilakukan 1 (satu) hari setelah tanggal Berita Acara Serah Terima Barang (BAST).

# g. Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasi

Laporan Keuangan Konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Surplus Defisit atau Laporan Operasional (LO), dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan Keuangan Konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya. Dalam Kebijakan Akuntansi ini, proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (reciprocal accounts).

## BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

# 5.1 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.1 Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

No.	Uraian	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan	1.433.623.122.600,00	1.412.981.759.684,52	98,56	1.633.972.466.127,94
2	Belanja	1.402.185.435.925,00	1.266.058.169.604,20	90,29	1.302.056.042.712,41
3	Transfer	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63	159.527.761.182,00
4	Jumlah Belanja dan Transfer	1.563.223.468.525,00	1.420.053.654.390,20	90,84	1.461.583.803.894,41
5	Surplus/Defisit	(129.600.345.925,00)	(7.071.894.705,68)	5,46	172.388.662.233,53
6	Pembiayaan Netto	208.920.012.659,00	208.920.012.659,90	100,00	89.531.350.426,37
	SiLPA	79.319.666.734,00	201.848.117.954,22		261.920.012.659,90

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

## 5.1.1 Pendapatan

Pendapatan adalah semua penerimaan ke Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak dan tidak perlu dibayarkan kembali oleh Pemerintah Daerah.

1.433.623.122.600,00	1.412.981.759.684,52	1.633.972.466.127,94
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Pendapatan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.412.981.759.684,52 atau tercapai 98,56% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.433.623.122.600,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan sebesar Rp1.633.972.466.127,94. Pendapatan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.2 Rincian Pendapatan

No. Uraian		2022			2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Asli Daerah	283.646.085.100,00	233.177.455.634,65	82,21	392.164.379.004,55
2	Pendapatan Transfer	1.073.865.408.500,00	1.107.583.678.376,87	103,14	1.203.708.747.726,33
3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	76.111.629.000,00	72.220.625.673,00	94,89	38.099.339.397,06
	Jumlah	1.433.623.122.600,00	1.412.981.759.684,52	98,56	1.633.972.466.127,94

## 5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
283,646,085,100,00	233.177.455.634.65	392,164,379,004,55

Realisasi Pendapatan Asli Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp233.177.455.634,65 atau tercapai 82,21% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp283.646.085.100,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp392.164.379.004,55. Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.3 Rincian Pendapatan Asli Daerah

No.	Uraian	2022			2021
NO.	No. Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Daerah	97.150.000.000,00	81.575.790.318,70	83,97	70.389.757.706,05
2	Retribusi Daerah	28.048.063.900,00	15.794.350.037,00	56,31	12.611.932.516,30
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.970.000.000,00	12.940.075.581,00	99,77	12.470.117.812,00
4	Lain-Lain PAD yang Sah	145.478.021.200,00	122.867.239.697,95	84,46	296.692.570.970,20
	Jumlah	283.646.085.100,00	233.177.455.634,65	82,21	392.164.379.004,55

# 5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Pendapatan Pajak Daerah adalah Pendapatan Daerah yang sifatnya memaksa dan tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Berikut adalah dasar hukum dari pemungutan dan pengelolaan Pajak Daerah yang dilaksanakan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu:

- Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pajak Hotel
- Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2018 tentang Pajak Restoran
- Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pajak Hiburan
- Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pajak Reklame
- Peraturan Daerah Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pajak Penerangan Jalan
- Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pajak Parkir
- Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Air Tanah
- Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pajak Sarang Burung Walet

- Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan
- Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
97.150.000.000,00	81.575.790.318,70	70.389.757.706,05

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp81.575.790.318,70 atau tercapai 83,97% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp97.150.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Pajak Daerah sebesar Rp70.389.757.706,05. Rincian 11 (sebelas) jenis Pajak Daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.4 Rincian Pendapatan Pajak Daerah

Na	Uraian	2022			2021
No.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pajak Hotel	4.500.000.000,00	1.945.458.674,10	43,23	1.019.134.857,83
2	Pajak Restoran	5.700.000.000,00	3.553.174.603,40	62,34	2.447.046.558,40
3	Pajak Hiburan	750.000.000,00	802.754.530,20	107,03	311.084.958,00
4	Pajak Reklame	2.500.000.000,00	1.016.063.546,00	40,64	1.048.830.681,54
5	Pajak Penerangan Jalan	27.000.000.000,00	25.124.635.681,60	93,05	23.343.368.909,28
6	Pajak Parkir	1.000.000.000,00	115.936.500,00	11,59	191.496.800,00
7	Pajak Air Tanah	200.000.000,00	56.904.910,00	28,45	36.844.243,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	5.000.000.000,00	1.110.301.729,40	22,21	1.120.980.670,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	8.000.000.000,00	2.224.103.102,00	27,80	2.717.092.655,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	16.000.000.000,00	10.871.761.738,00	67,95	10.918.969.352,00
11	ВРНТВ	26.500.000.000,00	34.754.695.304,00	131,15	27.234.908.021,00
	Jumlah	97.150.000.000,00	81.575.790.318,70	83,97	70.389.757.706,05

#### 5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
28.048.063.900,00	15.794.350.037,00	12.611.932.516,30	

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.794.350.037,00 atau tercapai 56,31% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp28.048.063.900,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Retribusi Daerah sebesar Rp12.611.932.516,30. Pendapatan Retribusi Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perijinan Tertentu sebagaimana tersaji pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.5 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah

NI-	Harton		2022		2021
No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Retribusi Jasa Umum	11.925.381.800,00	8.362.406.832,00	70,12	5.685.197.413,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	4.400.000.000,00	3.400.996.700,00	77,30	2.321.467.690,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	150.000.000,00	108.520.000,00	72,35	94.255.495,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	2.000.000.000,00	1.056.329.799,00	52,82	766.270.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	3.482.949.000,00	2.714.940.725,00	77,95	1.411.293.375,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.500.000.000,00	649.127.000,00	43,28	703.355.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	329.528.000,00	367.637.358,00	111,56	335.651.053,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	62.904.800,00	64.855.150,00	103,10	52.904.800,00
2	Retribusi Jasa Usaha	10.500.264.900,00	6.077.091.058,00	58,78	5.228.874.617,90
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	5.877.800.000,00	2.864.830.758,00	48,74	3.184.049.917,90
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	2.350.000.000,00	1.115.593.200,00	51,53	312.293.600,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	200.000.000,00	111.100.000,00	55,55	66.050.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	700.000.000,00	760.172.100,00	108,60	694.646.300,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	857.964.900,00	844.231.000,00	98,40	500.011.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	514.500.000,00	381.164.000,00	74,08	471.823.800,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	5.622.417.200,00	1.354.852.147,00	24,10	1.697.860.485,40
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	5.000.000.000,00	1.352.452.147,00	27,05	1.375.162.485,40
	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	4.453.000,00	2.400.000,00	53,90	2.100.000,00
	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	617.964.200,00	-	-	320.598.000,00
	Jumlah	28.048.063.900,00	15.794.350.037,00	56,31	12.611.932.516,30

Pendapatan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.6 Daftar Pendapatan Retribusi Daerah pada SKPD

Na	SKDD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	500.000.000,00	186.155.000,00	37,23	162.130.000,00
2	Dinas Kesehatan	4.750.000.000,00	3.642.646.700,00	76,69	2.601.287.690,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.500.000.000,00	2.769.700.908,00	29,15	2.437.555.917,90
4	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	617.964.200,00	1	ı	320.598.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup	235.000.000,00	221.356.500,00	94,19	161.399.495,00
6	Dinas Perhubungan	6.554.453.000,00	3.583.622.099,00	54,67	2.478.664.900,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	329.528.000,00	367.637.358,00	111,56	335.651.053,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.545.853.800,00	2.779.795.975,00	78,40	1.464.198.175,00

No.	SKPD	2022			2021
NO.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	660.813.497,00	,	1.292.546.093,00
10	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	57.964.900,00	15.000.000,00	25,88	17.500.000,00
11	Dinas Perikanan	379.900.000,00	308.954.500,00	81,33	464.669.800,00
12	Dinas Pariwisata	800.000.000,00	829.231.000,00	103,65	482.511.000,00
13	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	94.500.000,00	15.000.000,00	15,87	35.000.000,00
14	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	320.000.000,00	232.759.500,00	72,74	135.979.000,00
15	Sekretariat Daerah	249.250.000,00	121.332.000,00	48,68	111.450.000,00
16	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	52.246.005,00
17	Kecamatan Arut Utara	-	-	-	1.430.562,40
18	Kecamatan Kumai	-	-	-	13.385.120,00
19	Kecamatan Kotawaringin Lama	-	-	-	6.822.850,00
20	Kecamatan Pangakalan Lada	-	-	-	2.061.730,00
21	Kecamatan Pangkalan Banteng	15.150.000,00	17.975.000,00	118,65	24.945.125,00
22	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	93.500.000,00	38.400.000,00	41,07	6.000.000,00
23	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	5.000.000,00	3.970.000,00	79,40	3.900.000,00
	Jumlah	28.048.063.900,00	15.794.350.037,00	56,31	12.611.932.516,30

## 5.1.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
12.970.000.000.00	12.940.075.581.00	12.470.117.812.00

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.940.075.581,00 atau tercapai 99,77% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp12.970.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp12.470.117.812,00. Pendapatan ini berasal dari bagian laba (deviden) tahun 2022 atas penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera dan PT Bank Pembangunan Kalteng, dengan rincian:

Tabel 5.7 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

No	BUMD	2022			2021
NO	. BOWID	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	PD BPR Marunting Sejahtera	600.000.000,00	582.846.872,00	97,14	12.470.117.812,00
2	PT Bank Pembangunan Kalteng	12.370.000.000,00	12.357.228.709,00	99,90	-
	Jumlah	12.970.000.000,00	12.940.075.581,00	99,77	12.470.117.812,00

# 5.1.1.1.4 Lain-lain PAD yang Sah

Anggaran 2022 (Rp)	(Rp)	(Rp)		
145.478.021.200,00	122.867.239.697,95	296.692.570.970,20		

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp122.867.239.697,95 atau tercapai 84,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp145.478.021.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp296.692.570.970,20. Lain-lain PAD yang Sah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari:

Tabel 5.8 Rincian Lain-lain PAD yang Sah

N.	Huston	2022			2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	550.000.000,00	495.862.904,00	90,16	739.659.000,00
2	Jasa Giro	1.873.833.000,00	1.906.241.156,00	101,73	2.103.656.135,39
3	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	1.000.000.000,00	1.463.083.280,00	146,31	928.673.467,00
4	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	10.000.000,00	19.473.669,00	194,74	22.719.280,50
5	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	277.183.599,45	-	285.997.771,12
6	Pendapatan Denda Pajak	358.856.200,00	277.941.355,48	77,45	274.405.025,36
7	Pendapatan Denda Retribusi Umum	4.087.000,00	22.000,00	0,54	3.015.696,00
8	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	1	340.190,00	ı	1.195.081,00
9	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	40.488.000,00	25.996.000,00	64,21	302.936.113,00
10	Pendapatan Pengembalian	1.174.311.000,00	517.787.956,79	44,09	2.145.627.471,06
11	Pendapatan Lainnya	-	124.958.598,23	-	102.136.760,77
12	Pendapatan BLUD	140.226.167.000,00	117.235.881.233,00	83,60	289.478.592.169,00
13	PAD Lainnya	-	-	-	18.458.000,00
14	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	222.601.000,00
15	Hasil Sewa BMD	212.529.000,00	324.555.000,00	152,71	62.898.000,00
16	Restitusi atas kelebihan setoran PTKP	-	170.162.756,00	-	-
	Jumlah	145.478.021.200,00	122.867.239.697,95	84,46	296.692.570.970,20

Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.9 Daftar Lain-lain PAD yang Sah pada SKPD

Na	SKPD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	140.500.000.000,00	117.348.258.233,00	83,52	289.519.495.669,00
2	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	54,00	-	-

N.a	SKPD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	27.750.000,00	27.750.000,00	100,00	222.601.000,00
4	Dinas Ketahanan Pangan	ı	4.445.200,00	-	18.458.000,00
5	Dinas Lingkungan Hidup		162.000,00	1	457.000,00
6	Dinas Perhubungan	10.291.000,00	6.206.000,00	60,31	92.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1	2,00	1	2,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah		363.440,00		1.177.708,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	-	1	1.195.714,00
10	Sekretariat Daerah	-	167.040.000,00	-	22.299.000,00
11	Kecamatan Arut Selatan	-	-	-	1.876.248,00
12	Kecamatan Pangkalan Banteng	39.285.000,00	39.285.000,00	100,00	-
13	Badan Pendapatan Daerah	358.856.200,00	277.941.355,48	77,45	274.405.025,36
14	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.541.839.000,00	4.995.788.413,47	109,99	6.630.513.603,84
	Jumlah	145.478.021.200,00	122.867.239.697,95	84,46	296.692.570.970,20

## 5.1.1.2 Pendapatan Transfer

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.107.583.678.376,87 atau tercapai 103,14% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.073.865.408.500,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp1.203.708.747.726,33. Rincian Pendapatan Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 terdapat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.10 Rincian Pendapatan Transfer** 

No.	Uraian	2022			2021
NO.	Uraidii	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	980.791.986.500,00	995.446.393.184,00	101,49	1.123.614.847.716,00
	Dana Perimbangan	896.946.456.500,00	912.417.968.098,00	101,72	1.038.859.842.934,00
	Dana Insentif Daerah (DID)	13.214.332.000,00	13.214.332.000,00	100,00	1
	Dana Desa	70.631.198.000,00	69.814.093.086,00	98,84	84.755.004.782,00
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	93.073.422.000,00	112.137.285.192,87	120,48	80.093.900.010,33
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	92.923.422.000,00	111.987.285.192,87	120,52	80.093.900.010,33
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	150.000.000,00	150.000.000,00	100,00	-
	Jumlah	1.073.865.408.500,00	1.107.583.678.376,87	103,14	1.203.708.747.726,33

## 5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
980.791.986.500,00	995.446.393.184,00	1.123.614.847.716,00	

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp995.446.393.184,00 atau tercapai 101,49% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp980.791.986.500,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar Rp1.123.614.847.716,00. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

# 5.1.1.2.1.1 Dana Perimbangan

896.946.456.500,00	912.417.968.098,00	1.038.859.842.934,00	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	

Realisasi Dana Perimbangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp912.417.968.098,00 atau tercapai 101,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp896.946.456.500,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Perimbangan sebesar Rp1.038.859.842.934,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

#### **Tabel 5.11 Rincian Dana Perimbangan**

No.	Uraian	2022			2021
NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dana Transfer Umum- Dana Bagi Hasil (DBH)	112.892.541.000,00	138.520.194.506,00	122,70	135.229.818.254,00
2	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	593.355.915.000,00	591.800.383.800,00	99,74	593.260.006.000,00
3	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	112.235.300.000,00	110.134.562.916,00	98,13	230.385.941.118,00
4	Dana Transfer Khusus- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	78.462.700.500,00	71.962.826.876,00	91,72	79.984.077.562,00
	Jumlah	896.946.456.500,00	912.417.968.098,00	101,72	1.038.859.842.934,00

## 5.1.1.2.1.1.1 Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)

112 892 541 000 00	138 520 194 506 00	135 229 818 254 00
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp138.520.194.506,00 atau tercapai 122,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp112.892.541.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Transfer Umum-DBH sebesar Rp135.229.818.254,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.12 Rincian Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil

No.	Uraian	2022			2021
NO.		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	39.499.307.000,00	52.886.967.007,00	133,89	60.811.378.381,00
2	DBH PPh Pasal 21	11.832.304.000,00	12.338.747.909,00	104,28	13.362.057.800,00
3	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN	685.603.000,00	1.157.946.366,00	168,89	817.976.163,00
4	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	10.000,00	-	ı	16.585.362,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	19.496.000,00	19.496.000,00	100,00	1.082.600,00
6	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	184.534.000,00	184.534.000,00	100,00	111.954.409,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Landrent	396.061.000,00	396.061.000,00	100,00	1.003.754.003,00
8	DBH Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alma (SDA) Mineral dan Batubara-Royalti	51.894.005.000,00	63.155.221.224,00	121,70	36.588.743.354,00
9	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH)	-	-	1	5.988.120.571,00
10	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	6.422.910.000,00	6.422.910.000,00	100,00	15.170.546.461,00
11	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.958.311.000,00	1.958.311.000,00	100,00	1.357.619.150,00
	Jumlah	112.892.541.000,00	138.520.194.506,00	122,70	135.229.818.254,00

# 5.1.1.2.1.1.2 Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)

593.355.915.000,00	591.800.383.800,00	593.260.006.000,00	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp591.800.383.800,00 atau tercapai 99,74% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp593.355.915.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Transfer Umum-DAU sebesar Rp593.260.006.000,00.

## 5.1.1.2.1.1.3 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
112.235.300.000,00	110.134.562.916,00	230.385.941.118,00		

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp110.134.562.916,00 atau tercapai 98,13% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp112.235.300.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Fisik sebesar Rp230.385.941.118,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

# Tabel 5.13 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

No	Unaian		2022		2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	3.718.858.000,00	3.694.768.700,00	99,35	684.800.900,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	21.023.449.000,00	21.023.286.350,00	100,00	20.526.950.462,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	18.931.633.000,00	18.385.443.100,00	97,11	1.774.141.481,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	-	-	-	295.756.000,00
5	DAK Reguler Bidang Pendidikan- Reguler-SKB	1.143.260.000,00	1.135.760.000,00	99,34	-
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	-	-	-	20.484.814.405,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	2.930.959.000,00	2.359.522.928,00	80,50	2.646.558.396,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	944.963.000,00	871.175.000,00	92,19	96.475.846.861,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB	-	-	•	1.252.525.000,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan-Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	510.026.000,00	475.362.704,00	93,20	-
11	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	-	-	264.000.000,00
12	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	-	-	-	1.195.068.108,00
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Penurunan Stunting (KB)	857.880.000,00	834.883.560,00	97,32	-
14	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	26.862.522.000,00	26.849.629.692,00	99,95	37.142.055.500,00
15	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	-	-	ı	20.041.329.000,00
16	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	-	-	-	4.745.508.300,00
17	DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan	-	-	ı	2.343.600.000,00
18	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	-	-	-	6.967.122.000,00
19	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup	-	-	-	7.023.460.000,00
20	DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Penugasan	-	-	•	6.522.404.705,00
21	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	6.291.604.000,00	6.290.703.000,00	99,99	-
22	DAK Fisik Bidang Air Minum- Reguler	6.920.513.000,00	6.824.684.950,00	98,62	-
23	DAK Fisik Bidang Sanitasi- Reguler	5.083.429.000,00	5.083.429.000,00	100,00	-
24	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.895.705.000,00	15.283.814.662,00	96,15	-
25	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-KB	1.120.499.000,00	1.022.099.270,00	91,22	-
	Jumlah	112.235.300.000,00	110.134.562.916,00	98,13	230.385.941.118,00

## 5.1.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

78.462.700.500,00	71.962.826.876,00	79.984.077.562,00		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Realisasi Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp71.962.826.876,00 atau tercapai 91,72% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp78.462.700.500,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Transfer Khusus-DAK Non Fisik sebesar Rp79.984.077.562,00 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.14 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik

No.	Uraian	2022			2021
NO.	Oralan	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	48.775.083.500,00	48.664.753.201,00	99,77	56.578.529.000,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.167.000.000,00	1.167.000.000,00	100,00	1.046.487.000,00
3	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	977.140.000,00	436.476.030,00	44,67	890.387.000,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelengaraan PAUD	5.491.200.000,00	5.103.669.000,00	92,94	4.957.524.000,00
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.427.850.000,00	1.137.200.000,00	79,64	1.162.221.574,00
6	DAK Non Fisik BOPKKB BOK	15.914.221.000,00	10.964.508.427,00	68,90	12.019.570.147,00
7	DAK Non Fisik BOPKKB Jaminan Persalinan	54.635.000,00	-	-	-
8	DAK Non Fisik BOPKKB BOKB	2.994.600.000,00	2.928.394.101,00	97,79	1.137.719.573,00
9	DAK Non Fisik Dana PK2UKM	-	-	-	328.962.400,00
10	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	-	1	906.003.868,00
11	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	782.600.000,00	776.539.952,00	99,23	621.500.000,00
12	DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal	426.571.000,00	332.486.165,00	77,94	335.173.000,00
13	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	451.800.000,00	100,00	-
	Jumlah	78.462.700.500,00	71.962.826.876,00	91,72	79.984.077.562,00

#### 5.1.1.2.1.2 Dana Insentif Daerah (DID)

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
13.214.332.000,00	13.214.332.000,00	0,00		

Realisasi Dana Insentif Daerah (DID) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.214.332.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp13.214.332.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi Dana Insentif Daerah (DID).

#### **5.1.1.2.1.3 Dana Desa**

Ī	70.631.198.000,00	69.814.093.086,00	84.755.004.782,00		
(Rp)		(Rp)	(Rp)		
	Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Realisasi Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp 69.814.093.086,00 atau tercapai 98,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp70.631.198.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Dana Desa sebesar Rp84.755.004.782,00. Pada tahun 2022 terdapat sisa anggaran Dana Desa sebesar Rp817.104.914,00 dikarenakan:

- 1) Pemotongan penyaluran Dana Desa berdasarkan hasil rekonsiliasi sisa Dana Desa tahun 2015 s.d 2020 yang tidak dianggarkan kembali dan tidak disetorkan ke RKUD serta belum selesai diperhitungkan pada penyaluran Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp741.216.074,00, terdiri dari:
  - Desa Kenambui Kecamatan Arut Selatan sebesar Rp132.439.500,00
  - Desa Kinjil Kecamatan Kotawaringin Lama sebesar Rp342.987.174,00
  - Desa Kerabu Kecamatan Arut Utara sebesar Rp265.789.400,00
- 2) Tidak tersalurnya Dana Desa tahap III Desa Sungai Sekonyer Kecamatan Kumai sebesar Rp75.888.840,00 sebab Desa tersebut tidak dapat memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap III berupa penyampaian laporan realisasi penggunaan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II Tahun Anggaran 2022 dengan minimal rata-rata realisasi keuangan 90% dan rata-rata capaian keluaran 75%.

Adapun rincian realisasi Penyaluran Dana Desa tahun 2022 pada masing-masing Desa dapat dilihat pada Lampiran 5.1.

#### 5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah

93.073.422.000,00	112.137.285.192,87	80.093.900.010,33		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp112.137.285.192,87 atau tercapai 120,48% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp93.073.422.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar Rp80.093.900.010,33. Pendapatan Transfer Antar Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

## 5.1.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
92.923.422.000,00	111.987.285.192,87	80.093.900.010,33		

Pendapatan Bagi Hasil merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp111.987.285.192,87 atau tercapai 120,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp92.923.422.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pendapatan Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp80.093.900.010,33 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.15 Rincian Pendapatan Bagi Hasil

No.	Uraian	2022			2021
NO.		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor	19.500.000.000,00	16.857.048.269,48	86,45	15.236.123.715,97
2	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	15.000.000.000,00	15.360.453.840,08	102,40	10.272.283.835,16
3	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	42.923.422.000,00	64.592.171.279,78	150,48	43.113.061.777,10
4	Bagi Hasil dari Pajak Air Permukaan	75.000.000,00	110.460.876,53	147,28	106.544.846,10
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	15.425.000.000,00	15.067.150.927,00	97,68	11.365.885.836,00
	Jumlah	92.923.422.000,00	111.987.285.192,87	120,52	80.093.900.010,33

#### 5.1.1.2.2.2 Bantuan Keuangan

150,000,000,00	150,000,000,00	0.00		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp150.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi Bantuan Keuangan.

### 5.1.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

76.111.629.000,00	72.220.625.673,00	38.099.339.397,06		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp72.220.625.673,00 atau tercapai 94,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp76.111.629.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp38.099.339.397,06 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.16 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

No.	Uraian	2022			2021
NO.		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pendapatan Hibah	26.287.419.000,00	25.124.419.000,00	95,58	-
	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	26.287.419.000,00	25.124.419.000,00	95,58	-
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	49.824.210.000,00	47.096.206.673,00	95,58	38.099.339.397,06
	Pendapatan Hibah Dana BOS	41.154.000.000,00	39.119.594.609,00	95,58	38.099.339.397,06
	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	8.670.210.000,00	7.976.612.064,00	95,58	-
	Jumlah	76.111.629.000,00	72.220.625.673,00	94,89	38.099.339.397,06

#### 5.1.1.3.1 Pendapatan Hibah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
26.287.419.000,00	25.124.419.000,00	0,00		

Pendapatan Hibah merupakan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.124.419.000,00 atau tercapai 95,58% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp26.287.419.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi Pendapatan Hibah.

## 5.1.1.3.2 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

49.824.210.000,00	47.096.206.673,00	38.099.339.397,06		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		

Realisasi Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00 atau tercapai 94,52% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp49.824.210.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi sebesar Rp38.099.339.397,06. Realisasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah tahun 2022 terdiri dari Pendapatan Hibah Dana BOS Rp39.119.594.609,00 dan Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Rp7.976.612.064,00.

## 5.1.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah.

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1.563.223.468.525,00	1.420.053.654.390,20	1.461.583.803.894,41	

Realisasi Belanja sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.420.053.654.390,20 atau tercapai 90,84% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.563.223.468.525,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja sebesar Rp1.461.583.803.894,41. Rincian Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.17 Rincian Belanja

No. Harden		2022			2021
NO.	No. Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Operasi	1.095.560.882.544,00	992.718.034.981,20	90,61	886.809.604.687,83
2	Belanja Modal	303.284.543.381,00	270.539.145.420,00	89,20	413.698.499.168,58
3	Belanja Tak Terduga	3.340.010.000,00	2.800.989.203,00	83,86	1.547.938.856,00
4	Belanja Transfer	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63	159.527.761.182,00
	Jumlah	1.563.223.468.525,00	1.420.053.654.390,20	90,84	1.461.583.803.894,41

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan belanja yang dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk membiayai operasional pemerintahan.

1.095.560.882.544.00	992.718.034.981,20	886.809.604.687,83
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Belanja Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp992.718.034.981,20 atau tercapai 90,61% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.095.560.882.544,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Operasi sebesar Rp886.809.604.687,83 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18 Rincian Belanja Operasi

No.	Uraian	2022			2021
NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Pegawai	646.615.341.452,00	573.130.613.844,05	88,64	533.526.478.475,48
2	Belanja Barang dan Jasa	406.861.944.120,00	378.837.074.585,15	93,11	331.364.771.908,23
3	Belanja Bunga	563.500.000,00	563.499.999,00	100,00	847.000.000,00
4	Belanja Hibah	39.493.096.972,00	38.161.646.553,00	96,63	19.304.426.304,12
5	Belanja Bantuan Sosial	2.027.000.000,00	2.025.200.000,00	99,91	1.766.928.000,00
	Jumlah	1.095.560.882.544,00	992.718.034.981,20	90,61	886.809.604.687,83

## 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
646.615.341.452,00	573.130.613.844,05	533.526.478.475,48

Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp573.130.613.844,05 atau tercapai 88,64% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp646.615.341.452,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp533.526.478.475,48. Rincian Belanja Pegawai Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 tersaji pada tabel berikut:

Tabel 5.19 Rincian Belanja Pegawai

No.	Uraian	2022			2021
NO.	Oralan	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	276.992.485.306,00	271.263.672.133,00	97,93	268.906.415.166,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	128.236.659.165,00	124.982.721.168,00	97,46	106.169.490.985,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	69.404.912.905,00	61.498.785.880,00	88,61	64.433.745.600,00
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	15.925.961.000,00	15.914.137.589,00	99,93	15.839.914.254,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	609.707.000,00	330.142.577,00	54,15	533.661.042,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	679.100.000,00	676.220.000,00	99,58	795.970.000,00

Nia	Uraian	2022			2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
7	Belanja Pegawai BOS	2.114.367.000,00	2.069.173.000,00	97,86	7.535.684.630,00
8	Belanja Pegawai BLUD	152.652.149.076,00	96.395.761.497,05	63,15	69.311.596.798,48
	Jumlah	646.615.341.452,00	573.130.613.844,05	88,64	533.526.478.475,48

Belanja Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.20 Daftar Belanja Pegawai pada SKPD

N	CKDD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	212.937.724.609,00	200.889.578.802,00	94,34	207.588.932.021,00
2	Dinas Kesehatan	235.319.232.474,00	177.647.519.244,05	75,49	142.971.885.114,48
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.276.494.400,00	8.248.689.505,00	99,66	7.469.961.657,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.137.162.654,00	3.071.916.288,00	97,92	2.874.608.783,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.016.794.000,00	7.877.697.659,00	98,26	7.731.220.661,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.737.551.464,00	3.668.771.047,00	98,16	3.295.714.853,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4.035.149.644,00	3.959.453.042,00	98,12	3.343.684.508,00
8	Dinas Sosial	4.413.495.420,00	4.398.388.654,00	99,66	3.896.418.275,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.322.457.204,00	4.258.167.521,00	98,51	4.091.717.533,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan KB	4.611.138.000,00	4.572.869.177,00	99,17	4.275.286.778,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	3.265.931.165,00	3.225.241.709,00	98,75	3.537.436.518,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	4.663.885.865,00	4.644.262.626,00	99,58	4.468.603.934,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.631.684.216,00	4.459.414.041,00	96,28	4.376.874.020,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.527.045.043,00	4.379.149.058,00	96,73	4.083.697.219,00
15	Dinas Perhubungan	4.652.354.000,00	4.542.984.596,00	97,65	3.948.470.111,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.166.542.061,00	5.108.757.798,00	98,88	4.437.432.997,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.068.288.289,00	5.931.769.068,00	97,75	5.490.967.531,00
18	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.518.578.200,00	4.455.430.727,00	98,60	3.967.507.085,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.946.778.346,00	3.803.845.062,00	96,38	3.811.322.929,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.221.658.870,00	4.218.772.183,00	99,93	3.898.817.294,00
21	Dinas Perikanan	3.859.444.100,00	3.760.264.035,00	97,43	3.421.368.714,00
22	Dinas Pariwisata	4.238.226.960,00	4.190.494.790,00	98,87	3.791.450.961,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14.818.099.040,00	14.649.627.639,00	98,86	13.606.061.467,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.922.021.601,00	5.869.344.709,00	99,11	5.095.406.197,00
25	Sekretariat Daerah	13.952.356.000,00	13.329.714.433,00	95,54	13.303.847.710,00
26	Sekretariat DPRD	18.849.029.536,00	18.686.002.512,00	99,14	18.562.324.152,00
27	Inspektorat Daerah	6.248.301.970,00	6.093.493.581,00	97,52	4.998.974.910,00

No.	No. SKPD 2022			2021	
NO.	NO. SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
28	Kecamatan Arut Selatan	9.138.936.211,00	8.908.885.817,00	97,48	8.426.727.685,00
29	Kecamatan Arut Utara	2.748.273.927,00	2.711.811.386,00	98,67	2.621.561.507,00
30	Kecamatan Kumai	5.155.753.244,00	5.086.741.113,00	98,66	4.656.921.845,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.703.114.000,00	3.659.843.175,00	98,83	3.297.924.427,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	2.035.772.000,00	1.899.850.304,00	93,32	1.817.044.905,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.308.346.136,00	2.276.538.706,00	98,62	2.208.273.152,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.303.552.884,00	5.139.853.109,00	96,91	4.539.021.922,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.819.851.469,00	4.811.976.697,00	99,84	5.398.941.818,00
36	Badan Pendapatan Daerah	4.995.738.120,00	4.704.002.526,00	94,16	4.524.208.630,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.048.578.330,00	3.989.491.505,00	98,54	3.695.858.652,00
_	Jumlah	646.615.341.452,00	573.130.613.844,05	88,64	533.526.478.475,48

## 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
406.861.944.120.00	378.837.074.585.15	331.364.771.908.23		

Realisasi Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp378.837.074.585,15 atau tercapai 93,11% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp406.861.944.120,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp331.364.771.908,23. Rincian Belanja Barang dan Jasa Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.21 Rincian Belanja Barang dan Jasa

No.	Urajan 2022				2021
NO.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Barang Pakai Habis	75.962.166.642,00	72.036.643.159,00	94,83	60.807.306.893,09
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	757.357.723,00	747.680.175,00	98,72	146.660.851,00
3	Belanja Jasa Kantor	106.824.547.954,00	99.186.551.712,00	92,85	126.584.275.071,50
4	Belanja luran Jaminan/Asuransi	26.696.846.970,00	25.860.180.245,00	96,87	13.098.737.286,96
5	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.561.351.668,00	2.385.804.300,00	93,15	1.173.259.500,00
6	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.007.739.225,00	936.432.802,00	92,92	559.210.000,00
7	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	7.007.500,00	7.007.500,00	100,00	62.200.000,00
8	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	3.163.046.300,00	3.144.907.578,00	99,43	3.550.026.800,00
9	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	5.043.527.000,00	4.051.447.136,00	80,33	2.014.779.480,00
10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availibility Payment)	162.625.000,00	153.693.279,00	94,51	337.671.463,00
11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	487.427.000,00	450.138.000,00	92,35	267.252.500,00
12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.022.480.920,00	3.841.281.895,00	95,50	1.916.263.203,00

No.	Uraian		2022		
NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.333.070.845,00	4.909.071.095,00	92,05	4.444.240.433,00
14	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	3.827.263.547,00	3.794.552.510,00	99,15	1.415.287.009,00
15	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	12.035.305.218,00	12.016.345.647,00	99,84	6.476.946.831,00
16	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	ı	1	-	1.805.000,00
17	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	54.600.962.672,00	47.835.303.982,00	87,61	27.726.669.127,50
18	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.295.528.428,00	11.285.072.336,00	99,91	927.950.000,00
19	Belanja Barang dan Jasa BOS	23.291.550.611,00	22.463.272.578,15	96,44	15.286.997.993,18
20	Belanja Barang dan Jasa BLUD	69.782.138.897,00	63.731.688.656,00	91,33	64.567.232.466,00
	Jumlah	406.861.944.120,00	378.837.074.585,15	93,11	331.364.771.908,23

Belanja Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.22 Daftar Belanja Barang dan Jasa pada SKPD

Ma	CKDD		2022		2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	40.678.661.036,00	38.908.733.061,15	95,65	36.146.620.305,58
2	Dinas Kesehatan	141.532.550.212,00	129.550.524.618,00	91,53	151.700.965.768,09
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	36.093.408.105,00	35.425.190.713,00	98,15	23.659.696.120,50
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	13.663.358.940,00	13.512.628.567,00	98,90	2.152.888.986,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	4.354.088.121,00	4.215.997.883,00	96,83	3.807.000.292,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.497.634.711,00	2.397.978.136,00	96,01	1.216.271.425,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	6.611.505.270,00	5.491.884.835,00	83,07	7.626.664.434,00
8	Dinas Sosial	2.313.610.312,00	2.139.393.961,00	92,47	1.913.386.395,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.274.383.809,00	3.173.976.265,00	96,93	1.870.868.248,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.391.530.733,00	4.166.977.889,00	77,29	2.431.541.782,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	1.520.258.835,00	1.362.093.471,00	89,60	1.098.126.827,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	16.667.152.145,00	16.061.740.075,00	96,37	12.738.960.317,00
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2.099.008.638,00	1.803.167.116,00	85,91	1.268.656.756,00
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.889.363.857,00	2.852.934.263,00	98,74	2.112.988.490,00
15	Dinas Perhubungan	5.641.338.386,00	5.330.688.225,00	94,49	3.150.095.519,00
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	4.022.521.626,00	3.949.749.663,00	98,19	3.931.424.985,00
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	8.011.507.136,00	7.301.634.606,00	91,14	5.282.081.399,00
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.150.091.732,00	1.890.697.885,00	87,94	884.372.050,84
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.166.444.156,00	5.886.099.776,00	95,45	2.232.625.060,00

NI.	OKDD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1.868.102.645,00	1.727.272.749,00	92,46	1.018.851.036,00
21	Dinas Perikanan	11.359.598.439,00	11.225.904.347,00	98,82	8.896.531.812,00
22	Dinas Pariwisata	1.782.703.384,00	1.690.998.355,00	94,86	1.589.108.201,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.040.874.899,00	9.483.804.943,00	94,45	4.271.034.100,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	6.410.134.676,00	5.676.959.003,00	88,56	4.476.489.880,00
25	Sekretariat Daerah	19.821.488.233,00	17.987.440.985,00	90,75	13.976.742.745,00
26	Sekretariat DPRD	15.848.371.191,00	13.871.009.562,00	87,52	8.597.357.671,00
27	Inspektorat Daerah	3.543.363.620,00	3.246.181.322,00	91,61	2.745.676.040,72
28	Kecamatan Arut Selatan	4.630.407.814,00	4.416.691.556,00	95,38	3.943.661.079,00
29	Kecamatan Arut Utara	1.011.757.081,00	998.395.089,00	98,68	689.575.915,00
30	Kecamatan Kumai	2.066.911.264,00	1.916.237.514,00	92,71	1.642.037.458,50
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.993.930.597,00	1.937.416.850,00	97,17	1.418.686.029,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	684.598.506,00	580.774.687,00	84,83	289.619.156,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	815.444.261,00	779.261.369,00	95,56	398.187.677,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	4.586.126.227,00	4.425.484.878,00	96,50	2.559.198.127,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	6.197.254.919,00	5.588.318.043,00	90,17	4.107.653.860,00
36	Badan Pendapatan Daerah	4.072.175.723,00	3.468.012.218,00	85,16	2.424.448.550,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.550.282.881,00	4.394.820.107,00	96,58	3.094.677.411,00
	Jumlah	406.861.944.120,00	378.837.074.585,15	93,11	331.364.771.908,23

#### 5.1.2.1.3 Belanja Bunga

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
563.500.000,00	563.499.999,00	847.000.000,00		

Realisasi Belanja Bunga sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp563.499.999,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp563.500.000,00 yang merupakan Belanja Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah, sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Bunga sebesar Rp847.000.000,00.

#### 5.1.2.1.4 Belanja Hibah

39.493.096.972,00	38.161.646.553,00	19.304.426.304,12
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Belanja Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.161.646.553,00 atau tercapai 96,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp39.493.096.972,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Hibah sebesar Rp19.304.426.304,12. Belanja Hibah dialokasikan kepada Pemerintah Pusat, Badan/Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Dana BOS, serta Bantuan Partai Politik dengan rincian pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.23 Rincian Belanja Hibah

No.	Uraian	2022		2022	
NO.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	7.929.204.852,00	7.896.423.700,00	99,59	2.442.631.901,12
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	22.168.692.074,00	15.461.561.871,00	69,75	15.561.474.403,00
3	Belanja Hibah Dana BOS	7.444.720.046,00	12.853.180.982,00	172,65	-
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.950.480.000,00	1.950.480.000,00	100,00	1.300.320.000,00
	Jumlah	39.493.096.972,00	38.161.646.553,00	96,63	19.304.426.304,12

Adapun rincian penerima Hibah tahun 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada Lampiran 5.2.

## 5.1.2.1.5 Belanja Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial baik masyarakat pada umumnya maupun pegawai Pemerintah pada khususnya.

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
2.027.000.000,00	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00		

Realisasi Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.025.200.000,00 atau tercapai 99,91% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.027.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp1.766.928.000,00. Di bawah ini adalah rincian Belanja Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021:

Tabel 5.24 Rincian Belanja Bantuan Sosial

No	Uraian		2022		2021
NO	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	1.647.000.000,00	1.645.200.000,00	99,89	1.751.928.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang - yang direncanakan kepada Individu	1.647.000.000,00	1.645.200.000,00	99,89	1.584.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial - Barang yang direncanakan kepada Individu	•	-		167.928.000,00
2	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	15.000.000,00
	Belanja Bantuan Sosial Uang - yang direncanakan kepada Keluarga	380.000.000,00	380.000.000,00	100,00	15.000.000,00
	Jumlah	2.027.000.000,00	2.025.200.000,00	99,91	1.766.928.000,00

Adapun rincian penerima Bantuan Sosial tahun 2022 masing-masing SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.** 

## 5.1.2.2 Belanja Modal

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
303.284.543.381,00	270.539.145.420,00	413.698.499.168,58

Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp270.539.145.420,00 atau tercapai 89,20% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp303.284.543.381,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal sebesar Rp413.698.499.168,58. Belanja Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 terdiri dari:

Tabel 5.25 Rincian Belanja Modal

No.	Uraian		2022		
NO.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Tanah	55.399.200,00	1.061.200,00	1,92	100.900.000,00
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	79.195.810.588,00	75.230.158.868,00	94,99	69.514.111.613,00
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	91.099.303.077,00	89.604.333.064,00	98,36	171.955.314.980,00
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	129.972.018.987,00	102.987.368.793,00	79,24	167.205.556.475,58
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.962.011.529,00	2.716.223.495,00	91,70	4.922.616.100,00
	Jumlah	303.284.543.381,00	270.539.145.420,00	89,20	413.698.499.168,58

## 5.1.2.2.1 Belanja Modal Tanah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
55.399.200,00	1.061.200,00	100.900.000,00

Belanja Modal Tanah berupa pensertifikatan Tanah Persil sampai dengan 31 Desember 2022 terealisasi sebesar Rp1.061.200,00 atau hanya tercapai 1,92% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp55.399.200,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp100.900.000,00. Rendahnya realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2022 dikarenakan terbitnya peraturan baru bahwa untuk pensertifikatan Tanah Pemerintah Daerah tidak lagi dipungut Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Belanja Modal Tanah masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.26 Daftar Belanja Modal Tanah pada SKPD

No.	SKPD	2022			2021
NO.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Kesehatan	31.500.000,00	-	-	-
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.574.200,00	1.061.200,00	29,69	-
3	Dinas Perhubungan	6.300.000,00	-	-	-
4	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM	6.300.000,00	1	-	-
5	Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutura dan Perkebunan	525.000,00	1	-	-

No.	SKPD	2022			2021
		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
6	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.200.000,00	-	-	100.900.000,00
	Jumlah	55.399.200,00	1.061.200,00	1,92	100.900.000,00

# 5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
79.195.810.588.00	75.230.158.868.00	69.514.111.613.00		

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp75.230.158.868,00 atau tercapai 94,99% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp79.195.810.588,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp69.514.111.613,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.27 Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin

NI.	Uraian	2022			2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Alat Besar	157.604.298,00	157.532.740,00	99,95	223.453.481,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	14.588.457.361,00	13.183.161.428,00	90,37	7.454.159.800,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	123.377.079,00	122.347.629,00	99,17	125.138.400,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	170.374.442,00	149.845.880,00	87,95	204.582.000,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	16.532.507.513,00	15.561.852.363,00	94,13	7.994.935.419,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	4.587.115.144,00	4.565.925.105,00	99,54	447.050.805,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	27.096.589.667,00	25.994.103.219,00	95,93	22.904.667.394,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	10.587.480.969,00	10.210.354.849,00	96,44	11.582.756.697,00
9	Belanja Modal Komputer	4.831.552.030,00	4.766.933.727,00	98,66	3.331.416.432,00
10	Belanja Modal Alat Eksplorasi	-	-	-	8.124.996,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	197.113.937,00	196.929.780,00	99,91	6.000.000,00
12	Belanja Modal Alat Peraga	100.000.000,00	98.500.000,00	98,50	-
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	213.807.418,00	213.374.708,00	99,80	764.804.000,00
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	9.830.730,00	9.297.440,00	94,58	91.722.500,00
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	-	-	-	7.404.077.104,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	-	-	-	6.971.222.585,00
	Jumlah	79.195.810.588,00	75.230.158.868,00	94,99	69.514.111.613,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 5.28 Daftar Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada SKPD

No. SKPD		2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	19.847.563.029,00	18.953.455.766,00	95,50	20.466.506.661,00

			2022		2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
2	Dinas Kesehatan	37.782.575.373,00	36.441.072.086,00	96,45	33.698.939.642,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	285.417.163,00	285.124.162,00	99,90	210.249.424,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	481.278.291,00	456.498.480,00	94,85	4.655.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.466.274.879,00	2.036.474.000,00	82,57	1.237.321.000,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	53.156.825,00	53.150.130,00	99,99	23.012.550,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.369.621.344,00	1.803.263.770,00	76,10	78.432.000,00
8	Dinas Sosial	456.025.268,00	433.332.780,00	95,02	31.623.850,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	59.754.487,00	59.612.743,00	99,76	14.137.486,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.043.553.717,00	964.878.161,00	92,46	119.710.987,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	2.735.473.776,00	2.415.754.033,00	88,31	2.814.050.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	384.102.976,00	373.164.320,00	97,15	285.230.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	117.015.900,00	116.757.270,00	99,78	198.378.993,00
14	Dinas Perhubungan	397.013.722,00	393.859.708,00	99,21	772.119.700,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	122.155.148,00	122.153.800,00	100,00	156.265.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	175.587.489,00	171.595.500,00	97,73	80.868.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	236.192.654,00	233.258.500,00	98,76	96.370.000,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	242.044.600,00	241.879.350,00	99,93	269.725.795,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	53.905.885,00	53.825.885,00	99,85	295.756.000,00
20	Dinas Perikanan	246.725.152,00	243.937.300,00	98,87	147.677.000,00
21	Dinas Pariwisata	147.391.844,00	141.893.160,00	96,27	72.961.995,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	212.903.871,00	209.068.900,00	98,20	51.034.500,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	48.781.723,00	30.444.400,00	62,41	2.992.495,00
24	Sekretariat Daerah	3.949.514.754,00	3.850.142.750,00	97,48	4.973.413.882,00
25	Sekretariat DPRD	488.357.273,00	485.113.150,00	99,34	183.785.000,00
26	Inspektorat Daerah	1.493.862.410,00	1.411.092.950,00	94,46	1.758.363.920,00
27	Kecamatan Arut Selatan	226.274.248,00	225.301.831,00	99,57	277.535.800,00
28	Kecamatan Arut Utara	91.983.602,00	91.210.225,00	99,16	50.544.748,00
29	Kecamatan Kumai	142.477.792,00	142.438.000,00	99,97	141.977.205,00
30	Kecamatan Kotawaringin Lama	337.577.911,00	333.381.500,00	98,76	158.508.000,00
31	Kecamatan Pangkalan Lada	82.787.494,00	82.639.500,00	99,82	-
32	Kecamatan Pangkalan Banteng	93.388.603,00	87.177.601,00	93,35	-
33	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	146.015.682,00	140.482.000,00	96,21	274.290.000,00
34	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	489.059.757,00	481.903.839,00	98,54	76.890.000,00
35	Badan Pendapatan Daerah	708.790.157,00	683.651.788,00	96,45	371.873.000,00
36	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	981.205.789,00	981.169.530,00	100,00	118.911.980,00

	No. SKPD		2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi	
		Jumlah	79.195.810.588,00	75.230.158.868,00	94,99	69.514.111.613,00

## 5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

91.099.303.077.00	89.604.333.064.00	171.955.314.980.00
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp89.604.333.064,00 atau tercapai 98,36% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp91.099.303.077,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp171.955.314.980,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.29 Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	2022			2021
NO.		Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	90.209.802.399,00	88.716.729.194,00	98,34	169.319.179.780,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	214.159.261,00	213.706.540,00	99,79	-
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	675.341.417,00	673.897.330,00	99,79	2.636.135.200,00
	Jumlah	91.099.303.077,00	89.604.333.064,00	98,36	171.955.314.980,00

Belanja Modal Gedung dan Bangunan masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.30 Daftar Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada SKPD

Na	CKDD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	32.965.018.545,00	32.814.152.749,00	99,54	17.664.157.010,00
2	Dinas Kesehatan	12.414.335.241,00	12.139.454.078,00	97,79	96.677.305.994,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	23.743.391.500,00	23.731.776.051,00	99,95	36.881.435.525,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.050.140.387,00	1.046.642.130,00	99,67	974.637.400,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	993.635.212,00	867.466.600,00	87,30	-
6	Dinas Sosial	-	-	-	10.373.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	-	-	663.475.000,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	168.414.550,00	167.536.600,00	99,48	1.264.174.000,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	1.315.104.214,00	1.301.457.009,00	98,96	-
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	175.717.800,00	174.201.735,00	99,14	102.132.425,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	-	-	-	75.835.500,00
12	Dinas Perhubungan	2.068.161.802,00	2.064.204.238,00	99,81	7.021.423.225,00

No.	SKPD		2022		2021
NO.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	59.664.165,00	59.663.000,00	100,00	-
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.133.768.654,00	3.130.851.350,00	99,91	311.225.800,00
15	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	96.646.414,00	96.425.640,00	99,77	-
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.361.039.898,00	2.346.977.517,00	99,40	811.193.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	274.975.000,00	238.292.400,00	86,66	
18	Dinas Perikanan	164.970.599,00	163.688.250,00	99,22	1.246.306.804,00
19	Dinas Pariwisata	193.999.900,00	193.374.800,00	99,68	198.960.243,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.182.339.190,00	1.014.249.824,00	85,78	-
21	Sekretariat Daerah	4.794.905.013,00	4.654.653.355,00	97,07	6.246.587.804,00
22	Sekretariat DPRD	199.992.000,00	199.700.000,00	99,85	9.427.000,00
23	Inspektorat Daerah	193.750.000,00	193.350.000,00	99,79	206.550.000,00
24	Kecamatan Arut Selatan	915.088.449,00	413.632.368,00	45,20	134.498.250,00
25	Kecamatan Arut Utara	329.401.390,00	329.400.000,00	100,00	200.000.000,00
26	Kecamatan Kumai	288.400.000,00	286.778.000,00	99,44	165.800.000,00
27	Kecamatan Kotawaringin Lama	417.493.492,00	416.337.800,00	99,72	1.089.817.000,00
28	Kecamatan Pangkalan Lada	4.329.000,00	3.500.000,00	80,85	-
29	Kecamatan Pangkalan Banteng	24.860.000,00	-	-	-
30	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.052.722.207,00	1.041.524.700,00	98,94	-
31	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	400.531.455,00	399.201.900,00	99,67	-
32	Badan Pendapatan Daerah	50.000.000,00	49.456.000,00	98,91	-
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	66.507.000,00	66.384.970,00	99,82	-
	Jumlah	91.099.303.077,00	89.604.333.064,00	98,36	171.955.314.980,00

# 5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

129.972.018.987,00	102.987.368.793,00	167.205.556.475,58
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp102.987.368.793,00 atau tercapai 79,24% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp129.972.018.987,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp167.205.556.475,58 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.31 Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

No. Uraian		2022			2021
No.	Oralali	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	113.764.932.518,00	87.165.017.453,00	76,62	136.946.889.899,87
2	Belanja Modal Bangunan Air	10.710.963.006,00	10.605.013.540,00	99,01	18.285.102.107,00

No. Urajan		2022			2021
No.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
3	Belanja Modal Instalasi	420.070.128,00	418.950.000,00	99,73	11.853.702.468,71
4	Belanja Modal Jaringan	5.076.053.335,00	4.798.387.800,00	94,53	119.862.000,00
	Jumlah	129.972.018.987,00	102.987.368.793,00	79,24	167.205.556.475,58

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.32 Daftar Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	2022			2021
NO.	SKFD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	-	1	-	64.962.000,00
2	Dinas Kesehatan	366.736.800,00	365.750.000,00	99,73	3.517.807.268,71
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	92.448.160.980,00	92.191.225.552,00	99,72	154.203.774.749,87
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	9.235.570.528,00	8.655.867.841,00	93,72	3.505.290.000,00
5	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.887.725.530,00	ı	ı	373.384.000,00
6	Dinas Lingkungan Hidup	-	-	-	4.421.609.900,00
7	Dinas Perhubungan	1.290.062.745,00	1.090.241.000,00	84,51	5.000.000,00
8	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	142.400.967,00	141.891.900,00	99,64	-
9	Dinas Pariwisata	174.991.459,00	174.428.600,00	99,68	-
12	Kecamatan Arut Selatan	173.786.278,00	115.390.400,00	66,40	440.492.827,00
13	Kecamatan Arut Utara	-	-	-	229.913.630,00
14	Kecamatan Kumai	252.583.700,00	252.573.500,00	100,00	443.322.100,00
	Jumlah	129.972.018.987,00	102.987.368.793,00	79,24	167.205.556.475,58

## 5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

2.962.011.529,00	2.716.223.495,00	4.922.616.100,00
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.716.223.495,00 atau tercapai 91,70% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp2.962.011.529,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp4.922.616.100,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021, sebagai berikut:

Tabel 5.33 Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Na	Uraian		2021		
No.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.880.719.614,00	1.644.513.295,00	87,44	104.175.387,00
2	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00	198.444.850,00
3	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	1.031.291.915,00	1.021.710.200,00	99,07	1.570.473.000,00

Na	Uraian	2022			2021
No.	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	-	1	-	3.049.522.863,00
Jumlah		2.962.011.529,00	2.716.223.495,00	91,70	4.922.616.100,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya masing-masing SKPD sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.34 Daftar Belanja Modal Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No	SKDD	2022			2021
No.	SKPD	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.598.865.114,00	1.368.463.795,00	85,59	3.162.432.863,00
2	Dinas Kesehatan	9.090.900,00	8.850.000,00	97,35	21.700.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150.000.000,00	147.263.700,00	98,18	1.406.193.000,00
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	-	-	-	27.070.230,00
5	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	96.533.370,00	96.237.000,00	99,69	-
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	95.425.200,00	94.647.500,00	99,19	15.700.000,00
7	Dinas Perhubungan	89.343.345,00	89.133.000,00	99,76	-
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	350.000.000,00	348.034.500,00	99,44	99.715.000,00
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	-	1	18.865.000,00
10	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	30.000.000,00
11	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	122.713.600,00	122.197.000,00	99,58	15.115.157,00
12	Dinas Pariwisata	99.990.000,00	97.624.500,00	97,63	-
13	Sekretariat DPRD	150.000.000,00	144.985.500,00	96,66	-
14	Inspektorat Kabupaten		-	1	36.000.000,00
15	Kecamatan Arut Utara	-	-	-	32.624.850,00
16	Kecamatan Kumai	-	-	-	52.910.000,00
18	Kecamatan Pangkalan Lada	33.000.000,00	32.967.000,00	99,90	-
19	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	27.150.000,00	27.130.000,00	99,93	4.290.000,00
20	Badan Pendapatan Daerah	100.000.000,00	98.790.000,00	98,79	-
21	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan	9.900.000,00	9.900.000,00	100,00	-
	Jumlah	2.962.011.529,00	2.716.223.495,00	91,70	4.922.616.100,00

# 5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
3.340.010.000,00	2.800,989,203,00	1.547.938.856,00

Belanja Tidak Terduga tahun 2022 dialokasikan untuk penanganan bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 realisasi sebesar Rp2.800.989.203,00 atau tercapai 83,86% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar

Rp3.340.010.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.547.938.856,00.

## 5.1.2.4 Belanja Transfer

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	159.527.761.182,00		

Realisasi Belanja Transfer Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp153.995.484.786,00 atau tercapai 95,63% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp161.038.032.600,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Transfer sebesar Rp159.527.761.182,00 yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan. Rincian Belanja Transfer sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.35 Rincian Belanja Transfer

No	Uraian		2022		2021
NO	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Belanja Bagi Hasil	13.675.814.000,00	10.267.531.800,00	75,08	7.632.280.400,00
	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa	10.541.316.000,00	8.563.191.900,00	81,23	6.492.481.300,00
	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah - Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	3.134.498.000,00	1.704.339.900,00	54,37	1.139.799.100,00
2	Belanja Bantuan Keuangan	147.362.218.600,00	143.727.952.986,00	97,53	151.895.480.782,00
	Belanja Bantuan - Keuangan antar Daerah Provinsi	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00	245.000.000,00
	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	146.877.218.600,00	143.242.952.986,00	97,53	151.650.480.782,00
	Jumlah	161.038.032.600,00	153.995.484.786,00	95,63	159.527.761.182,00

## 5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021		
(Rp)	(Rp)	(Rp)		
13.675.814.000.00	10.267.531.800.00	7.632.280.400.00		

Belanja Bagi Hasil Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari realisasi Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa sebesar Rp8.563.191.900,00 atau tercapai 81,23% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp10.541.316.000,00 serta Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Desa sebesar Rp1.704.339.900,00 atau tercapai 54,37% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp3.134.498.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Bagi Hasil sebesar Rp7.632.280.400,00.

#### 5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
147.362.218.600,00	143.727.952.986,00	151.895.480.782,00

Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 terdiri dari realisasi Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi sebesar Rp485.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp485.000.000,00 serta Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp143.242.952.986,00 atau tercapai 97,53% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp146.877.218.600,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp151.895.480.782,00. Tabel berikut adalah rincian Belanja Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022:

Tabel 5.36 Rincian Belanja Transfer

No.	Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022	%	Lebih/(kurang)
1.	Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Provinsi	485.000.000,00	485.000.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah (Sewa Transponder)	245.000.000,00	245.000.000,00	100,00	-
	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi Kalimantan Tengah (Rejuvenasi/ Revitalisasi/ Renovasi Anjungan Provinsi Kalimantan Tengah Di Taman Mini Indonesia Indah Tahun)	240.000.000,00	240.000.000,00	100,00	-
2.	Bantuan Keuangan Kepada Desa	146.877.218.600,00	143.242.952.986,00	97,53	(3.634.265.614,00)
	Dana Desa	70.631.198.000,00	69.814.093.086,00	98,84	(817.104.914,00)
	Alokasi Dana Desa	70.624.845.600,00	67.807.684.900,00	96,01	(2.817.160.700,00)
	Kurang Salur Alokasi Dana Desa	4.576.249.000,00	4.576.249.000,00	100,00	-
	Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa	1.044.926.000,00	1.044.926.000,00	100,00	-
	Jumlah	147.362.218.600,00	143.727.952.986,00	97,53	3.634.265.614,00

## 5.1.3 Surplus/Defisit

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
(129.600.345.925,00)	(7.071.894.705,68)	172.388.662.233,53

Surplus/Defisit merupakan selisih antara Pendapatan dan Belanja, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (7.071.894.705,68) atau tercapai 5,46% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar (Rp129.600.345.925,00) sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Surplus/Defisit sebesar Rp172.388.662.233,53.

#### 5.1.4 Pembiayaan Netto

Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan, sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

208.920.012.659,00	208.920.012.659,90	89.531.350.426,37
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Pembiayaan Netto sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp208.920.012.659,90 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp208.920.012.659,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pembiayaan Netto sebesar Rp89.531.350.426,37 dengan perhitungan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.37 Perhitungan Pembiayaan Netto

Na	Urajan	2022		2021	
No	Oraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Peneriman Pembiayaan	261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	100,00	130.531.350.426,37
	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	100,00	97.531.350.426,37
	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	1	ı	33.000.000.000,00
2	Pengeluaran Pembiayaan	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100,00	41.000.000.000,00
	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	208.920.012.659,00	208.920.012.659,90	100,00	89.531.350.426,37

## 5.1.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	130.531.350.426,37

Realisasi Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp261.920.012.659,90 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp261.920.012.659,90 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi sebesar Rp130.531.350.426,37. Rincian Penerimaan Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.38 Rincian Penerimaan Pembiayaan

No.	Uraian	2022		2021	
NO.	Oralali	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	100,00	97.531.350.426,37
2	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	1	33.000.000.000,00
	Jumlah	261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	100,00	130.531.350.426,37

## 5.1.4.1.1 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
261.920.012.659,00	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya merupakan penerimaan SiLPA TA.2021, dimana realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp261.920.012.659,90 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp261.920.012.659,90 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya sebesar Rp97.531.350.426,37.

## 5.1.4.1.2 Penerimaan Pinjaman Daerah

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
0.00	0.00	33,000,000,000,00

Penerimaan Pinjaman Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat merupakan Pinjaman Dalam Negeri dari Lembaga Keuangan Bank, dimana tidak terdapat realisasi maupun anggaran yang ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp33.000.000.000,00.

## 5.1.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	41.000.000.000,00
(Rp)	(Rp)	(Rp)
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp53.000.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp53.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp41.000.000.000,00. Rincian Pengeluaran Pembiayaan sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Tabel 5.39 Rincian Pengeluaran Pembiayaan

No. Uraian		2022		2021	
NO.	Uraian	Anggaran	Realisasi	%	Realisasi
1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00	-
2	Penyertaan Modal Daerah	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	33.000.000.000,00	33.000.000.000,00	100,00	36.000.000.000,00
	Jumlah	53.000.000.000,00	53.000.000.000,00	100,00	41.000.000.000,00

#### 5.1.4.2.1 Pembentukan Dana Cadangan

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
5,000,000,000,00	5.000.000.000.00	0.00	

Pembentukan Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk persiapan Pemilihan Kepala Daerah serentak di tahun 2024 realisasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,000 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp5.000.000.000,000 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat realisasi Dana Cadangan.

#### 5.1.4.2.2 Penyertaan Modal Daerah

15,000,000,000,00	15.000.000.000.00	5,000,000,000,00	
(Rp)	(Rp)	(Rp)	
Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	

Realisasi Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 pada PT Bank Pembangunan Kalteng sebesar Rp15.000.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp15.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp5.000.000.000,00.

#### 5.1.4.2.3 Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
33.000.000.000.00	33.000.000.000.00	36.000.000.000.00

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo pada Bank Kalteng sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.000.000.000,00 atau tercapai 100% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp33.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp36.000.000.000,00.

## 5.1.5 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)

Anggaran 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021
(Rp)	(Rp)	(Rp)
79.319.666.734,00	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) berdasarkan Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22 sedangkan SiLPA sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90. Rincian Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

# Tabel 5.40 Rincian SiLPA

No.	Sumber Dana/Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas yang Dibatasi Penggunaannya	8.293.528.644,00	25.654.132.368,80
	- DBH DR	3.768.896.836,00	14.509.124.135,00
	- DBH CHT	16.585.362,00	16.585.362,00
	- DAK FISIK:		
	- Silpa TAYL	388.017.239,00	557.378.568,80
	- Murni	71.803.277,00	-
	- DAK NONFISIK:		
	- BOP PAUD	23.469.000,00	621.272.450,00
	- BOKB	848.619.098,00	66.205.899,00
	- BOK	1.804.270.520,00	5.004.347.573,00
	- TPG	461.212.010,00	3.565.485.476,00
	- Tamsil	95.250.000,00	545.250.000,00
	- TKG	26.294.430,00	188.714.400,00
	- Adminduk	38.085.351,00	323.223.714,00
	- BOP Kesetaraan	-	52.638.750,00
	- P2UKM	2.905.158,00	90.961.158,00
	- Kepariwisataan	12.800.000,00	12.800.000,00
	- FPM	101.512.000,00	94.084.835,00
	- KPP	57.054.380,00	6.060.048,00
	- PPA	184.665.224,00	-
	- DID	392.088.759,00	-
2	Kas yang Penggunaannya Umum	93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
3	Silpa Dana BOS	65.946.613,38	198.943.550,53
4	Silpa Dana JKN	200.186.748,00	533.961,00
5	Silpa BLUD	99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
6	Silpa BOP PAUD di Rekening Satuan Pendidikan	6.699,00	-
7	Silpa BOP Kesetaraan di Rekening Satuan Pendidikan	-	-
8	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.191.100,00	20.277.093,00
9	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	17.389.789,00	5.095.194,00
	SiLPA	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

## 5.2 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) merupakan laporan keuangan yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos berikut: Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya, dan Saldo Anggaran Lebih Akhir. Penjelasan mengenai kenaikan/penurunan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.41 Kenaikan/Penurunan Saldo Anggaran Lebih

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	261.920.012.659,90	97.531.350.426,37
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	(261.920.012.659,90)	(97.531.350.426,37)
3	Subtotal (1 + 2)		-
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
5	Subtotal (3 + 4)	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
	Saldo Anggaran Lebih Akhir	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

## 5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
261.920.012.659.90	97.531.350.426.37	

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 merupakan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp261.920.012.659,90, sedangkan Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2021 sebesar Rp97.531.350.426,37.

#### 5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
(261.920.012.659,90)	(97.531.350.426,37)	

Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2022 dipergunakan seluruhnya sebagai Penerimaan Pembiayaan untuk Tahun Anggaran 2022 yaitu sebesar (Rp261.920.012.659,90), demikian juga pada Tahun Anggaran 2021 sebesar (Rp97.531.350.426,37).

# 5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
201.848.117.954.22	261.920.012.659.90	

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) Tahun 2022 Rp201.848.117.954,22 adalah sebesar SiLPA pada Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, sedangkan pada Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90.

# 5.2.4 Saldo Anggaran Lebih Akhir

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2022 Rp201.848.117.954,22 mengalami penurunan sebesar (Rp60.071.894.705,68) atau 22,94 persen dibandingkan dengan Saldo Anggaran Lebih Akhir Tahun 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90.

## 5.3 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Neraca

Neraca merupakan laporan keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.42 Ringkasan Neraca

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset	3.431.526.533.551,62	3.387.967.337.153,31
2	Kewajiban	27.064.327.055,25	116.879.838.917,43
3	Ekuitas	3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88
	Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	3.431.526.533.551,62	3.387.967.337.153,31

Rincian dan penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Neraca Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1 Aset

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.431.526.533.551,62	3.387.967.337.153,31

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Aset per 31 Desember 2022 senilai Rp3.431.526.533.551,62 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp3.387.967.337.153,31 yang terdiri dari:

Tabel 5.43 Rincian Aset

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Aset Lancar	299.450.512.413,73	359.195.622.322,60
2	Investasi Jangka Panjang	150.901.062.447,39	135.835.164.064,45
3	Aset Tetap	2.886.552.976.376,43	2.843.370.821.272,03
4	Dana Cadangan	5.000.000.000,00	-
5	Aset Lainnya	89.182.372.806,87	49.565.729.494,23
6	Properti Investasi	439.609.507,20	-
	Jumlah	3.431.526.533.551,62	3.387.967.337.153,31

## 5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
299.450.512.413,73	359.195.622.322,60	

Jumlah Aset Lancar bersih per 31 Desember 2022 senilai Rp299.450.512.413,73 dan per 31 Desember 2021 senilai Rp359.195.622.322,60 dengan rincian pada tabel di bawah ini:

#### **Tabel 5.44 Rincian Aset Lancar**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kas di Kas Daerah	93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	17.389.789,00	5.095.194,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	12.191.100,00	20.277.093,00
4	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	200.186.748,00	533.961,00
5	Kas di BLUD	99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
6	Kas Dana BOS	65.946.613,38	198.943.550,53
7	Kas Lainnya-Dana BOP	6.699,00	-
8	Piutang Pajak Daerah	49.552.603.804,10	44.711.059.810,17
9	Penyisihan Piutang Pajak Daerah	(34.890.103.912,60)	(31.572.099.488,31)
10	Piutang Retribusi Daerah	3.351.962.234,50	2.905.509.406,50
11	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(2.027.667.398,88)	(1.096.421.324,98)
12	Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	84.974,00	170.247.730,00
13	Piutang Bagi Hasil	37.692.763.745,55	34.625.557.401,92
14	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	11.180.355.723,00	22.897.522.223,00
15	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(1.467.630.183,85)	(2.221.254.721,00)
16	Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	21.096.474,00	40.570.143,00
17	Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	(21.096.474,00)	(40.570.143,00)
18	Beban Dibayar Di Muka	480.749.278,28	335.234.824,33
19	Persediaan	42.022.804.839,41	52.174.386.169,87
	Jumlah	299.450.512.413,73	359.195.622.322,60

#### 5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
93.963.371.891,25	68.450.111.633,93

Kas Di Kas Daerah adalah saldo Kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah per 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp93.963.371.891,25 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp68.450.111.633,93 yang disimpan pada rekening Bank Pembangunan Kalteng (BPK), BNI dan BRI Cabang Pangkalan Bun. Rinciannya adalah sebagai berikut:

## Tabel 5.45 Rincian Kas Di Rekening Kas Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Bank Kalteng		
	Kas Daerah No. 4000101000002	77.870.316.170,63	72.002.049.329,64
2	BNI		
	Rekening No. 008 142 6262	12.914.222.347,00	2.397.271.820,00
3	BRI		
	Rek. Pendapatan No. 0282 01 000447-30-3	-	7.550.000,00
	Kas Daerah No. 000278-30-6	11.473.845.370,62	19.697.420.853,09
	Jumlah	102.258.383.888,25	94.104.292.002,73

Berdasarkan tabel di atas, Saldo Kas di Rekening Kas Daerah sebesar Rp102.258.383.888,25 berbeda dengan Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp93.963.371.891,25 sehingga terdapat selisih sebesar Rp8.295.011.997,00 dengan penjelasan sebagai berikut:

#### Penambahan:

- Kas yang Dibatasi Penggunaannya sebesar Rp8.293.528.644,00 telah dicatat pada akun Aset Lainnya; dan
- Kurang debet dari rekening Kasda atas SP2D PUPR No.14.04/04.0/001112/ls/ 1.03.0.00.00.01.0000/p.03/12/2022 tanggal 19 Desember 2022 sebesar nilai bersihnya Rp1.729.529,00.

**Pengurangan:** *Double* debet dari rekening Kasda atas SP2D Dinas Kesehatan Hewan No.529 tanggal 26 dan 27 Desember 2022 berupa pembayaran BPJS (Rp246.176,00).

### 5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Pengeluaran

17.389.789,00	5.095.194,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Kas Di Bendahara Pengeluaran merupakan saldo Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang masih ada di tangan Bendahara Pengeluaran SKPD per 31 Desember 2022 sebesar Rp17.389.789,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp5.095.194,00 Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran terdapat pada tabel berikut:

### Tabel 5.46 Rincian Kas Di Bendahara Pengeluaran

N -	OKAD	31 Desember 2022		
No.	SKPD	Nilai	Tgl Setor	31 Desember 2021
1	Kecamatan Pangkalan Lada	2.575.800,00	30 Januari 2023	-
2	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	-	5.054.542,00
3	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	14.768.989,00	1 Januari 2023	-
4	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	45.000,00	10 Januari 2023	-
5	Dinas Sosial	-	-	40.652,00
	Jumlah	17.389.789,00		5.095.194,00

#### 5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
12.191.100.00	20,277,093,00

Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas di tangan Bendahara Penerimaan SKPD atas pendapatan tahun berjalan tetapi saat tanggal pelaporan belum disetorkan ke Kas Daerah, dimana per 31 Desember 2022 saldonya sebesar Rp12.191.100,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp20.277.093,00. Saldo Kas di Bendahara Penerimaan terdapat pada SKPD:

#### Tabel 5.47 Rincian Kas Di Bendahara Penerimaan

		31 Desember 2022		
No.	SKPD	Nilai	Tgl Setor	31 Desember 2021
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	-	-	12.361.968,00
2	Dinas Kesehatan	11.065.000,00	2 Januari 2023	2.956.000,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.126.100,00	2 & 5 Januari 2023	4.959.125,00
	Jumlah	12.191.100,00		20.277.093,00

# 5.3.1.1.4 Kas Dana Kapitasi pada FKTP

200 186 748 00	533 961 00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Kas Dana Kapitasi pada FKTP per 31 Desember 2022 sebesar Rp200.186.748,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp533.961,00 merupakan saldo kas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang terdapat pada 18 Puskesmas di Kabupaten Kotawaringin Barat sebagaimana terinci dalam tabel berikut:

Tabel 5.48 Rincian Kas Dana Kapitasi pada FKTP

No.	Puskesmas	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1.	Arut Selatan	1.360,00	440,00
2.	Mendawai	95.991.000,00	1
3.	Madurejo	2.570,00	1.657,00
4.	Kumai	21.113,00	196.621,00
5.	Sungai Rangit	39.130,00	4.472,00
6.	Pangkalan Lada	7.242.447,00	17.450,00
7.	Semanggang	2.600,00	10.135,00
8.	Natai Pelingkau	16,00	43,00
9.	Kumpai batu Atas	3.575.994,00	43,00
10.	Teluk Bogam	160,00	100,00
11.	Kotawaringin Lama	1.154.030,00	450,00
12.	Arut Utara	245.720,00	1.420,00
13.	Karang Mulya	27.580.871,00	263.685,00
14.	Pandu Senjaya	60.821.500,00	14.702,00
15.	Riam Durian	3.164.950,00	19.260,00
16.	Sambi	317.600,00	200,00
17.	Runtu	2,00	3,00
18.	Ipuh Bangun Jaya	25.685,00	3.280,00
	Jumlah	200.186.748,00	533.961,00

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana Kapitasi pada FKTP tahun 2022 terdapat pada Lampiran 5.4.

#### 5.3.1.1.5 Kas di BLUD

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
99.295.496.469,59	167.590.918.858,64

Kas di BLUD adalah saldo kas atas pengelolaan dan pemanfaatan dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada RSUD Sultan Imanuddin per 31 Desember 2022 sebesar Rp99.295.496.469,59 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp167.590.918.858,64. Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana BLUD tahun 2022 terdapat pada Lampiran 5.5.

### **5.3.1.1.6 Kas Dana BOS**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
65.946.613,38	198.943.550,53

Kas Dana BOS merupakan saldo kas atas Dana BOS yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh Sekolah-sekolah Negeri Tingkat Dasar sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Sejak tahun 2020, pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Satdik di Kabupaten Kotawaringin Barat mulai menggunakan Sistem Informasi Pengadaan di Sekolah (SIPLah) untuk meningkatkan transparansi dan kemudahan bagi Satuan Pendidikan (Satdik) dalam administrasi dan pelaporan, serta bagi UMKM untuk turut serta hadir sebagai penyedia barang dan jasa. Saldo Kas Dana BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp65.946.613,38 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp198.943.550,53 terdiri dari:

Tabel 5.49 Rincian Kas Dana BOS

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Sekolah Dasar Negeri (SDN)	33.326.689,38	104.208.074,38
2	Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN)	32.619.924,00	94.735.476,15
	Jumlah	65.946.613,38	198.943.550,53

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana BOS tahun 2022 terdapat pada Lampiran 5.6.

#### 5.3.1.1.7 Kas Lainnya-Dana BOP

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
6.699,00	0,00

Kas Lainnya merupakan saldo kas atas Dana BOP yang ditransfer dari Pemerintah Pusat untuk dikelola langsung oleh Sekolah-sekolah Negeri PAUD dan Pendidikan Kesetaraan sesuai kewenangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.699,00 sedangkan per 31 Desember 2021 tidak terdapat saldo Kas Lainnya, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.50 Rincian Kas Lainnya

No.	Jenjang Pendidikan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	6.699,00	-
2	Pendidikan Kesetaraan	-	-
	Jumlah	6.699,00	-

Adapun rincian penerimaan dan pengeluaran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan tahun 2022 terdapat pada **Lampiran 5.7.** 

### 5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

49.552.603.804,10	44.711.059.810,17
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.552.603.804,10 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp44.711.059.810,17. Jumlah Piutang Pajak Daerah ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Pajak Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Pajak belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.51 Rincian Piutang Pajak Daerah

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Piutang Pajak Hotel	274.885.431,50	342.685.007,00
2	Piutang Pajak Restoran	120.908.002,13	139.585.296,43
3	Piutang Pajak Hiburan	13.856.006,40	13.856.000,20
4	Piutang Pajak Reklame	429.982.341,56	394.988.131,56
5	Pajak Penerangan Jalan	208.154.508,52	9.041.605,99
6	Pajak Parkir	400.000,00	5.075.200,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	134.000,00	600,00
8	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	17.600.000,00	17.600.000,00
9	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	164.570.800,99	164.327.402,99
10	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	48.302.743.163,00	43.604.531.016,00
11	Piutang BPHTB	19.369.550,00	19.369.550,00
	Jumlah	49.552.603.804,10	44.711.059.810,17

Sedangkan daftar Piutang Pajak Daerah yang disajikan per tahun dapat dilihat di bawah ini:

Tabel 5.52 Daftar Piutang Pajak Daerah per Tahun

No.	Tahun Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2010	3.290.500,00	3.290.500,00
2	2011	8.063.925,00	8.063.925,00
3	2012	8.390.500,00	8.390.500,00

No.	Tahun Piutang Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
4	2013	4.842.500,00	4.842.500,00
5	2014	930.000,00	930.000,00
6	2015	1.232.000,00	1.232.000,00
7	2016	4.118.500,00	4.118.500,00
8	2017	106.382.462,46	106.382.462,46
9	2018	116.324.155,62	119.272.905,62
10	2019	218.268.426,40	220.650.426,40
11	2020	384.427.566,00	456.545.166,00
12	2021	58.772.066,20	172.809.908,69
13	2022	334.818.039,42	-
14	1994-2021	-	43.604.531.016,00
15	1994-2022	48.302.743.163,00	-
	Jumlah	49.552.603.804,10	44.711.059.810,17

# 5.3.1.1.9 Penyisihan Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(34.890.103.912.60)	(31.572.099.488,31)

Saldo Penyisihan Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp34.890.103.912,60) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp31.572.099.488,31) dengan rincian pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.53 Rincian Penyisihan Piutang Pajak Daerah

No.	Jenis Pajak	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pajak Hotel	(48.844.090,57)	(42.118.639,90)
2	Pajak Restoran	(54.325.326,26)	(54.847.423,49)
3	Pajak Hiburan	(5.172.000,32)	(5.172.000,01)
4	Pajak Reklame	(214.214.573,33)	(200.352.267,83)
5	Pajak Penerangan Jalan	(10.407.725,43)	(452.080,30)
6	Pajak Parkir	(155.000,00)	(268.760,00)
7	Pajak Air Tanah	(6.700,00)	(30,00)
8	Pajak Sarang Burung Walet	(13.100.000,00)	(5.950.000,00)
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(120.141.400,59)	(101.636.891,79)
10	Pajak Bumi dan Bangunan	(34.404.367.546,10)	(31.150.955.970,00)
11	ВРНТВ	(19.369.550,00)	(10.345.425,00)
	Jumlah	(34.890.103.912,60)	(31.572.099.488,31)

# 5.3.1.1.10 Piutang Retribusi Daerah

3.351.962.234.50	2.905.509.406.50
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.351.962.234,50 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp2.905.509.406,50. Jumlah Piutang Retribusi Daerah ini merupakan hasil verifikasi/perhitungan data Surat Ketetapan Retribusi Daerah dan/atau persamaannya yang diterbitkan oleh SKPD, akan tetapi saat tanggal pelaporan Wajib Retribusi belum menyetorkan ke Kas Daerah. Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.54 Rincian Piutang Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD/Jenis Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	54.675.000,00	48.930.000,00
2	Dinas Kesehatan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	84.300.000,00	133.525.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.516.883,50	12.635.884,50
4	Dinas Perhubungan		
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.891.376.000,00	1.891.376.000,00
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	216.700.000,00	204.700.000,00
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	51.143.943,00	50.197.789,00
6	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	25.380.000,00	25.950.000,00
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Retribusi Pelayanan Pasar	842.418.700,00	372.743.025,00
8	Sekretariat Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	56.200.000,00	37.150.000,00
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	14.774.208,00	14.774.208,00
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	109.017.500,00	109.017.500,00
	Retribusi Situ	340.000,00	340.000,00
10	Dinas Perikanan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah		1.500.000,00
11	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.850.000,00	1.400.000,00
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.270.000,00	1.270.000,00
	Jumlah	3.351.962.234,50	2.905.509.406,50

Sedangkan daftar Piutang Retribusi Daerah yang disajikan per tahun dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 5.55 Daftar Piutang Retribusi Daerah per Tahun

No.	Tahun Piutang Retribusi	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	2009	285.000,00	285.000,00
2	2010	28.480.000,00	28.480.000,00
3	2011	2.880.000,00	3.570.000,00
4	2012	5.800.000,00	5.110.000,00
5	2013	14.304.508,00	14.304.508,00
6	2014	40.179.508,00	41.079.508,00
7	2015	42.575.873,00	83.501.725,00
8	2016	36.890.000,00	32.430.000,00
9	2017	70.457.000,00	75.292.900,00
10	2018	248.575.600,00	248.034.600,00
11	2019	39.840.850,00	32.015.850,00
12	2020	553.373.058,00	692.211.306,00
13	2021	1.530.066.800,00	1.649.194.009,50
14	2022	738.254.037,50	-
	Jumlah	3.351.962.234,50	2.905.509.406,50

# 5.3.1.1.11 Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(2.027.667.398.88)	(1.096.421.324.98)

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp2.027.667.398,88) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp1.096.421.324,98) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.56 Rincian Penyisihan Piutang Retribusi Daerah pada SKPD

No.	SKPD/Jenis Pajak Retribusi Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(13.965.750,00)	(2.446.500,00)
2	Dinas Kesehatan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(43.796.250,00)	(46.505.000,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(125.844,18)	(631.794,23)
4	Dinas Perhubungan		
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	(1.259.601.000,00)	(497.141.000,00)
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	(201.500.000,00)	(162.750.000,00)
5	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian		
	Retribusi Pengendalian Menara dan Telekomunikasi	(50.245.096,70)	(50.197.789,00)
6	Dinas Lingkungan Hidup		
	Retribusi Pelayanan Kebersihan	(25.192.500,00)	(25.322.500,00)

No.	SKPD/Jenis Pajak Retribusi Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah		
	Retribusi Pelayanan Pasar	(285.245.500,00)	(176.207.533,75)
8	Sekretariat Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(22.501.250,00)	(8.997.500,00)
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu		
	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	(14.774.208,00)	(14.774.208,00)
	Retribusi SITU	(340.000,00)	(340.000,00)
	Retribusi Izin Gangguan Keramaian	(109.017.500,00)	(109.017.500,00)
10	Dinas Perikanan		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	-	(750.000,00)
11	Kecamatan Pangkalan Banteng		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(92.500,00)	(70.000,00)
12	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah		
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	(1.270.000,00)	(1.270.000,00)
	Jumlah	(2.027.667.398,88)	(1.096.421.324,98)

# 5.3.1.1.12 Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
84.974.00	170.247.730.00

Saldo Piutang Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21 per 31 Desember 2022 sebesar Rp84.974,00 merupakan hasil perhitungan kelebihan potongan atas PPh 21 pegawai dari tahun 2015 s.d 2022 sedangkan per 31 Desember 2021 saldonya sebesar Rp170.247.730,00.

#### 5.3.1.1.13 Piutang Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
37.692.763.745,55	34.625.557.401,92

Saldo Piutang Bagi Hasil per 31 Desember 2022 total sebesar Rp37.692.763.745,55 dicatat berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah:

- Nomor 188.44/128/2022 Tanggal 14 Maret 2023 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap IV Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp26.532.582.772,43 dan telah dikredit ke rekening Kas Daerah pada tanggal 5 April 2023.
- Nomor 188.44/174/2023 Tanggal 28 April 2023 tentang Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Daerah Tahap V Kepada Kabupaten/Kota Se Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2022 yang Disalurkan Pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp9.238.905.894,12.
- Nomor 188.44/175/2023 Tanggal 28 April 2023 tentang Alokasi Definitif Pajak Rokok Kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan Dana Bagi Hasil Pajak Rokok Kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Tengah Bulan Desember

Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.921.275.079,00 telah dikredit ke rekening Kas Daerah pada tanggal 3 Mei 2023.

sedangkan per 31 Desember 2021 saldo Piutang Bagi Hasil sebesar Rp34.625.557.401,92. Di bawah ini adalah rinciannya:

**Tabel 5.57 Rincian Piutang Bagi Hasil** 

No.	Bagi Hasil Pajak Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pajak Kendaraan Bermotor	5.148.690.310,72	6.393.641.829,11
2	Bea Balik Nama – Kendaraan Bermotor	5.382.422.695,07	5.646.063.402,08
3	Pajak Air Permukaan	90.828.732,65	38.241.584,10
4	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	25.149.546.928,11	20.526.157.591,63
5	Bagi Hasil dari Pajak Rokok	1.921.275.079,00	2.021.452.995,00
	Jumlah	37.692.763.745,55	34.625.557.401,92

# 5.3.1.1.14 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
11.180.355.723,00	22.897.522.223,00

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah merupakan Piutang atas Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD yang dikelola oleh RSUD Sultan Imanuddin. Saldo Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.180.355.723,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp22.897.522.223,00.

### 5.3.1.1.15 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
(1.467.630.183,85)	(2.221.254.721,00)	

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.467.630.183,85) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp2.221.254.721,00).

### 5.3.1.1.16 Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
21.096.474,00	40.570.143,00

Saldo Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.096.474,00 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp40.570.143,00 yang merupakan Tuntutan Ganti Rugi pegawai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana an. Jamin Ginting dan telah dilakukan upaya pemotongan pada rekening tambahan penghasilan yang bersangkutan.

### 5.3.1.1.17 Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(21.096.474,00)	(40.570.143,00)

Saldo Penyisihan Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah per 31 Desember 2022 sebesar (Rp21.096.474,00) sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar (Rp40.570.143,00).

### 5.3.1.1.18 Beban Dibayar Di Muka

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
480,749,278,28	335.234.824,33

Beban Dibayar di Muka adalah beban yang dibayar terlebih dahulu untuk suatu periode yang melebihi periode akuntansi. Dengan demikian, beban yang dibayar di muka bukanlah merupakan beban seluruhnya pada periode berkenaan, melainkan sebagai aktiva lancar. Saldo Beban Dibayar Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp480.749.278,28 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp335.234.824,33 yang terdiri dari:

#### Tabel 5.58 Rincian Beban Dibayar Di Muka

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Asuransi Barang Milik Daerah/Pasar (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah)	145.753.424,66	145.753.424,66
2	Sewa Rumah Asrama (Sekretariat Daerah)	200.100.642,37	188.954.514,42
3	Asuransi Gedung Kantor TA 2020 (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah)	526.885,25	526.885,25
4	Persediaan Obat-obatan (Dinas Kesehatan)	134.368.326,00	-
	Jumlah	480.749.278,28	335.234.824,33

### 5.3.1.1.19 Persediaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
42.022.804.839,41	52.174.386.169,87

Persediaan merupakan barang/bahan habis pakai yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Saldo akhir persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp42.022.804.839,41 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp52.174.386.169,87. Tabel di bawah ini menyajikan rincian persediaan berdasarkan jenisnya:

Tabel 5.59 Rincian Persediaan

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Persediaan ATK, Buku dan Barang Cetakan	1.896.024.047,38	1.349.988.752,30
2	Persediaan Alat Listrik	61.124.668,00	21.997.253,00
3	Persediaan Benda Pos Lainnya	21.818.000,00	33.054.000,00
4	Persediaan Alat Kebersihan	52.200.691,00	21.986.161,00

No.	Jenis Persediaan	31 Desember 2022	31 Desember 2021
5	Persediaan Benda Berharga	58.994.348,00	668.025.014,00
6	Persediaan Bahan Material dan Bahan Lainnya	4.074.365.600,00	4.758.938.127,34
7	Persediaan Obat-obatan	19.778.012.635,69	23.554.850.214,11
8	Persediaan Bahan Kimia	891.452.645,08	467.875.401,50
9	Persediaan Bahan Bakar dan Pelumas	66.972.400,00	-
10	Persediaan Hewan dan Ternak	-	189.220.000,00
11	Persediaan Bibit Ternak/Ikan	311.323.556,90	149.216.591,00
12	Persediaan Pakan, Natura dan Pakan Lainnya	91.754.636,00	-
13	Persediaan Untuk Tujuan Strategis/Berjaga-Jaga	33.000.985,00	-
14	Persediaan Barang yang akan diserahkan kepada masyarakat	13.262.257.320,86	18.744.622.764,12
15	Persediaan Barang Fisik	781.963.788,00	475.300.980,00
16	Bahan Komputer	4.519.172,00	-
17	Bahan Lainnya	63.111.960,00	-
18	Souvenir/cenderamata	36.985.200,00	-
19	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	3.000.000,00	-
20	втт	355.874.627,00	-
21	Hibah	178.048.558,50	1.739.310.911,50
	Jumlah	42.022.804.839,41	52.174.386.169,87

Sedangkan daftar saldo akhir persediaan pada masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.60 Daftar Saldo Akhir Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	397.028.801,00	20.675.419,83
2	Dinas Kesehatan	13.051.794.556,26	17.963.179.805,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	12.295.270.584,93	12.094.427.821,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	13.611.404.434,48	19.150.618.642,09
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	176.429,00	418.715,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	300.000,00	506.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	13.094.758,00	9.371.300,00
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	95.953.928,00	95.132.363,00
9	Dinas Ketahanan Pangan	126.480.842,86	490.963.505,86
10	Dinas Lingkungan Hidup	205.151.066,58	91.115.555,48
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	331.136.337,00	339.222.608,50
12	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	2.396.009,00	2.700.126,00
13	Dinas Perhubungan	109.953.956,00	95.603.967,00
14	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.421.000,00	4.790.404,00
15	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	177.041.105,00	180.130.308,00
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.865.074,00	4.590.871,00
17	Dinas Perikanan	340.339.882,90	280.716.591,00
18	Dinas Pariwisata	53.459.498,00	46.453.354,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	262.344.707,50	225.321.423,50
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	352.574.814,00	302.295.413,00
21	Sekretariat Daerah	490.233.334,90	461.665.854,00
22	Sekretariat DPRD	36.985.200,00	224.928,00
23	Kecamatan Kumai	3.560.000,00	-
24	Kecamatan Pangkalan Lada	7.003.443,00	2.923.742,00
25	Inspektorat Daerah	30.742.040,00	16.561.370,00
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	487.278,00	674.929,00
27	Badan Pendapatan Daerah	20.605.759,00	294.101.152,00
	Jumlah	42.022.804.839,41	52.174.386.169,87

# 5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
150.901.062.447,39	135.835.164.064,45

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat memiliki Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.901.062.447,39 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.835.164.064,45. Penjelasan lebih lanjut mengenai saldo Investasi Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

### 5.3.1.2.1 Investasi Non Permanen (nilai bersih yang dapat direalisasikan)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	218.705.204.00

Pencatatan Investasi Non Permanen pertama kali adalah sebesar harga perolehan, yaitu sebesar kas yang dibayarkan secara periodik. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan penyesuaian terhadap saldo Investasi Non Permanen sehingga nilai yang tercatat di Neraca adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Nilai bersih Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 Rp0,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp218.705.204,00 dengan rincian sebagai berikut:

### 5.3.1.2.1.1 Investasi Non Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
218 705 204 00	218 705 204 00

Investasi Non Permanen adalah saldo dana yang digulirkan/dipinjamkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melalui: (1) Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, (2) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam bentuk pinjaman kepada petani jagung dengan bunga sebesar 3% dari pokok pinjaman serta dikenakan denda bunga sebesar 0,25% dari suku bunga berlaku. Penanaman Modal kepada masyarakat ini sesuai dengan SK Kepala Daerah dan pengembalian dana tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan, rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### **Tabel 5.61 Rincian Investasi Non Permanen**

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	16.260.000,00	16.260.000,00
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	202.445.204,00	202.445.204,00
	Jumlah	218.705.204,00	218.705.204,00

### 5.3.1.2.1.2 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(218.705.204,00)	0,00

Pada tahun 2016 SKPD pengelola dana bergulir telah melakukan penatausahaan dana bergulir sesuai dengan waktu jatuh temponya (*aging schedule*) atau nilai saat ini. Dasar pembuatan *aging schedule* adalah SKPD teknis/tim melakukan pengecekan ke lokasi/penerima dana bergulir. Pada tabel berikut disajikan *Aging Schedule* Investasi Non Permanen per 31 Desember 2022 dari masing-masing SKPD pengelola dana bergulir.

Tabel 5.62 Penyisihan Tidak Tertagih-Investasi Non Permanen

No.	Uraian	Kemungkinan Tertagih
1	Dana Bergulir (Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah)	(16.260.000,00)
2	Pinjaman ke petani jagung (PPKD)	(202.445.204,00)
	Jumlah	(218.705.204,00)

#### 5.3.1.2.2 Investasi Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
150.901.062.447,39	135.616.458.860,45

Investasi Permanen adalah Penyertaan Modal kepada Perusahaan Daerah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2022 sebesar Rp150.901.062.447,39 sedangkan per 31 Desember 2021 sebesar Rp135.616.458.860,45 yang terdapat pada:

#### **Tabel 5.63 Rincian Investasi Permanen**

No.	Perusahaan Daerah	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	PT Bank Pembangunan Kalteng	72.500.000.000,00	57.500.000.000,00
2	PD BPR Marunting Sejahtera	19.807.379.466,00	19.389.497.840,29
3	PDAM Tirta Arut	54.277.162.033,39	54.410.440.072,16
4	PD Agrotama Mandiri	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
5	PT Jamkrida	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
	Jumlah	150.901.062.447,39	135.616.458.860,45

a) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Bank Pembangunan Kalteng berdasarkan Perda No.14 Tahun 2019 dengan anggaran Rp90.475.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2022 Rp72.500.000.000,00 sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp17.975.000.000,00. Setoran Modal yang telah diterbitkan sahamnya adalah 5750 lembar saham atau komposisi (*share*) sebesar 4,41% yang disahkan melalui Akta RUPS Tahunan Tahun Buku 2021. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PT Bank Pembangunan Kalteng per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp72.500.000.000,00 dan Rp57.500.000.000,00 dimana mengalami kenaikan sebesar Rp15.000.000.000,00 yang merupakan Penyertaan Modal pada tahun 2022, berikut adalah rinciannya:

Tabel 5.64 Investasi Permanen pada PT Bank Pembangunan Kalteng (Cost Method)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	57.500.000.000,00	53.500.000.000,00
2	Penyertaan Modal	15.000.000.000,00	4.000.000.000,00
	Saldo Akhir	72.500.000.000,00	57.500.000.000,00

b) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Marunting Sejahtera berdasarkan Perda No.10 Tahun 2014 dengan anggaran Rp15.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2022 Rp15.000.000.000,00 sehingga tidak terdapat lagi sisa modal yang belum disertakan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp19.807.379.466,00 dan Rp19.389.497.840,29 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.65 Investasi Permanen pada PD BPR Marunting Sejahtera (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	19.389.497.840,29	17.879.885.624,29
2	Penyesuaian atas laba (rugi) setelah audited	324.997,00	432.254,00
3	Pembagian Deviden ke Pemda	(582.846.872,00)	(550.216.627,00)
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	1.676.310.175,00	1.059.396.589,00
5	Penyertaan Modal	-	1.000.000.000,00
6	Koreksi perlakuan pengurangan nilai Ekuitas BPR Marunting TA 2020-2021 atas beban dana kesejahteraan, jasa produksi, CSR, tantiem pada Laporan Perubahan Ekuitas BUMD-BPR Marunting serta kelebihan catat laba TA 2019)	(410.976.276,29)	-
7	Koreksi perlakuan pengurangan nilai Ekuitas BPR Marunting TA 2022 atas beban dana kesejahteraan, jasa produksi, CSR, tantiem pada Laporan Perubahan Ekuitas BUMD-BPR Marunting)	(264.930.398,00)	-
	Saldo Akhir	19.807.379.466,00	19.389.497.840,29

Data tahun 2022 diperoleh dari Laporan Keuangan PD BPR Marunting Sejahtera per 31 Desember 2022 *audited*.

c) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PDAM Arut Tirta berdasarkan Perda No.8 Tahun 2016 dengan anggaran Rp200.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2022 Rp80.089.540.801,00 sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp119.910.459.199,00. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2022

dan 2021 masing-masing sebesar Rp54.277.162.033,16 dan Rp54.410.440.072,16 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.66 Investasi Permanen pada PDAM Tirta Arut (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	54.410.440.072,16	54.338.613.253,12
2	Penyesuaian laba (rugi) hasil audited	(151.051.358,00)	(575.641.409,23)
3	Penyertaan Modal	-	-
4	Laba (Rugi) Operasional Tahun Berjalan	17.773.319,00	647.468.228,27
5	Penyesuaian laba (rugi) tahun 2020 hasil audited	0,23	-
	Saldo Akhir	54.277.162.033,39	54.410.440.072,16

Data tahun 2022 berdasarkan laporan keuangan PDAM Tirta Arut per 31 Desember 2022 *audited*.

d) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD Agrotama Mandiri berdasarkan Perda No.2 Tahun 2009 dengan anggaran Rp10.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2022 Rp7.500.000.000,00, sehingga masih terdapat sisa modal yang belum disertakan sebesar Rp2.500.000.000,00, namun PD Agrotama Mandiri sejak tahun 2015 sudah tidak beroperasi (dalam proses pembekuan). Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 pada PD Agrotama Mandiri tetap sebesar Rp1.316.520.948,00 sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.67 Investasi Permanen pada PD Agrotama Mandiri (Equity Method)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00
2	Penyertaan Modal	-	-
	Saldo Akhir	1.316.520.948,00	1.316.520.948,00

e) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PT Jamkrida berdasarkan Perda No.7 Tahun 2014 dengan anggaran Rp3.000.000.000,00 dan jumlah modal yang telah disertakan sampai dengan akhir tahun 2022 Rp3.000.000.000,00 sehingga tidak terdapat lagi sisa modal yang belum disertakan. Saldo Investasi Permanen Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 pada PT Jamkrida tetap sebesar Rp3.000.000.000,00. sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.68 Investasi Permanen pada PT Jamkrida (Cost Method)

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Awal	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00
2	Penyertaan Modal	-	-
	Saldo Akhir	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00

Penyertaan Modal pada PT Bank Pembangunan Kalteng dan PT Jamkrida dicatat berdasarkan metode *cost* karena kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat kurang dari 20%. Metode *cost* adalah suatu metode pencatatan investasi yang mencatat nilai investasi sebagai harga perolehan. Dalam hal ini, penghasilan investasi dianggap sebagai bagi hasil dan tidak mempengaruhi saldo Investasi Permanen. Sedangkan

pencatatan Investasi Permanen pada 3 (tiga) Perusahaan Daerah lainnya, yaitu PD BPR Marunting Sejahtera, PDAM Tirta Arut dan PD Agrotama Mandiri berdasarkan metode ekuitas karena ketiga BUMD tersebut sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Dalam hal ini, ketika mendapatkan keuntungan maka akan dicatat sebagai penambah saldo Investasi Permanen dan sebaliknya.

### **5.3.1.3** Aset Tetap

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
2.886.552.976.376.43	2.843.370.821.272.03	

Aset Tetap adalah jenis Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat ekonomis lebih dari dua belas bulan dan digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan/nilai wajar saat perolehannya. Pada Tahun Anggaran 2022, penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat telah mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah. Hal ini berdampak pada perubahan kebijakan terkait pencatatan Aset Tetap.

Aset Tetap bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp2.886.552.976.376,43 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp2.843.370.821.272,03. Aset Tetap tahun 2022 dan 2021 diklasifikasikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan seperti pada tabel di bawah ini:

**Tabel 5.69 Rincian Aset Tetap** 

No.	Klasifikasi Aset Tetap	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah	574.040.012.618,07	573.976.967.018,07
2	Peralatan dan Mesin	754.300.745.839,36	679.967.382.463,55
3	Gedung dan Bangunan	1.344.533.308.602,87	1.232.792.193.621,29
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.217.565.720.299,30	3.059.391.512.388,30
5	Aset Tetap Lainnya	44.373.397.712,40	43.770.873.560,40
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.395.530.091,36	136.022.753.529,36
7	Akumulasi Penyusutan	(3.179.655.738.786,93)	(2.882.550.861.308,94)
	Aset Tetap Bersih	2.886.552.976.376,43	2.843.370.821.272,03

Penjelasan lebih lanjut mengenai Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

#### 5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
574.040.012.618,07	573.976.967.018,07

Aset Tetap – Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian independen pada tahun 2005 oleh PT Satyatama Grahatara Surabaya, ditambah dengan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp63.045.600,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi senilai Rp574.040.012.618,07.

Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Tanah pada tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.70 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap - Tanah

No.	Uraian	Nilai
Sald	o Awal tanah	573.976.967.018,07
1	Penambahan Tanah:	1.245.446.850,00
	Pengadaan Belanja Modal Tanah Tahun 2022 yang diakui sebagai Aset Tanah	1.061.200,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Hasil penilaian Aset lama	311.175.650,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	783.210.000,00
	Hibah	150.000.000,00
2	Pengurangan Tanah:	1.182.401.250,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	783.210.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Pemanfaatan oleh Pihak Lain	126.391.250,00
	Hibah	272.800.000,00
Sald	o Akhir Tanah	574.040.012.618,07

- 1) Penambahan Aset Tetap Tanah tahun 2022 total senilai Rp1.245.446.850,00 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Pengadaan Belanja Modal Tanah Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Tanah Rp1.061.200,00.
  - b. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya Hasil penilaian Aset lama Rp311.175.650,00. Koreksi ini terjadi pada SKPD:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp25.096.500,00 Hasil Inventarisasi tahun 2022 ditemukan adanya rumah dinas SDN 1 Kenambui Kecamatan Arut Selatan, dimana bangunan gedung rumah dinasnya sudah tercatat di KIB C DIKBUD, sedangkan tanah bangunan rumah dinas tersebut belum tercatat di KIB A DIKBUD, sehingga terhadap permasalahan tersebut dilakukan penilaian Aset tanah rumah dinas oleh Tim Penilai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pendekatan NJOP. Hasil penilaian oleh Tim Penilai Pemkab Kobar dituangkan dalam SK Bupati Kotawaringin Barat Nomor 032/150/IV.I/SK/BPKAD/2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan nilai perolehan sebesar Rp25.096.500,00.
    - Dinas Kesehatan Rp3.582.150,00
      Bangunan gedung Poskesdes Kenambui dan Pustu Kenambui sudah tercatat di KIB C Dinas Kesehatan, sedangkan tanah bangunannya tersebut belum tercatat di KIB A sehingga dilakukan penilain Aset tanah oleh Tim Penilai Kabupaten Kotawaringin Barat dengan pendekatan NJOP dengan nilai tanah Poskesdes Kenambui Rp2.223.650,00 dan Pustu Kenambui dengan nilai Rp1.358.500,00 sehingga total penilaian Rp3.582.150,00.
    - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp140.800.000,00
       Hasil Inventarisasi tahun 2022 ditemukan aset tanah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang belum tercatat sebagai aset, tanah tersebut dengan luas 1.100m² berlokasi di Jalan Salak RT.17 Kel. Madurejo. Untuk mencatat aset

tanah tersebut dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Pemkab Kobar dengan SK Bupati Nomor 032/150/IV.I/SK/BPKAD/ 2022 tanggal 12 Desember 2022 dengan nilai Rp140.800.000,00.

- Dinas Perikanan Rp12.705.000,00
   Penilaian atas Tanah kosong seluas 600m² di Jalan Panglima Utar RT.8 Desa Sungai Bakau Rp.8.400.000,00 dan penilaian atas tanah kosong seluas 86m² di Jalan Titian Ulin RT.03 Desa Tanjung Putri Arut Selatan dengan nilai Rp4.305.000,00.
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Rp128.992.000,00
   Hasil Inventarisasi tahun 2022 ditemukan aset tanah yang belum tercatat sebagai aset, tanah tersebut dengan luas 2.015,50 m² berlokasi di Jalan Maid Badir RT.10
   Kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan, hasil penilaian oleh Tim Penilai dengan nilai Rp128.992.000,00.
- c. Penetapan status penggunaan masuk senilai Rp783.210.000,00 adalah pengalihan status tanah dari Sekretariat Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu tanah yang berlokasi di Jalan Iskandar Pangkalan Bun dengan nilai sebesar Rp756.960.000,00 dan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai dengan nilai sebesar Rp20.658.750,00.
- d. Hibah masuk Rp150.000.000,00 adalah hibah 2 bidang tanah dari masyarakat untuk rencana pembangunan kantor Bakamla seluas 1.000m² senilai Rp15.000.000,00 dan seluas 9.000m² senilai Rp135.000.000,00.
- 2) Pengurangan Aset Tetap Tanah tahun 2022 total senilai Rp1.182.401.250,00 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Penetapan status penggunaan keluar senilai Rp783.210.000,00 adalah pengalihan status tanah dari Sekretariat Daerah kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD yaitu tanah yang berlokasi di Jalan Iskandar Pangkalan Bun dengan nilai sebesar Rp756.960.000,00 dan Desa Sungai Kapitan Kecamatan Kumai dengan nilai sebesar Rp20.658.750,00.
  - b. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh Pihak Lain senilai Rp126.391.250,00 pada SKPD:
    - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp60.000.000,00 berupa tanah di Jalan utama (Pasir Panjang) yang dipergunakan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI).
    - Sekretariat Daerah Rp60.800.000,00 berupa pemanfaatan tanah bangunan tempat ibadah Masjid dan Gereja.
    - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Rp5.591.250,00 berupa pemanfaatan Tanah Bangunan Pos Jaga/Menara Jaga Pos Polisi Air.
  - c. Hibah keluar Rp272.800.000,00 pada SKPD:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp122.800.000,00 berupa hibah Tanah SMKN 3 Kumai kepada pemerintah Provinsi sesuai kewenangan sekolah pendidikan menengah.
    - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Rp150.000.000,00 berupa hibah tanah kepada Bakamla RI.

Dari keseluruhan bidang Tanah yang tercatat pada KIB Tanah Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, terdapat Aset Tetap – Tanah di Bawah Jalan dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.71 Rekapitulasi Tanah Di Bawah Jalan

No.	SKPD	7	Tahun 2022
	Uraian	Bidang/Ruas	Nilai Perolehan
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		
	Tanah Jalan Kabupaten	326	259.590.430.700,00
	Tanah Jalan Desa	1.976	42.783.801.840,00
	Tanah Jalan Lingkungan	163	3.64 1.857.050,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman		
	Tanah Jalan Desa	400	19.608.339.450,00
	Tanah Jalan Lingkungan	29	1.228.522.200,00
	Tanah Untuk Jalan Khusus/Komplek	64	11.011.228.900,00
3	Dinas Lingkungan Hidup		
	Tanah Jalan Desa	3	14.280.000,00
	Jumlah	2.961	337.878.460.140,00

Pada tahun 2022 masih terdapat 22 bidang Tanah dengan total seluas 1.450.992 M² senilai Rp19.896.256.755,00 yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat namun mengalami sengketa. Daftar Aset dimaksud dapat dilihat pada **Lampiran 5.8.** 

Saldo Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp574.040.012.618,07 dan Rp573.976.967.018,07 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.72 Rincian Saldo Aset Tetap - Tanah Berdasarkan Jenisnya

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tanah Perkampungan	7.019.996.586,72	7.018.935.386,72
2	Tanah Hutan	339.775.070,00	339.775.070,00
3	Tanah Untuk Bangunan Gedung	223.753.147.071,35	223.691.162.671,35
4	Tanah Untuk Bangunan Bukan Gedung	342.927.093.890,00	342.927.093.890,00
	Jumlah	574.040.012.618,07	573.976.967.018,07

Sedangkan daftar saldo akhir Aset Tetap – Tanah per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada masing-masing SKPD sebagai berikut:

Tabel 5.73 Daftar Saldo Aset Tetap - Tanah pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.722.557.830,06	26.820.261.330,06
2	Dinas Kesehatan	50.023.594.082,67	6.434.379.452,67
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	43.585.632.480,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	307.839.219.590,00	307.839.219.590,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	40.701.431.585,00	40.700.370.385,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.675.240.000,00	3.675.240.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	152.990.000,00	152.990.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.140.000,00	7.140.000,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
9	Dinas Sosial	694.040.000,00	694.040.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.437.048.680,00	2.296.248.680,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB	1.460.900.000,00	1.460.900.000,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	400.382.180,00	400.382.180,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	5.024.532.162,00	5.024.532.162,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	400.000.000,00	400.000.000,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	354.800.000,00	354.800.000,00
16	Dinas Perhubungan	2.811.429.680,00	2.811.429.680,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	320.000.000,00	320.000.000,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	23.011.971.760,00	23.011.971.760,00
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	10.065.205.425,00	10.125.205.425,00
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	645.200.000,00	645.200.000,00
21	Dinas Perikanan	790.605.626,00	777.900.626,00
22	Dinas Pariwisata	3.671.862.300,00	3.671.862.300,00
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	12.578.121.871,00	12.578.121.871,00
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.383.802.060,00	1.383.802.060,00
25	Sekretariat Daerah	54.169.391.963,67	55.013.401.963,67
26	Sekretariat DPRD	932.900.000,00	932.900.000,00
27	Inspektorat Kabupaten	350.000.000,00	350.000.000,00
28	Kecamatan Arut Selatan	13.403.043.520,00	13.403.043.520,00
29	Kecamatan Arut Utara	93.978.260,00	93.978.260,00
30	Kecamatan Kumai	458.313.066,67	458.313.066,67
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	327.915.000,00	327.915.000,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	845.764.560,00	845.764.560,00
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	400.000.000,00	400.000.000,00
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	467.400.000,00	467.400.000,00
36	Badan Pendapatan Daerah	288.000.000,00	288.000.000,00
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	487.000.000,00	487.000.000,00
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	5.644.231.416,00	4.737.620.666,00
	Saldo Akhir Tanah	574.040.012.618,07	573.976.967.018,07

# 5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
754.300.745.839,36	679.967.382.463,55

Aset Tetap — Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dicatat berdasarkan hasil penilaian/inventarisasi oleh BPKP pada tahun 2002 sebagai dasar pembuatan neraca awal, dan selanjutnya ditambahkan nilai perolehan tahun-tahun berikutnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap — Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp74.333.363.375,81 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp754.300.745.839,36. Penambahan/pengurangan Aset Tetap — Peralatan dan Mesin pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.74 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

No.	Uraian	Nilai
Saldo	Awal Peralatan dan Mesin	679.967.382.463,55
1	Penambahan:	80.867.997.669,95
	Pengadaan Belanja Modal Peralatan & Mesin Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	69.210.802.348,00
	Pengadaaan Belanja Modal Selain Peralatan & Mesin Yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan & Mesin	670.711.154,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	44.776.997,00
	Pengadaan Barang dari Belanja Hibah	93.322.000,00
	Hibah	3.260.266.600,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya-Hasil Penilaian atas aset lama	1.484.714.152,95
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	680.410.000,00
	Reklasifikasi masuk	5.422.994.418,00
2	Pengurangan:	6.534.634.294,14
	Koreksi pencatatan sebelumnya	299.925.002,00
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	680.410.000,00
	Penghapusan 2022	100.456.884,73
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022	1.983.556.097,41
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	3.470.286.310,00
Saldo	Akhir Peralatan dan Mesin	754.300.745.839,36

- 1) Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 total senilai Rp80.867.997.669,95 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin hanya senilai Rp69.210.802.348,00 sehingga tidak sama dengan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp75.230.158.868,00. Dengan kata lain, terdapat senilai Rp6.019.356.520,00 dari Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2022 yang tidak dikapitalisasi menjadi Aset Peralatan dan Mesin. Hal ini dikarenakan terdapat Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp377.438.976,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp17.114.694,00 yang dikapitalisasi sebagai aset Gedung Bangunan.
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp13.754.800,00 yang dikapitalisasi sebagai aset tetap lainnya.
    - Dinas Kesehatan Rp21.685.300,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
    - Dinas Kesehatan Rp3.982.500.000,00 yang menambah aset Jalan, Jaringan dan Irigasi.
    - Dinas Kesehatan Rp348.902.000,00 yang menambah aset Gedung Bangunan.
    - Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanuddin Rp1.081.443.400,00 yang menambah asset Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa peningkatan Kapasitas Kabel Travo Induk.

- Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanudin Rp75.533.850,00 yang menambah asset tak berwujud berupa Sistem Informasi Manajemen/Biaya Pembuatan Modul Akreditasi.
- Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp19.800.000,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
- Dinas Pariwisata Rp2.220.000,00 yang menambah aset Gedung Bangunan berupa daun pintu pada kantor Dinas Pariwisata.
- Sekretariat Daerah Rp11.574.500,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
- BPKAD Rp67.389.000,00 berupa barang-barang dengan harga satuan di bawah batas kapitalisasi sehingga dicatat sebagai Aset *Ekstracomptabel*.
- b. Pengadaan Belanja Modal Selain Peralatan dan Mesin yang dikapitalisasi sebagai Aset Peralatan dan Mesin Rp670.711.154,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp190.913.084,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - Dinas Kesehatan Rp38.500.000,00 dari Belanja Modal Gedung Bangunan.
  - Dinas Kesehatan Rp8.850.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya.
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp29.414.550,00 dari belanja modal Gedung Bangunan berupa backdrop resepsionis kantor yang tidak melekat pada bangunan dan dapat dipindahkan.
  - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp92.601.750,00 dari Belanja modal Gedung Bangunan berupa rak buku perpustakaan dan meja pelayanan.
  - Dinas Perhubungan Rp71.907.000,00 dari Belanja modal Gedung Bangunan berupa Pekerjaan Penataan Jaringan Internet/Menara Accer Point dan Jaringan LIstrik untuk Suplay Daya APILL di Jembatan Sungai Arut.
  - Dinas Perikanan Rp2.805.000,00 dari Belanja Modal Gedung Bangunan berupa tempat cuci tangan (wastafell) yang tidak menempel pada bangunan.
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp47.867.270,00 dari Belanja Modal Gedung Bangunan berupa konstruksi Tower Penguat signal Internet pada Balai Penyuluhan Pertanin Kecamatan Kotawaringin Lama.
  - Sekretariat DPRD Rp144.985.500,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa videotron dan 1 unit Running Tex.
  - Kecamatan Pangkalan Lada Rp32.967.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa pengadaan 2 unit proyektor.
  - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rp9.900.000,00 dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya berupa Proyektor.
- c. Penambahan Peralatan Mesin dari Belanja Barang dan Jasa Rp44.776.997,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp29.317.597,00
  - Dinas Kesehatan Rp850.000,00
  - Sekretariat Daerah Rp14.609.400,00
- d. Penambahan Peralatan Mesin dari Belanja Hibah Rp93.322.000,00 yaitu pada Belanja BOS Tingkat Pendidikan Dasar.

- e. Penambahan Peralatan Mesin dari Hibah masuk Rp3.260.266.600,00 yaitu hibah pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp10.700.000,00 berupa hibah meja, kursi, papan tulis dari PT Korintiga dan Rp627.130.000,00 berupa peralatan TIK dari Kemendikbud sesuai BAST Nomor 29701.117/C3/KPA/XII/BAST/2022 Tanggal 15 Desember 2022.
  - Dinas Kesehatan-RSUD Sultan Imanuddin Rp1.293.800.000,00 berupa hibah mesin hitung dari BRI Rp3.800.000,00 serta hibah dari Provinsi Kalimantan Tengah berupa *ventilator internal, anestesi apparatus* dan *microwave diathermy* Rp1.290.000.000,00.
  - Dinas Kesehatan Rp1.315.326.600,00 berupa peralatan kesehatan
  - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp13.310.000,00 berupa peralatan penanggulangan bencana dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana berdasarkan dokumen Naskah Perjanjian Hibah Antara Badan Nasional Penanggulangan Bencana dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tentang Hibah Barang Milik Negara Berupa Selain Tanah dan/atau Bangunan pada Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 72/BNPB/D-V/RT.03.05/09/2022 dan Nomor 032/26/BPBD.IV.4/IX/2022 Tanggal 29 September 2022 di Jakarta serta Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara Nomor 72/D-V/RT.03.03/09/2022 Tanggal 29 September 2022.
- f. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya Rp1.484.714.152,95. Koreksi terjadi karena pada tahun 2022 terdapat hibah Barang Milik Negara (BMN) dari Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementrian PUPR berupa Truck dengan Nomor Polisi KH 8141 GW dengan nilai perolehan Rp 280.500.000,00. Hasil penelusuran dokumen dan konfirmasi ditemukan bahwa BMN yang dihibahkan tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Daerah (BMD) di KIB B DLH pada tahun 2005 dengan nilai perolehan sebesar Rp183.000.000,00 sehingga terdapat selisih kurang catat sebesar Rp97.500.000,00 dari nilai BAST hibah, dan tahun 2022 dilakukan koreksi pencatatan terhadap aset tersebut berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah Nomor 032/685/IV.III/BPKAD/2022 dan 661.1/BA/DL/2022 Tanggal 17 Mei 2022.
- g. Penetapan status penggunaan-masuk Rp680.410.000,00 berupa pengalihan status penggunaan kendaraan dinas dan operasional pada:
  - Kendaraan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dialihkan kepada Dinas Sosial dengan nilai perolehan Rp150.000.000,00.
  - Kendaraan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD dialihkan kepada Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan Rp13.900.000,00.
  - Kendaraan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD dialihkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama dengan nilai perolehan Rp145.000.000,00.
  - Kendaraan dari Sekretariat Daerah dialihkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan nilai perolehan Rp371.510.000,00.
- h. Penambahan Peralatan Mesin dari Reklasifikasi Masuk Rp5.422.994.418,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp658.846.417,00
  - Dinas Kesehatan Rp933.256.900,00
  - Dinas Perhubungan Rp2.802.097.019,00
  - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp996.794.082,00
  - Sekretariat Daerah Rp32.000.000,00

- 2) Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2022 total senilai Rp6.534.634.294,14 berasal dari:
  - a. Koreksi pencatatan sebelumnya Rp299.925.002,00. Koreksi mengurangi di Sekretariat Daerah sebesar Rp 299.925.002,00 merupakan tindak lanjut temuan TIM BPK RI sesuai LHP Nomor 37/LHP/XIX PAL/05/2022. Pemerintah Kabupaten Kotawaringan Barat melakukan penelusuran terhadap keberadaan 2 (dua) unit mobil *ambulance*, dengan hasil penelusuran ditemukan bahwa terjadi *double* catat antara SKPD Dinas Kesehatan dengan Sekretariat Daerah terhadap dua buah mobil *ambulance* dimana fisik barang tersebut berada dan juga tercatat di Dinas Kesehatan dengan data sebagai berikut:
    - KH 230 GU, tahun perolehan 2003 dengan nilai perolehan Rp41.000.000,00 (BMD tersebut telah dilelang dan telah dilakukan penghapusan karena pemindahtanganan (penjualan) pada tahun 2019 sesuai SK Penjualan Barang Nomor 032/52.e/IV.III/ SK/BPKAD/2019 Tanggal 23 April 2019
    - KH. 160 GU, tahun perolehan 2006 dengan nilai perolehan Rp195.500.000,00 sebagai Puskesmas Keliling Arut Selatan

Kedua mobil *ambulance* tersebut juga tercatat di KIB B Sekretariat Daerah dengan data sebagai berikut:

- Mobil Merk Toyota tahun perolehan 2004 dengan nilai perolehan Rp159.925.002,00
- Mobil Unit Kesehatan Masyarakat tahun perolehan 2005 dengan nilai perolehan Rp140.000.000,00

Karena terjadi *double* catat terhadap barang yang sama maka dilakukan koreksi pencatatan pada Sekretariat Daerah berdasarkan BA Rekonsiliasi Barang Milik Daerah SETDA dan DINKES Nomor 027/113/BU/II/2022 Tanggal 20 Juni 2022.

- b. Penetapan status penggunaan-keluar Rp680.410.000,00 berupa pengalihan status penggunaan kendaraan dinas dan operasional pada:
  - Kendaraan dari Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dialihkan kepada Dinas Sosial dengan nilai perolehan Rp150.000.000,00.
  - Kendaraan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD dialihkan kepada Dinas Perhubungan dengan nilai perolehan Rp13.900.000,00.
  - Kendaraan dari Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD dialihkan kepada Kecamatan Kotawaringin Lama dengan nilai perolehan Rp145.000.000,00.
  - Kendaraan dari Sekretariat Daerah dialihkan kepada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan dengan nilai perolehan Rp371.510.000,00.
- c. Penghapusan Peralatan mesin Rp100.456.884,73 adalah penghapusan BMD atas barang-barang yang hilang (pencurian) berdasarkan surat keterangan kepolisian pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp22.350.000,00 berupa 2 unit PC dan printer.
  - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp30.700.000,00 berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp16.200.000,00 berupa 1 (satu) unit sepeda motor.
  - Dinas Perikanan Rp10.532.500,00 berupa 1 (satu) unit mesin pompa air.
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp 20.674.384,73 berupa 1 (satu) unit sepeda motor.

- d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022 Rp1.983.556.097,41 pada:
  - Dinas Kesehatan Rp717.785.000,00
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp85.000.000,00
  - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp120.250.500,00
  - Dinas Perikanan Rp180.757.000,00
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp143.588.597,41
  - Sekretariat Daerah Rp594.550.000,00
  - Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rp141.625.000,00
- e. Reklasifikasi ke Aset lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain Rp3.470.286.310,00 yaitu pada:
  - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp87.472.000,00 berupa peralatan KB pada klinik kesehatan yang tersebar di Kabupaten Kotawaringin Barat.
  - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp199.534.310,00 berupa Peralatan kantor yang dimanfaatkan oleh Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Rp1.360.000,00, Pengurus Kwartir Cabang Gerakan Praja Muda Karana (Pramuka) Kabupaten Kotawaringin Barat Rp75.000.000,00 dan Komite Olahraga Nasional Indonesia Pengurus Kabupaten Kotawaringin Barat Rp123.174.310,00.
  - Sekretariat Daerah Rp2.901.940.000,00 berupa 6 buah kendaraan operasional untuk instansi vertikal.
  - Pejabat Pengelola Keuangan Daerah pada BPKAD Rp281.340.000,00 berupa 1 (satu) buah kendaraan operasional untuk instansi vertikal.

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.75 Daftar Saldo Aset Tetap – Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	112.711.898.567,70	92.548.868.173,70
2	Dinas Kesehatan	337.139.873.337,27	87.402.854.857,14
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	215.933.212.444,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	30.272.604.128,00	30.072.479.966,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	1.394.551.310,00	1.107.852.830,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	22.202.094.362,00	20.196.320.362,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.384.354.649,00	1.449.655.019,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	25.334.688.197,99	23.518.114.427,99
9	Dinas Sosial	2.455.588.330,00	1.872.255.550,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.745.142.789,00	4.685.530.046,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.312.836.320,00	4.406.015.609,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.473.153.534,66	1.473.153.534,66
13	Dinas Lingkungan Hidup	24.001.695.025,40	21.488.440.992,40
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.079.197.631,95	3.613.431.561,95
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.432.022.430,00	1.315.265.160,00
16	Dinas Perhubungan	15.792.520.498,95	11.171.546.619,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	6.295.618.856,00	5.176.670.974,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.212.292.104,95	5.040.696.604,95
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.598.912.769,00	2.365.654.269,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.068.361.285,00	2.026.016.245,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.518.459.191,00	3.464.633.306,00
22	Dinas Perikanan	24.861.249.522,00	24.805.796.722,00
23	Dinas Pariwisata	2.748.455.427,75	2.608.782.267,75
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	10.804.386.269,46	10.340.203.081,60
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	7.811.691.277,00	7.781.246.877,00
26	Sekretariat Daerah	37.503.181.285,27	37.785.928.637,27
27	Sekretariat DPRD	10.534.705.525,00	9.904.606.875,00
28	Inspektorat Daerah	5.379.216.955,00	3.968.124.005,00
29	Kecamatan Arut Selatan	7.596.783.150,00	7.371.481.319,00
30	Kecamatan Arut Utara	1.501.605.818,00	1.410.395.593,00
31	Kecamatan Kumai	4.489.045.317,67	4.346.607.317,67
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	4.349.572.340,67	3.871.190.840,67
33	Kecamatan Pangkalan Lada	1.484.891.850,00	1.369.285.350,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.184.149.477,67	2.096.971.876,67
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	3.919.132.457,00	3.778.650.457,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.715.774.151,00	7.301.259.312,00
37	Badan Pendapatan Daerah	5.519.293.683,00	4.835.641.895,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.599.246.015,00	4.749.801.485,00
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	872.500.000,00	1.312.740.000,00
	Saldo Akhir Peralatan dan Mesin	754.300.745.839,36	679.967.382.463,55

### 5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.344.533.308.602,87	1.232.792.193.621,29

Aset Tetap – Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, maupun reklasifikasi masuk. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp111.741.114.981,58 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp1.344.533.308.602,87. Penambahan atau pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.76 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Gedung dan Bangunan		1.232.792.193.621,29
1	Penambahan:	121.279.720.341,65
	Pengadaan Belanja Modal Gedung & Bangunan Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	84.697.408.447,65
	Pengadaaan Belanja Modal Selain Gedung & Bangunan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung & Bangunan	820.971.636,00

No.	Uraian	Nilai
	Pengadaan Barang dari Belanja Hibah	229.000.000,00
	Pengadaan Barang dan Jasa 2022	208.577.000,00
	Hibah	25.266.651.194,00
	Koreksi Pencatatan sebelumnya	782.764.000,00
	Penetapan Status Penggunaan-Masuk	127.738.000,00
	Reklasifikasi masuk	9.146.610.064,00
2	Pengurangan:	9.538.605.360,07
	Penetapan Status Penggunaan-Keluar	127.738.000,00
	Reklasifikasi keluar	3.308.478.019,00
	Penghapusan/Pemusnahan	245.567.376,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022	4.375.927.965,07
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain	1.480.894.000,00
Saldo	Akhir Gedung dan Bangunan	1.344.533.308.602,87

- 1) Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 total senilai Rp121.279.720.341,65 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Pengadaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan tahun 2022 Rp84.697.408.447,65 pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp32.812.708.924,00
    - Dinas Kesehatan Rp11.991.313.978,00
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp23.731.776.051,00
    - Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Rp1.046.642.130,00
    - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Rp 867.466.600,00
    - Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Rp138.122.050,00
    - Dinas Lingkungan Hidup Rp216.072.554,65
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp81.599.985,00
    - Dinas Perhubungan Rp1.419.750.838,00
    - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp59.663.000,00
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp3.130.851.350,00
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp96.425.640,00
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp238.292.400,00
    - Dinas Perikanan Rp61.695.000,00
    - Dinas Pariwisata Rp193.374.800,00
    - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp891.679.554,00
    - Sekretariat Daerah Rp4.654.653.355,00
    - Sekretariat DPRD Rp199.700.000,00
    - Inspektorat Kabupaten Rp193.350.000,00
    - Kecamatan Arut Selatan Rp263.262.868,00
    - Kecamatan Arut Utara Rp329.400.000,00
    - Kecamatan Kumai Rp152.658.000,00
    - Kecamatan Kotawaringin Lama Rp416.337.800,00
    - Kecamatan Pangkalan Lada Rp3.500.000,00
    - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Rp1.041.524.700,00

- Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Rp66.384.970,00
- Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp399.201.900,00
- b. Pengadaaan Belanja Modal Selain Gedung dan Bangunan yang dikapitalisasi sebagai Aset Gedung dan Bangunan Rp820.971.636,00 pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp469.849.636,00
  - Dinas Kesehatan Rp348.902.000,00
  - Dinas Pariwisata Rp2.220.000,00 berupa daun pintu pada kantor Dinas Pariwisata.
- c. Pengadaan Barang dari Belanja Hibah Rp229.000.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan pada TK Pertiwi Arut Utara.
- d. Pengadaan Barang dan Jasa 2022 yang menambah aset Gedung dan Bangunan Rp208.577.000,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp7.580.000,00 berupa instalasi listrik dan pembuatan sumur bor.
  - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Rp187.525.000,00 berupa Rehap Pagar Samping Kantor Satpol PP dan Damkar.
  - Inspektorat Kabupaten Rp13.472.000,00 berupa perencanaan Rp5.772.000 dan pengawasan Rp7.700.000 dari pekerjaan rehabilitasi kantor Inspektorat.
- e. Hibah masuk Gedung dan Bangunan Rp25.266.651.194,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp7.483.624.460,00 merupakan total hibah dari:
    - 1) PT Korintiga Hutani berupa bantuan perbaikan gedung SDN 1 Riam berdasarkan BAST Tanggal 1 Oktober 2022 senilai Rp12.289.000,00
    - 2) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemeterian PUPR berupa Pembangunan Gedung SDN 2 Runtu Arut Selatan berdasarkan dokumen hibah Nomor 110.3/BA/DC/2021 dan 032/215/IV.III/BPKAD/2021 Tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp1.761.038.171,00
    - 3) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemeterian PUPR berupa Pembangunan SD Negeri 1 Sungai Bakau Kumai berdasarkan dokumen hibah Nomor 110.3/BA/DC/2021 dan 032/215/IV.III/BPKAD/2021 Tanggal 25 Februari 2021 senilai Rp1.215.309.371,00
    - 4) Direktorat Jenderal Cipta Karya Kemeterian PUPR berupa Pembangunan SD Negeri 2 Sungai Cabang Kumai berdasarkan dokumen hibah Nomor 032/685/IV.III/BPKAD/2022 Tanggal 17 Mei 2022 senilai Rp4.494.987.918,00
  - Dinas Perumahan Rakyat dan kawasan Pemukiman Rp17.720.026.734,00 berupa Rumah Susun RSUD Sultan Imanuddin dari Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR.
  - Dinas Perikanan Rp63.000.000,00 berupa bangunan di Desa Kapitan dari An. Rosono berdasarkan dokumen Surat Hibah Tanggal 16 Juni 2022.
- f. Koreksi Pencatatan sebelumnya karena Penilaian Rp782.764.000,00 pada:
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp424.064.000,00
  - Kecamatan Arut Selatan Rp358.700.000,00

- g. Penetapan Status Penggunaan-Masuk Rp127.738.000,00 pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dari Dinas Perikanan berupa Gedung *Outlet* Pusat Jajanan Hasil Perikanan.
- h. Reklasifikasi masuk yang menambah aset Gedung dan Bangunan Rp9.146.610.064,00 yaitu pada:
  - Dinas Kesehatan Rp155.790.200,00 terdiri dari Rp79.507.200,00 berasal dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan dan Rp76.283.000,00 adalah reklasifikasi masuk dari Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp2.970.000,00 dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan
  - Dinas Pariwisata Rp5.984.000,00 dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp6.176.060,00 dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan
  - Sekretariat Daerah Rp8.966.262.804,00 dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan
  - Sekretariat DPRD Rp9.427.000,00 dari Aset Kontruksi Dalam Pengerjaan
- 2) Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan tahun 2022 total senilai Rp9.538.605.360,07 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Penetapan Status Penggunaan-Keluar Rp127.738.000,00 yaitu pada Dinas Perikanan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah berupa bangunan *outlet* pusat jajanan hasil perikanan yang digunakan oleh Sekretariat Daerah berdasarkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) BMD Nomor 028/367/DISKAN.I/2022 Tanggal 4 Maret 2022.
  - b. Reklasifikasi keluar Rp3.308.478.019,00 yaitu pada:
    - Dinas Kesehatan Rp506.381.000,00
    - Dinas Perhubungan Rp2.802.097.019,00
  - c. Penghapusan/Pemusnahan Rp245.567.376,00 yaitu pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp6.900.000,00
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp156.917.376,00
    - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp6.250.000,00
    - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp75.500.000,00
  - d. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022 Rp4.375.927.965,07 pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp258.408.806,17
    - Dinas Kesehatan Rp342.500.000,00
    - Dinas Lingkungan Hidup Rp44.200.000,00
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp1.543.553.098,90
    - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp1.955.593.060,00
    - Badan Pendapatan Daerah Rp55.000.000,00
    - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp176.673.000,00
  - e. Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena pemanfaatan oleh pihak lain Rp1.480.894.000,00 yaitu pada:
    - Dinas Kesehatan Rp76.283.000,00

# - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp1.404.611.000,00

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.77 Daftar Saldo Aset Tetap – Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	350.614.895.621,48	309.877.441.407,65
2	Dinas Kesehatan	436.616.601.129,95	178.083.182.920,26
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	246.962.576.031,69
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	85.998.985.164,65	61.843.145.113,65
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	27.187.295.297,33	8.420.626.433,33
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	5.287.002.972,91	5.099.477.972,91
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	2.555.409.083,00	2.555.409.083,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7.789.626.503,00	6.922.159.903,00
9	Dinas Sosial	2.076.550.525,00	2.076.550.525,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	6.995.058.439,00	6.995.058.439,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.097.518.860,00	4.959.396.810,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	843.293.991,00	843.293.991,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	50.444.289.448,15	50.272.416.893,50
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.220.001.075,00	3.138.401.090,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	978.471.200,00	978.471.200,00
16	Dinas Perhubungan	24.475.898.515,79	25.858.244.696,79
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	806.876.970,37	747.213.970,37
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	91.898.697.513,10	90.468.316.638,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3.236.915.640,00	3.137.520.000,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	19.850.624.813,00	23.217.078.873,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.634.852.517,77	3.396.560.117,77
22	Dinas Perikanan	19.828.597.573,72	19.831.640.573,72
23	Dinas Pariwisata	17.134.394.805,07	16.932.816.005,07
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	23.671.039.335,00	22.773.183.721,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	15.565.410.731,00	15.565.410.731,00
26	Sekretariat Daerah	58.394.008.710,24	44.773.092.551,24
27	Sekretariat DPRD	11.989.858.004,89	11.780.731.004,89
28	Inspektorat Kabupaten	4.093.902.392,28	3.887.080.392,28
29	Kecamatan Arut Selatan	13.668.161.234,36	13.046.198.366,36
30	Kecamatan Arut Utara	5.298.459.609,92	4.969.059.609,92
31	Kecamatan Kumai	4.909.361.235,16	4.756.703.235,16
32	Kecamatan Kotawaringin Lama	11.437.994.628,74	11.021.656.828,74
33	Kecamatan Pangkalan Lada	3.386.643.081,00	3.383.143.081,00
34	Kecamatan Pangkalan Banteng	3.472.170.369,00	3.472.170.369,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	7.513.876.050,00	6.472.351.350,00
36	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	7.746.787.353,30	7.423.085.453,30

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
37	Badan Pendapatan Daerah	1.462.222.420,00	1.517.222.420,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.727.694.252,27	3.661.309.282,27
39	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	1.623.861.536,42	1.672.796.536,42
	Saldo Akhir Gedung dan Bangunan	1.344.533.308.602,87	1.232.792.193.621,29

# 5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.217.565.720.299,30	3.059.391.512.388,30

Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat antara lain berasal dari belanja modal, belanja barang dan jasa yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap, belanja tidak terduga, hibah, penetapan status penggunaan, reklasifikasi masuk, dan utang belanja yang diakui sebagai penambah Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp158.174.207.911,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp3.217.565.720.299,30. Penambahan/pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.78 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi

No.	Uraian	Nilai
Saldo	Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.059.391.512.388,30
1	Penambahan:	160.499.851.893,00
	Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	100.680.323.343,00
	Pengadaaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi & Jaringan Yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan	5.749.640.050,00
	Hibah	53.640.408.000,00
	Koreksi pencatatan tahun sebelumnya	429.480.500,00
2	Pengurangan:	2.325.643.982,00
	Reklasifikasi keluar	2.261.183.982,00
	Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022	64.460.000,00
Saldo	Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.217.565.720.299,30

- 1) Penambahan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 total senilai Rp160.499.851.893,00 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Pengadaan Belanja Modal Jalan, Irigasi & Jaringan Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan pada:
    - Dinas Kesehatan Rp365.750.000,00
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp89.907.339.502,00
    - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Rp8.655.867.841,00
    - Dinas Perhubungan Rp1.090.241.000,00
    - Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Rp141.891.900,00
    - Dinas Pariwisata Rp174.428.600,00
    - Kecamatan Arut Selatan Rp92.231.000,00
    - Kecamatan Kumai Rp252.573.500,00

- b. Pengadaaan Belanja Modal Selain Jalan, Irigasi & Jaringan yang dikapitalisasi sebagai Aset Jalan, Irigasi & Jaringan Rp5.749.640.050,00 yaitu pada:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp13.962.000,00
  - Dinas Kesehatan Rp5.063.943.400,00
  - Dinas Perhubungan Rp572.546.400,00 berupa pekerjaan Pengadaan PJU/Penerangan Jalan Umum
  - Dinas Perikanan Rp99.188.250,00 berupa saluran pembuangan air (*drainase*)
- c. Hibah Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp53.640.408.000,00 yaitu pada:
  - Dinas Lingkungan Hidup Rp9.824.115.000,00 berupa Sanitasi air di TPS dari Direktorat Cipta Karya Kementerian PUPR berdasarkan dokumen BAST Nomor 032/683/IV.III/BPKAD/2022.
  - Dinas Perhubungan Rp43.816.293.000,00 berupa Pekerjaan Pembangunan Jalan Masuk di Lingkungan Pelabuhan Penyeberangan Kumai dari Kementerian Perhubungan berdasarkan dokumen BAST Nomor PL.301/1/4.1/BPTD-XVI/2022 Tanggal 10 Juni 2022
- d. Koreksi pencatatan tahun sebelumnya Rp429.480.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
- 2) Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 total senilai Rp2.325.643.982,00 antara lain disebabkan oleh:
  - a. Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi karena reklasifikasi keluar Rp 2.261.183.982,00 yaitu pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp437.533.000,00
    - Dinas Kesehatan Rp826.856.900,00
    - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp996.794.082,00
  - Reklasifikasi ke Aset Lainnya karena Lelang 2022 Rp64.460.000,00 pada Dinas Kesehatan

Daftar saldo akhir Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.79 Daftar Saldo Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	971.167.969,00	1.394.738.969,00
2	Dinas Kesehatan	36.139.507.232,65	7.294.144.268,71
3	Rumah Sakit Umum Daerah	1	24.306.986.463,94
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.924.992.187.627,63	2.834.655.367.625,63
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	71.743.768.817,72	63.087.900.976,72
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	570.000,00	570.000,00
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	9.016.096.400,00	9.016.096.400,00
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	991.701.567,50	991.701.567,50
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	361.635.000,00	361.635.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	12.239.615.620,10	2.415.500.620,10
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	9.000.000,00	9.000.000,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
12	Dinas Perhubungan	97.869.393.422,90	52.390.313.022,90
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	-	996.794.082,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	574.796.081,00	432.904.181,00
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	148.516.866,00	148.516.866,00
16	Dinas Perikanan	12.957.378.190,00	12.858.189.940,00
17	Dinas Pariwisata	13.027.367.621,58	12.852.939.021,58
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	32.260.198.197,22	32.260.198.197,22
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	892.111.700,00	892.111.700,00
20	Sekretariat Daerah	25.000.000,00	25.000.000,00
21	Inspektorat Kabupaten	4.205.240,00	4.205.240,00
22	Kecamatan Arut Selatan	1.022.861.556,00	930.630.556,00
23	Kecamatan Arut Utara	869.099.390,00	869.099.390,00
24	Kecamatan Kumai	738.695.600,00	486.122.100,00
25	Kecamatan Kotawaringin Lama	487.366.200,00	487.366.200,00
26	Kecamatan Pangkalan Lada	27.030.000,00	27.030.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	13.750.000,00	13.750.000,00
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	182.700.000,00	182.700.000,00
	Saldo Akhir Jalan, Jaringan dan Irigasi	3.217.565.720.299,30	3.059.391.512.388,30

# 5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
44.373.397.712.40	43,770,873,560,40

Saldo Aset Tetap Lainnya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berasal dari belanja modal yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp602.524.152,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp44.373.397.712,40. Penambahan/pengurangan Aset Tetap Lainnya pada tahun 2022 disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.80 Penambahan/Pengurangan Aset Tetap Lainnya

No.	Uraian	Nilai
Saldo Awal Aset Tetap Lainya		43.770.873.560,40
1	Penambahan:	865.687.569,00
	Pengadaan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Aset Tetap Lainnya	840.200.769,00
	Pengadaaan Belanja Modal Selain Aset Tetap Lainnya Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya	13.754.800,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	4.588.000,00
	Pengadaan Belanja Hibah Tahun 2022	7.144.000,00
2	Pengurangan:	263.163.417,00
	Koreksi pencatatan tahun lalu	9.850.000,00
	Reklasifikasi keluar	253.313.417,00
Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya		44.373.397.712,40

- 1) Penambahan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 total senilai Rp865.687.569,00 disebabkan oleh:
  - a. Pengadaan dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 yang dikapitalisasi sebagai Aset Aset Tetap Lainnya pada SKPD:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp710.853.769,00
    - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Rp122.197.000,00
    - Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Rp7.150.000,00
  - b. Pengadaaan dari Belanja Modal selain Aset Tetap Lainnya yang dikapitalisasi sebagai Aset Tetap Lainnya Rp13.754.800,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - c. Pengadaan dari Belanja Barang dan Jasa Dana BOS Sekolah Dasar Negeri tahun 2022 Rp4.588.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - d. Belanja Hibah tahun 2022 Rp7.144.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Aset Tetap Lainnya di sekolah PAUD
- 2) Pengurangan Aset Tetap Lainnya tahun 2022 total senilai Rp263.163.417,00 disebabkan oleh:
  - a. Koreksi pencatatan tahun lalu Rp9.850.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
  - b. Reklasifikasi keluar Rp253.313.417,00 yaitu pada:
    - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp221.313.417,00
    - Sekretariat Daerah Rp32.000.000,00

Daftar saldo akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.81 Daftar Saldo Aset Tetap Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	35.605.990.074,40	35.100.812.922,40
2	Dinas Kesehatan	222.331.365,00	15.575.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	206.756.365,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.055.862.700,00	2.055.862.700,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	226.187.500,00	226.187.500,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	8.415.000,00	8.415.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	12.124.100,00	12.124.100,00
8	Dinas Sosial	750.000,00	750.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	3.212.000,00	3.212.000,00
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.250.000,00	1.250.000,00
11	Dinas Ketahanan Pangan	365.000,00	365.000,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	1.586.871.500,00	1.586.871.500,00
13	Dinas Perhubungan	139.700.000,00	139.700.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	11.482.080,00	11.482.080,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	14.000.000,00	14.000.000,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	2.562.754.423,00	2.440.557.423,00
17	Dinas Perikanan	24.534.800,00	24.534.800,00
18	Dinas Pariwisata	221.745.000,00	221.745.000,00
19	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	68.922.650,00	68.922.650,00
20	Sekretariat Daerah	1.067.551.000,00	1.099.551.000,00
21	Sekretariat DPRD	321.414.775,00	321.414.775,00
22	Inspektorat Kabupaten	14.945.395,00	14.945.395,00
23	Kecamatan Arut selatan	66.245.000,00	66.245.000,00
24	Kecamatan Arut Utara	32.624.850,00	32.624.850,00
25	Kecamatan Kumai	52.910.000,00	52.910.000,00
26	Kecamatan Kotawaringin Lama	20.680.000,00	20.680.000,00
27	Kecamatan Pangkalan Lada	1.680.000,00	1.680.000,00
28	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	12.693.000,00	5.543.000,00
29	Badan Pendapatan Daerah	5.772.000,00	5.772.000,00
30	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	10.383.500,00	10.383.500,00
	Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya	44.373.397.712,40	43.770.873.560,40

### 5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
131.395.530.091,36	136.022.753.529,36

Terdapat Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2022 dikarenakan Bangunan dan/atau Gedung masih dalam proses pembangunan dan belum siap untuk digunakan. Jika dibandingkan dengan saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021, ada pengurangan senilai (Rp4.627.223.438,00) sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp131.395.530.091,36. Di bawah ini adalah rincian penambahan/pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2022:

Tabel 5.82 Penambahan/Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan

No.	Uraian	Nilai
Sald	o Awal Kontruksi Dalam Pengerjaan	136.022.753.529,36
1	Penambahan:	4.443.103.626,00
	Pengadaan Belanja Modal Tahun 2022	4.443.103.626,00
2	Pengurangan:	9.070.327.064,00
	Reklasifikasi keluar	9.070.327.064,00
Sald	o Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.395.530.091,36

- 1) Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 disebabkan adanya Pengadaan dari Belanja Modal tahun 2022 senilai Rp4.443.103.626,00 pada SKPD:
  - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp1.443.825,00
  - Dinas Kesehatan Rp109.640.100,00
  - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp2.283.886.050,00 berupa DED Jalan
  - Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Rp1.949.278.151,00 berupa Rehab sedang/berat

- Gedung Koni Rp997.330.300,00, Rehab sedang/berat Lapangan Sampuraga Rp740.936.900,00 dan Rehab Aula Tahap III Rp211.010.951,00
- Kecamatan Arut Selatan Rp49.399.500,00 berupa Pembangunan Taman Baca Kelurahan Madurejo Tahap I
- Badan Pendapatan Daerah Rp49.456.000,00 berupa Perencanaan Teknis Pembangunan Aula.
- 2) Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan tahun 2022 total senilai Rp9.070.327.064,00 disebabkan adanya Reklasifikasi Keluar pada SKPD:
  - Dinas Kesehatan Rp79.507.200,00
  - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp2.970.000,00 berupa Perencanaan Rehabilitasi Pembangunan Gedung Kantor yang telah selesai dan dicatat sebagai aset Gedung dan Bangunan
  - Dinas Pariwisata Rp5.984.000,00 berupa perencanaan pembuatan jalur pejalan kaki/pedestrian di obyek wisata Pantai Kubu yang telah selesai dan dicatat sebagai aset Gedung dan Bangunan
  - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp6.176.060,00 berupa penambahan daya listrik yang telah selesai dan dicatat menambah aset Gedung BPP Pangkalan Banteng
  - Sekretariat Daerah Rp8.966.262.804,00
  - Sekretariat DPRD Rp9.427.000,00 berupa Jasa Perencanaan pembuatan *Back Drop* yang telah selesai dan dicatat menambah aset Gedung dan Bangunan

Daftar saldo akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan masing-masing SKPD per 31 Desember 2022 dan 2021 disajikan pada tabel di bawah ini dan rinciannya pada **Lampiran 5.9.** 

Tabel 5.83 Daftar Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	623.884.098,72	622.440.273,72
2	Dinas Kesehatan	2.456.056.166,00	2.041.623.266,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	384.300.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	121.865.798.558,97	119.581.912.508,97
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.137.666,67	2.137.666,67
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	75.839.500,00	75.839.500,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	389.121.892,00	389.121.892,00
9	Dinas Sosial	10.373.000,00	10.373.000,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.815.893.558,00	1.815.893.558,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.675.000,00	48.675.000,00
12	Dinas Perhubungan	70.706.500,00	70.706.500,00
13	Dinas Komunikasi, informatik, Statistik dan Persandian	254.243.000,00	254.243.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	42.438.000,00	42.438.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	2.970.000,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.358.445.151,00	409.167.000,00
17	Dinas Pariwisata	4.628.000,00	10.612.000,00
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	158.095.500,00	164.271.560,00
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	9.427.000,00	9.427.000,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
20	Sekretariat Daerah	272.886.000,00	9.239.148.804,00
21	Sekretariat DPRD	-	9.427.000,00
22	Kecamatan Arut Selatan	885.325.500,00	835.926.000,00
23	Kecamatan Arut Utara	2.100.000,00	2.100.000,00
24	Badan Pendapatan Daerah	49.456.000,00	-
	Saldo Akhir Konstruksi Dalam Pengerjaan	131.395.530.091,36	136.022.753.529,36

#### 5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 senilai (Rp3.179.655.738.786,93) merupakan hasil dari koreksi penyusutan tahun-tahun sebelumnya dan penyusutan tahun 2022. Rincian Akumulasi Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.84 Akumulasi Penyusutan per Jenis Aset Tetap

No.	Jenis Aset	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Peralatan dan Mesin	(546.865.118.882,55)	(473.163.499.764,04)
2	Gedung dan Bangunan	(217.694.295.046,34)	(200.690.606.450,53)
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	(2.415.096.324.858,04)	(2.208.696.755.094,37)
	Jumlah	(3.179.655.738.786,93)	(2.882.550.861.308,94)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2022 tidak sama apabila dibandingkan dengan hasil uji dari penjumlahan beban penyusutan tahun 2022 ditambah akumulasi penyusutan Aset Tetap tahun 2021 *audited*. Terdapat selisih nilai akumulasi penyusutan sebesar Rp18.392.885.033,17 yang disebabkan adanya koreksi:

- 1) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap Hibah masuk senilai Rp22.574.256.515,84 yang diterima di tahun 2022, namun tahun perolehan Aset Tetap Hibah tersebut sebelum tahun 2022
- 2) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status masuk Aset Tetap senilai Rp679.490.810,23
- 3) Akumulasi penyusutan atas pengalihan status keluar Aset Tetap senilai (Rp679.490.810,23)
- 4) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dilelang senilai (Rp2.854.782.178,74)
- 5) Akumulasi penyusutan atas Aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain/pinjam pakai senilai (Rp892.289.970,48)
- 6) Akumulasi penyusutan atas Aset Tetap yang dihapus karena sebab lain (Rp69.440.224,80) dan dimusnahkan (Rp97.119.145,10)
- 7) Akumulasi penyusutan atas perubahan data BMD, antara lain karena adanya perubahan tanggal perolehan, masa manfaat, dan reklas mapping akun) senilai (Rp267.739.963,55)

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap dan selisih nilai akumulasi penyusutan yang disebabkan adanya koreksi di atas pada masing-masing SKPD disajikan pada Lampiran 5.10.

## 5.3.1.4 Dana Cadangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
5 000 000 000 00	0,00

Dana Cadangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk persiapan PILKADA serentak di tahun 2024 per 31 Desember 2022 senilai Rp5.000.000.000,00 sedangkan per 31 Desember 2021 tidak terdapat Dana Cadangan.

#### 5.3.1.5 Aset Lainnya

(Rp)	(Rp)
89.182.372.806.87	49.565.729.494.23

Aset Lainnya adalah aset yang tidak diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang ataupun Aset Tetap. Aset Lainnya terdiri dari Tagihan penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti rugi (TGR), Tagihan Lainnya, Aset Lainnya yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain. Saldo Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp89.182.372.806,87 dan per 31 Desember 2021 Rp49.565.729.494,23 yang terdiri dari:

Tabel 5.85 Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Tagihan Lainnya	175.342.231,00	175.342.231,00
2	Aset yang Dibatasi Penggunaannya	8.293.528.644,00	25.654.132.368,80
3	Aset Tak Berwujud	52.526.725.717,00	51.356.828.667,00
4	Amortisasi	(46.466.415.153,80)	(42.402.028.557,40)
5	Aset Lain-lain (setelah Penyusutan)	19.139.041.268,67	14.781.454.784,83
6	Aset Lain-lain	33.566.508.827,00	28.483.271.291,00
7	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(14.427.467.558,33)	(13.701.816.506,17)
8	Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	55.514.150.100,00	-
	Jumlah	89.182.372.806,87	49.565.729.494,23

Daftar saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.86 Daftar Saldo Aset Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	5.763.146.919,00	5.859.806.119,00
2	Dinas Kesehatan	197.494.670,09	309.075.042,00
3	Badan RSUD Sultan Imanuddin	1.139.120.650,00	1.260.919.400,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.970.267.118,00	5.082.158.818,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	88.770.000,00	118.360.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	3.070.745,99	3.070.745,99

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00
8	Dinas Sosial	124.801.000,00	170.361.000,00
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.000.000,00	49.148.971,68
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	89.756.906,72	5.111.220,00
11	Dinas Lingkungan Hidup	29.710.000,00	59.420.000,00
12	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	132.948.000,00	55.328.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	107.207.500,00	15.700.000,00
14	Dinas Perhubungan	381.216.088,00	717.763.376,00
15	Dinas Komunikasi,Informatika, Statistik dan Persandian	932.170.452,79	844.812.552,79
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	167.291.820,00	186.823.320,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	150.603.805,58	169.102.453,98
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.286.818.198,69	586.486.721,66
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	6.204.000,00	9.306.000,00
20	Dinas Perikanan	34.767.933,31	41.565.933,31
21	Dinas Pariwisata	154.224.500,00	66.566.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	432.134.540,85	357.431.540,85
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	58.336.091,85	58.336.091,85
24	Sekretariat Daerah	9.231.138.987,88	6.705.555.937,23
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	70.928.000,00	419.448.360,00
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah	56.542.000,00	30.014.300,00
27	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	64.058.993.206,03	25.886.982.377,80
28	Badan Pendapatan Daerah	392.889.652,66	354.461.652,66
29	Inspektorat Kabupaten	27.690.500,00	47.529.000,00
30	Kecamatan Arut Selatan	8.865.120,00	11.820.160,00
31	Kecamatan Arut Utara	935.865,85	935.865,85
32	Kecamatan Pangkalan Lada	4.000.000,00	4.000.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	12.891.033,58	12.891.033,58
34	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
	Jumlah	89.182.372.806,87	49.565.729.494,23

## 5.3.1.5.1 Tagihan Lainnya



Tagihan Lainnya merupakan saldo tagihan piutang lainnya yang mempunyai masa tagih lebih dari 1 (satu) tahun. Tidak terdapat perubahan Saldo Tagihan Lainnya per 31 Desember 2022 dan per 31 Desember 2021 yaitu sebesar Rp175.342.231,00.

## Tabel 5.87 Rincian Tagihan Lainnya

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	Piutang tahun 2008	873.923,00	873.923,00
1	Piutang Pajak Reklame:		
	- GMHK Ega Megatron	86.720,00	86.720,00

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
	- CV Surya Alam Makmur	324.000,00	324.000,00
	Piutang Pajak Golongan C:		
	- CV Bina Putra	463.203,00	463.203,00
	Piutang tahun 2009	3.159.750,00	3.159.750,00
	Piutang Pajak Hotel:		
	- Losmen Permata Hijau	354.000,00	354.000,00
2	- Losmen Mentari	594.000,00	594.000,00
	- Losmen Selekta	150.000,00	150.000,00
	Piutang Pajak Reklame:		
	- CV Bina Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV Griya Fortuna Buun	216.000,00	216.000,00
	- CV Maju Jaya Borneo	108.000,00	108.000,00
	- Koperasi Rajawali Perkasa	108.000,00	108.000,00
	- CV Putra Arut Persada	96.750,00	96.750,00
	- CV Sawit Sumber Mas Sarana	290.250,00	290.250,00
	- Bengkel Sumber Baru	579.000,00	579.000,00
	- Jaya Makmur	92.250,00	92.250,00
	- Kios Berkat Anugrah	162.000,00	162.000,00
	- CV Alba	108.000,00	108.000,00
	- CV Mulya	96.750,00	96.750,00
	- UD Sinti	108.000,00	108.000,00
3	Piutang Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan PT Korindo TA. 2002	59.148.018,00	59.148.018,00
4	Piutang Retribusi Pasar dan Tebusan Blok Pasar Indra Kencana	97.249.320,00	97.249.320,00
5	Piutang Dana Bergulir Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar	9.800.000,00	9.800.000,00
6	Piutang Bunga Dana UPPKS Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
	Jumlah	175.342.231,00	175.342.231,00

Daftar saldo Tagihan Lainnya per 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.88 Daftar Saldo Tagihan Lainnya pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	59.148.018,00	59.148.018,00
2	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	5.111.220,00	5.111.220,00
3	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	107.049.320,00	107.049.320,00
4	Badan Pendapatan Daerah	4.033.673,00	4.033.673,00
	Jumlah	175.342.231,00	175.342.231,00

# 5.3.1.5.2 Aset yang Dibatasi Penggunaannya

(Rp)	(Rp)
8.293.528.644.00	25.654.132.368.80

Aset yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas yang telah ada peruntukannya yaitu saldo kas yang ada pada Bendahara Umum Daerah atau Kas Daerah. Saldo Akhir Kas di

BUD/Kasda yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2022 senilai Rp8.293.528.644,00 sedangkan per 31 Desember 2021 Rp25.654.132.368,80 atau mengalami penurunan sebesar (Rp17.360.603.724,80) dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.89 Rincian Aset yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Sumber Dana	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	DBH DR	3.768.896.836,00	14.509.124.135,00
2	DBH CHT	16.585.362,00	16.585.362,00
3	DAK FISIK:		
	Silpa TAYL	388.017.239,00	557.378.568,80
	Murni	71.803.277,00	-
4	DAK NONFISIK:		
	BOP PAUD	23.469.000,00	621.272.450,00
	вокв	848.619.098,00	66.205.899,00
	BOK	1.804.270.520,00	5.004.347.573,00
	TPG	461.212.010,00	3.565.485.476,00
	Tamsil	95.250.000,00	545.250.000,00
	TKG	26.294.430,00	188.714.400,00
	Adminduk	38.085.351,00	323.223.714,00
	BOP Kesetaraan	-	52.638.750,00
	P2UKM	2.905.158,00	90.961.158,00
	Kepariwisataan	12.800.000,00	12.800.000,00
	FPM	101.512.000,00	94.084.835,00
	KPP	57.054.380,00	6.060.048,00
	PPA	184.665.224,00	-
5	DID	392.088.759,00	-
	Jumlah	8.293.528.644,00	25.654.132.368,80

## 5.3.1.5.3 Aset Tak Berwujud

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
52,526,725,717,00	51.356.828.667.00

Saldo Aset Tak Berwujud berasal dari pengadaaan belanja modal dan belanja selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp1.169.897.050,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp52.526.725.717,00 Rincian penambahan/pengurangan Aset Tak Berwujud Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada tahun 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5.90 Penambahan/Pengurangan Aset Tak Berwujud

No.	Uraian	Nilai
Sald	o awal Aset Tak Berwujud	51.356.828.667,00
1	Penambahan:	1.188.597.050,00

No.	Uraian	Nilai
	Pengadaaan Belanja Modal Selain Tak Berwujud Yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud	1.151.967.050,00
	Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022	36.630.000,00
2	Pengurangan:	18.700.000,00
	Penghapusan	18.700.000,00
Sald	o Akhir Aset Tak Berwujud	52.526.725.717,00

- 1) Penambahan Aset Tak Berwujud tahun 2022 total senilai Rp1.188.597.050,00 berasal dari:
  - a. pengadaaan Belanja Modal selain Aset Tak Berwujud yang dikapitalisasi sebagai Aset Tak Berwujud senilai Rp1.151.967.050,00 pada SKPD:
    - Dinas Kesehatan Rp75.533.850,00
    - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp147.263.700,00
    - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Rp96.237.000,00
    - Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Rp94.647.500,00
    - Dinas Perhubungan Rp89.133.000,00
    - Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Rp348.034.500,00
    - Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Rp30.000.000,00
    - Dinas Pariwisata Rp97.624.500,00
    - Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Rp 74.703.000,00
    - Badan Pendapatan Daerah Rp98.790.000,00
  - b. Pengadaan Barang dan Jasa Tahun 2022 Rp36.630.000,00 yaitu pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- 2) Pengurangan Aset Tak Berwujud tahun 2022 total senilai Rp18.700.000,00 karena adanya penghapusan pada Dinas Ketahanan Pangan.

Daftar saldo akhir Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 5.91 Daftar Saldo Aset Tak Berwujud pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	750.578.500,00	750.578.500,00
2	Dinas Kesehatan	1.605.115.350,00	14.723.500,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	•	1.514.858.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	25.188.825.985,00	25.041.562.285,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	147.950.000,00	147.950.000,00
6	Dinas Sosial	227.800.000,00	227.800.000,00
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	14.718.000,00	14.718.000,00
8	Dinas Ketahanan Pangan		18.700.000,00
9	Dinas Lingkungan Hidup	902.873.000,00	902.873.000,00
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	234.372.000,00	138.135.000,00
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	110.347.500,00	15.700.000,00
12	Dinas Perhubungan	8.355.715.040,00	8.266.582.040,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.651.417.500,00	1.303.383.000,00
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	628.683.000,00	628.683.000,00
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	342.013.242,00	312.013.242,00
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	199.485.000,00	199.485.000,00
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	94.345.000,00	94.345.000,00
18	Dinas Perikanan	466.950.000,00	466.950.000,00
19	Dinas Pariwisata	147.454.500,00	49.830.000,00
20	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	74.703.000,00	-
21	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	44.850.000,00	44.850.000,00
22	Sekretariat Daerah	1.254.884.300,00	1.254.884.300,00
23	Kecamatan Arut Selatan	63.725.200,00	63.725.200,00
24	Inspektorat Kabupaten	99.192.500,00	99.192.500,00
25	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	6.897.899.800,00	6.897.899.800,00
26	Badan Pendapatan Daerah	866.252.000,00	767.462.000,00
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.334.624.200,00	1.297.994.200,00
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	517.025.500,00	517.025.500,00
29	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	304.925.600,00	304.925.600,00
	Saldo Akhir Aset Tak Berwujud	52.526.725.717,00	51.356.828.667,00

## 5.3.1.5.4 Amortisasi

(46.466.415.153,80)	(42.402.028.557,40)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Amortisasi adalah perhitungan akumulasi penyusutan untuk Aset Tak Berwujud dimana per 31 Desember 2022 saldonya senilai (Rp46.466.415.153,80) sedangkan per 31 Desember 2021 senilai (Rp42.402.028.557,40). Daftar saldo akhir Amortisasi per 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021 pada masing-masing SKPD tersaji pada tabel berikut:

## Tabel 5.92 Daftar Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(479.664.500,00)	(383.005.300,00)
2	Dinas Kesehatan	(14.723.500,00)	(14.723.500,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(1.245.151.200,00)	(1.047.818.600,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(22.277.706.885,00)	(20.018.551.485,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(59.180.000,00)	(29.590.000,00)
6	Dinas Sosial	(103.100.000,00)	(57.540.000,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(14.718.000,00)	(14.718.000,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	(18.700.000,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(873.163.000,00)	(843.453.000,00)
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(101.424.000,00)	(82.807.000,00)
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(3.140.000,00)	-
12	Dinas Perhubungan	(7.974.498.952,00)	(7.548.818.664,00)

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(917.096.000,00)	(656.419.400,00)
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(569.503.000,00)	(551.034.000,00)
15	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(214.757.296,80)	(166.258.648,40)
16	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(79.794.000,00)	(39.897.000,00)
17	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(88.141.000,00)	(85.039.000,00)
18	Dinas Perikanan	(466.950.000,00)	(460.152.000,00)
19	Dinas Pariwisata	(49.830.000,00)	(39.864.000,00)
20	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(44.850.000,00)	(44.850.000,00)
21	Sekretariat Daerah	(1.110.365.640,00)	(961.908.980,00)
22	Kecamatan Arut Selatan	(54.860.080,00)	(51.905.040,00)
23	Inspektorat Kabupaten	(75.361.000,00)	(55.522.500,00)
24	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(6.826.971.800,00)	(6.478.451.440,00)
25	Badan Pendapatan Daerah	(721.432.000,00)	(661.070.000,00)
26	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(1.278.082.200,00)	(1.267.979.900,00)
27	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)	(304.925.600,00)	(517.025.500,00)
28	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(517.025.500,00)	(304.925.600,00)
	Saldo Akhir Amortisasi	(46.466.415.153,80)	(42.402.028.557,40)

## 5.3.1.5.5 Aset Lain-lain (setelah penyusutan)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
19.139.041.268.67	14.781.454.784.83

Saldo Aset Lain-lain (setelah penyusutan) per 31 Desember 2022 senilai Rp19.139.041.268,67 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp14.781.454.784,83.

#### 5.3.1.5.5.1 Aset Lain-lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
33.566.508.827,00	28.483.271.291,00

Aset Lain-lain milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terdiri dari Aset dalam kondisi Rusak Berat yang diusulkan untuk dihapuskan, aset hasil penilaian, aset dalam proses Hibah, aset dalam proses Lelang, dan aset yang dimanfaatkan oleh pihak lain. Jika dibandingkan dengan saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2021, terdapat penambahan senilai Rp5.083.237.536,00 sehingga saldo per 31 Desember 2022 menjadi Rp33.566.508.827,00. Penambahan/pengurangan Aset Lain-lain Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat selama tahun 2022 dijelaskan pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.93 Rincian Penambahan/Pengurangan Aset Lain-lain

No.	Uraian	Nilai
Sald	o awal Aset Lain-lain	28.483.271.291,00
1	Penambahan:	11.899.214.988,48

No.	Uraian	Nilai
	Reklasifikasi masuk karena Lelang 2022	6.423.944.062,48
	Reklasifikasi masuk karena pemanfaatan oleh pihak lain	5.077.571.560,00
	Belanja Modal 2022	397.699.366,00
2	Pengurangan:	6.815.977.452,48
	Penghapusan karena lelang 2022	6.638.794.452,48
	Reklasifikasi keluar	177.183.000,00
Sald	o akhir Aset Lain-Lain	33.566.508.827,00

Daftar saldo akhir Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.94 Daftar Saldo Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.867.013.819,00	8.867.013.819,00
2	Dinas Kesehatan	6.220.264.042,00	358.075.042,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	-	5.963.089.000,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	22.200.000,00	22.200.000,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	34.329.000,00	34.329.000,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	163.335.400,00	163.335.400,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.700.000,00	3.700.000,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	61.737.500,00	61.737.500,00
9	Dinas Sosial	101.000,00	101.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	2.000.000,00	67.482.890,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	126.767.500,00	39.295.500,00
12	Dinas Lingkungan Hidup	338.000,00	338.000,00
13	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	142.203.000,00	142.203.000,00
14	Dinas Perhubungan	4,00	4,00
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	220.800.000,00	220.800.000,00
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1.062.500,00	2.125.000,00
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	174.974.850,00	174.974.850,00
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	2.575.685.876,00	513.841.200,00
19	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	22.710.000,00	22.710.000,00
20	Dinas Perikanan	332.901.673,00	332.901.673,00
21	Dinas Pariwisata	254.100.000,00	254.100.000,00
22	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	444.662.000,00	449.662.000,00
23	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	276.568.000,00	276.568.000,00
24	Sekretariat Daerah	11.120.492.704,00	8.274.252.704,00
25	Sekretariat DPRD	287.925.000,00	287.925.000,00
26	Kecamatan Arut Selatan	28.560.000,00	28.560.000,00
27	Kecamatan Arut Utara	52.495.000,00	52.495.000,00
28	Kecamatan Pangkalan Lada	5.600.000,00	5.600.000,00
29	Kecamatan Pangkalan Banteng	72.986.700,00	99.791.700,00

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
30	Inspektorat Kabupaten	3.859.000,00	3.859.000,00
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	273.956.000,00	273.956.000,00
32	Badan Pendapatan Daerah	285.000.000,00	285.000.000,00
33	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.488.180.259,00	1.201.249.009,00
	Saldo Akhir Aset Lain-Lain	33.566.508.827,00	28.483.271.291,00

## 5.3.1.5.5.2 Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(14.427.467.558,33)	(13.701.816.506,17)

Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 senilai (Rp14.427.467.558,33) sedangkan per 31 Desember 2021 (Rp13.701.816.506,17) yang merupakan akumulasi penyusutan aset rusak berat, aset yang dimanfaatkan pihak lain, dan aset dalam proses lelang. Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain per 31 Desember 2022 dan 2021 pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.95 Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(3.374.780.900,00)	(3.374.780.900,00)
2	Dinas Kesehatan	(59.680.371,91)	(49.000.000,00)
3	Rumah Sakit Umum Daerah	(5.169.209.000,00)	(5.169.209.000,00)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	(22.200.000,00)	(22.200.000,00)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	(34.329.000,00)	(34.329.000,00)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(160.264.654,01)	(160.264.654,01)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1	(18.333.918,32)
8	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	(42.121.813,28)	(39.295.500,00)
9	Dinas Lingkungan Hidup	(338.000,00)	(338.000,00)
10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	(142.203.000,00)	(142.203.000,00)
11	Dinas Perhubungan	(4,00)	(4,00)
12	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(22.951.047,21)	(22.951.047,21)
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(151.626.989,62)	(151.626.989,62)
14	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(408.558.677,31)	(86.942.478,34)
15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	(22.710.000,00)	(22.710.000,00)
16	Dinas Perikanan	(298.133.739,69)	(298.133.739,69)
17	Dinas Pariwisata	(197.500.000,00)	(197.500.000,00)
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	(87.230.459,15)	(92.230.459,15)
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(218.231.908,15)	(218.231.908,15)
20	Sekretariat Daerah	(2.033.872.376,12)	(1.861.672.086,77)
21	Sekretariat DPRD	(287.925.000,00)	(287.925.000,00)
22	Kecamatan Arut Selatan	(28.560.000,00)	(28.560.000,00)
23	Kecamatan Arut Utara	(51.559.134,15)	(51.559.134,15)
24	Kecamatan Pangkalan Lada	(1.600.000,00)	(1.600.000,00)

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
25	Kecamatan Pangkalan Banteng	(60.095.666,42)	(86.900.666,42)
26	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	(273.956.000,00)	(273.956.000,00)
27	Badan Pendapatan Daerah	(40.964.020,34)	(40.964.020,34)
28	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	(1.236.865.796,97)	(968.399.000,00)
	Jumlah	(14.427.467.558,33)	(13.701.816.506,17)

## 5.3.1.5.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
55.514.150.100,00	0,00

Dana Transfer *Treasury Deposit Facility* yang selanjutnya disingkat *TDF* merupakan fasilitas yang disediakan oleh BUN bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia. Berdasarkan Surat Dirjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor S-392/WPB.18/2023 Tanggal 20 Februari 2023, saldo *TDF-TKD* per 31 Desember 2022 sebesar Rp55.514.150.100,00 pada Rek Lain BI *TDF-TKD* Kab. Kotawaringin Barat dengan nomor rekening 519000433980, sedangkan per 31 Desember 2021 tidak terdapat saldo Dana Transfer *TDF*. Tabel di bawah ini adalah rincian Dana Transfer *TDF* per 31 Desember 2022:

Tabel 5.96 Rincian Dana Transfer TDF

No.	Tanggal	Uraian	Nilai
1	29 Des 2022	Kurang Bayar Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Tahun 2021 non tunai - TDF yang dialokasikan pada TA 2022	25.615.099.987,00
2	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	211.753.211,00
3	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	137.156.490,00
4	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	16.274.287.835,00
5	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	12.356.755,00
6	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	67.905,00
7	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	694.512.677,00
8	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	3.526.930.715,00
9	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	221.001.354,00
10	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	198.785,00
11	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	2.040.206,00
12	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	5.611.326.388,00
13	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	5.141.092,00
14	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai - TDF, Minggu ke-18 TA 2022	1.198.523,00
15	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	6.819.823,00
16	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	1.236,00

No.	Tanggal	Uraian	Nilai
17	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Minyak dan Gas Bumi Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	176.259.024,00
18	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	42.826.286,00
19	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Non Migas Lainnya Non Tunai - TDF, Minggu ke-18 TA 2022	41.134.207,00
20	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	18.040.519,00
21	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai, Tahap ke-3 TA 2022	472.605.805,00
22	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	84.809.035,00
23	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	327.094,00
24	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Bagi Rata Non Tunai - TDF, Tahap ke-3 TA 2022	344.421.402,00
25	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	530.191.705,00
26	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Lainnya Non Tunai, Minggu ke-18 TA 2022	360.337,00
27	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan Non Tunai, Triwulan ke-4 TA 2022	1.463.655.040,00
28	30 Des 2022	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi Non Tunai - TDF, Triwulan ke-4 TA 2022	19.626.664,00
	Jumlah 55.514.150.1		

## 5.3.1.6 Properti Investasi (setelah penyusutan)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
439.609.507,20	0,00

Properti Investasi (setelah penyusutan) per 31 Desember 2022 senilai Rp439.609.507,20 sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

## 5.3.1.6.1 Properti Investasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
500 881 000 00	0.00

Properti Investasi berdasarkan PSAP 17 adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya, dan tidak untuk:

- digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif
- dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada msyarakat

Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 senilai Rp500.881.000,00sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00.

## 5.3.1.6.2 Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(61.271.492,80)	0,00

Akumulasi Penyusutan Properti Investasi per 31 Desember 2022 senilai (Rp61.271.492,80) sedangkan per 31 Desember 2021 senilai Rp0,00. Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi dapat dilihat pada **Lampiran 5.11.** 

## 5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
27.064.327.055,25	116.879.838.917,43

Kewajiban terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek dan Jangka Panjang. Kewajiban timbul antara lain karena adanya kekurangan pembayaran gaji dan tunjangan lainnya, serta kepada penyedia jasa yang telah menyediakan jasa akan tetapi pembayarannya di kemudian hari sehingga mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat melakukan aliran kas keluar. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.064.327.055,25 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp116.879.838.917,43 yang terdiri dari:

#### Tabel 5.97 Jenis Kewajiban

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Kewajiban Jangka Pendek	27.064.327.055,25	83.879.838.917,43
2	Kewajiban Jangka Panjang	-	33.000.000.000,00
	Jumlah	27.064.327.055,25	116.879.838.917,43

#### 5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
27.064.327.055,25	83.879.838.917,43	

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp27.064.327.055,25 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.879.838.917,43 yang terdiri dari:

#### 5.3.2.1.1 Pendapatan Diterima Di Muka

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
305.756.383,20	115.639.302,19

Saldo Pendapatan Diterima Di Muka per 31 Desember 2022 sebesar Rp305.756.383,20 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp115.639.302,19 yang merupakan pendapatan atas Sewa Barang Milik Daerah pada:

- RSUD Sultan Imanuddin Rp123.759.000,00
- Dinas Perhubungan Rp4.368.295,89
- Dinas Kesehatan Rp9.278.465,75
- Sekretariat Daerah Rp134.834.596,90
- Kecamatan Pangkalan Banteng Rp33.516.024,66

## 5.3.2.1.2 Utang Belanja

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
26,758,570,672,05	83.764.199.615.24

Utang Belanja Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat per 31 Desember 2022 sebesar Rp26.758.570.672,05 terdiri dari Utang Belanja Pegawai, Utang Belanja Barang dan Jasa,

Utang Belanja Modal serta Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, sedangkan Utang Belanja per 31 Desember 2021 sebesar Rp83.764.199.615,24. Jenis Utang Belanja dapat dilihat pada tabel di bawah ini dan rinciannya pada **Lampiran 5.12.** 

#### Tabel 5.98 Jenis Utang Belanja

No.	Jenis Utang	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Utang Belanja Pegawai	10.782.027.002,00	8.779.962.362,00
2	Utang Belanja Barang dan Jasa	12.384.577.910,00	69.101.476.293,19
3	Utang Belanja Modal	507.960,05	507.960,05
4	Utang Belanja Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	3.591.457.800,00	5.882.253.000,00
	Jumlah	26.758.570.672,05	83.764.199.615,24

# 5.3.2.1.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	33.000.000.000,00

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki saldo Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Menengah per 31 Desember 2022, sedangkan per 31 Desember 2021 terdapat saldo sebesar Rp33.000.000.000,00 yang merupakan Pokok Utang kepada Lembaga Keuangan Bank-Jangka Menengah.

### 5.3.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	0.00

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat tidak memiliki saldo Kewajiban Jangka Panjang, baik per 31 Desember 2022 maupun per 31 Desember 2021.

#### 5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88

Ekuitas merupakan kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yaitu selisih antara Aset Rp3.431.526.533.551,62 dan Kewajiban Rp27.064.327.055,25. Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.404.462.206.496,37 atau mengalami kenaikan sebesar Rp133.374.708.260,49 atau 4,08 persen dari Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.271.087.498.235,88.

## 5.4 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) merupakan laporan keuangan yang menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Di samping melaporkan kegiatan operasional, LO juga melaporkan transaksi keuangan dari kegiatan non-operasional dan pos luar biasa yang merupakan transaksi di luar tugas dan fungsi utama entitas. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.

**Tabel 5.99 Ringkasan Laporan Operasional** 

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021	Kenaikan/Penurunan
1	Kegiatan Operasional			
	Pendapatan-LO	1.458.642.764.072,76	1.552.401.516.068,48	(104.918.932.968,84)
	Beban	1.338.364.519.255,67	1.273.606.510.310,78	64.758.008.944,89
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Operasi	120.278.244.817,09	278.795.005.757,70	(158.516.760.940,61)
2	Kegiatan Non Operasional			
	Jumlah Surplus Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(621.292.795,85)	268.337.607,18	(889.630.403,03)
	Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	119.656.952.021,24	279.063.343.364,88	(159.406.391.343,64)
3	Pos Luar Biasa	-	-	-
	Surplus/Defisit-LO	119.656.952.021,24	279.063.343.364,88	(159.406.391.343,64)

Penjelasan lebih lanjut mengenai pos-pos Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### 5.4.1 Pendapatan – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.458.642.764.072,76	1.552.401.516.068,48

Pendapatan-LO adalah pendapatan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah diklasifikasikan menurut asal dan jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO TA. 2022 sebesar Rp1.458.642.764.072,76 dan TA. 2021 sebesar Rp1.552.401.516.068,48 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.100 Rincian Pendapatan-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Pendapatan Asli Daerah-LO	214.170.554.561,57	331.547.556.916,60
2	Pendapatan Transfer-LO	1.097.232.561.734,50	1.120.942.150.470,96
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO	147.239.647.776,69	99.911.808.680,92
	Jumlah	1.458.642.764.072,76	1.552.401.516.068,48

#### 5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
214.170.554.561,57	331.547.556.916,60

Akun ini menggambarkan capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Laporan Operasional. Pendapatan Asli Daerah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp214.170.554.561,57 dan TA. 2021 sebesar Rp331.547.556.916,60 yang terdiri dari:

#### 5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
86.823.991.920,63	74.740.551.967,77

Pajak Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah yang dipungut dan dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional disajikan dengan basis akrual, dimana pengakuannya terjadi pada saat timbulnya hak atas pendapatan pada tahun 2022, sehingga nilai pendapatan Pajak Daerah pada Laporan Operasional adalah senilai ketetapan Pajak Daerah dan tidak termasuk pembayaran atas piutang tahun sebelumnya ditambah dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) maupun Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) yang ditetapkan di tahun 2022. Pendapatan Pajak Daerah-LO untuk TA. 2022 dan 2021, masingmasing sebesar Rp86.823.991.920,63 dan Rp74.740.551.967,77 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.101 Rincian Pendapatan Pajak Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Pajak Hotel	1.945.458.674,10	1.015.781.077,60
2	Pajak Restoran	3.553.174.603,40	2.464.788.248,00
3	Pajak Hiburan	802.754.530,20	300.351.508,20
4	Pajak Reklame	1.016.063.546,00	1.118.263.730,00
5	Pajak Penerangan Jalan	25.124.635.681,60	23.254.544.777,97
6	Pajak Parkir	115.936.500,00	181.123.200,00
7	Pajak Air Tanah	56.904.910,00	36.457.773,00
8	Pajak Sarang Burung Walet	1.110.301.729,40	1.120.480.670,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Lainnya	2.224.103.102,00	2.736.067.684,00
10	Pajak Bumi dan Bangunan	16.119.963.339,93	15.277.785.278,00
11	ВРНТВ	34.754.695.304,00	27.234.908.021,00
	Jumlah	86.823.991.920,63	74.740.551.967,77

## 5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
16.242.177.865,00	13.928.596.779,80

Pendapatan Retribusi Daerah terkait langsung dengan pelayanan kepada masyarakat yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pemungutan Retribusi Daerah didasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah. Pendapatan Retribusi Daerah-LO TA. 2022 dan 2021, masing-masing sebesar Rp16.242.177.865,00 dan Rp13.928.596.779,80. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.102 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Retribusi Jasa Umum	8.808.859.660,00	7.005.176.236,00
	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3.847.449.528,00	2.321.467.690,00
	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan	108.520.000,00	92.945.495,00
	Retribusi Parkir Di Tepi Jalan Umum	1.056.329.799,00	2.029.820.000,00
	Retribusi Pelayanan Pasar	2.714.940.725,00	1.502.516.050,00
	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	649.127.000,00	703.355.000,00
	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi	367.637.358,00	302.167.201,00
	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	64.855.250,00	52.904.800,00
2	Retribusi Jasa Usaha	6.078.466.058,00	5.229.070.502,40
	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	2.866.205.758,00	3.180.245.802,40
	Retribusi Tempat Khusus Parkir	1.115.593.200,00	316.293.600,00
	Retribusi Rumah Potong Hewan	111.100.000,00	66.050.000,00
	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	760.172.100,00	694.646.300,00
	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	844.231.000,00	500.011.000,00
	Retribusi Penjualan Produk Usaha Daerah	381.164.000,00	471.823.800,00
3	Retribusi Perijinan Tertentu	1.354.852.147,00	1.694.350.041,40
	Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan	1.352.452.147,00	1.371.652.041,40
	Retribusi Ijin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	2.400.000,00	2.100.000,00
	Retribusi Ijin Usaha Perikanan	-	-
	Retribusi Ijin Mempekerjakan Tenaga Asing (IMTA)	-	320.598.000,00
	Jumlah	16.242.177.865,00	13.928.596.779,80

#### 5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
12.357.228.709,00	11.919.901.185,00

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp12.357.228.709,00 dan TA. 2021 sebesar Rp11.919.901.185,00. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

#### Tabel 5.103 Rincian Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Bank Pembangunan Kalteng	12.357.228.709,00	11.919.901.185,00
2	Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada PT Jamkrida	-	
	Jumlah	12.357.228.709,00	11.919.901.185,00

## 5.4.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
98.747.156.066.94	230.958.506.984.03

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah merupakan pendapatan di luar Pendapatan Pajak, Retribusi dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp98.747.156.066,94 dan TA. 2021 sebesar Rp230.958.506.984,03. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5.104 Rincian Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Jasa Giro	1.906.241.156,00	2.103.656.135,39
2	Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah (Deposito)	1.463.083.280,00	928.673.467,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	277.183.599,45	285.997.771,12
4	Pendapatan Denda Pajak	277.941.355,48	179.377.633,36
5	Pendapatan Denda Retribusi Umum	22.000,00	3.015.696,00
6	Pendapatan Denda Retribusi Izin Usaha	340.190,00	1.195.081,00
7	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	25.996.000,00	302.936.113,00
8	Pendapatan Pengembalian	517.787.956,79	1.736.785.898,06
9	Pendapatan Lainnya	124.958.598,23	102.136.760,77
10	Pendapatan BLUD	93.115.797.601,99	224.981.891.134,00
11	PAD Lainnya	-	18.458.000,00
12	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Perda	27.750.000,00	222.601.000,00
13	Hasil Sewa BMD	324.555.000,00	91.782.294,33
14	Hasil Penjualan Aset Daerah yang Tidak Dipisahkan	495.862.904,00	-
15	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	19.473.669,00	-
16	Restitusi atas kelebihan setoran PTKP	170.162.756,00	-
	Jumlah	98.747.156.066,94	230.958.506.984,03

## 5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.097.232.561.734,50	1.120.942.150.470,96

Pendapatan Transfer adalah Pendapatan yang diterima dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Pusat Lainnya dan Provinsi yang kemudian dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat. Pendapatan Transfer-LO untuk periode

sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.097.232.561.734,50 dan TA. 2021 sebesar Rp1.120.942.150.470,96 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

## Tabel 5.105 Rincian Pendapatan Transfer-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	982.028.070.198,00	1.038.859.842.934,00
	Dana Perimbangan-LO	968.813.738.198,00	1.038.859.842.934,00
	Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO	13.214.332.000,00	-
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	115.204.491.536,50	82.082.307.536,96
	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	115.054.491.536,50	82.082.307.536,96
	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO	150.000.000,00	-
	Jumlah	1.097.232.561.734,50	1.120.942.150.470,96

## 5.4.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
982.028.070.198,00	1.038.859.842.934,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp982.028.070.198,00 dan TA. 2021 sebesar Rp1.038.859.842.934,00.

#### 5.4.1.2.1.1 Dana Perimbangan-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
968.813.738.198.00	1.038.859.842.934.00

Dana Perimbangan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp968.813.738.198,00 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp1.038.859.842.934,00 dengan rincian sebagaimana tersaji pada tabel berikut:

## Tabel 5.106 Rincian Dana Perimbangan-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO	194.034.344.606,00	135.229.818.254,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO	592.682.003.800,00	593.260.006.000,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	110.134.562.916,00	230.385.941.118,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	71.962.826.876,00	79.984.077.562,00
	Jumlah	968.813.738.198,00	1.038.859.842.934,00

#### 5.4.1.2.1.1.1 Dana Bagi Hasil-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
194.034.344.606,00	135.229.818.254,00

Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp194.034.344.606,00 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp135.229.818.254,00.

#### **5.4.1.2.1.1.2 Dana Alokasi Umum-LO**

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
592,682,003,800,00	593.260.006.000.00	

Realisasi Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp592.682.003.800,00 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp593.260.006.000,00.

## 5.4.1.2.1.1.3 Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

(Rp)	(Rp)
110.134.562.916,00	230.385.941.118,00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp110.134.562.916,00 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp230.385.941.118,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.107 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler PAUD	3.694.768.700,00	684.800.900,00
2	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SD	21.023.286.350,00	20.526.950.462,00
3	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler SMP	18.385.443.100,00	1.774.141.481,00
4	DAK Fisik Bidang Pendidikan-Reguler-SKB	1.135.760.000,00	-
5	DAK Fisik Bidang Pendidikan Reguler Perpustakaan Daerah	-	295.756.000,00
6	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kesehatan Dasar	-	20.484.814.405,00
7	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Pelayanan Kefarmasian	2.359.522.928,00	2.646.558.396,00
8	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler Penugasan Penurunan AKI dan AKB	871.175.000,00	96.475.846.861,00
9	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler KB		1.252.525.000,00
10	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Reguler-Peningkatan Kesiapan Sistem Kesehatan	15.283.814.662,00	-
11	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB Penugasan- Peningkatan Pencegahan dan Pengendalian Penyakit dan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat	475.362.704,00	-
12	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan- Penurunan Stunting (KB)	834.883.560,00	-
13	DAK Fisik Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	1.022.099.270,00	-
14	DAK Fisik Bidang Industri Kecil dan Menengah Penugasan Pembangunan Sentra IKM dan Revitalisasi Sentra IKM	-	264.000.000,00
15	DAK Fisik Bidang Kelautan dan Perikanan Penugasan	-	1.195.068.108,00
16	DAK Fisik Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler- Penyediaan Rumah Swadaya	6.290.703.000,00	-
17	DAK Fisik Bidang Jalan Reguler Jalan	26.849.629.692,00	37.142.055.500,00
18	DAK Fisik Bidang Jalan Penugasan Jalan	-	20.041.329.000,00
19	DAK Fisik Bidang Air Minum Penugasan	-	4.745.508.300,00
20	DAK Fisik Bidang Air Minum-Reguler	6.824.684.950,00	-
21	DAK Fisik Bidang Sanitasi-Reguler	5.083.429.000,00	-

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
22	DAK Fisik Bidang Sanitasi Penugasan		2.343.600.000,00
23	DAK Fisik Bidang Irigasi Penugasan	-	6.967.122.000,00
24	DAK Fisik Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Penugasan Lingkungan Hidup	-	7.023.460.000,00
25	DAK Fisik Bidang Transportasi Laut Penugasan	-	6.522.404.705,00
	Jumlah	110.134.562.916,00	230.385.941.118,00

## 5.4.1.2.1.1.4 Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
71.962.826.876.00	79.984.077.562.00

Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp71.962.826.876,00 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp79.984.077.562,00. Rincian Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.108 Rincian Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	DAK Non Fisik Tunjangan Profesi Guru PNSD	48.664.753.201,00	56.578.529.000,00
2	DAK Non Fisik Tambahan Penghasilan Guru	1.167.000.000,00	1.046.487.000,00
3	DAK Non Fisik Tunjangan Khusus Guru	436.476.030,00	890.387.000,00
4	DAK Non Fisik Bantuan Oprasional Penyelengaraan PAUD	5.103.669.000,00	4.957.524.000,00
5	DAK Non Fisik BOP Pendidikan Kesetaraan	1.137.200.000,00	1.162.221.574,00
6	DAK Non Fisik BOPKKB BOK	10.964.508.427,00	12.019.570.147,00
7	DAK Non Fisik BOPKKB BOKB	2.928.394.101,00	1.137.719.573,00
8	DAK Non Fisik Dana PK2UKM	-	328.962.400,00
9	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Administrasi Kependudukan	-	906.003.868,00
10	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan	-	621.500.000,00
11	DAK Non Fisik Dana Fasilitasi Penanaman Modal	332.486.165,00	335.173.000,00
12	DAK Non Fisik Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	451.800.000,00	-
13	DAK Non Fisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	776.539.952,00	-
	Jumlah	71.962.826.876,00	79.984.077.562,00

## 5.4.1.2.1.2 Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
13.214.332.000,00	0,00

Dana Penyesuaian (DID dan DID Tambahan)-LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.214.332.000,00 sedangkan TA. 2021 Rp0,00.

#### 5.4.1.2.2 Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
115.204.491.536,50	82.082.307.536,96

Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp115.204.491.536,50 sedangkan TA. 2021 sebesar Rp82.082.307.536,96 dengan rincian sebagai berikut:

#### 5.4.1.2.2.1 Pendapatan Bagi Hasil-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
115.054.491.536,50	82.082.307.536,96

Pendapatan Bagi Hasil-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp115.054.491.536,50 dan TA. 2021 sebesar Rp82.082.307.536,96.

#### 5.4.1.2.2.2 Bantuan Keuangan-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
150,000,000,00	0.00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00 dan TA. 2021 Rp0,00.

#### 5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

147.239.647.776.69	99.911.808.680.92
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp147.239.647.776,69 dan TA. 2021 sebesar Rp99.911.808.680,92 yang terdiri dari:

Tabel 5.109 Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	47.096.206.673,00	99.911.808.680,92
2	Pendapatan Hibah-LO	100.143.441.103,69	-
	Jumlah	147.239.647.776,69	99.911.808.680,92

Berdasarkan tabel di atas, Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO selama tahun 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00 adalah hak Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayarkan kembali.

# 5.4.1.3.1 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO

31 Desember 2022 31 Desember 2021 (Rp) (Rp) 99.911.808.680,92

Lain-lain Pendapatan Sesuai

dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00 dan TA. 2021 sebesar Rp99.911.808.680,92.

## 5.4.1.3.2 Pendapatan Hibah-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
100.143.441.103.69	0.00

Pendapatan Hibah-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp100.143.441.103,69 dan TA. 2021 Rp0,00. Daftar Pendapatan Hibah-LO pada SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.110 Rincian Lain-lain Pendapatan Hibah-LO

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	8.121.454.460,00	2.936.593.740,97
2	Dinas Kesehatan	15.016.238.478,99	1.712.090.842,35
3	Rumah Sakit Umum Daerah	2.659.543.446,54	22.186.195.154,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	•	13.740.417.248,54
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	16.633.325.209,50	15.049.038.245,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	176.600.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	665.139.153,00
8	Dinas Lingkungan Hidup	1.963.746.974,26	50.000.000,00
9	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	209.297.500,00	-
10	Dinas Perhubungan	30.202.416.034,40	2.328.124.000,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	83.500.000,00
12	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1	17.528.500,00
13	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	1	172.292.500,00
14	Dinas Perikanan	63.000.000,00	-
15	Dinas Pariwisata		2.559.550.000,00
16	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	-	123.552.000,00
17	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	-	11.847.900,00
18	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	25.274.419.000,00	38.099.339.397,06
	Jumlah	100.143.441.103,69	99.911.808.680,92

Pendapatan Hibah berupa Aset Tetap yang diakui sebagai Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO adalah sebesar nilai bukunya sedangkan Hibah berupa persediaan dan uang adalah sebesar nilai perolehannya.

#### 5.4.2 Beban-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
1.338.364.519.255,67	1.273.606.510.310,78	

Beban-LO merupakan beban yang telah benar-benar dimanfaatkan dan terjadi pada tahun berkenaan, terdiri dari Beban Operasi, Beban Transfer dan Beban Tak Terduga. Beban-LO Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.338.364.519.255,67 dan TA. 2021 sebesar Rp1.273.606.510.310,78. Jenis Beban-LO dapat dilihat pada tabel berikut:

#### Tabel 5.111 Jenis Beban-LO

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Operasi	1.253.672.933.552,67	1.197.147.712.554,78
2	Beban Transfer	81.890.596.500,00	75.440.651.400,00
3	Beban Tak Terduga	2.800.989.203,00	1.018.146.356,00
	Jumlah	1.338.364.519.255,67	1.273.606.510.310,78

#### 5.4.2.1 Beban Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.253.672.933.552,67	1.197.147.712.554,78

Rekening ini menggambarkan realisasi Beban Operasi pada Laporan Operasional untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.253.672.933.552,67 sedangkan TA. 2021 Rp1.197.147.712.554,78 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.112 Rincian Beban Operasi

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Pegawai	476.755.034.690,00	443.723.077.127,00
2	Beban Barang dan Jasa	449.473.541.803,40	442.004.112.401,25
3	Beban Bunga	563.499.999,00	897.000.000,00
4	Beban Hibah	36.954.453.903,00	17.668.503.094,00
5	Beban Bantuan Sosial	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00
6	Beban Penyisihan Piutang	4.877.408.103,44	5.381.790.441,53
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	282.805.089.849,83	285.706.301.491,00
8	Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang- Dana Bergulir	218.705.204,00	-
	Jumlah	1.253.672.933.552,67	1.197.147.712.554,78

## 5.4.2.1.1 Beban Pegawai

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
476.755.034.690.00	443.723.077.127.00

Beban Pegawai untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp476.755.034.690,00 dan TA. 2021 sebesar Rp443.723.077.127,00 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.113 Rincian Beban Pegawai

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	271.262.401.747,00	268.969.684.641,00
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	127.073.346.897,00	95.783.236.846,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	61.498.785.880,00	59.900.875.600,00
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	15.914.137.589,00	15.832.106.748,00
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	330.142.577,00	634.013.292,00
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	676.220.000,00	795.970.000,00
7	Beban Pegawai BLUD		1.807.190.000,00
	Jumlah	476.755.034.690,00	443.723.077.127,00

Adapun Beban Pegawai pada masing-masing SKPD TA. 2022 dan 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.114 Daftar Beban Pegawai pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	199.076.671.038,00	193.500.638.141,00
2	Dinas Kesehatan	52.732.016.349,00	46.315.571.032,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	29.115.643.301,00	27.861.575.974,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	8.290.632.428,00	7.201.040.639,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	3.095.574.064,00	2.711.363.279,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	7.916.015.631,00	7.403.513.844,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.690.864.584,00	3.127.378.681,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.966.834.905,00	3.239.844.677,00
9	Dinas Sosial	4.407.226.339,00	3.737.602.733,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	4.278.671.959,00	3.875.533.167,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.607.128.134,00	4.094.270.669,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	3.300.162.565,00	3.340.034.028,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.678.122.355,00	4.252.503.482,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4.481.634.586,00	4.171.069.100,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4.400.469.477,00	3.905.703.190,00
16	Dinas Perhubungan	4.557.037.796,00	3.775.861.225,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.153.220.494,00	4.244.736.392,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.967.427.965,00	5.244.850.334,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	4.487.958.366,00	3.788.910.984,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.801.735.557,00	3.651.510.334,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	4.288.130.475,00	3.657.504.016,00
22	Dinas Perikanan	3.781.769.442,00	3.262.392.522,00
23	Dinas Pariwisata	4.222.823.823,00	3.588.437.189,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	14.726.791.419,00	13.189.262.073,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	5.829.568.846,00	4.959.370.860,00
26	Sekretariat Daerah	13.380.328.876,00	12.723.735.859,00

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
27	Sekretariat DPRD	18.700.903.531,00	18.438.685.230,00
28	Kecamatan Arut Selatan	8.947.600.958,00	8.135.876.984,00
29	Kecamatan Arut Utara	2.745.011.355,00	2.496.877.927,00
30	Kecamatan Kumai	5.117.349.979,00	4.482.673.011,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	3.694.662.297,00	3.169.816.932,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	1.898.541.786,00	1.758.790.173,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.287.343.174,00	2.095.549.351,00
34	Inspektorat Kabupaten	6.147.595.336,00	4.871.752.314,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.232.263.424,00	4.302.135.216,00
36	Badan Pendapatan Daerah	4.848.314.372,00	4.431.430.343,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	4.881.007.948,00	5.169.902.420,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	4.019.979.756,00	3.545.372.802,00
	Jumlah	476.755.034.690,00	443.723.077.127,00

## 5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
449.473.541.803,40	442.004.112.401,25

Beban Barang dan Jasa untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp449.473.541.803,40 dan TA. 2021 sebesar Rp442.004.112.401,25 yang terdiri dari:

#### Tabel 5.115 Rincian Beban Barang dan Jasa

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Barang/Persediaan	163.898.674.605,57	143.028.416.060,42
2	Beban Jasa	201.260.676.985,81	254.339.261.676,33
3	Beban Pemeliharaan	24.563.395.122,02	15.400.201.844,00
4	Beban Perjalanan Dinas	48.465.722.754,00	28.308.282.820,50
5	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	11.285.072.336,00	927.950.000,00
	Jumlah	449.473.541.803,40	442.004.112.401,25

## 5.4.2.1.2.1 Beban Barang/Persediaan

(Rp)	(Rp)
163.898.674.605,57	143.028.416.060,42

Beban Barang/Persediaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp163.898.674.605,57 dan TA. 2021 sebesar Rp143.028.416.060,42. Beban Barang/Persediaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

## Tabel 5.116 Daftar Beban Barang/Persediaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	13.005.949.403,83	19.718.525.571,78
2	Dinas Kesehatan	27.343.272.640,20	13.080.361.563,80

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
3	Rumah Sakit Umum Daerah	54.528.665.350,00	64.734.948.623,09
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	17.779.534.744,61	9.484.043.614,90
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	585.303.022,00	840.560.480,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	873.526.644,00	414.345.705,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	382.146.079,00	246.462.891,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.697.276.812,00	3.718.604.400,00
9	Dinas Sosial	861.880.541,00	968.265.340,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.351.741.245,00	522.221.278,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	980.837.928,00	1.503.659.506,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	632.432.594,00	208.865.000,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	4.742.852.116,23	1.931.508.229,52
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1.070.205.383,50	911.504.642,50
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	336.394.759,00	285.667.334,00
16	Dinas Perhubungan	475.519.776,00	290.544.854,10
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	178.189.468,00	130.177.839,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.544.949.858,00	293.735.877,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	393.354.380,00	157.205.913,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.132.776.415,00	695.417.570,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	289.509.381,00	92.431.507,00
22	Dinas Perikanan	8.789.931.765,10	7.361.112.810,00
23	Dinas Pariwisata	274.790.802,00	557.863.574,20
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	5.600.543.495,00	2.631.917.570,87
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	3.270.223.350,00	2.816.344.266,41
26	Sekretariat Daerah	4.193.209.407,10	2.398.066.613,00
27	Sekretariat DPRD	1.593.831.149,00	1.518.096.337,00
28	Kecamatan Arut Selatan	1.526.229.701,00	1.558.137.048,77
29	Kecamatan Arut Utara	182.419.716,00	155.143.510,00
30	Kecamatan Kumai	593.287.665,00	588.054.370,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	495.945.026,00	247.704.925,48
32	Kecamatan Pangkalan Lada	172.991.590,00	100.041.485,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	144.554.894,00	63.837.810,00
34	Inspektorat Kabupaten	441.849.191,00	391.973.506,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	832.628.549,00	653.235.101,00
36	Badan Pendapatan Daerah	934.973.391,00	496.715.024,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.308.076.734,00	923.370.019,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	356.869.640,00	337.744.350,00
	Jumlah	163.898.674.605,57	143.028.416.060,42

## 5.4.2.1.2.2 Beban Jasa

(Rp)	(Rp)
201.260.676.985,81	254.339.261.676,33

Beban Jasa untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp201.260.676.985,81 dan TA. 2021 sebesar Rp254.339.261.676,33. Beban Jasa pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.117 Daftar Beban Jasa pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	26.513.519.573,15	21.762.287.830,40
2	Dinas Kesehatan	45.044.390.275,00	37.546.852.862,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	46.222.923.639,61	120.237.789.454,24
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.123.253.997,00	10.601.381.917,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.020.144.684,00	1.087.715.191,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.517.636.441,00	2.670.090.890,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.300.804.003,00	516.424.643,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.187.580.662,00	3.602.749.547,00
9	Dinas Sosial	791.166.640,00	782.792.403,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.113.854.074,00	1.119.095.201,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	2.022.046.637,00	1.176.465.438,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	248.581.983,00	224.677.079,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	11.175.031.644,00	10.521.196.348,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	452.004.653,00	450.717.423,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.324.759.259,00	1.059.869.554,00
16	Dinas Perhubungan	2.003.856.036,00	1.827.472.633,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	3.509.878.795,00	3.643.735.768,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	3.810.870.731,00	4.145.561.770,38
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	643.087.797,00	424.800.499,84
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.437.572.613,00	846.965.090,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	855.516.206,00	799.546.146,00
22	Dinas Perikanan	1.480.825.827,00	1.202.250.581,00
23	Dinas Pariwisata	975.457.473,00	763.897.196,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.939.519.840,00	1.290.813.909,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	1.553.741.256,00	1.494.939.592,00
26	Sekretariat Daerah	10.168.879.439,05	9.479.844.605,50
27	Sekretariat DPRD	3.245.454.280,00	2.954.687.857,00
28	Kecamatan Arut Selatan	2.156.170.092,00	1.960.304.953,00
29	Kecamatan Arut Utara	426.082.508,00	376.434.405,00
30	Kecamatan Kumai	785.533.157,00	759.584.118,50
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	967.724.520,00	875.324.329,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	143.132.384,00	127.537.285,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	259.688.613,00	221.002.867,00

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
34	Inspektorat Kabupaten	528.628.146,00	426.832.719,72
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.139.866.020,00	1.385.083.032,00
36	Badan Pendapatan Daerah	1.758.097.228,00	1.338.595.552,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	2.361.624.835,00	2.213.360.381,75
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		165.000.000,00
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	3.051.771.025,00	2.255.580.605,00
	Jumlah	201.260.676.985,81	254.339.261.676,33

## 5.4.2.1.2.3 Beban Pemeliharaan



Beban Pemeliharaan untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp24.563.395.122,02 dan TA. 2021 sebesar Rp15.400.201.844,00. Beban Pemeliharaan pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.118 Daftar Beban Pemeliharaan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	546.897.113,00	1.292.758.488,00
2	Dinas Kesehatan	349.517.386,00	314.249.970,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	3.569.693.243,00	2.079.628.217,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	11.532.537.119,00	6.573.511.079,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	69.980.000,00	33.639.200,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	285.556.750,00	481.779.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	26.643.819,00	31.750.480,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	208.327.779,00	174.972.200,00
9	Dinas Sosial	20.300.000,00	149.903.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	155.058.100,00	39.311.500,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	66.679.262,00	61.308.782,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	36.810.000,00	32.928.270,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	143.253.150,02	194.595.100,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	130.046.243,00	71.621.716,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	48.562.930,00	34.065.684,00
16	Dinas Perhubungan	2.279.991.757,00	838.460.284,00
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	46.633.000,00	31.651.314,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	239.495.000,00	203.534.925,00
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	120.905.654,00	55.490.940,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	145.381.350,00	106.388.800,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	138.887.000,00	53.780.536,00
22	Dinas Perikanan	286.362.000,00	65.425.000,00
23	Dinas Pariwisata	38.865.000,00	56.109.332,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	225.456.300,00	48.445.000,00

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	136.769.040,00	44.680.000,00
26	Sekretariat Daerah	733.006.320,00	682.683.037,00
27	Sekretariat DPRD	807.631.325,00	439.576.398,00
28	Kecamatan Arut Selatan	504.728.400,00	265.235.000,00
29	Kecamatan Arut Utara	94.154.000,00	18.148.000,00
30	Kecamatan Kumai	330.431.000,00	200.028.000,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	184.543.000,00	80.770.000,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	30.635.042,00	11.273.191,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	78.035.000,00	14.859.000,00
34	Inspektorat Kabupaten	86.764.500,00	77.594.799,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	187.175.150,00	88.148.045,00
36	Badan Pendapatan Daerah	119.710.000,00	122.031.826,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	407.824.745,00	249.632.331,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	150.147.645,00	80.233.400,00
	Jumlah	24.563.395.122,02	15.400.201.844,00

## 5.4.2.1.2.4 Beban Perjalanan Dinas

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
48.465.722.754,00	28.308.282.820,50

Beban Perjalanan Dinas untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp48.465.722.754,00 dan TA. 2021 sebesar Rp28.308.282.820,50. Beban Perjalanan Dinas pada masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.119 Daftar Beban Perjalanan Dinas pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	1.899.415.381,00	1.305.161.910,00
2	Dinas Kesehatan	12.416.922.865,00	10.510.058.592,00
3	Badan RSUD Sultan Imanuddin	242.378.524,00	116.572.537,00
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	528.834.378,00	361.083.062,50
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	356.897.041,00	191.446.135,00
6	Satuan Polisi Pamong Praja	337.923.664,00	234.244.000,00
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	688.597.435,00	422.199.911,00
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	414.650.874,00	255.396.487,00
9	Dinas Sosial	445.505.052,00	417.477.530,00
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	553.242.996,00	190.714.269,00
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1.092.092.497,00	658.432.746,00
12	Dinas Ketahanan Pangan	448.566.957,00	211.628.751,00
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.040.139.928,00	114.436.759,00
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	368.294.608,00	220.991.908,00
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.077.914.382,00	687.218.645,00
16	Dinas Perhubungan	556.727.633,00	192.202.397,00

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	208.645.840,00	127.794.154,00
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	709.408.220,00	469.400.583,00
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	733.939.904,00	246.675.495,00
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	1.076.701.598,00	471.348.300,00
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	399.479.763,00	76.731.626,00
22	Dinas Perikanan	607.569.723,00	251.926.186,00
23	Dinas Pariwisata	380.164.686,00	170.774.928,00
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	1.663.199.763,00	409.464.300,00
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	665.945.956,00	226.289.353,00
26	Sekretariat Daerah	2.845.597.610,00	1.134.957.832,00
27	Sekretariat DPRD	8.187.332.536,00	3.688.072.151,00
28	Kecamatan Arut Selatan	352.952.093,00	385.809.778,00
29	Kecamatan Arut Utara	295.738.865,00	139.850.000,00
30	Kecamatan Kumai	337.447.692,00	209.187.640,00
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	288.760.504,00	219.951.600,00
32	Kecamatan Pangkalan Lada	229.935.970,00	51.920.000,00
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	299.821.125,00	98.488.000,00
34	Inspektorat Daerah	2.119.286.815,00	1.837.089.426,00
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.269.016.075,00	439.146.849,00
36	Badan Pendapatan Daerah	928.707.742,00	583.630.800,00
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.561.718.380,00	559.381.624,00
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan	836.247.679,00	421.126.556,00
	Jumlah	48.465.722.754,00	28.308.282.820,50

## 5.4.2.1.2.5 Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

11 285 072 336 00	927 950 000 00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp11.285.072.336,00 dan TA. 2021 sebesar Rp927.950.000,00 dengan rincian masing-masing SKPD pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.120 Daftar Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	121.150.000,00	57.500.000,00
2	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	10.500.000.000,00	-
3	Dinas Sosial	20.000.000,00	72.000.000,00
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.500.000,00	9.000.000,00
5	Dinas Ketahanan Pangan	360.000.000,00	440.000.000,00
6	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	65.700.000,00	43.750.000,00
7	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.000.000,00	4.500.000,00
8	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	93.061.600,00	114.350.000,00

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	44.606.196,00	-
10	Dinas Perikanan	1.704.540,00	•
11	Dinas Pariwisata	14.750.000,00	50.500.000,00
12	Dinas Tanaman Pangan, Holtikulutura dan Perkebunan	12.600.000,00	-
13	Sekretariat Daerah	-	136.350.000,00
14	Inspektorat Daerah	42.000.000,00	-
	Jumlah	11.285.072.336,00	927.950.000,00

## **5.4.2.1.3 Beban Bunga**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
563.499.999.00	897.000.000.00

Beban Bunga untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp563.499.999,00 yang merupakan Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB) BUMD Jangka Menengah, sedangkan TA. 2021 Beban Bunga sebesar Rp897.000.000,00.

#### **5.4.2.1.4 Beban Hibah**

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
36.954.453.903,00	17.668.503.094,00

Beban Hibah untuk periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp36.954.453.903,00 yaitu Beban Hibah yang dikelola oleh Bendahara Umum Daerah (PPKD) dan SKPD dalam bentuk program kegiatan, sedangkan TA. 2021 Beban Hibah sebesar Rp17.668.503.094,00. Beban Hibah masing-masing SKPD dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.121 Daftar Beban Hibah pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.773.052.802,00	9.646.332.403,00
2	Dinas Kesehatan	748.731.721,00	199.916.000,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	6.560.021.450,00	-
4	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3.050.480.000,00	1.300.320.000,00
5	Dinas Sosial	50.000.000,00	18.150.000,00
6	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	278.596.000,00
7	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	414.996.980,00	-
8	Dinas Lingkungan Hidup	-	180.950.000,00
9	Dinas Perhubungan	-	932.512.000,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	436.402.250,00	150.000.000,00
11	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	48.000.000,00
12	Dinas Pariwisata	145.768.700,00	-
13	Sekretariat Daerah	2.625.000.000,00	4.774.578.357,00
14	Kecamatan Kumai	-	18.700.000,00
15	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	150.000.000,00	43.098.334,00

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
16	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan		77.350.000,00
	Jumlah	36.954.453.903,00	17.668.503.094,00

#### 5.4.2.1.5 Beban Bantuan Sosial

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
2.025.200.000,00	1.766.928.000,00

Beban Bantuan Sosial untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.025.200.000,00 dan TA. 2021 sebesar Rp1.766.928.000,00 yang dikelola khusus oleh Bendahara Umum Daerah melalui SKPD berikut:

Tabel 5.122 Daftar Beban Bantuan Sosial pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.180.000.000,00	1.207.500.000,00
2	Dinas Sosial	845.200.000,00	392.928.000,00
3	Sekretariat Daerah	-	166.500.000,00
	Jumlah	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00

## 5.4.2.1.6 Beban Penyisihan Piutang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
4.877.408.103,44	5.381.790.441,53

Beban Penyisihan Piutang tidak tertagih berdasarkan perhitungan penyisihan piutang TA. 2022 dan 2021 masing-masing sebesar Rp4.877.408.103,44 dan Rp5.381.790.441,53 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 5.123 Jenis Beban Penyisihan Piutang

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak	3.318.640.281,51	4.238.743.879,40
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	1.003.513.399,38	410.713.231,98
3	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	555.254.422,55	732.333.330,15
	Jumlah	4.877.408.103,44	5.381.790.441,53

Sedangkan Beban Penyisihan Piutang masing-masing SKPD untuk TA. 2022 dan TA. 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.124 Daftar Beban Penyisihan Piutang pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	12.717.750,00	2.446.500,00
2	Dinas Kesehatan	24.413.750,00	33.441.250,00
3	Rumah Sakit Sultan Imanuddin	555.254.422,55	723.407.898,90
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	125.844,18	631.794,23
5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	8.925.431,25
6	Dinas Lingkungan Hidup	62.500,00	597.500,00

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
7	Dinas Perhubungan	801.410.000,00	272.188.750,00
8	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	47.307,70	-
9	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	150.263.747,50	89.079.433,75
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	-	3.825.504,00
11	Dinas Perikanan	•	600.000,00
12	Sekretariat Daerah	14.380.000,00	7.257.500,00
13	Kecamatan Banteng	92.500,00	70.000,00
14	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	575.000,00
15	Badan Pendapatan Daerah	3.318.640.281,51	4.238.743.879,40
	Jumlah	4.877.408.103,44	5.381.790.441,53

## 5.4.2.1.7 Beban Penyusutan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
278.711.992.444.82	281.111.749.594.60

Beban Penyusutan berasal dari penyusutan seluruh aset tetap selama periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp278.711.992.444,82. Rincian Beban Penyusutan berdasarkan klasifikasi Aset Tetap yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat TA. 2022 dan TA. 2021 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5.125 Jenis Beban Penyusutan

No.	Jenis Aset Tetap	TA. 2022	TA. 2021
1	Peralatan dan Mesin	70.471.801.165,53	69.741.109.771,88
2	Gedung dan Bangunan	26.943.490.125,21	25.418.561.704,98
3	Jalan, Jaringan dan Irigasi	181.296.701.154,08	185.952.078.117,74
	Jumlah	278.711.992.444,82	281.111.749.594,60

Sedangkan Beban Penyusutan Aset Tetap masing-masing SKPD untuk TA. 2022 dan TA. 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.126 Daftar Beban Penyusutan pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	23.731.766.561,54	19.505.125.879,79
2	Dinas Kesehatan	40.916.279.523,96	40.793.626.374,03
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	166.831.375.132,76	181.853.171.650,86
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	2.370.092.996,22	2.029.250.381,07
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	2.539.966.512,97	2.404.456.709,63
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	105.915.458,62	102.333.448,44
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.539.134.070,43	4.162.513.022,88
8	Dinas Sosial	213.545.613,10	210.699.735,87
9	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	563.287.394,53	707.066.978,35
10	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	575.779.120,23	654.467.735,15
11	Dinas Ketahanan Pangan	62.269.022,56	92.702.653,69
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.556.329.050,11	2.535.980.724,77

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	465.210.526,04	453.500.251,03
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	123.773.966,54	97.557.918,50
15	Dinas Perhubungan	12.498.599.332,91	3.697.060.231,10
16	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	1.190.644.578,71	1.090.206.391,21
17	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	2.488.989.130,20	2.558.621.739,54
18	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	238.346.685,93	256.593.312,27
19	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	670.850.688,20	777.713.469,07
20	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	445.979.656,61	402.433.138,24
21	Dinas Perikanan	1.507.611.491,55	1.819.980.462,76
22	Dinas Pariwisata	1.406.823.821,97	1.310.576.425,31
23	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	2.062.160.884,05	2.475.418.620,35
24	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	606.602.222,01	1.012.091.380,65
25	Sekretariat Daerah	2.985.293.813,11	3.038.720.117,63
26	Sekretariat DPRD	901.337.158,95	1.141.669.031,48
27	Inspektorat Kabupaten	714.935.263,22	364.286.596,04
28	Kecamatan Arut Selatan	1.202.198.741,38	1.220.302.233,56
29	Kecamatan Arut Utara	269.413.665,33	296.343.659,13
30	Kecamatan Kumai	659.431.763,23	670.443.243,57
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	758.741.286,84	746.962.979,78
32	Kecamatan Pangakalan Lada	127.021.111,80	169.688.168,52
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	259.987.407,30	307.966.156,98
34	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	690.016.558,70	750.630.584,26
35	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	592.287.917,96	724.738.928,34
36	Badan Pendapatan Daerah	361.932.301,88	347.629.607,99
37	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	418.550.369,70	329.219.652,76
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	59.511.643,67	-
	Jumlah	278.711.992.444,82	281.111.749.594,60

## 5.4.2.1.7.1 Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
70.471.801.165,53	69.741.109.771,88

Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin berasal dari penyusutan seluruh Aset Peralatan dan Mesin dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp70.471.801.165,53 dan TA. 2021 sebesar Rp69.741.109.771,88. Di bawah ini adalah rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD TA. 2022 dan 2021.

Tabel 5.127 Daftar Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	16.548.475.525,38	12.661.213.652,27
2	Dinas Kesehatan	9.371.429.605,51	8.805.533.417,66
3	RSUD Sultan Imanuddin	22.020.369.619,05	24.424.717.483,13
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.193.415.913,09	1.519.698.325,21
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	77.418.309,98	112.727.068,24
6	Satuan Polisi Pamong Praja	2.435.471.014,23	2.301.067.051,15

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	55.073.941,97	51.491.931,84
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3.284.071.870,46	3.663.901.852,20
9	Dinas Sosial	170.395.751,64	165.874.601,03
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	353.854.442,38	518.692.989,59
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	451.795.799,42	551.829.983,82
12	Dinas Ketahanan Pangan	44.406.794,80	74.840.425,69
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.432.358.345,82	1.005.387.611,65
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	396.248.369,37	390.009.854,98
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	105.363.280,36	80.688.518,49
16	Dinas Perhubungan	1.221.506.655,96	1.105.474.212,54
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	1.172.376.152,14	1.023.444.442,86
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	640.157.647,54	703.427.540,16
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	174.717.161,66	193.116.176,96
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	233.710.976,56	274.770.332,81
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	380.012.968,50	336.699.451,68
22	Dinas Perikanan	661.386.147,70	931.546.667,55
23	Dinas Pariwisata	204.782.468,65	204.796.797,48
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	593.609.189,98	687.212.815,32
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	269.100.743,43	659.875.504,74
26	Sekretariat Daerah	2.024.734.761,49	2.130.246.032,54
27	Sekretariat DPRD	674.563.454,25	914.682.354,26
28	Kecamatan Arut Selatan	826.176.568,93	903.872.973,61
29	Kecamatan Arut Utara	76.495.398,69	128.927.355,00
30	Kecamatan Kumai	525.756.530,19	570.318.387,10
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	426.370.913,32	448.616.929,68
32	Kecamatan Pangkalan Lada	59.688.011,75	102.368.283,58
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	187.274.356,42	240.597.109,76
34	Inspektorat Daerah	640.812.631,27	294.487.642,69
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	413.865.309,87	367.513.197,62
36	Badan Pendapatan Daerah	330.360.806,94	314.958.895,07
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	443.041.079,19	574.304.568,91
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah		40.159.992,17
38	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan	351.152.647,64	262.017.340,84
	Jumlah	70.471.801.165,53	69.741.109.771,88

## 5.4.2.1.7.2 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
26.943.490.125,21	25.418.561.704,98

Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan berasal dari penyusutan seluruh Aset Gedung dan Bangunan dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu

sebesar Rp26.943.490.125,21 dan TA. 2021 sebesar Rp25.418.561.704,98. Di bawah ini adalah rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan per SKPD TA. 2022 dan 2021.

Tabel 5.128 Daftar Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	7.160.882.037,68	6.798.305.881,75
2	Dinas Kesehatan	3.741.891.428,26	3.368.154.623,48
3	RSUD Sultan Imanuddin	4.811.802.648,59	3.286.970.756,83
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1.456.427.945,00	1.910.940.339,80
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	532.132.159,93	318.190.534,46
6	Satuan Polisi Pamong Praja	104.495.498,74	103.389.658,41
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	50.813.036,17	50.813.036,17
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	139.156.277,77	138.348.801,88
9	Dinas Sosial	43.149.861,46	44.825.134,92
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	192.015.967,45	176.761.605,56
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	112.101.104,46	90.755.535,54
12	Dinas Ketahanan Pangan	17.862.227,76	17.862.227,76
13	Dinas Lingkungan Hidup	1.049.349.302,26	1.437.845.198,74
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	68.962.156,67	63.036.564,57
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	18.410.686,18	16.869.400,34
16	Dinas Perhubungan	748.551.602,65	898.040.735,14
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	18.268.426,57	16.956.353,79
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	1.821.264.321,28	1.819.641.012,35
19	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	63.629.524,27	63.477.135,40
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	433.429.331,36	499.232.754,95
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	65.966.688,11	65.733.685,60
22	Dinas Perikanan	427.991.732,28	420.752.500,56
23	Dinas Pariwisata	354.946.960,51	349.618.734,65
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	469.339.314,54	466.850.368,57
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	328.566.412,50	328.566.288,51
26	Sekretariat Daerah	959.934.479,42	907.849.512,89
27	Sekretariat DPRD	226.773.704,70	226.986.701,05
28	Kecamatan Arut Selatan	248.509.753,72	245.035.350,54
29	Kecamatan Arut Utara	106.059.688,11	100.104.111,22
30	Kecamatan Kumai	92.480.870,22	89.919.559,51
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	281.778.924,81	247.754.602,50
32	Kecamatan Pangkalan Lada	66.574.521,06	66.561.305,90
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	72.713.050,88	67.369.048,32
34	Inspektorat Daerah	73.912.513,92	69.588.835,82
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	276.151.248,83	383.117.386,57
36	Badan Pendapatan Daerah	31.571.494,94	32.670.711,99
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	148.713.856,42	149.901.377,72
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	59.511.643,67	12.562.017,90

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Perlatihan	67.397.722,06	67.202.313,32
Jumlah		26.943.490.125,21	25.418.561.704,98

# 5.4.2.1.7.3 Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
181.296.701.154,08	185.952.078.117,74

Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp181.296.701.154,08 dan TA. 2021 sebesar Rp185.952.078.117,74. Di bawah ini adalah rincian Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi per SKPD TA. 2022 dan 2021.

Tabel 5.129 Daftar Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi pada SKPD

No.	SKPD	TA 2022	TA 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	22.408.998,48	45.606.359,42
2	Dinas Kesehatan	284.983.330,48	141.176.008,22
3	RSUD Sultan Imanuddin	685.802.892,07	715.723.299,91
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	164.181.531.274,67	178.422.532.985,74
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1.760.542.526,31	1.598.332.780,00
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	28.480,48	28.480,48
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	115.905.922,20	360.262.371,89
8	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	17.416.984,70	11.612.382,73
9	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.882.216,35	11.882.216,35
10	Dinas Lingkungan Hidup	1.074.621.402,03	92.747.914,90
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	-	449.692,01
12	Dinas Perhubungan	10.528.541.074,30	1.693.545.283,61
13	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandiaan	-	49.805.590,68
14	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM	27.567.161,38	34.186.058,70
15	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	3.710.380,28	3.710.380,28
16	Dinas Perikanan	418.233.611,57	467.681.294,22
17	Dinas Pariwisata	847.094.392,81	756.160.893,14
18	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	999.212.379,53	1.321.355.436,18
19	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	8.935.066,08	23.649.589,07
20	Sekretariat Daerah	624.572,20	624.572,20
21	Kecamatan Arut Selatan	127.512.418,73	71.393.909,15
22	Kecamatan Arut Utara	86.858.578,53	67.312.193,53
23	Kecamatan Kumai	41.194.362,82	10.205.297,19
24	Kecamatan Kotawaringin Lama	50.591.448,71	50.591.448,71
25	Kecamatan Pangkalan Lada	758.578,99	758.578,99
26	Inspektorat Daerah	210.118,03	210.118,09
27	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	532.982,35	532.982,35
	Jumlah	181.296.701.154,08	185.952.078.117,74

# 5.4.2.1.8 Beban Amortisasi

4.083.086.596.40	4.594.551.896.40
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Beban Amortisasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Tak Berwujud dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp4.083.086.596,40 dan TA. 2021 sebesar Rp4.594.551.896,40. Beban Amortisasi pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

Tabel 5.130 Daftar Beban Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	TA. 2022	TA. 2021
1	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	96.659.200,00	102.598.100,00
2	Dinas Kesehatan	-	-
3	RSUD Sultan Imanuddin	197.332.600,00	229.738.600,00
4	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	2.259.155.400,00	2.338.222.800,00
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	29.590.000,00	29.590.000,00
6	Dinas Sosial	45.560.000,00	45.560.000,00
7	Dinas Lingkungan Hidup	29.710.000,00	138.627.600,00
8	Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	18.617.000,00	18.617.000,00
9	Dinas Perhubungan	3.140.000,00	695.406.888,00
10	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik Dan Persandian	425.680.288,00	240.733.600,00
11	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah	260.676.600,00	14.696.000,00
12	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	18.469.000,00	42.498.648,40
13	Dinas Kepemudaan Dan Olah Raga	48.498.648,40	39.897.000,00
14	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	39.897.000,00	6.252.000,00
15	Dinas Perikanan	3.102.000,00	15.598.000,00
16	Dinas Pariwisata	6.798.000,00	9.966.000,00
17	Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan	9.966.000,00	ı
18	Sekretariat Daerah		174.906.660,00
19	Kecamatan Arut Selatan	148.456.660,00	2.955.040,00
20	Inspektorat Kabupaten	2.955.040,00	19.838.500,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	19.838.500,00	348.520.360,00
22	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah	348.520.360,00	19.967.100,00
23	Badan Pendapatan Daerah	10.102.300,00	60.362.000,00
24	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan	60.362.000,00	-
	Jumlah	4.083.086.596,40	4.594.551.896,40

# 5.4.2.1.9 Beban Penyusutan Properti Investasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
10.010.808.61	0.00

Beban Penyusutan Properti Investasi berasal dari penyusutan seluruh Aset Properti Investasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dalam periode 1 Januari 2022

sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp10.010.808,61 sedangkan TA. 2021 tidak terdapat Beban Penyusutan Properti Investasi.

## 5.4.2.1.10 Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
218.705.204,00	0,00

Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir merupakan penyesuaian terhadap saldo Investasi Non Permanen dalam periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp218.705.204,00 dan sedangkan TA. 2021 tidak terdapat Beban Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang-Dana Bergulir.

## 5.4.2.2 Beban Transfer

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
81.890.596.500.00	75.440.651.400.00

Beban Transfer untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp81.890.596.500,00 dan TA. 2021 sebesar Rp75.440.651.400,00 yang terdiri dari:

#### Tabel 5.131 Rincian Beban Transfer

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Beban Bagi Hasil	9.735.824.900,00	8.300.175.400,00
2	Beban Transfer Bantuan Keuangan	72.154.771.600,00	67.140.476.000,00
	Jumlah	81.890.596.500,00	75.440.651.400,00

# 5.4.2.2.1 Beban Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
9.735.824.900.00	8.300.175.400.00

Beban Bagi Hasil untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp9.735.824.900,00 dan TA. 2021 sebesar Rp8.300.175.400,00.

# 5.4.2.2.2 Beban Transfer Bantuan Keuangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
72.154.771.600,00	67.140.476.000,00

Beban Transfer Bantuan Keuangan untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp72.154.771.600,00 dan TA. 2021 sebesar Rp67.140.476.000,00.

# 5.4.2.3 Beban Tak Terduga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
2.800.989.203.00	1.018.146.356.00

Beban Tak Terduga untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.800.989.203,00 yang ditujukan untuk kegiatan penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Kotawaringin Barat melalui PPKD, sedangkan TA. 2021 sebesar Rp1.018.146.356,00.

# 5.4.3 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
120.278.244.817,09	278.795.005.757,70

Surplus dari Kegiatan Operasi Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp120.278.244.817,09 dimana Pendapatan-LO sebesar Rp1.458.642.764.072,76 dan Beban sebesar Rp1.338.364.519.255,67.

## 5.4.4 Surplus Non-Operasional

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
3.087.902.653,36	2.335.475.303,52

Surplus dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp3.087.902.653,36 dan TA. 2021 sebesar Rp2.335.475.303,52 yang terdiri dari:

# 5.4.4.1 Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
257.168.748,96	628.178.232,25

Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp257.168.748,96 dan TA. 2021 sebesar Rp628.178.232,25.

# 5.4.4.2 Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

2.830.733.904,40	1.707.297.071,27
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar Rp2.830.733.904,40 dan TA. 2021 sebesar Rp1.707.297.071,27.

## 5.4.5 Defisit Non-Operasional

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(3.709.195.449,21)	(2.067.137.696,34)

Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp3.709.195.449,21) dan TA. 2021 sebesar (Rp2.067.137.696,34) yang terdiri dari:

# 5.4.5.1 Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(3.378.679.200,38)	(1.461.963.159,28)

Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp3.378.679.200,38) dan TA. 2021 sebesar (Rp1.461.963.159,28).

## 5.4.5.2 Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(330.516.248,83)	(605.174.537,06)

Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode sampai dengan 31 Desember 2022 yaitu sebesar (Rp330.516.248,83) dan TA. 2021 sebesar (Rp605.174.537,06).

# 5.4.6 Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(621.292.795,85)	268.337.607,18

Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non-Operasional merupakan penjumlahan antara Surplus Non-Operasional dan Defisit Non-Operasional, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 terdapat Defisit dari Kegiatan Non-Operasional sebesar (Rp621.292.795,85) dan TA. 2021 sebesar Rp268.337.607,18.

#### 5.4.7 Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
119.656.952.021,24	279.063.343.364,88

Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional dan Non-Operasional. Surplus Sebelum Pos Luar Biasa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp119.656.952.021,24 dan TA. 2021 sebesar Rp279.063.343.364,88.

# 5.4.8 Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa

0,00	0,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa TA. 2022 dan TA. 2021 sebesar Rp0,00.

# 5.4.9 Surplus/(Defisit) – LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
119.656.952.021,24	279.063.343.364,88

Surplus/(Defisit)-LO merupakan penjumlahan antara Surplus/(Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/(Defisit) dari Pos Luar Biasa selama satu periode pelaporan. Surplus-LO berdasarkan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun Anggaran 2022 adalah sebesar Rp119.656.952.021,24 atau mengalami penurunan sebesar (Rp159.406.391.343,64) sedangkan TA. 2021 sebesar Rp279.063.343.364,88.

# 5.5 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas merupakan laporan keuangan yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris. Laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas-aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas Pemerintah.

Penjelasan lebih rinci mengenai Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas dari keempat Aktivitas dalam Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk Tahun yang Berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.132 Rincian Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	262.971.387.810,32	585.347.502.402,11
	Arus Kas Masuk	1.412.485.896.780,52	1.633.232.807.127,94
	Arus Kas Keluar	1.149.514.508.970,20	1.047.885.304.725,83
2	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(290.043.282.516,00)	(417.958.840.168,58)
	Arus Kas Masuk	495.862.904,00	739.659.000,00
	Arus Keluar Kas	290.539.145.420,00	418.698.499.168,58
3	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(33.000.000.000,00)	(3.000.000.000,00)
	Arus Masuk Kas	-	33.000.000.000,00
	Arus Keluar Kas	33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
4	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris	-	(59.074.500,00)
	Arus Masuk Kas	88.371.168.787,01	102.684.651.055,00
	Arus Keluar Kas	88.371.168.787,01	102.743.725.555,00
	Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas	(60.071.894.705,68)	164.329.587.733,53

# 5.5.1 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.412.485.896.780.52	1.633.232.807.127.94

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi atau aktivitas penerimaan kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.412.485.896.780,52 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.633.232.807.127,94 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.133 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penerimaan Pajak Daerah	81.575.790.318,70	70.389.757.706,05
2	Penerimaan Retribusi Daerah	15.794.350.037,00	12.611.932.516,30
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	12.444.212.677,00	12.470.117.812,00
4	Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	122.867.239.697,95	295.952.911.970,20
5	Penerimaan Dana Bagi Hasil	138.520.194.506,00	135.229.818.254,00

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	591.800.383.800,00	593.260.006.000,00
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	182.097.389.792,00	310.370.018.680,00
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	13.214.332.000,00	-
9	Penerimaan Dana penyesuaian	69.814.093.086,00	84.755.004.782,00
10	Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi	111.987.285.192,87	80.093.900.010,33
11	Bantuan Keuangan dari Propinsi	150.000.000,00	-
12	Penerimaan Hibah	25.124.419.000,00	38.099.339.397,06
13	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	47.096.206.673,00	-
	Jumlah	1.412.485.896.780,52	1.633.232.807.127,94

# 5.5.1.1 Penerimaan Pajak Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
81.575.790.318,70	70.389.757.706,05

Arus Kas Masuk Penerimaan Pajak Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp81.575.790.318,70 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp70.389.757.706,05.

# 5.5.1.2 Penerimaan Retribusi Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
15.794.350.037,00	12.611.932.516,30

Arus Kas Masuk Penerimaan Retribusi Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.794.350.037,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.611.932.516,30.

# 5.5.1.3 Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
12.444.212.677,00	12.470.117.812,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp12.444.212.677,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp12.470.117.812,00.

## 5.5.1.4 Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
122.867.239.697,95	295,952,911,970,20

Arus Kas Masuk Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp122.867.239.697,95 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp295.952.911.970,20.

# 5.5.1.5 Penerimaan Dana Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
138.520.194.506.00	135.229.818.254.00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp138.520.194.506,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp135.229.818.254,00.

#### 5.5.1.6 Penerimaan Dana Alokasi Umum

(Rp)	(Rp)
591.800.383.800.00	593.260.006.000.00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Umum sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp591.800.383.800,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp593.260.006.000,00.

#### 5.5.1.7 Penerimaan Dana Alokasi Khusus

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
182.097.389.792,00	310.370.018.680,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Alokasi Khusus sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp182.097.389.792,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp310.370.018.680,00.

## 5.5.1.8 Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
13 214 332 000 00	0.00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp13.214.332.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 tidak terdapat Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID).

#### 5.5.1.9 Penerimaan Dana Desa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
69.814.093.086,00	84.755.004.782,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Dana Desa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp69.814.093.086,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.755.004.782,00.

# 5.5.1.10 Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi

111 987 285 192 87	80 093 900 010 33
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Bagi Hasil Pajak Propinsi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp111.987.285.192,87 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp80.093.900.010,33.

# 5.5.1.11 Penerimaan Bantuan Keuangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
150.000.000,00	0,00

Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp150.000.000,00 sedangkan 31 Desember 2021 tidak terdapat Arus Kas Masuk Penerimaan Bantuan Keuangan.

# 5.5.1.12 Penerimaan Pendapatan Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
25.124.419.000.00	0.00

Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp25.124.419.000,00 sedangkan 31 Desember 2021 tidak terdapat Arus Kas Masuk Penerimaan Pendapatan Hibah.

# 5.5.1.13 Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
47.096.206.673,00	38.099.339.397,06

Arus Kas Masuk Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp47.096.206.673,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp38.099.339.397,06.

#### 5.5.2 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.149.514.508.970,20	1.047.885.304.725,83

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.149.514.508.970,20 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.047.885.304.725,83. Rinciannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.134 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Operasi

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pembayaran Pegawai	573.130.613.844,05	533.526.478.475,48
2	Pembayaran Barang dan Jasa	378.837.074.585,15	331.364.771.908,23
3	Pembayaran Bunga	563.499.999,00	847.000.000,00
4	Pembayaran Hibah	38.161.646.553,00	19.304.426.304,12
5	Pembayaran Bantuan Sosial	2.025.200.000,00	1.766.928.000,00
6	Pembayaran Tak Terduga	2.800.989.203,00	1.547.938.856,00
7	Pembayaran Bagi Hasil	10.267.531.800,00	7.632.280.400,00
8	Pembayaran Bantuan Keuangan	143.727.952.986,00	151.895.480.782,00
	Jumlah	1.149.514.508.970,20	1.047.885.304.725,83

#### 5.5.2.1 Pembayaran Pegawai

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
573.130.613.844,05	533.526.478.475,48

Arus Kas Keluar Pembayaran Pegawai sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp573.130.613.844,05 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp533.526.478.475,48.

# 5.5.2.2 Pembayaran Barang dan Jasa

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
378.837.074.585,15	331.364.771.908,23

Arus Kas Keluar Pembayaran Barang dan Jasa sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp378.837.074.585,15 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp331.364.771.908,23.

# 5.5.2.3 Pembayaran Bunga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
563,499,999,00	847,000,000,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Bunga sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp563.499.999,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp847.000.000,00.

# 5.5.2.4 Pembayaran Hibah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
38.161.646.553.00	19.304.426.304.12

Arus Kas Keluar Pembayaran Hibah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp38.161.646.553,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp19.304.426.304,12.

# 5.5.2.5 Pembayaran Bantuan Sosial

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
2.025.200.000.00	1.766.928.000.00

Arus Kas Keluar Pembayaran Bantuan Sosial sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.025.200.000,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.766.928.000,00.

# 5.5.2.6 Pembayaran Tak Terduga

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
2.800.989.203,00	1.547.938.856,00

Arus Kas Keluar Pembayaran Tak Terduga sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.800.989.203,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp1.547.938.856,00.

# 5.5.2.7 Pembayaran Bagi Hasil

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
10.267.531.800,00	7.632.280.400,00	

Arus Kas Keluar Pembayaran Bagi Hasil sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp10.267.531.800,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp7.632.280.400,00.

# 5.5.2.8 Pembayaran Bantuan Keuangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
143.727.952.986,00	151.895.480.782,00	

Arus Kas Keluar Pembayaran Bantuan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp143.727.952.986,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp151.895.480.782,00.

#### 5.5.3 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
262.971.387.810,32	585.347.502.402,11	

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp262.971.387.810,32 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp585.347.502.402,11.

#### 5.5.4 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Rp)	
(Rp)		
495.862.904,00	739.659.000,00	

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi atau aktivitas penerimaan kas karena adanya pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp495.862.904,00 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp739.659.000,00 dengan rincian seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.135 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Penjualan atas Peralatan dan Mesin	•	567.565.000,00
2	Penjualan atas Gedung dan Bangunan	-	68.599.000,00
3	Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi	-	18.657.000,00
4	Penjualan Aset Lainnya	495.862.904,00	84.838.000,00
	Jumlah	495.862.904,00	739.659.000,00

# 5.5.4.1 Penjualan atas Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Rp)	
(Rp)		
0,00	567.565.000,00	

Tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp567.565.000,00.

## 5.5.4.2 Penjualan atas Gedung dan Bangunan

31 Desember 2022	31 Desember 2021 (Rp)	
(Rp)		
0.00	68,599,000,00	

Tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp68.599.000,00.

# 5.5.4.3 Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	18.657.000,00

Tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp18.657.000,00.

# 5.5.4.4 Penjualan Aset Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
495.862.904,00	84.838.000,00	

Arus Kas Masuk dari Penjualan atas Aset Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp495.862.904,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp84.838.000,00.

#### 5.5.5 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

290.539.145.420.00	418.698.499.168.58	
(Rp)	(Rp)	
31 Desember 2022	31 Desember 2021	

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi merupakan kegiatan pengadaan/pembelian Aset Tetap yang dianggarkan dari Belanja Modal APBD dan Penyertaan Modal oleh Pemerintah Daerah, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp290.539.145.420,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp418.698.499.168,58. Rinciannya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.136 Rincian Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi

N	0	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	1 1	Pembentukan Dana Cadangan	5.000.000.000,00	•
2	2 1	Perolehan Tanah	1.061.200,00	100.900.000,00

No	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
3	Perolehan Peralatan dan Mesin	75.230.158.868,00	69.514.111.613,00
4	Perolehan Gedung dan Bangunan	89.604.333.064,00	171.955.314.980,00
5	Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi	102.987.368.793,00	167.205.556.475,58
6	Perolehan Aset Tetap Lainnya	2.716.223.495,00	4.922.616.100,00
7	Perolehan Aset Lainnya	-	-
8	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	15.000.000.000,00	5.000.000.000,00
	Jumlah	290.539.145.420,00	418.698.499.168,58

# 5.5.5.1 Pembentukan Dana Cadangan

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
5.000.000.000,00	0,00

Arus Kas Keluar Pembentukan Dana Cadangan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan 31 Desember 2021 tidak ada Pembentukan Dana Cadangan.

#### 5.5.5.2 Perolehan Tanah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.061.200,00	100.900.000,00

Arus Kas Keluar Perolehan Tanah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp1.061.200,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp100.900.000,00.

#### 5.5.5.3 Perolehan Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
75.230.158.868,00	69.514.111.613,00	

Arus Kas Keluar Perolehan Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp75.230.158.868,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp69.514.111.613,00.

# 5.5.5.4 Perolehan Gedung dan Bangunan

89.604.333.064,00	171.955.314.980,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Keluar Perolehan Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp89.604.333.064,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp171.955.314.980,00.

## 5.5.5.5 Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
102.987.368.793,00	167.205.556.475,58

Arus Kas Keluar Perolehan Jalan, Jaringan dan Irigasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp102.987.368.793,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp167.205.556.475,58.

#### 5.5.5.6 Perolehan Aset Tetap Lainnya

(Rp)	(Rp)
(1tp)	(14)

Arus Kas Keluar Perolehan Aset Tetap Lainnya sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp2.716.223.495,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp4.922.616.100,00.

# 5.5.5.7 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
15.000.000.000.00	5,000,000,000,00

Arus Kas Keluar Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada PD BPR Marunting Sejahtera sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp15.000.000.000,00 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp5.000.000.000,00.

#### 5.5.6 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(290.043.282.516,00)	(417.958.840.168,58)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp290.043.282.516,00) dan 31 Desember 2021 sebesar (Rp417.958.840.168,58).

#### 5.5.7 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

(Rp)	(Rp)
0.00	33.000.000.000,00

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan merupakan aktivitas penerimaan kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 tidak terdapat Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp33.000.000.000,00. Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.137 Rincian Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pendanaan

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank	-	33.000.000.000,00
2	Penerimaan Kembali Pinjaman Dana Bergulir	-	-
	Jumlah	-	33.000.000.000,00

#### 5.5.8 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan

33.000.000.000,00	36.000.000.000,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.000.000.000,000 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp36.000.000.000,000.

## 5.5.8.1 Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank

33.000.000.000.00	36.000.000.000.00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Keluar berupa Pembayaran Pokok Pinjaman Dalam Negeri - Lembaga Keuangan Bank sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp33.000.000.000,00 sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp36.000.000.000,00.

#### 5.5.9 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan

(33.000.000.000.00)	(3.000.000.000.00)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar (Rp33.000.000.000,00) sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar (Rp3.000.000.000,00).

## 5.5.10 Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2022	31 Desember 2021	
(Rp)	(Rp)	
88.371.168.787,01	102.684.651.055,00	

Arus Kas Masuk dari Aktivitas Transitoris mencerminkan penerimaan kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, dimana sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.684.651.055,00 yang berasal dari Perhitungan Penerimaan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Daerah.

# 5.5.10.1 Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah

88.371.168.787,01	102.684.651.055,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Arus Kas Masuk dari Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga Pemerintah Daerah sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.684.651.055,00.

#### 5.5.11 Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
88.371.168.787.01	102.743.725.555.00

Arus Kas Keluar dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01 yang merupakan Perhitungan Pengeluaran Fihak Ketiga (PFK) sedangkan sampai dengan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.743.725.555,00.

# 5.5.11.1 Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
88.371.168.787.01	102.684.651.055.00

Arus Kas Keluar atas Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp88.371.168.787,01 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp102.684.651.055,00.

# 5.5.11.2 Kiriman Uang Keluar/Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum Dipertanggungjawabkan (UP/TUP)

0.00	59.074.500,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Tidak terdapat Kiriman Uang Keluar/Kas di Bendahara Pengeluaran yang Belum dipertanggungjawabkan (UP/TUP) sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar Rp59.074.500,00.

# 5.5.12 Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
0.00	(59.074.500.00)

Tidak terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris sampai dengan 31 Desember 2022 sedangkan 31 Desember 2021 sebesar (Rp59.074.500,00).

#### 5.5.13 Saldo Akhir Kas

201.848.117.954,22	261.920.012.659,90
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat sampai dengan 31 Desember 2022 sebesar Rp201.848.117.954,22 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp261.920.012.659,90. Adapun rincian Saldo Akhir Kas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

# Tabel 5.138 Rincian Saldo Akhir Kas

No.	Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Bersifat Umum (belum ditentukan penggunaannya)	93.963.371.891,25	68.450.111.633,93
2	Saldo Akhir Kas di BUD/Kas Daerah yang Dibatasi Penggunaannya	8.293.528.644,00	25.654.132.368,80
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	12.191.100,00	20.277.093,00
4	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	17.389.789,00	5.095.194,00
5	Saldo Akhir Kas Dana JKN	200.186.748,00	533.961,00
6	Saldo Akhir Kas di BLUD RSUD Sultan Imanuddin	99.295.496.469,59	167.590.918.858,64
7	Saldo Akhir Kas BOP PAUD	6.699,00	-
8	Saldo Akhir Kas BOS	65.946.613,38	198.943.550,53
	Saldo Akhir Kas	201.848.117.954,22	261.920.012.659,90

# 5.6 Rincian dan Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan keuangan yang menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, dan ekuitas akhir Pemerintah pada periode pelaporan. Tabel di bawah ini adalah Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 dan 2021.

Tabel 5.139 Ringkasan Laporan Perubahan Ekuitas

No.	Uraian	TA. 2022	TA. 2021
1	Ekuitas Awal	3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57
2	Surplus/Defisit-LO	119.656.952.021,24	279.063.343.364,88
3	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	13.717.756.239,25	53.965.719.868,43
	Ekuitas Akhir	3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88

Penjelasan lebih rinci mengenai pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat adalah sebagai berikut:

#### 5.6.1 Ekuitas Awal

3.271.087.498.235,88	2.938.058.435.002,57
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Ekuitas Awal tahun 2022 merupakan nilai Ekuitas Akhir tahun 2021 yaitu sebesar Rp3.271.087.498.235,88 sedangkan Ekuitas Awal tahun 2021 sebesar Rp2.938.058.435.002,57.

# 5.6.2 Surplus/Defisit-LO

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
119.656.952.021,24	279.063.343.364,88

Surplus/Defisit-LO merupakan Surplus/Defisit atas Kegiatan Operasional (basis akrual) yang menambah/mengurangi nilai Ekuitas pada Neraca, dimana untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 Surplus/Defisit-LO sebesar Rp119.656.952.021,24 dan 31 Desember 2021 sebesar Rp279.063.343.364,88.

#### 5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

13.717.756.239.25	53.965.719.868.43
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan atau Kesalahan Mendasar pada Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 total senilai Rp13.717.756.239,25 disebabkan adanya:

#### 5.6.3.1 Koreksi Saldo Awal Kas BLUD

( 1 )	
(Rp) <b>0,00</b>	(Rp) (500,00)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Kas BLUD tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 senilai (Rp500,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.

# 5.6.3.2 Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak

Koreksi Saldo Awal Piutang Pajak tahun 2022 senilai (Rp406.657.608,00) pada Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari koreksi piutang:

- Pajak Restoran Rp18.612.000,00
- Pajak Reklame Rp8.689.500,00
- Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Rp379.356.108,00

## 5.6.3.3 Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
11.525.925.721,00	(9.713.688.124,56)

Koreksi Saldo Awal Piutang Lainnya tahun 2022 senilai Rp11.525.925.721,00 dan tahun 2021 senilai (Rp9.713.688.124,56) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.

#### 5.6.3.4 Koreksi Saldo Awal Persediaan

(880,00)	(79.214.060,42)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Koreksi Saldo Awal Persediaan tahun 2022 senilai (Rp880,00) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupa Persediaan ATK sedangkan tahun 2021 senilai (Rp79.214.060,42).

#### 5.6.3.5 Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(410.976.276,06)	0,00

Koreksi Saldo Awal Investasi Permanen tahun 2022 senilai (Rp410.976.276,06) merupakan koreksi perlakuan pengurangan nilai Ekuitas PD BPR Marunting Sejahtera TA. 2020 - 2021 atas beban dana kesejahteraan, jasa produksi, CSR, tantiem pada Laporan Perubahan Ekuitas BUMD-BPR Marunting dan kelebihan catat laba TA. 2019 (Rp410.976.276,29), serta koreksi kurang catat laba pada PDAM Tirta Arut tahun 2020 Rp0,23.

#### 5.6.3.6 Koreksi Saldo Awal Tanah

311.175.650,00	59.378.023.500,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Koreksi Saldo Awal Tanah tahun 2022 senilai Rp311.175.650.,00 atas penilaian aset Tanah yang baru ditemukan pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp25.096.500,00
- Dinas Kesehatan Rp3.582.150,00
- Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp140.800.000,00
- Dinas Perikanan Rp12.705.000,00
- Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Rp128.992.000,00

#### 5.6.3.7 Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
1.184.789.150,95	831.000.000,00

Koreksi Saldo Awal Peralatan dan Mesin tahun 2022 total senilai Rp1.184.789.150,95 pada SKPD:

- Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Rp30.004.000,00 dikarenakan adanya reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin (intrakom) yang tercatat pada Aset Jalan, Jaringan dan Irigasi sebagai ekstrakom sesuai kode referensi/tidak berdasarkan kode akun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
- Dinas Lingkungan Hidup Rp97.500.000,00 dikarenakan adanya kurang catat Nilai Perolehan Barang Hibah
- Dinas Perhubungan Rp1.339.210.152,95 dikarenakan adanya reklasifikasi Aset Tetap Peralatan Mesin (intrakom) yang tercatat pada Aset Gedung dan Bangunan sebagai ekstrakom sesuai kode referensi/tidak berdasarkan kode akun pada Dinas Perhubungan.
- Sekretariat Daerah (Rp299.925.002,00) dikarenakan adanya *double* catat pada Sekretariat Daerah dan Dinas Kesehatan terhadap barang yang sama berupa 2 unit mobil *ambulance*
- Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Rp18.000.000,00 merupakan koreksi atas aset intrakom yang dijual/lelang dimana pada laporan unaudited telah diperhitungkan nilai bukunya

#### 5.6.3.8 Koreksi Saldo Awal Gedung dan Bangunan

782.764.000,00	1.807.913.000,00
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Koreksi saldo Awal Gedung dan Bangunan tahun 2022 senilai Rp782.764.000,00 pada SKPD:

- Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp424.064.000,00 dikarenakan adanya kurang catat Nilai Perolehan Barang Hibah
- Kecamatan Arut Selatan Rp358.700.000,00 berupa bangunan rumah Negara/Dinas yang difungsikan untuk Rumah Taman Baca

# 5.6.3.9 Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
429.480.500.00	0.00

Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2022 senilai Rp429.480.500,00 pada Dinas Pekerjaan Umum Daerah dikarenakan adanya kurang catat Nilai Perolehan Barang Hibah, sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Jalan, Jaringan dan Irigasi.

## 5.6.3.10 Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
(9.850.000,00)	0,00

Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya tahun 2022 senilai (Rp9.850.000,00) merupakan koreksi nilai Aset Tetap Lainnya ke Peralatan Mesin sebagai ekstrakom sesuai kode referensi/tidak berdasarkan kode akun pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sedangkan pada tahun 2021 tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Aset Tetap Lainnya.

## 5.6.3.11 Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka

<b>0,00</b>	(95.739.000,00)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Tidak terdapat Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 Koreksi Saldo Awal Pendapatan Diterima Di Muka senilai (Rp95.739.000,00) pada Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Imanuddin.

# 5.6.3.12 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang

(Rp)	(Rp)
0,00	4.265.428.471,87

Tidak terdapat Koreksi Nilai Penyisihan Piutang tahun 2022 sedangkan pada tahun 2021 Koreksi Nilai Penyisihan Piutang senilai Rp4.265.428.471,87.

# 5.6.3.13 Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi

216.479.279,36	(1.595.051.518,43)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi tahun 2022 sebesar Rp216.479.279,36 dan tahun 2021 sebesar (Rp1.595.051.518,43). Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

# Tabel 5.140 Daftar Koreksi Penyusutan Aset Tetap/Amortisasi pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	(858.103.099,54)	81.622.133,92
2	Dinas Kesehatan	(185.609.424,97)	(18.909.509,81)
3	RSUD Sultan Imanuddin	(241.482.876,34)	(158.762.210,24)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.226.559.403,81	(99.250.207,59)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	736.838.275,82	(11.261.355,88)
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	(34.422.999,38)	-
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	(16.200.000,00)	-
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	(228.871.617,73)	-
9	Dinas Sosial	10.215.140,55	(201.612,63)
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	(30.438.048,47)	(445.663,92)
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	-	(336.437,26)
12	Dinas Lingkungan Hidup	3.302.885.675,74	(824.014.858,73)
13	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	(5.214.308,70)	-
14	Dinas Perhubungan	(6.991.438.049,93)	(32.549.012,25)
15	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	(407.957.954,80)	-
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	(47.492.695,96)	245.709,38
17	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	(1.213.663,83)	-
18	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	(13.184.691,92)	39.857.173,04
19	Dinas Perikanan	(352.248.982,41)	-
20	Dinas Pariwisata	(1.198.940.847,44)	(90.149,98)
21	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	3.749.825.856,10	-
22	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	(44.631.377,18)	-
23	Sekretariat Daerah	1.069.028.848,61	(450.195.040,74)
24	Sekretariat DPRD	(8.530.970,50)	-
25	Kecamatan Arut Selatan	12.567.786,57	(8.386,85)
26	Kecamatan Arut Utara	364.731,58	(101.731,17)
27	Kecamatan Kumai	(3.357.178,37)	(37.047,10)
28	Kecamatan Kotawaringin Lama	1.273.383,84	311.925,98
29	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.169.613,63	-
30	Inspektorat Daerah	846.052,81	(335.232,72)
31	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	240.339.357,24	-
32	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	(14.213.967,68)	-
33	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	(452.882.091,79)	-
34	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	-	(120.590.003,88)
	Jumlah	216.479.279,36	(1.595.051.518,43)

# 5.6.3.14 Koreksi Nilai Utang

31 Desember 2022	31 Desember 2021
(Rp)	(Rp)
94.626.702,00	254.939.699,31

Koreksi nilai utang disebabkan oleh adanya lebih/kurang catat utang tahun 2022 senilai Rp94.626.702,00 yang terdiri dari:

- Gaji PNS sebesar Rp4.038.839,00.
- Tambahan Penghasilan Pegawai Rp83.251.864,00.
- Belanja Barang dan Jasa Rp7.335.999,00.

Koreksi Nilai Utang tahun 2022 sebesar Rp94.626.702,00 dan tahun 2021 sebesar Rp254.939.699,31 terdapat pada SKPD berikut:

Tabel 5.141 Daftar Koreksi Nilai Utang pada SKPD

No.	SKPD	31 Desember 2022	31 Desember 2021
1	Dinas Kesehatan	82.320.010,00	260.650.000,00
2	RSUD Sultan Imanuddin	2.155.999,00	(10.831.234,00)
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.029.848,00	-
4	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	862.398,00	(4.204.142,00)
5	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	-	2.952.745,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	-	(4.803.682,00)
7	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	-	(98.567,00)
8	Dinas Ketahanan Pangan	-	(2.235.869,00)
9	Dinas Perhubungan	-	(8,00)
10	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	-	2.016.706,00
11	Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1.080.094,00	(471,00)
12	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	-	2.892.790,00
13	Dinas Perpustakaan	(4.189.115,00)	-
14	Dinas Perikanan	-	(8.939.496,00)
15	Sekretariat Daerah	-	(605.131,00)
16	Inspektorat Kabupaten	(279.966,00)	-
17	Kecamatan Arut Selatan	(79.515,00)	(991.146,00)
18	Kecamatan Arut Utara	1.447.834,00	1.740,00
19	Kecamatan Kumai	13.172,00	(1.113.006,00)
20	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	2.265.943	5.408.813,00
21	Badan Pendapatan Daerah	-	14.839.657,31
	Jumlah	94.626.702,00	254.939.699,31

# 5.6.3.15 Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain

0.00	(354.420.984.34)
(Rp)	(Rp)
31 Desember 2022	31 Desember 2021

Tidak terdapat Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain pada tahun 2022 sedangkan Koreksi Nilai Penyusutan Aset Lain-lain tahun 2021 sebesar (Rp354.420.984,34).

# 5.6.4 Ekuitas Akhir

(Rp)	(Rp)
3.404.462.206.496,37	3.271.087.498.235,88

Saldo Ekuitas Akhir yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat berdasarkan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022 Rp3.404.462.206.496,37 mengalami kenaikan sebesar Rp133.374.708.260,49 atau 4,08 persen jika dibandingkan Ekuitas Akhir tahun 2021 sebesar Rp3.271.087.498.235,88.

# BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Kabupaten Kotawaringin Barat terletak di Provinsi Kalimantan Tengah bagian barat, dengan ibu kota di Pangkalan Bun. Kabupaten Kotawaringin Barat didirikan pada tanggal 3 Oktober 1959 dan memiliki semboyan Marunting Batu Aji (Menuju Kejayaan). Luas Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat tercatat 10.759 Km² atau 6,2% dari luas wilayah Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten Kotawaringin merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di sebelah barat Provinsi Kalimantan Tengah bertetangga dengan Kabupaten Sukamara dan Kabupaten Lamandau. Secara administratif, Kabupaten Kotawaringin terdiri atas 81 Desa, 13 Kelurahan, dan 6 Kecamatan. Kecamatan dengan penduduk terbanyak di Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Kecamatan Arut Selatan, yaitu 128.248 jiwa sedangkan Kecamatan terluas adalah Kecamatan Kumai, yaitu seluas 2.921 Km². Berdasarkan Peta RTRWK tahun 2017 – 2037, Kabupaten Kotawaringin Barat terletak pada posisi 1°26′ – 3°33′ Lintang Selatan, 111°20′ – 112°6′ Bujur Timur. Secara administratif, batas wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat sebagai berikut:

- 1. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lamandau;
- 2. sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Jawa;
- 3. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Seruyan;
- 4. dan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Sukamara.

Wilayah Kabupaten Kotawaringin Barat di sekitar aliran Sungai Kumai, Arut, dan Lamandau, mudah tergenang, berawa-rawa dan merupakan daerah endapan serta bersifat organik dan asam. Berdasarkan hasil proyeksi survei penduduk, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2022 sebanyak 272.531 jiwa. Jumlah penduduk menurut kelompok jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebanyak 141.564 jiwa dan perempuan sebanyak 130.967 jiwa.

Terhitung mulai tanggal 22 Mei 2022, dengan berakhirnya masa jabatan Bupati Kotawaringin Barat Hj. NURHIDAYAH, S.H., M.H. maka ditunjuk ANANG DIRJO, S.P., M.M. sebagai Penjabat Bupati Kotawaringin Barat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 131.62-1170 Tahun 2022. Pada Tahun Anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dipimpin oleh:

1. Pj. Bupati : ANANG DIRJO, S.P., M.M.

2. Plh. Sekretaris Daerah : Dr. Ir. JUNI GULTOM, S.T, MTP.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, maka pada awal tahun 2017 terjadi Perubahan Struktur Organisasi Kabupaten Kotawaringin Barat dan Pelantikan Organisasi Pemerintah Daerah yang diadakan pada tanggal 07 Januari 2017.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan data dari pembebanan gaji yang dibayarkan dan dikeluarkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah per 31 Desember 2022 sebanyak 3919 orang yang terdiri dari: Pejabat Negara 2 orang, golongan IV sebanyak 832 orang, golongan III sebanyak 2.638 orang, golongan II sebanyak 442 orang, dan golongan I sebanyak 7 orang.

# BAB VII PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kotawaringin Barat untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2022, yang mana dalam penyusunannya mengacu dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.412.981.759.684,52 atau turun 13,52 persen dibandingkan Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2021 Rp1.633.972.466.127,94. Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.420.053.654.390,20 atau turun 2,84 persen dibandingkan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp1.461.583.803.894,41. Surplus/Defisit Anggaran Tahun Anggaran 2022 sebesar (Rp7.071.894.705,68) merupakan selisih antara Pendapatan Daerah dan Belanja Daerah. Pembiayaan Netto Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp208.920.012.659,90 merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan sebesar Rp261.920.012.659,90 dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp53.000.000.000,00. Jumlah Aset per 31 Desember 2022 Daerah Rp3.431.526.533.551,62 atau naik 1,29 persen dibandingkan Aset Daerah per 31 Desember 2021 sebesar Rp3.387.967.337.153,31.

Demikian secara ringkas pokok-pokok mengenai Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022, Semoga Laporan Keuangan ini dapat bermanfaat dan menjadi acuan untuk penyusunan Laporan Keuangan tahun berikutnya.

> Pangkalan Bun, 10 Mei 2023 PJ. BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

> > ANANG DIRJO, SP., MM.



# Lampiran 5.1 Rincian Penyaluran Dana Desa Tahun 2022

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN	PE	NYALURAN		SISA
DESA	NAMA DESA	DANA DESA	NON BLT	BLT	%	ANGGARAN
620101	KECAMATAN KUMAI					
6201012001	Sungai Cabang	719.463.000,00	424.263.000,00	719.463.000,00	100,00	-
6201012002	Teluk Pulai	720.305.000,00	403.505.000,00	720.305.000,00	100,00	-
6201012003	Sabuai	973.551.000,00	577.551.000,00	973.551.000,00	100,00	-
6201012004	Keraya	619.575.000,00	371.175.000,00	619.575.000,00	100,00	-
6201012005	Teluk Bogam	955.607.000,00	570.407.000,00	955.607.000,00	100,00	-
6201012006	Sungai Bakau	839.057.000,00	479.057.000,00	839.057.000,00	100,00	-
6201012007	Kubu	1.094.410.000,00	655.210.000,00	1.094.410.000,00	100,00	-
6201012008	Sungai Kapitan	1.273.504.000,00	762.304.000,00	1.273.504.000,00	100,00	-
6201012009	Batu Belaman	1.055.576.000,00	630.776.000,00	1.055.576.000,00	100,00	-
6201012010	Sungai Tendang	1.092.216.000,00	653.016.000,00	1.092.216.000,00	100,00	75 000 040 00
6201012014	Sungai Sekonyer	632.407.000,00	423.318.160,00	556.518.160,00	88,00	75.888.840,00
6201012015	Sungai Bedaun	1.357.088.000,00	907.088.000,00	1.357.088.000,00	100,00	-
6201012017	Bumi Harjo	895.493.000,00	535.493.000,00	895.493.000,00	100,00	-
6201012032	Pangkalan Satu Sabuai Timur	799.009.000,00	478.609.000,00	799.009.000,00	100,00	-
6201012034		712.005.000,00 <b>13.739.266.000,00</b>	510.405.000,00 <b>8.382.177.160.00</b>	712.005.000,00	99.45	75.888.840,00
620102	SUB TOTAL KECAMATAN ARUT SELATAN	13.739.266.000,00	8.382.177.160,00	13.663.377.160,00	99,45	75.888.840,00
6201022001	Tanjung Putri	698.259.000,00	629.859.000,00	698.259.000,00	100,00	_
6201022004	Pasir Panjang	1.238.583.000,00	741.783.000,00	1.238.583.000.00	100,00	-
6201022010	Rangda	772.600.000,00	754.600.000,00	772.600.000,00	100,00	_
6201022011	Kenambui	964.497.000,00	439.657.500,00	832.057.500,00	86,27	132.439.500,00
6201022012	Runtu	1.468.061.000,00	956.861.000,00	1.468.061.000,00	100,00	-
6201022013	Umpang	1.617.359.000,00	1.379.759.000,00	1.617.359.000,00	100,00	_
6201022014	Kumpai Batu Bawah	770.300.000,00	460.700.000,00	770.300.000,00	100,00	-
6201022015	Kumpai Batu Atas	844.725.000,00	506.325.000,00	844.725.000,00	100,00	_
6201022016	Natai Raya	964.782.000,00	838.782.000,00	964.782.000,00	100.00	_
6201022017	Medang Sari	679.139.000,00	412.739.000,00	679.139.000,00	100,00	_
6201022018	Natai Baru	928.145.000,00	647.345.000,00	928.145.000,00	100,00	_
6201022019	Tanjung Terantang	783.927.000,00	614.727.000,00	783.927.000,00	100,00	-
6201022020	Sulung	888.685.000,00	600.685.000,00	888.685.000,00	100,00	-
	SUB TOTAL	12.619.062.000,00	8.983.822.500,00	12.486.622.500,00	98,95	132.439.500,00
620103	KECAMATA KOTAWARINGIN LAMA					
6201032001	Babual Baboti	862.387.000,00	516.787.000,00	862.387.000,00	100,00	-
6201032002	Tempayung	737.498.000,00	442.298.000,00	737.498.000,00	100,00	-
6201032003	Sakabulin	723.676.000,00	435.676.000,00	723.676.000,00	100,00	-
6201032004	Kinjil	953.614.000,00	229.026.826,00	610.626.826,00	64,03	342.987.174,00
6201032005	Dawak	746.606.000,00	426.206.000,00	746.606.000,00	100,00	-
6201032006	Riam Durian	695.966.000,00	418.766.000,00	695.966.000,00	100,00	-
6201032009	Lalang	706.977.000,00	440.577.000,00	706.977.000,00	100,00	-
6201032010	Rungun	1.048.729.000,00	627.529.000,00	1.048.729.000,00	100,00	-
6201032011	Kondang	774.414.000,00	425.214.000,00	774.414.000,00	100,00	-
6201032012	Suka Jaya	676.726.000,00	424.726.000,00	676.726.000,00	100,00	-
6201032013	Suka Makmur	672.968.000,00	402.968.000,00	672.968.000,00	100,00	-
6201032014	Sumber Mukti	725.399.000,00	458.999.000,00	725.399.000,00	100,00	-
6201032015	Palih Baru	657.078.000,00	390.678.000,00	657.078.000,00	100,00	-
6201032016	Ipuh Bangun Jaya	734.373.000,00	439.173.000,00	734.373.000,00	100,00	-
6201032017	Sagu Suka Mulya	665.722.000,00	399.322.000,00	665.722.000,00	100,00	-
	SUB TOTAL	11.382.133.000,00	6.477.945.826,00	11.039.145.826,00	96,99	342.987.174,00
620104	KECAMATAN					
	ARUT UTARA	4 070 504 000 00	4.077.404.000.00	4 070 504 000 00	400.00	
6201042001	Nanga Mua	1.379.584.000,00	1.077.184.000,00	1.379.584.000,00	100,00	-
6201042003	Sukarami	899.793.000,00	759.393.000,00	899.793.000,00	100,00	-
6201042004	Gandis	1.090.858.000,00	813.658.000,00	1.090.858.000,00	100,00	265 700 400 00
6201042005	Kerabu	879.161.000,00	289.371.600,00	613.371.600,00	69,77	265.789.400,00
6201042006	Sambi	930.626.000,00	556.226.000,00	930.626.000,00	100,00	-
6201042007	Penyombaan	676.561.000,00	406.561.000,00	676.561.000,00	100,00	-
6004040000	Pandau	663.035.000,00	396.635.000,00	663.035.000,00	100,00	-
6201042008	Diam	004 705 000 00	000 705 000 00			
6201042008 6201042009	Riam	834.705.000,00	690.705.000,00	834.705.000,00	100,00	-
6201042008 6201042009 6201042010	Panahan	705.024.000,00	420.624.000,00	705.024.000,00	100,00	-
6201042008 6201042009					, ,	265.789.400,00

KODE	NAMA DESA	ANGGARAN	PENYALURAN			SISA
DESA	NAMA DESA	DANA DESA	NON BLT	BLT	%	ANGGARAN
620105	KECAMATAN PANGKALAN LADA					
6201052001	Pangkalan Tiga	815.365.000,00	487.765.000,00	815.365.000,00	100,00	
6201052002	Pandu Sanjaya	943.657.000,00	565.657.000,00	943.657.000,00	100,00	
6201052003	Lada Mandala Jaya	1.063.510.000,00	635.110.000,00	1.063.510.000,00	100,00	
6201052004	Makarti Jaya	754.921.000,00	452.521.000,00	754.921.000,00	100,00	
6201052005	Sumber Agung	816.519.000,00	488.919.000,00	816.519.000,00	100,00	
6201052006	Purbasari	834.402.000,00	499.602.000,00	834.402.000,00	100,00	
6201052007	Sungai Rangit Jaya	780.801.000,00	467.601.000,00	780.801.000,00	100,00	
6201052008	Pangkalan Dewa	843.288.000,00	504.888.000,00	843.288.000,00	100,00	
6201052009	Kadipi Atas	669.304.000,00	399.304.000,00	669.304.000,00	100,00	
6201052010	Sungai Melawen	757.406.000,00	451.406.000,00	757.406.000,00	100,00	
6201052011	Pangkalan Durin	980.244.000,00	587.844.000,00	980.244.000,00	100,00	
	SUB TOTAL	9.259.417.000,00	5.540.617.000,00	9.259.417.000,00	100,00	
620106	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG					
6201062001	Pangkalan Banteng	786.464.000,00	466.064.000,00	786.464.000,00	100,00	
6201062002	Mulya Jadi	725.023.000,00	415.423.000,00	725.023.000,00	100,00	
6201062003	Karang Mulya	903.344.000,00	539.744.000,00	903.344.000,00	100,00	
6201062004	Kebun Agung	775.638.000,00	466.038.000,00	775.638.000,00	100,00	
6201062005	Sido Mulyo	722.508.000,00	376.908.000,00	722.508.000,00	100,00	
6201062006	Marga Mulya	727.149.000,00	539.949.000,00	727.149.000,00	100,00	
6201062007	Amin Jaya	1.775.104.000,00	1.177.504.000,00	1.775.104.000,00	100,00	
6201062008	Arga Mulya	989.648.000,00	597.248.000,00	989.648.000,00	100,00	
6201062009	Natai Kerbau	789.648.000,00	469.248.000,00	789.648.000,00	100,00	
6201062010	Simpang Berambai	754.139.000,00	451.739.000,00	754.139.000,00	100,00	
6201062011	Sungai Hijau	823.380.000,00	495.780.000,00	823.380.000,00	100,00	
6201062012	Sungai Pakit	723.288.000,00	442.488.000,00	723.288.000,00	100,00	
6201062013	Berambai Makmur	702.802.000,00	422.002.000,00	702.802.000,00	100,00	
6201062014	Karang Sari	698.874.000,00	421.674.000,00	698.874.000,00	100,00	
6201062015	Sungai Pulau	709.264.000,00	428.464.000,00	709.264.000,00	100,00	
6201062016	Sungai Bengkuang	853.043.000,00	511.043.000,00	853.043.000,00	100,00	
6201062017	Sungai Kuning	1.354.736.000,00	825.536.000,00	1.354.736.000,00	100,00	
	SUB TOTAL	14.814.052.000,00	9.046.852.000,00	14.814.052.000,00	100,00	
	TOTAL	70.631.198.000,00	44.297.293.086,00	69.814.093.086,00	98,84	817.104.914,00

# Lampiran 5.2 Rincian Penerima Hibah Tahun 2022

No.	SKPD/Uraian	Nilai
1	DINAS KESEHATAN	748.731.721,00
	Pembayaran Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kotawaringin Barat	250.000.000,00
_	Pembayaran Hibah Uang Kepada Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Kotawaringin Barat  DINAS SOSIAL	498.731.721,00
2	Pembayaran belanja Hibah Uang kepada Organisasi Relawan Kobar Bersatu Kabupaten	50.000.000,00
	Kotawaringin Barat  DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN	50.000.000,00
3	PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	414.996.980,00
	Belanja Hibah Uang Tahap I kepada Asosiasi Bawi Dayak, Budaya dan Wisata (ASBADATA) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor: 008/ASBADATA-KOBAR/2022 tanggal 25 Februari 2022	52.500.000,00
	Belanja Hibah Uang Tahap I kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kotawaringin Barat sesuai Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor: 007/Sekr/GOW/II/2022 tanggal 23 Februari 2022	125.000.000,00
	Belanja Hibah Uang kepada Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor: 038.a/DWP-KabKobar/X/2022 tanggal 17 Oktober 2022	90.000.000,00
	Belanja Hibah Uang Tahap II kepada Asosiasi Bawi Dayak, Budaya dan Wisata (ASBADATA) Kabupaten Kotawaringin Barat sesuai Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor: 035/ASBADATA-KOBAR/2022 tanggal 5 Desember 2022	22.500.000,00
	Belanja Hibah Uang Tahap II kepada Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kotawaringin Barat sesuai Surat Permohonan Pencairan Dana Hibah Nomor: 24/Sekr/GOW/XII/2022 tanggal 6 Desember 2022	124.996.980,00
4	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN	436.402.250,00
	Belanja Hibah uang untuk keperluan penyelenggaraan berbagai kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahap I Tahun Anggaran 2022	94.191.511,00
	Belanja Hibah uang untuk keperluan penyelenggaraan berbagai kegiatan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Kotawaringin Barat Tahap II Tahun Anggaran 2022	105.808.489,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa Sound Sysrem Tahun Anggaran Perubahan 2022	106.937.400,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa TV Led Tahun Anggaran Perubahan 2022	51.060.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa Jaringan Wi Fi Tahun Anggaran Perubahan 2022	5.550.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa CCTV Tahun Anggaran Perubahan 2022	17.482.500,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa Kamera Tahun Anggaran Perubahan 2022	44.289.000,00
	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat Berupa Ground Receiver Tahun Anggaran Perubahan 2022	11.083.350,00
5	SEKRETARIAT DAERAH	2.625.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk program kerja dan kegiatan badan amil zakat nasional (BAZNAS) Kobar tahap I sebesar 70% x Rp150.000.000 sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	105.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk program dan kegiatan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran (LPTQ) Kobar tahap I sebesar 70% x Rp200.000.000 sub kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA. 2022	140.000.000,00
	Pembayaran hibah pengadaan sarana & prasarana Rukun Kematian Sadar Allah Rt.9 Kumai Hilir & Yayasan Suniyah Salafiyah Desa Karang Mulya sebesar 70% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	52.500.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk program kerja dan kegiatan Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ktw. Barat tahap I sebesar 70% x Rp100.000.000 sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	70.000.000,00
	Pembayaran hibah kepada Musholla Nurul Maharifah Sungai Tendang, Musholla Nurul Hidayah Pasir Panjang, Gereja GKPS, Gereja GKE, Masjid Al-Hikmah Natai Raya sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	101.500.000,00
	Pembayaran hibah Masjid Al Ihsan Desa Batu Belaman, Musholla Roudhatul Jannah Desa Sungai Tendang, Madrasah Diniyah Islamiyah Miftahul Ulum II Kel.Candi sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	30.000.000,00
	Pembayaran hibah tahap I kepada 4 lembaga Mushola Al Mubarok, Masjid AL-Hijrah, Masjid Nurul Iklas, Masjid AL-Huda sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	122.500.000,00
	Pembayaran hibah termin 100 % kepada Masjid Nurul Qauli Kelurahan Mendawai Seberang sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	10.000.000,00
	Pembayaran hibah untuk Gereja Sinta Jl. HM. Rafii Desa Pasir Panjang dan GKE Kelurahan Raja Seberang Kec. Arut Selatan tahap I sebesar 70% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	73.500.000,00
	Pembayaran hibah uang kepada 4 Lembaga untuk kelompok pengajian Baitul Muslimat Desa Kubu, Desa Sungai Kapitan, Kel. Kumai Hilir, Kel. Kumai Hulu tahap I sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	99.400.000,00
	Pembayaran hibah uang kepada 3 Lembaga untuk Musholla Khoirun Nur Sungai Kapitan, Masjid Al- Muhajjirin Purbasari, Musholla Miftahul Jannah Kumai hulu tahap I sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	70.000.000,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Pembayaran hibah untuk Masjid Jami Badariyah Jl. Mak Jambek Kelurahan Mendawai Seberang Kecamatan Arut Selatan tahap I sebesar 70% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	14.000.000,00
	Pembayaran hibah untuk Masjid Al-Huda Rt. 17 Kel. Kumai Hulu Kec. Kumai dan Musholla Nurul Hidayah Jl. Bhayangkara Perumahan Melati Pasir Panjang tahap II 30% sub keg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	22.500.000,00
	Pembayaran hibah Musholla Nurul Maharifah Desa Sungai Tendang Kec. Kumai dan Rukun Kematian Sadar Allah Kel. Kumai Hilir Kec. Kumai tahap II 30% sub keg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	22.500.000,00
	Pembayaran hibah kepada Banser Kobar (Banser NU) Jl. P. Diponegoro No:06 P. Bun & Musholla Miftahul Jannah Rt. 09 Desa Lada Mandala Jaya Kec. P. Lada tahap I 70% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	87.500.000,00
	Pembayaran hibah Masjid Nurul Ikhlas Desa Kebun Agung Rt. 03 Rw. 01 Desa Kebun Agung Kec. Pangkalan Banteng tahap II 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	7.500.000,00
	Pembayaran hibah Gereja GKPS Desa Pasir Panjang, Mushilla Al Mubarok Desa Pangkalan Tiga, Yayasan Suniyah Salafiyah Desa Karang Mulya tahap II sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	36.000.000,00
	Pembayaran hibah untuk Musholla Khoirun Nur Desa Sungai Kapitan, Gereja GKE Pasir Panjang dan Musholla Miftahul jannah Kelurahan Kumai Hulu tahap ke II sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	24.000.000,00
	Pembayaran hibah untuk Badan Amil Zakat Nasional Kab. Kotawaringin Barat tahap ke II sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	45.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk pembangunan sarana & prasarana Masjid Al-Muhajjirin Rt. 19 Desa Purbasari Kec. P. Lada tahap II sebesar 30% x Rp50.000.000 subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	15.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Yayasan Panti Asuhan Ar Rahman Ponpes Hidayatullah Desa Sungai Tendang & TPA Hidayatul Mubtadiin Desa P. Dewa tahap II (100%) subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat	80.000.000,00
	Pembayaran hibah uang kepada Masjid Hubbul Waton Kel. Madurejo dan Masjid Babut Taqwa Desa Sungai Kapitan Kec. Kumai sebesar 100% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	50.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Yayasan Kotawaringin termin 100% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	250.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Gereja Sinta Jl. HM. Rafii Desa Pasir Panjang Kec. arsel dan GKE Kel. Raja Seberang Kec. Arsel tahap II sebesar 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	31.500.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid Al Baidho Kel. Kumai Hilir, Yayasan Hidayatul Mubtadiin Desa Marga Mulya, Musholla Nurul Jannah Kel. Candi termin 100% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	150.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid Jami Nurul Qomar Desa Simpang Berambai, Masjid Al Fajar Kel. Baru, Musholla Nurul Iman Kel. Candi termin 100% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	110.000.000,00
	Pembayaran hibah uang termin 100% kepada Masjid Jami Darul Muttaqin, Gereja GKE Getsemane, Masjid Al Muhajirin, Balai Hindu Kaharingan, Musholla Nurul Abror, Masjid Jami Nurul Hikmah, Masjid An Nur, Musholla Hidayatul Hasanah	255.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk kelompok pengajian Baitul Muslimat Desa Kubu, Desa sungai kapitan, Kel. Kumai Hilir, Kel. Kumai Hulu tahap II sebesar 30% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	42.600.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid Al-Hijrah Desa Pasir Panjang dan Musholla Miftahul Jannah Desa Lada Mandala Jaya tahap II 30% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	22.500.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Musholla Al-Istiqomah Desa Pandu Sanjaya dan Masjid Nurul Falah Desa Sulung termin 100% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	60.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Majelis Sholawat Kubro Junaidiyah Kel. Sidorejo, Masjid Jannatul Khoirot Pasir Panjang, Masjid Nuruddin Kel. Candi termin 100% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	155.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Pondok Pesantren Yayasan Sabilur Rosyad An Noor Kel. Mendawai Seberang & Masjid Nurul Jannah Desa Sungai Pakit termin 100% subkeg. pelaksanaan kebijakan, evaluasi & capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	38.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Musholla Annahar Jl. Pasanah Gg. Kenanga Rt. 12 Kel. Madurejo Kec. Arsel termin 100% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	50.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid Al-Hikmah Desa Natai Raya Kec. Arel tahap II sebesar 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	6.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid jami Nurul Huda Kel. raja Kec. Arsel termin 100% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	50.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk program dan kegiatan LPTQ Kab. Kobar tahap II sebesar 30% x Rp200.000.000 Sub Kegiatan Fasilitas Pengelolaan Bina Mental Spiritual TA. 2022	60.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk Banser Kobar (Banser NU) Jl. P. Diponegoro No:06 Pangkalan Bun tahap II sebesar 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	30.000.000,00

Γ

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Pembayaran hibah uang untuk Masjid Jami Badariyah Jl. Mak Jambek Ke. Mendawai Seberang Kec. Arsel tahap II sebesar 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	6.000.000,00
	Pembayaran hibah uang untuk pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kab. Ktw. Barat termin tahap II sebesar 30% sub kegiatan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan capaian kinerja terkait kesejahteraan masyarakat TA. 2022	30.000.000,00
6	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	3.050.480.000,00
	Pembayaran belanja Hibah untuk membangun fasilitas pendidikan berupa 1 (satu) buah ruang makan siswa tipe 200 M2 SPN Polda Kalteng, berdasarkan NPHD Nomor: 300/01/Kesbang.l/2022 tanggal 2 Februari 2022	1.100.000.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai GERINDRA Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada Tahap Pertama Sebesar 50 persen dari nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	140.662.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Golongan Karya Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada Tahap Pertama Sebesar 50 persen dari nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	226.860.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.	46.350.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Keadilan Sejahtera Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.	48.772.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrat Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	57.540.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Nasonal Demokrat Kbupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada Tahap Pertama Sebesar 50 persen Dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana Tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	98.677.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	63.315.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Amanat Nasional Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	49.830.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada Tahap Pertama Sebesar 50 persen dari nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat	205.612.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Berkarya Kab.Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap pertama sebesar 50 persen dari Nilai Alokasi Banpol sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kotawaringin Barat.	37.620.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai GERINDRA Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	140.662.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Persatuan Pembangunan Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	46.350.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Amanat Nasional Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	49.830.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	205.612.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Keadilan Sejahtera Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	48.772.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai DEMOKRAT Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	57.540.000,00
	Pembayaran belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Golongan Karya Kab. Kotawaringin Barat Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	226.860.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Nasional Demokrat Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	98.677.500,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Kebangkitan Bangsa Kab. Kobar Tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana tertuang dalam Keputusan Bupati Kobar	63.315.000,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Berkarya Kab. Kotawaringin Barat tahun 2022 pada tahap kedua sebesar 50 persen dari nilai alokasi bantuan keuangan kepada partai politik sebagaimana tertuang dalam keputusan Bupati Kobar	37.620.000,00
7	DINAS PARIWISATA	145.768.700,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Teknis Kelotok Wisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota an ANDRIA ARISANTO, ST. MT. Direktur Utama CV. TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)	3.518.700,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Termyin 100% atas Pekerjaan Pembuatan Kelotok Wisata Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota An. WINARNI Direktur Utama CV. SAKA DUTA PERSADA	142.250.000,00
8	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	6.560.021.450,00
	Pembayaran Termyn 100% Perencanaan teknis pembangunan lapangan serbaguna kodim 1014 pangkalan bun	14.674.200,00
	Pembayaran Uang Muka 50% Pek. Pembangunan Lapangan Serbaguna Kodim 1014 Pangkalan Bun CV. BANUA SIDAY	232.000.000,00
	Pembayaran Uang Muka 30% Pembangunan Gedung Barang Bukti, Rehab Gedung Kantor Kejaksaan, Penataan halaman dan rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun CV. USAHA JAYA	700.350.000,00
	Pembayaran Uang Muka 30% . Lanjutan Pembangunan Gedung Reskrim dan Fasilitas-Fasiltas Pendukung Pada Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat CV. KINGTA ABADI	838.050.000,00
	Pembayaran Uang Muka 50% Pembangunan Rumah Dinas Detasemen Polisi Milter (Denpom) Pangkalan Bun CV. DENHAS	83.758.500,00
	Pembayaran Termyn 100% Pengawasan Teknis Pembangunan Lapangan Serbaguna Kodim 1014 Pangkalan Bun CV. SERUYAN MITRATAMA CONSULTANT	19.758.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Pembangunan Lapangan Serbaguna Kodim 1014 Pangkalan Bun CV. BANUA SIDAY	232.000.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Pengawasan Teknis Pembangunan Rumah Dinas Detasemen Polisi Militer (Denpom) Pangkalan Bun CV. BORNEO PERKASA CONSULTANT	6.959.700,00
	Pembayaran Termyn 100% Pengawasan Teknis Renovasi Pos Jaga Lawu, Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lanud Iskandar dan Rehab Masjid Lanud Iskandar CV. EMPIRIS TRITECH DESIGN	18.481.500,00
	Pembayaran Termyn 100% Rehab Masjid Lanud Iskandar CV. RISMA	189.745.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Renovasi Pos Jaga Lawu CV. NADILA	66.501.000,00
	Termyn 100 % Pek. Pengawasan Teknis Pembangunan Ged Barang Bukti, Rehab Ged Kantor Kejaksaan, Penataan halaman & rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri P.Bun & Pembangunan drainase Lingkungan Kejaksaan Negeri P.Bun, CV. CENDRAWASIH MITRA PRATAMA	98.762.250,00
	Pembayaran Termyn 100% Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman di Lanud Iskandar CV. RISMA	191.000.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Gedung Reskrim dan Fasilitas-Fasiltas Pendukung Pada Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat CV. WIDYA GRAHA PRATAMA	98.878.800,00
	Pembayaran Termyn 100% Pembangunan drainase Lingkungan Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun CV. BERKAH	95.744.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Pembangunan Rumah Dinas Detasemen Polisi Militer (DENPOM) Pangkalan Bun CV. DENHAS	83.758.500,00
	Pembayaran Termyn 100% Pembangunan Gedung Barang Bukti, Rehab Gedung Kantor Kejaksaan, Penataan halaman dan rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Negeri Pangkalan Bun CV. USAHA JAYA	1.634.150.000,00
	Pembayaran Termyn 100% Lanjutan Pembangunan Gedung Reskrim dan Fasilitas-Fasiltas Pendukung Pada Kepolisian Resor Kabupaten Kotawaringin Barat CV. KINGTA ABADI	1.955.450.000,00
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	24.130.245.452,00
	Bantuan dana untuk biaya operasional Kegiatan Pokja Bunda PAUD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022	50.000.000,00
	Bantuan Dana untuk biaya operasional Kegiatan PD HIMPAUDI Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022	20.000.000,00
	Bantuan Hibah Uang (Bantuan Rehabilitasi sedang ruang kelas TK Kartika Kelurahan Kumai Belanja Hibah Uang kepada SMP Swasta se-Kabupaten Kotawaringin Barat an. Kepala SMP	53.000.000,00
	Muhammadiyah, RAFIQOH, S.Pd ( SEBANYAK 19 Sekolah )  Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (PNF): Warga Belajar Penerima Bantuan Operasional	190.000.000,00
	Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2022  Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (PNF): Warga Belajar Penerima Bantuan Operasional	33.600.000,00
	Pendidikan Kesetaraan Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2023	51.600.000,00
	Belanja Hibah BOP Kesetaraan Belanja Hibah BOP Kesetaraan	569.075.040,00
	Belanja Hibah BOP PAUD	3.221.834.000,00
	Belanja Hibah BOP PAUD	1.734.835.000,00
	Bantuan pengadaan alat musik Tradisional Gamelan Desa Kumpai Batu Atas Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat	50.000.000,00
	Bantuan pengadaan Alat Kesenian MTS Babussalam Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	30.000.000,00
	Pengadaan alat kesenian kuda lumping karya budaya Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	50.000.000,00
	Pengadaan Alat Kesenian Karang Taruna Desa Karang Sari Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat	59.850.000,00
	Pengadaan Alat Kesenian dan Sound system sanggar Sehaluan Kelurahan Raja Seberang Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat	49.865.000,00
İ	Pengadaan Alat Kesenian Luminter Laras Desa Bumi Harjo Kecaamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	114.900.000,00
	Pengadaan Alat Kesenian Gamelan Kelompok Ngudi Laras Desa Suka Makmur Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat	149.700.000,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Pengadaan Alat Musik Sound System Masyarakat Kumai Hilir Rt.9 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat	59.900.000,00
	Pengadaan Alat Sanggar Kesenian Arut Selaman Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat	25.000.000,00
	Pengadaan Alat Kuda Lumping Kelompok Turonggo Seto Desa Natai Kerbau Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat	50.000.000,00
	Pengadaan Busana Penari Paguyupan Seni Kuda Lumping Turonggo Muda Desa Pangkalan Tiga Kecamatan Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat	69.900.000,00
	Pengadaan Alat Kesenian Paguyupan Pasundan Lembur Kuning Desa Purbasari Kecamatan	74.800.000,00
	Pangkalan Lada Kabupaten Kotawaringin Barat Pengadaan Alat Musik Banua Musik Production Kelurahan Kumai Hulu Kecamatan Kumai	149.700.000,00
	Kabupaten Kotawaringin Barat Pengadaan Alat Musik Kelompok Mendawai Bersaudara Rt.21 Mendawai Kecamatan Arut Selatan	149.800.000.00
	Kabupaten Kotawaringin Barat Pengadaan Sound System dan Genset Kelompok Turonggo Budoyo Desa Marga Mulya Kecamatan	99.800.000,00
	Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat Tahap 1 sebesar 25% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang UKS SMP N 1 Arut Selatan, SMP N 4	9.333.750,00
	Kotawaringin Lama, SMP N 4 Kumai, SMP IT Al Huda TA. 2022  Tahap I 25% kegiatan Rehabilitasi Ruang Kelas untuk SMPN 1 Arsel, SMPN 3 Arsel, SMP IT Al	•
	Huda, SMPN 4 Kolam, SMPN 4 Kumai, SMPN 1 P.Banteng, SMPN 1 P.Lada Pembayaran Rehabilitasi ruang ibadah SMPN 1 ARSEL, SMP IT AL HUDA, SMPN 4 KOLAM dan	106.804.500,00
	Rehabilitasi Toilet (Jamban) beserta sanitasinya SMPN 1 ARSEL, SMP IT AL HUDA, SMPN 4 KOLAM, SMPN 4 KUMAI, dan SMPN 1 PANGKALAN LADA (DAK)	54.203.250,00
	Pembayaran Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang SMP NEGERI 1 ARUT SELATAN, SMP IT AL-HUDA, SMP NEGERI 4 KUMAI dan SMP NEGERI 1 PANGKALAN LADA	57.500.000,00
	Tahap I 25% kegiatan Pembangunan Ruang LAB IPA dan Komputer untuk SMP IT Al Manar, SMPN 4 Arsel, SMPN 6 Arsel, SMPN 7 Arsel, SMP IT Al Huda, SMPN 4 Kolam, SMPN 4 Kumai, SMPN 5 Kumai, SMPN 2 P.Banteng, SMPN 2 P.Lada	347.975.000,00
	DAK Fisik Tahap 1 sebesar 25% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK Makarti Mukti Siwi Kec. Arut Selatan pada kegiatan Pembangunan gedung /Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD TA. 2022	22.750.000,00
	DAK Fisik Tahap 1 sebesar 25% Biaya Pekerj.Pemb.R.UKS padaTK Makarti Mukti Siwi,TKIT Al Manar,TK Islam Darul Ulum,TK N Pembina Kec.Arsel,TK Harapan Bangsa,TK Dahlia Kec.P.Lada,TK Al Ishlahul Iman,TK PGRI Kec.P.Banteng,TK Sadar Bhakti Kec.Kumai TA.202	182.000.000,00
	DAK Fisik Tahap 1 : 25% Biaya Pekerj Pemb.Area bermain beserta APE Luar Ruang pd TK Bumitama Kolam,TK Dahlia P.Lada,TK Al Ishlahul Iman,TK Mekar Sari,TK Pertiwi,TK PGRI P.Banteng,TK Makarti M.Siwi,TK IT Al Manar,TK Islam D.Ulum,TKN Pembina Arsel TA.2	346.500.000,00
	DAK Fisik Tahap 1 sebesar 25% Biaya Pekerj.Pemb.Toilet( Jamban)beserta sanitasinya pada TK.Berunai,TK Anggrek Kec.Arsel,TK Sadar Bhakti Kec.Kumai,TK PGRI Kec.P.Banteng,TK Harapan Bangsa Kec.P.Lada pd Keg.Pemb.Sarana Prasarana dan Utilitas PAUD TA.202	93.750.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Perenc. Pembangunan Pagar Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kumai (Candi) & Perenc. Pembangunan Pagar Madrasah Jaziratulilmi Desa Sei Bakau Berdasarkan SPK No:01.06/001.I.1/SPK/DPK.III/2022 Kab.Ktw.Barat TA.2022	4.900.000,00
	Pembayaran DAK Fisik Tahap I sebesar 25% Biaya Pekerj. Pemb. Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya dan Pekerj. Pemb. Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Arut Utara TA. 2022	57.250.000,00
	Pengadaan Notebook/Laptop KB.Bunga Hati Kelurahan Mendawai Kec. Arut Selatan Kab.Ktw.Barat	9.425.000,00
	Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya SMP IT AL-HDA Kotawaringin Lama dan Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar Berdasarkan SPK No:02.12/096/SPK/DPK.IV/Dikbud/2022 Kab.Ktw.Barat Tahun Anggaran 2022	2.530.800,00
	Termyn 100% Perencanaan Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya SMP IT AL-HDA Kotawaringin Lama dan Pembangunan Pagar Sekolah SMP Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar Berdasarkan SPK No:02.12/096/SPK/DPK.IV/Dikbud/2022 Kab.Ktw.Barat Tahun Anggaran 2022	359.980.000,00
	Pengadaan peralatan Teknologi,Informasi dan Komnikasi (TIK) SMP ALAM BINA INSAN P.BUN, SMP ISLAM AR-RAUDHAH,SMP IT AL.HUDA,SMP IT AL.MANAR, dan SMP PESANTREN DARUL ULUM PANGLIMA KOBAR lokasi Kab.Ktw.Barat kegiataan pengadaan Alat Praktik dan Peraga S	569.325.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) berdasarkan Surat Perjanjian (SP) Nomor: 01.22/001.I.1/SP/DPK.III/2022 tanggal 7 Maret 2022 (53 SD Negeri) & Belanja Hibah Barang (3 SDN Swasta)	374.992.500,00
	Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor TK 17 Oktober Desa Sambi Kecamatan Arut Utara Kab.Kotawaringin Barat Surat Pesanan No: 03.12/004/SP.DPKII/DIKBUD/2022	10.000.000,00
	Tahap II sebesar 55% Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA	263.670.000,00
	DAK Fisik Tahap II 45% Biaya Pekerjaan Pemb.R.UKS pada TK Harapan Bangsa Kec.P.Lada pada	40.950.000,00
	kegiatan Pemb.Sarana,Prasarana dan Utilitas Sekolah TA. 2022 Tahap II Sebesar 55% Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)	238.205.000,00
	pada SMP IT AL HUDA Tahap II sebesar 55% Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SMP IT AL HUDA	234.969.900,00
	Tahap II Sebesar 55% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan dengan Tingkat Kerusakaan Minimal Sedang pada SMP IT AL-HUDA Kecamatan Kotawaringin Lama pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	126.500.000,00
	Tahap II Sebesar 55% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Ibadah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada SMP IT AL-HUDA Kecamatan Kotawaringin Lama Pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	14.747.150,00

SKPD/Uraian	Nilai
Tahap II Sebesar 55% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakaar Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada SMP IT AL-HUDA Kecamatan Kotawaringin Lama pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Seko	
Tahap II sebesar 55% Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL MANAR	263.670.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 55% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang UKS dengan tingkat kerusakar minimal sedang pada SMP IT AL-HUDA Kec. Ktw.Lama pada kegiatan rehabilitasi sedang/bera ruang unit kesehatan sekolah TA. 2022	
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKART MUKTI SIWI Kec.Arut Selatan TA. 2022	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet(jamban)beserta sanitasinya pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada pada kegiatan pembangunan sarana, prasarana dan utilitas sekolah TA. 2022	
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE lua ruang pada TK Dahlia Kec. Pangkalan Lada TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalar Lada TA. 2022	40.950.000,00
Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor TPA Pelita Ibu Kelurahan Sidorejo Kec. Arut Selatar Kab.Kotawaringin Barat	10.000.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain besserta APE Lua Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAF BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumia TA. 2022	33.750.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUI IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kec Pangkalan Banteng TA. 2022	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022	33.750.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area bermain beserta APE Lua	r 69.300.000,00
ruang pada TK PERTIWI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE lua	r 69.300.000,00
ruang pada TK MEKAR SARI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE lua ruang pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya pada TK ANGGREK 1 Kec. Arut Selatan TA. 2022	33.750.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Lua Ruang pada TK IT AL MANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta Sanitasinya pada TK PERTIWI Kec. Arut Utara TA. 2022	33.750.000,00
Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUN Kec. Arut Selatan pada Kegiatan Pembangunan Sarana Prasarana dan Untilitas Sekolah	40.950.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Lua Ruang pada TK PERTIWI Kec. Arut Utara TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Lua Ruang pada TK BUMITAMA Kec. Kotawaringin Lama TA. 2022	r 69.300.000,00
: DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luara Ruang pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan	69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Kumai TA. 2022	33.750.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Lua Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Kumai TA. 2022	r 69.300.000,00
DAK Fisik Tahap II sebesar 45% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK IT AL MANAF Kec. Arut Selatan TA. 2022	R 40.950.000,00
Termyn 100% atas Pekerjaan Pengadaan Alat Drum Band SD IT Almanar Berdasarkan SPK No	59.840.100,00
01.22/001.1.4/SPK/DPK.III/2022 Tanggal 12 Oktober 2022 Kab. Kotawaringin Barat Th 2022  Termyn 100% atas Pekerjaan Pengadaan Peralatan Pelatihan Tampil secara Online berbentuk Studio Mini dan Kelengkapannya SD IT Almanar Berdasarkan SPK No	
01.22/001.I.3/SPK/DPK.III/2022 Tanggal 9 September 2022 Kab. Kotawaringin Barat Th 2022  Pengadaan peralatan laboratorium ilmu pengetahuan alam (IPA) Fisika dan Biologi (18 Paket) Lokas	i 328.644.000,00
Kabupaten Kotawaringin Barat Pada Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Pengadaan Alat Peraga Edukasi (APE) Outdoor KB Bunda Liyan Kel Sidorejo Kec.Arut Selatan	20.000.000,00
Termyn 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pagar Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kumai (Candi dan Pengawasan Pembangunan Pagar Madrasah Jaziratulilmi Desa Sei Bakau SPK No 01.06/001.II.1/SPK/DPK.III/2022	6.900.000,0
Termyn 100% Pengadaan Mebel Ruang Kelas dan Ruang Kantor SMP ISLAM HADDADIL QULUE TA 2022 (CV. KARYA BERSAMA)	148.514.670,0
Termyn 100% Pembangunan Jamban beserta sanitasinya SMP IT AL-HUDA Kotawaringin Lama Tahun Anggaran 2022	100.539.000,00

Termyn 100% Pembangunan Pagar Sekolan SMP PESANTREN DARUL ULUM PANGLIMA KOBAR Tahun Anogaran 2022 Tahap Ill sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Toilet (jamban) beserta sanitasinya pada TK PERTWIK Mec. And Ulara TA. 2022 Termyn 100% atsa Pekerjaan Permcananan Rehabilitasi Sedang Gedung TK Sadar Bhakti Noro 338 JOIN SM Pekerjaan Permcananan Rehabilitasi Sedang Gedung TK Sadar Bhakti Noro 338 JOIN SM	No.	SKPD/Uraian	Nilai
Termyn 100% Perngadaan Mebel Ruang Keles SMP AL MIFTAH TA 2022 (OV. PORTAL DESAIN) 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.000.000.000 115.0000.0000			191.580.000,00
Termyn 100% Permbangunan Pagar Sekolah SMP PESANTREN DARUL ULUM PANGLIMA KOBAR Tahun Angaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Toilet (jamban) beserta sanitasinya pada TK PERTMI Mec. Anul Ulara TA. 2022 Termyn 100% ataa Pekerjaan Permbangunan Rehabilitaal Sedang Gedung TK Sadar Bhidi Nor30.30/158/CDPK LIDIKEM LOVE 2022 tangan 25 Angatas 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Permbangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP ITA LAMANAR Kec Anul Selatan 11. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Permbangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MEKAR ARM Kec Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK TK LAMANAR Kec Anul Selatan 12. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Area Luar Ruang pada TK BUMI TAMA Kec.  46 200 000.00 TK NAJANAR Kec Anul Selatan 12. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Area Luar Ruang pada TK BUMI TAMA Kec.  46 200 000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Permbangunan Area Luar Ruang bada TK BUMI TAMA Kec.  47 200 000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ALUB SEBAR 12. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREK I Kec. Anti Selatan 12. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ALUB SEBAR 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kac.Pangkalan Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kac.Pangkalan Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kac.Pangkalan TABAP III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kac.Pangkalan Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kac.Pangkalan Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kac.Pangkalan Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK			44.800.000,00
Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Permbangunan Toilet (jamban) beserta sanitasinya pada TK PERTIVIK Rec. Arut Ulara TA. 2022 Termyin 100% atas Pokenjaan Permbangunan Rehabilitas Sedarg Gedung TK Sadar Bhakti Kelurahan Kumal Hilf Kecamatan Kumai. Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Not30.3030/ISPKOPEN IIDNEBUD/2022 langgal 23 Agustus 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP 17 AL IMAVAR Kec Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL Sadar Managan Sadar Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL Sadar Managan Sadar Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL Sadar Managan Sadar			115.000.000,00
Redurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai. Berdasarkan Suriat Perintah Kerja (SPK) No.03.09/ISPK/DPK.IURBUD/2022 tanapa III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP   17.ALMANAR Kee And Selatan   17.4		PERTIWI Kec. Arut Utara TA. 2022	22.500.000,00
IT AL. MANAR Kec Arut Selatan 14.2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MEKAR SARI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK IT AL MANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL 46.200.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL 46.200.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL 46.200.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANDAR BHARTI Kec. Kumal TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK SADAR BHARTI Kec. Kumal TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK SEMAR BHARTI Kec. Kumal TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA (Se. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA (Se. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumal TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumal TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MARARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pa		Kelurahan Kumai Hilir Kecamatan Kumai Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:03.03/01/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 23 Agustus 2022	2.630.700,00
TK MEKAR SARI Kec. Pańgkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta Ape Luar Ruang pada TK IT AL MANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Luar Ruang pada TK BLMI TAMA Kec. Kotawaringin Lama TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PERTIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK AL SELAMARI TK Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK SELAMARI TK Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK SELAMARI TK Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Latab TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Latab TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pa		IT AL MANAR Kec Arut Selatan	42.280.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta Ape Luar Ruang pada TK ILA MANAR Kec. Aut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Luar Ruang pada TK BLMI TAMA Kec. Kotawaringin Lama TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL ISHLAHULI IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kec. Pangkalan Barteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK. ANGGREK I Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK. SADAR BHAKTI Kec. Kumia TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK. BERDUNI Kec. Ant Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK. BERDUNI Kec. Ant Uselatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Carla TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Carla TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Ant Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Ant Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKI TA MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Ant Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pe			46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Lura Ruang pada TK BUMI TAMA Kec. Kotawaringin Lamar TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Lura Ruang pada TK AL ISILA-HUL IMAN Kec. Pengkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kec.Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREKI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK ANGGREKI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP TIA. HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Zhada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Zhada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Wec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 20		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta Ape Luar Ruang pada	46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Perkerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK AL ISHLAHUI. IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREK IKEc. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREK IKEc. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27,300.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27,300.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27,300.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27,300.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Luar Ruang pada TK BUMI TAMA Kec.	46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kec Pangkalan Banten TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREK I Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lata TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lata TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lata TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SKPK No.005/SPK/DPK. III/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. 27.300.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Anut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Anut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Anut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ILAMANAR Kec. A		Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Area Bermain besesrta APE Luar Ruang pada TK AL	46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta sanitasinya pada TK ANGGREK I Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK SADAR BHANTI Kec. Kumai TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PERTIWI Kec. Arut Utara TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022  Temmyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PERTIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PERTIWI Kec		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PGRI Kec.Pangkalan	27.300.000,00
The Nation Rec. Nation Selation Tri. A.022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Arut Utara TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tamap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Tampun 100% atas pekerjaan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SPK No.006/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022 Tampun 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SILAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK PER Luar Ruang pada TK PER IN Besear 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISLAM PAL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Blaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHUAH Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada	22.500.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 202 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL. HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL. HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Pangkalan Bantang TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesa		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta Sanitasinya pada	
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Pangkalan Bantang TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Bantang TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ITAL MANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PERTIR Kec. Pangkalah Bantang TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PERTIR MARARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pek		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet ( Jamban ) beserta sanitasinya pada	
Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama   42.280.000,00		TK BERUNAI Kec. Arut Selatan TA. 202 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK HARAPAN BANGSA	,
IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan gedung TK di 3 (liga) Sekolah berdasrkan SPK No:005/SPK/DPK II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022 : Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Tolleit (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Tolleit (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Tolleit (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Tolleit (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Tolleit (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Ta		Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Komputer pada SMP	•
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK DAHLIA Kec.Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022  Termyn 100% atas pekerjaan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SPK No.005/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKI ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Usta Sekolah pada TK P		IT AL HUDA Kotawaringin Lama	•
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PERTIWI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022  Termyn 100% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SPK No:005/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (PA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap I		Kec. Arut Utara TA. 2022	•
TK PERTIWI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK SADAR BHAKTI Kec. Kumai TA. 2022 Termyn 100% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SPK No:005/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKI ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKI ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK AMAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK AMAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IIPA SMP IT AL HUDA Kec. 66.310.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IIPA SMP IT AL HUDA Kec. Rangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang		Lada TA. 2022	27.300.000,00
Kumai TA. 2022   Termyn 100% atas pekerjaan Pengawasan Pembangunan gedung TK di 3 (tiga) Sekolah berdasrkan SPK No:005/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022   10.767.000,00   10		TK PERTIWI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022	46.200.000,00
SPK No:005/SPK/DPK. II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022  : Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IImu Pengetahuan Rang III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium IImu Pengetahuan Rang III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembanguna		Kumai TA. 2022	27.300.000,00
Kec. Árut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA (66.310.000.00 Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000.00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000.00		SPK No:005/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 29 September 2022	10.767.000,00
TK ISLAM DARUL ULUM Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kec. 2030.000,00		Kec. Arut Selatan TA. 2022	27.300.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kec. 27.300.000,00  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kec. 29.300.000,00			46.200.000,00
Termyn 100% Pengadaan Peralatan Marchingband SMP Alam Bina Insan Tahun Anggaran 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022 Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022 Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Kuang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. 27.300.000,00 Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TK MAKARTI MUKTI SIWI	27.300.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec			145.731.900,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembanguna Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000,00  Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000,00		TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022	46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembanguna Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK	22.500.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000,00  Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000,00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembanguna Ruang UKS pada TKIT ALMANAR Kec. Arut	27.300.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK MAKARTI MUKTI SIWI Kec. Arut Selatan TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52 930 000 00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Toilet (Jamban) beserta sanitasinya pada TK	22.500.000,00
Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec.  Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52 930 000 00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Guru dan Kepala Sekolah pada TK	27.300.000,00
Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA  Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Pembangunan Ruang Laboratorium Ilmu Pengetahuan ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52 930 000 00		Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Laboratorium IPA SMP IT AL HUDA Kec.	66.310.000,00
ALam (IPA) pada SMP IT AL HUDA Kec. Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52 930 000 00		Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Ruang Kelas SMP IT AL HUDA	104.352.000,00
TK PGRI Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52.930.000,00			86.620.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada TK DAHLIA Kec. Pangkalan Lada TA. 2022  Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52.930.000,00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada	46.200.000,00
Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec. 27.300.000,00 Pangkalan Banteng TA. 2022  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA 52.930.000,00 Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec 52.930.000,00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pekerjaan Pembangunan Area Bermain beserta APE Luar Ruang pada	46.200.000,00
Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama  Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec  52.930.000,00		Tahap III sebesar 30% Biaya Pembangunan Ruang UKS pada TK AL ISHLAHUL IMAN Kec.	27.300.000,00
Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL MANAR Kec 52 930 000 00		Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Laboratorium Komputer SMP IT AL HUDA	52.930.000,00
			52.930.000,00

ο.	SKPD/Uraian	Nilai
	Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Pemavingan TK Melati Desa Riam Durian KTW Lama, Perencanaan Penataan Halaman TK Melati Desa Amin Jaya, dan Area Bermain Luar Ruang TK	5.050.500,00
	Melati Amin Jaya Desa Amin Jaya SPK No:03.02/25/SPK/DPK.II/DIKBUD/22 Termyn 100% Pembangunan Gedung Sekolah SMP BINA INSAN Tahun Anggaran 2022	191.600.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pembangunan Pagar Madrasah Diniyah Miftahul Ulum Kumai (Candi) SPK No: 01.06/001.III.1/SPK/DPK.III/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	93.750.000,00
	Tahap III Sebesar 100% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Toilet (Jamban) Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang Beserta Sanitasinya pada SMP IT AL-HUDA Kecamatan Kotawaringin Lama Pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana,Prasarana dan Utilitas Seko	38.000.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung KB Rumah Belajarku, Desa pasir panjang Kec. Arsel SPK No: 005/SPK/DPK.III/DIKBUD/2022 Tanggal 29 September 2022	95.600.000,00
	Pengadaan Alat Permainan Edukasi(APE)pada TK.Berunai,TK C.Mulia,TK.Islam Mujahidin,TK Kemala Bhayangkari,TK.Bumitama,TK.S.Bhakti,TK AL Is Iman,TK.Mekar S,TK.Pertiwi,TK IT Al Manar,TK Pertiwi Aruta,TK.PGRI,TK H Bangsa,TK.Anggrek 2,TK Islam D Ulum TA.2	371.580.000,00
	Tahap III Sebesar 100% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Ibadah Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada SMP IT AL-HUDA Kec. Kotawaringin Lama pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	5.362.600,00
	Pengadaan Alat Peraga Edukasi ( APE ) Outdoor TK. Tunas Karya Desa Sungai Bengkuang Kec. Pangkalan Banteng, Kab. Ktw. Barat TA. 2022	47.300.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pembangunan Pagar Madrasah Jaziratulilmi Desa Sei Bakau SPK No: 01.06/001.III.2/SPK/DPK.III/2022 Tanggal 30 Agustus 2022	93.750.000,00
	Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Kelas pada SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama	85.443.600,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Gedung Sekolah SMP Bina Insan Dan Ruang Kelas Baru Madrasah Kyai Gede berdasarkan SPK No:02.02/091/SPK/DPK.IV/Dikbud/2022	5.661.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pengawasan Rehabilitasi Sedang Gedung TK Sadar Bakti Kumai Hilir berdasarkan SPK No 004/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 4 Oktober 2022	4.273.500,00
	Termyn 100% Pengawasan Pembangunan Jamban Beserta Sanitasinya SMP IT ALHUDA Kotawaringin Lama dan Pembangunan pagar Sekolah SMP Pesantren Darul Ulum Panglima Kobar berdasarkan SPK No:02.12/162/SPK/DPK.IV/Dikbud/2022	4.501.050,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Sekolah SMP Bina Insan Dan Ruang Kelas Baru Madrasah Tsanawiyah Kayai Gede Berdasarkan SPK No:02.02/151/SPK/DPK.IV/2022 Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2022	9.712.500,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pengawasan Pemavingan TK Melati Desa Riam Durian KTW Lama, Perencanaan Penataan Halaman TK Melati Desa Amin Jaya, dan Area Bermain Luar Ruang TK Melati Amin Jaya Desa Amin Jaya SPK No: 003/SPK/DPK.II/DIKBUD/22 Tgl 14 Okt 2022	7.603.500,00
	Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang Perpustakaan Dengan Tingkat Kerusakan Minimal Sedang pada SMP IT AL-HUDA Kecamatan Kotawaringin Lama pada Kegiatan Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	46.000.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Rehabilitasi Sedang Gedung TK Sadar Bhakti Kel Kumai Hilir Kec. Kumai SPK No: 007/SPK/DPK.III/DIKBUD/2022 Tanggal 29 September 2022	172.400.000,00
	termyn 100% atas Pekerjaan Perenc Pemasangan keramik Ruang Kelas dan Teras TPA Hidayatullah Desa Bumi Harjo, Perenc. Pemb. Gedung KB Rumah Belajarku Desa Psr Panjang, Perenc.Pemb. Ruang kls Baru TK Afwahul Jannah, Perenc.Pemambahan ruang Kls TK Tuna	6.549.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Konstruksi Penataan halaman dan Area Bermain Luar Tuang TK Melati Desa Amin Jaya Kec. P.Banteng SPK No: 010/PK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 18 Oktober 2022	90.129.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pembangunan TK Afwahul Jannah Kelurahan Kumai Hilir Kec Kumai SPK No: 004/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 29 September 2022	166.400.000,00
	Tahap III sebesar 100% Biaya Pekerjaan Rehabilitasi Ruang UKS pada SMP IT ALHUDA Kec. Kotawaringin Lama TA. 2022	7.467.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Konstruksi Penambahan Ruang Kelas TK Tunas Karya Desa Sumber Agung Kecamatan Pangkalan Lada Berdasarkan Kontrak Nomor:003/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 29 September 2022	172.387.800,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Konstruksi Pemavingan TK Melati Desa Riam Durian Kotawaringin Lama SPK No 009/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 tanggal 18 Oktober 2022	166.400.000,00
	Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Perabot Ruang UKS SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lama	9.550.000,00
ļ	Tahap III sebesar 100% Biaya Pengadaan Mebeler Perpustakaan SMP IT AL HUDA Kotawaringin Lam	64.310.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Pengawasan Lanjutan Pembangunan TPA Hidayatullah Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai Berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:005.02/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 25 November 2022	1.631.700,00
	Termyn 100% atas pekerjaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas TPA Hidayatullah Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) No:012/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 25 Nopember 2022	66.850.000,00
	Termyn 100% atas Pekerjaan Perencanaan Lanjutan Pembangunan Ruang Kelas TPA Hidayatullah Desa Bumi Harjo Kec. Kumai SPK No: 005.01/SPK/DPK.II/DIKBUD/2022 Tanggal 15 Nov 2022	971.250,00
-	Belanja Hibah BOS SD Belanja Hibah BOS SMP	5.292.721.415,00 1.813.408.567,00
- 1	Bolanja i ilban BOO Olvii	38.161.646.553,00

## Lampiran 5.3 Rincian Penerima Bantuan Sosial Tahun 2022

No.	SKPD/Uraian	Nilai					
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1.180.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Rangda Kecamatan Arut Selatan An. Basri Dkk TA. 2022	140.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Desa Merkati Jaya Kecamatan Pangkalan Lada An. THAMRIN Dkk 2022	180.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Sungai Kuning Kecamatan Pangkalan Banteng An. Kustanto Dkk TA. 2022	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Marga Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Yohanis Afenti	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni di Sungai Hijau Kecamatan Pangkalan Banteng An. Puripurno Nugroho Dkk						
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Berabai Makmur Kecamatan Pangkalan Banteng An. Saiti Dkk	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Panahan Kecamatan Arut Utara An. So'ong Dkk	80.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Marsani Dkk						
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Karang Sari Kecamatan Pangkalan Banteng An. Kasid Dkk						
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Sido Mulyo Kecamatan Pangkalan Banteng An. Yudistira Dkk						
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Amin Jaya Kecamatan Pangkalan Banteng An. Caslan Dkk TA.2022	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sagu Sukamulya Kecamatan Kotawaringin Lama An. Mustiadi	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Simpang Berambai Kecamatan Pangkalan Banteng An. Rochimi	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Riam Kecamatan Arut Utara An. Dedi Efendi B.J Dkk	80.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Tanjung Putri Kecamatan Arut Selatan An. Misrani	60.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial uang yang direncanakan Kepada Individu, Uang yang diberikan Kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Desa Sungai Bedaun Kecamatan Kumai An.Suratin Dkk	60.000.000,00					
2	DINAS SOSIAL	845.200.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	2.000.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	30.000.000,00					
	Pembayaran Bantuan Sosial BBM Bagi Masyarkat tidak mampu Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. Oktober 2022 sebanyak 450 orang	135.000.000,00					
	Pembayaran Bantuan Sosial BLT BBM Sektor Nelayan dan Transportasi bagi Masyarakat Tidak Mampu Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. Nopvember 2022 An. Akhmad Fajriyadi, Dkk	134.100.000,00					
	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	30.000.000,00					
	Pembayaran biaya Bantuan Sosial BLT BBM Sektor nelayan dan Trnsportasi (Nelayan, Pekerja Jasa Angkutan, Ojek,Getek dan Angkut) bagi masyarakat tidak mampu Kab.Kobar Ub.Desember 2022 An.AKHMAD FAJRIYADI Dkk	134.100.000,00					
	Pembayaran bantuan sosial Uang kepada penerima Bansos untuk Kelompok Usaha bersama (KUBE) Kab.Kobar TA.2022	380.000.000,00					
	Total Realisasi Bantuan Sosial	2.025.200.000,00					

Lampiran 5.4 Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kapitasi Pada FKTP Tahun 2022

					Pengelua	ran 2022		
No.	Puskesmas (FKTP)	Saldo 2021	Penerimaan 2022	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Total Belanja	Saldo 2022
1	Arut Selatan	440,00	954.790.960,00	668.353.980,00	223.610.810,00	62.825.250,00	954.790.040,00	1.360,00
2	Natai Pelingkau	43,00	540.910.157,00	351.591.630,00	141.809.850,00	47.508.704,00	540.910.184,00	16,00
3	Mendawai	-	604.014.250,00	375.732.000,00	125.727.500,00	6.563.750,00	508.023.250,00	95.991.000,00
4	Madurejo	1.657,00	696.185.243,00	487.330.830,00	170.353.500,00	38.500.000,00	696.184.330,00	2.570,00
5	Kumpai Batu Atas	43,00	280.314.707,00	182.204.586,00	58.258.670,00	36.275.500,00	276.738.756,00	3.575.994,00
6	Kumai	196.621,00	1.413.283.679,00	918.762.196,00	453.453.042,00	41.243.949,00	1.413.459.187,00	21.113,00
7	Teluk Bogam	100,00	176.349.900,00	114.627.500,00	61.722.340,00	-	176.349.840,00	160,00
8	Sungai Rangit	4.472,00	694.569.628,00	486.201.870,00	178.787.100,00	29.546.000,00	694.534.970,00	39.130,00
9	Runtu	3,00	112.532.497,00	67.519.498,00	27.718.200,00	17.294.800,00	112.532.498,00	2,00
10	Pandu Senjaya	14.702,00	369.748.498,00	207.870.000,00	79.609.200,00	21.462.500,00	308.941.700,00	60.821.500,00
11	Pangkalan Lada	17.450,00	272.917.925,00	197.615.628,00	47.731.300,00	20.346.000,00	265.692.928,00	7.242.447,00
12	Semanggang	10.135,00	591.196.715,00	384.284.453,00	171.269.797,00	35.650.000,00	591.204.250,00	2.600,00
13	Karang Mulya	263.685,00	528.235.215,00	342.264.601,00	140.453.433,00	18.199.995,00	500.918.029,00	27.580.871,00
14	Kotawaringin Lama	450,00	363.967.350,00	236.579.070,00	123.034.700,00	3.200.000,00	362.813.770,00	1.154.030,00
15	Riam Durian	19.260,00	108.277.240,00	75.807.550,00	27.418.500,00	1.905.500,00	105.131.550,00	3.164.950,00
16	Ipuh Bangun Jaya	3.280,00	67.503.220,00	40.503.900,00	17.517.950,00	9.458.965,00	67.480.815,00	25.685,00
17	Arut Utara	1.420,00	127.582.580,00	89.308.800,00	30.704.480,00	7.325.000,00	127.338.280,00	245.720,00
18	Sambi	200,00	74.232.300,00	44.539.500,00	29.375.400,00	-	73.914.900,00	317.600,00
	Jumlah	533.961,00	7.976.612.064,00	5.271.097.592,00	2.108.555.772,00	397.305.913,00	7.776.959.277,00	200.186.748,00

Lampiran 5.5 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BLUD Tahun 2022

					Pengelua	aran 2022		
No.	Uraian/Bulan	Saldo 2021	Penerimaan 2022	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Total Belanja	Saldo 2022
1	Saldo Awal	167.590.918.858,64						167.590.918.858,64
2	Januari		9.922.096.235,00	9.226.942.541,00	274.937.852,00	-	9.501.880.393,00	168.011.134.700,64
3	Februari		1.800.611.556,00	10.548.956.147,00	3.097.342.952,00	1.099.699.900,00	14.745.998.999,00	155.065.747.257,64
4	Maret		11.160.727.276,00	7.301.382.060,00	6.725.176.101,00	1.369.000.190,00	15.395.558.351,00	150.830.916.182,64
5	April		16.280.566.612,00	13.489.343.748,00	5.770.247.822,00	693.674.600,00	19.953.266.170,00	147.158.216.624,64
6	Mei		5.976.517.910,00	10.316.860.586,00	3.600.902.638,00	66.685.000,00	13.984.448.224,00	139.150.286.310,64
7	Juni		10.054.527.826,00	7.939.482.960,05	5.275.227.605,00	26.100.000,00	13.240.810.565,05	135.964.003.571,59
8	Juli		3.138.330.521,00	5.866.258.200,00	3.730.543.112,00	76.000.000,00	9.672.801.312,00	129.429.532.780,59
9	Agustus		11.129.238.705,00	3.401.997.708,00	5.134.066.556,00	135.200.000,00	8.671.264.264,00	131.887.507.221,59
10	September		9.848.993.066,00	5.892.495.748,00	5.265.044.658,00	146.855.192,00	11.304.395.598,00	130.432.104.689,59
11	Oktober		13.958.520.064,00	4.776.091.480,00	7.330.127.289,00	2.682.186.821,00	14.788.405.590,00	129.602.219.163,59
12	November		5.928.597.755,00	5.654.783.363,00	7.916.337.309,00	7.501.671.464,00	21.072.792.136,00	114.458.024.782,59
13	Desember		18.037.153.707,00	11.981.166.956,00	9.611.735.212,00	11.606.779.852,00	33.199.682.020,00	99.295.496.469,59
	Jumlah	167.590.918.858,64	117.235.881.233,00	96.395.761.497,05	63.731.689.106,00	25.403.853.019,00	185.531.303.622,05	99.295.496.469,59

Lampiran 5.6 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOS Tahun 2022

			P	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
1	SD NEGERI 1 DAU	31.896,30	20.584.400,00	80.000.000,00	-	ı	20.606.886,00	79.999.923,00	9.487,30
2	SD NEGERI 1 GANDIS	15.847,47	34.200.000,00	-	-	ı	28.712.500,00	5.499.996,00	3.351,47
3	SD NEGERI 1 KERABU	460.000,26	53.540.000,00	-	-		47.395.000,00	6.300.000,00	305.000,26
4	SD NEGERI 1 NANGA MUA	35.575,39	38.664.425,00	-	-	•	31.915.580,00	6.740.000,00	44.420,39
5	SD NEGERI 1 PANAHAN	1,42	49.325.000,00	-	-	•	43.825.000,00	5.500.000,00	1,42
6	SD NEGERI 1 PANDAU	755.283,57	35.244.717,00	-	-	•	35.169.000,00	750.000,00	81.000,57
7	SD NEGERI 1 PANGKUT	83.700,00	94.217.750,00	-	-		62.458.700,00	31.740.000,00	102.750,00
8	SD NEGERI 1 PENYOMBAAN	48.989,46	41.556.400,00	-	-	-	38.605.389,00	3.000.000,00	0,46
9	SD NEGERI 1 RIAM	1.000,48	32.513.248,00	-	-	•	22.169.470,00	10.300.000,00	44.778,48
10	SD NEGERI 1 SAMBI	841.776,72	65.719.000,00	-	-	ı	39.441.776,00	23.500.000,00	3.619.000,72
11	SD NEGERI 1 SUKARAMI	55,67	21.060.000,00	-	-	-	17.559.800,00	3.500.000,00	255,67
12	SD NEGERI 2 PANGKUT	3.300.161,21	126.566.650,00	-	-	-	71.666.700,00	58.087.599,00	112.512,21
13	SD NEGERI 1 BABUAL BABOTI	146.373,98	50.224.200,00	-	-	-	30.819.403,00	19.525.000,00	26.170,98
14	SD NEGERI 1 DAWAK	85.000,20	44.015.000,00	-	-	-	39.100.000,00	5.000.000,00	0,20
15	SD NEGERI 1 IPUH BANGUN JAYA	5.744,00	113.398.000,00	-	-	-	90.063.544,00	23.340.000,00	200,00
16	SD NEGERI 1 KINJIL	323,52	115.199.677,00	-	-	-	72.418.000,00	42.633.000,00	149.000,52
17	SD NEGERI 1 KONDANG	0,52	37.800.000,00	-	-	-	29.300.000,00	8.500.000,00	0,52
18	SD NEGERI 1 KOTAWARINGIN HILIR	39.800,69	119.645.252,00	-	-	-	66.203.585,00	53.027.000,00	454.467,69
19	SD NEGERI 1 KOTAWARINGIN HULU	1.106.749,81	181.680.075,00	1		•	99.383.480,00	83.340.000,00	63.344,81
20	SD NEGERI 1 LALANG	0,23	14.400.000,00	-	-	-	11.900.000,00	2.500.000,00	0,23
21	SD NEGERI 1 PALIH BARU	7.437,90	88.192.563,00	-	-	-	63.807.400,00	24.383.000,00	9.600,90
22	SD NEGERI 1 RIAM DURIAN	1.452.630,67	126.760.752,00	-	-	-	71.043.950,00	57.153.200,00	16.232,67
23	SD NEGERI 1 RUNGUN	2.572,24	125.997.428,00	-	-	-	83.082.472,00	42.917.100,00	428,24
24	SD NEGERI 1 SAGU SUKAMULYA	4.133.647,97	268.573.500,00	-	-	-	203.843.450,00	67.650.000,00	1.213.697,97

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
25	SD NEGERI 1 SAKABULIN	20.599,51	60.769.943,00	-	-	-	46.975.500,00	13.800.000,00	15.042,51
26	SD NEGERI 1 SUKAJAYA	1.402,54	109.167.800,00	-	-	-	48.476.600,00	60.690.500,00	2.102,54
27	SD NEGERI 1 SUKA MAKMUR	38.938,00	101.362.850,00	-	-	-	77.890.000,00	23.385.000,00	126.788,00
28	SD NEGERI 1 SUMBER MUKTI	47,14	18.900.000,00	-	-	-	18.900.000,00	-	47,14
29	SD NEGERI 1 TEMPAYUNG	952,18	69.299.048,00	-	-	-	54.915.500,00	14.300.000,00	84.500,18
30	SD NEGERI 2 BABUAL BABOTI	1.828,60	28.798.172,00	-	-	-	25.816.800,00	2.900.000,00	83.200,60
31	SD NEGERI 2 KOTAWARINGIN HILIR	2.620.675,53	153.906.650,00	-	-	-	113.404.800,00	43.092.400,00	30.125,53
32	SD NEGERI 2 RIAM DURIAN	939,01	172.400.050,00	1	-	-	97.474.000,00	74.900.000,00	26.989,01
33	SD NEGERI 2 SUMBER MUKTI	1.288,87	48.625.582,00	-	-	-	42.723.750,00	5.902.900,00	220,87
34	SD NEGERI 3 KOTAWARINGIN HILIR	770.998,56	75.323.024,00	•	-	-	37.652.300,00	38.424.600,00	17.122,56
35	SD NEGERI 4 KOTAWARINGIN HILIR	375,00	26.999.900,00	•	-	-	23.373.800,00	3.620.800,00	5.675,00
36	SD NEGERI 1 KADIPI ATAS	727.505,47	113.672.590,00	-	-	-	76.641.750,00	37.485.980,00	272.365,47
37	SD NEGERI 1 LADA MANDALA JAYA	653.093,53	109.042.283,00	ı	-	-	79.920.376,00	29.775.000,00	0,53
38	SD NEGERI 1 MAKARTI JAYA	143.490,00	190.483.109,00	-	-	-	147.512.125,00	43.039.499,00	74.975,00
39	SD NEGERI 1 PANDU SENJAYA	515.779,01	243.499.082,00	-	-	-	190.396.908,00	53.480.484,00	137.469,01
40	SD NEGERI 1 PANGKALAN DEWA	591.997,53	134.977.918,00	-	-	-	78.459.512,00	57.099.983,00	10.420,53
41	SD NEGERI 1 PANGKALAN DURIN	706.275,21	188.277.900,00	-	-	-	139.372.976,00	49.610.464,00	735,21
42	SD NEGERI 1 PANGKALAN TIGA	299.458,27	170.702.095,00	-	-	-	107.839.381,00	63.100.000,00	62.172,27
43	SD NEGERI 1 PURBASARI	396.260,00	178.411.236,00	-	-	-	138.820.941,00	39.845.999,00	140.556,00
44	SD NEGERI 1 SUMBER AGUNG	832.607,42	173.767.393,00	-	-	-	118.546.650,00	56.037.000,00	16.350,42
45	SD NEGERI 1 SUNGAI MELAWEN	69.191,57	114.230.809,00	80.000.000,00	-	-	119.609.067,00	74.678.724,00	12.209,57
46	SD NEGERI 1 SUNGAI RANGIT JAYA	155.155,01	115.699.532,00	-	-	-	94.930.902,00	20.900.000,00	23.785,01
47	SD NEGERI 2 LADA MANDALA JAYA	2.379.273,87	151.920.041,00	-	-	-	105.787.029,00	48.426.995,00	85.290,87
48	SD NEGERI 2 PANDU SENJAYA	399.329,76	261.023.269,00	-	-	-	194.041.735,00	67.375.090,00	5.773,76
49	SD NEGERI 2 PANGKALAN DEWA	1.014.678,46	139.385.322,00	-	-	-	103.119.782,00	37.279.999,00	219,46

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
50	SD NEGERI 2 PANGKALAN TIGA	2.085.541,77	127.233.547,00	-	-	-	95.808.889,00	33.510.000,00	199,77
51	SD NEGERI 2 PURBASARI	309.432,00	133.500.039,00	-	-	-	122.499.777,00	11.300.000,00	9.694,00
52	SD NEGERI 2 SUMBER AGUNG	-	174.220.000,00	-	-	-	121.259.262,00	52.899.980,00	60.758,00
53	SD NEGERI 2 SUNGAI MELAWEN	121.883,53	124.078.117,00	-	-	-	78.738.100,00	45.460.000,00	1.900,53
54	SD NEGERI 2 SUNGAI RANGIT JAYA	14.246,82	133.185.754,00	1	1	-	85.349.930,00	47.850.000,00	70,82
55	SD NEGERI 3 PANDU SENJAYA	65.800,92	160.621.486,00	-	-	-	108.059.286,00	52.610.000,00	18.000,92
56	SD NEGERI 1 AMIN JAYA	129.452,00	228.210.889,00	ı	-	-	167.726.341,00	60.614.000,00	-
57	SD NEGERI 1 ARGA MULYA	2.464,69	66.554.632,00	ı	ı	1	54.234.096,00	12.323.000,00	0,69
58	SD NEGERI 1 BERAMBAI MAKMUR	59.235,00	35.324.850,00	ı	ı	ı	27.884.085,00	7.500.000,00	-
59	SD NEGERI 1 KARANG MULYA	824.740,46	172.875.260,00	80.000.000,00	ı	ı	183.839.951,00	69.860.049,00	0,46
60	SD NEGERI 1 KARANG SARI	0,48	71.996.000,00			-	65.956.000,00	6.040.000,00	0,48
61	SD NEGERI 1 KEBUN AGUNG	-	96.300.000,00	-	-	-	85.710.000,00	10.590.000,00	-
62	SD NEGERI 1 MARGA MULYA	1.028,75	131.153.500,00	ı	ı	1	107.854.528,00	23.300.000,00	0,75
63	SD NEGERI 1 MULYA JADI	409.648,54	100.390.352,00	ı	ı	ı	80.856.352,00	19.943.648,00	0,54
64	SD NEGERI 1 NATAI KERBAU	132.386,32	138.462.655,00			-	94.503.041,00	44.092.000,00	0,32
65	SD NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG	100.578,19	97.999.422,00	-	-	-	83.266.000,00	14.834.000,00	0,19
66	SD NEGERI 1 SIDOMULYO	27.170,50	123.959.800,00	-	-	-	99.270.970,00	24.716.000,00	0,50
67	SD NEGERI 1 SIMPANG BERAMBAI	246.294,51	125.515.062,00	ı	1	-	110.261.356,00	15.500.000,00	0,51
68	SD NEGERI 1 SUNGAI BENGKUANG	84,25	120.384.122,00	1	1	•	87.012.206,00	33.372.000,00	0,25
69	SD NEGERI 1 SUNGAI HIJAU	995.890,00	124.895.600,00	1	ı	1	95.046.490,00	30.845.000,00	-
70	SD NEGERI 1 SUNGAI KUNING	44.348,36	88.155.652,00	-	-	-	67.694.000,00	20.506.000,00	0,36
71	SD NEGERI 1 SUNGAI PAKIT	65.887,00	93.858.035,00	-	-	-	72.373.922,00	21.550.000,00	-
72	SD NEGERI 1 SUNGAI PULAU	43,21	65.700.000,00	-	-	-	54.260.043,00	11.440.000,00	0,21
73	SD NEGERI 2 KARANG MULYA	5.307.220,00	331.847.416,00	-	-	-	266.341.436,00	70.813.200,00	-
74	SD NEGERI 2 PANGKALAN BANTENG	244.186,00	72.386.160,00	-	-	-	48.630.930,00	23.995.000,00	4.416,00
75	SD NEGERI 2 SUNGAI HIJAU	314,00	69.940.000,00	-	-	-	46.500.314,00	23.440.000,00	-

			P	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
76	SD NEGERI 1 BATU BELAMAN	4.323.162,44	174.252.741,00	-	-	-	134.526.439,00	43.970.162,00	79.302,44
77	SD NEGERI 1 BUMI HARJO	47.685,95	308.464.160,00	-	-	-	220.407.204,00	88.060.000,00	44.641,95
78	SD NEGERI 1 CANDI	4.221.788,66	214.478.212,00	-	-	-	189.794.862,00	28.877.500,00	27.638,66
79	SD NEGERI 1 KERAYA	-	54.900.000,00	-	-	-	36.860.000,00	18.039.997,00	3,00
80	SD NEGERI 1 KUBU	63,00	215.183.208,00	-	-	-	179.563.150,00	35.610.000,00	10.121,00
81	SD NEGERI 1 KUMAI HILIR	66,31	152.827.084,00	-	-	-	100.175.350,00	52.650.000,00	1.800,31
82	SD NEGERI 1 KUMAI HULU	4.703.627,00	254.496.373,00	-	-	-	218.353.627,00	36.550.000,00	4.296.373,00
83	SD NEGERI 1 PANGKALAN SATU	1.080,00	122.129.850,00	-	-	-	86.780.500,00	35.350.000,00	430,00
84	SD NEGERI 1 SEBUAI	3.574,83	37.796.426,00	-	-	-	36.332.250,00	1.467.600,00	150,83
85	SD NEGERI 1 SEBUAI TIMUR	140.000,00	38.560.000,00	-	-	-	38.500.000,00	-	200.000,00
86	SD NEGERI 1 SUNGAI BAKAU	15.007,58	200.684.993,00	-	-	-	125.891.633,00	74.784.100,00	24.267,58
87	SD NEGERI 1 SUNGAI BEDAUN	1.017,37	140.343.014,00	-	-	-	110.118.000,00	30.173.754,00	52.277,37
88	SD NEGERI 1 SUNGAI CABANG	1.090.000,19	77.938.400,00	-	-	-	78.740.000,00	-	288.400,19
89	SD NEGERI 1 SUNGAI KAPITAN	5.854,00	223.008.523,00	-	-	-	134.034.252,00	88.850.000,00	130.125,00
90	SD NEGERI 1 SUNGAI SEKONYER	53.208,86	41.827.115,00	-	-	-	33.990.083,00	7.889.976,00	264,86
91	SD NEGERI 1 SUNGAI TENDANG	9.789,97	123.139.336,00	-	-	-	102.873.095,00	20.100.000,00	176.030,97
92	SD NEGERI 1 TELUK BOGAM	230.862,41	173.469.138,00	-	-	-	127.160.200,00	38.200.000,00	8.339.800,41
93	SD NEGERI 1 TELUK PULAI	1.966.356,85	55.633.644,00	-	-	-	39.720.000,00	17.250.000,00	630.000,85
94	SD NEGERI 2 BUMI HARJO	150.612,50	143.849.388,00	-	-	-	110.820.500,00	33.010.000,00	169.500,50
95	SD NEGERI 2 CANDI	80.000,71	129.520.000,00	-	-	-	117.366.292,00	12.100.000,00	133.708,71
96	SD NEGERI 2 KUBU	1.470,17	157.498.530,00	-	-	-	107.629.470,00	49.870.000,00	530,17
97	SD NEGERI 2 KUMAI HILIR	9.730,34	170.999.657,00	-	-	-	128.398.172,00	42.600.000,00	11.215,34
98	SD NEGERI 2 KUMAI HULU	73.047,00	260.680.711,00	-	-		183.025.608,00	77.725.000,00	3.150,00
99	SD NEGERI 2 PANGKALAN SATU	519.909,48	72.595.288,00	-	-	-	53.411.100,00	19.684.800,00	19.297,48
100	SD NEGERI 2 SUNGAI CABANG	14,28	53.996.000,00	-	-	-	53.000.000,00	750.000,00	246.014,28
101	SD NEGERI 2 SUNGAI KAPITAN	134.791,17	108.765.209,00	-		-	108.752.060,00	-	147.940,17
102	SD NEGERI 2 SUNGAI TENDANG	1.412,28	114.960.408,00	-	-	-	88.950.000,00	26.000.000,00	11.820,28

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
103	SD NEGERI 3 CANDI	6.137,15	107.093.863,00	-	-	-	79.365.972,00	27.730.000,00	4.028,15
104	SD NEGERI 3 KUMAI HILIR	4.913,00	111.595.087,00	-	-	-	97.836.093,00	13.759.299,00	4.608,00
105	SD NEGERI 3 KUMAI HULU	371.000,48	30.229.000,00	-	-	-	30.600.000,00	-	0,48
106	SD NEGERI 4 KUMAI HILIR	70.091,41	230.270.754,00	-	-	-	177.680.943,00	52.579.000,00	80.902,41
107	SD NEGERI 1 BARU	4.208.227,05	246.892.986,00	-	-	-	188.657.420,00	62.442.000,00	1.793,05
108	SD NEGERI 1 KENAMBUI	61.291,88	67.437.500,00	-	-	-	48.458.791,00	19.040.000,00	0,88
109	SD NEGERI 1 KUMPAI BATU ATAS	15.209,28	129.541.861,00	-	-	-	104.739.065,00	24.818.000,00	5,28
110	SD NEGERI 1 KUMPAI BATU BAWAH	294.608,16	74.929.686,00	-	-	-	55.098.542,00	19.920.000,00	205.752,16
111	SD NEGERI 1 MADUREJO	635.141,68	155.064.859,00	ı	-	1	132.099.954,00	23.599.985,00	61,68
112	SD NEGERI 1 MEDANGSARI	457.575,17	133.945.300,00	-	-	-	92.610.661,00	41.782.575,00	9.639,17
113	SD NEGERI 1 MENDAWAI	253.537,71	157.359.564,00	-	-	-	136.706.772,00	20.640.000,00	266.329,71
114	SD NEGERI 1 MENDAWAI SEBERANG	4.946,81	121.495.054,00	-	-	-	97.838.100,00	23.661.900,00	0,81
115	SD NEGERI 1 NATAI BARU	207.901,81	178.207.323,00	ı	-	1	136.215.117,00	42.199.999,00	108,81
116	SD NEGERI 1 NATAI RAYA	52.719,51	144.066.280,00	ı	-	1	110.766.031,00	33.352.500,00	468,51
117	SD NEGERI 1 PASIR PANJANG	220,51	159.733.724,00	80.000.000,00	-	-	165.475.540,00	74.255.583,00	2.821,51
118	SD NEGERI 1 RAJA	4.299.930,00	122.423.490,00	-	-	-	88.187.789,00	38.530.880,00	4.751,00
119	SD NEGERI 1 RAJA SEBERANG	65.500,94	146.934.500,00	ı	-	1	106.817.292,00	40.099.989,00	82.719,94
120	SD NEGERI 1 RANGDA	776.000,41	37.024.000,00	ı	-	1	24.829.000,00	12.967.000,00	4.000,41
121	SD NEGERI 1 RUNTU	75.000,00	94.622.000,00		-		77.875.000,00	16.770.000,00	52.000,00
122	SD NEGERI 1 SIDOREJO	50.145,19	332.949.855,00	80.000.000,00	-	-	287.492.000,00	125.498.276,00	9.724,19
123	SD NEGERI 1 SULUNG	545.967,52	20.013.000,00	-	-	-	17.347.990,00	3.200.000,00	10.977,52
124	SD NEGERI 1 TANJUNG PUTRI	1.533.944,04	61.466.056,00	-	-	-	43.643.700,00	18.690.000,00	666.300,04
125	SD NEGERI 1 TANJUNG TERANTANG	28,00	50.399.972,00	-	-	-	35.500.000,00	14.900.000,00	-
126	SD NEGERI 1 UMPANG	3.132,69	56.696.868,00	-	-	-	26.201.598,00	30.498.200,00	202,69
127	SD NEGERI 2 BARU	85.731,44	282.124.464,00	-	-	-	234.499.446,00	47.699.996,00	10.753,44
128	SD NEGERI 2 KUMPAI BATU ATAS	4.052.446,41	113.847.554,00	-	-		82.952.446,00	34.500.000,00	447.554,41

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
129	SD NEGERI 2 KUMPAI BATU BAWAH	699.225,90	70.764.315,00	-	-	-	59.537.444,00	11.925.000,00	1.096,90
130	SD NEGERI 2 MADUREJO	16.860,54	135.883.560,00	-	-	-	109.006.224,00	26.880.000,00	14.196,54
131	SD NEGERI 2 MEDANG SARI	87.353,45	21.348.700,00	80.000.000,00	-	-	30.255.858,00	71.176.668,00	3.527,45
132	SD NEGERI 2 MENDAWAI	1.069,85	259.195.113,00	-	-	-	183.924.814,00	75.270.000,00	1.368,85
133	SD NEGERI 2 PASIR PANJANG	40.000,03	110.538.100,00	-	-	-	106.576.710,00	3.999.999,00	1.391,03
134	SD NEGERI 2 RAJA	87.056,19	149.865.674,00	-	-	-	128.202.526,00	21.750.000,00	204,19
135	SD NEGERI 2 RAJA SEBERANG	16.388,58	84.583.612,00	-	-	-	59.280.892,00	25.309.999,00	9.109,58
136	SD NEGERI 2 RUNTU	42.632,45	56.907.500,00	-	-	-	36.138.732,00	20.803.900,00	7.500,45
137	SD NEGERI 2 SIDOREJO	920,45	257.952.266,00	-	-	-	189.663.186,00	68.290.000,00	0,45
138	SD NEGERI 2 SULUNG	6.250,89	43.193.750,00	-	-	-	34.343.700,00	8.850.000,00	6.300,89
139	SD NEGERI 2 TANJUNG TERANTANG	1.817.085,66	17.082.915,00	-	-	-	18.365.112,00	478.000,00	56.888,66
140	SD NEGERI 3 BARU	181.398,50	286.018.602,00	-	-	-	235.623.204,00	50.576.398,00	398,50
141	SD NEGERI 3 MADUREJO	910.027,50	145.789.973,00	-	-	-	114.169.542,00	32.530.000,00	458,50
142	SD NEGERI 3 MENDAWAI	1.442.993,29	97.767.025,00	-	-	-	83.087.182,00	16.106.000,00	16.836,29
143	SD NEGERI 3 PASIR PANJANG	3.648.547,00	420.251.453,00	-	-	-	348.482.701,00	71.768.998,00	3.648.301,00
144	SD NEGERI 3 RAJA	920,00	198.899.080,00	-	-	-	135.130.000,00	63.770.000,00	-
145	SD NEGERI 3 SIDOREJO	621.495,50	164.978.505,00	-	-	-	134.302.872,00	31.279.200,00	17.928,50
146	SD NEGERI 4 BARU	0,09	303.300.000,00	-	-	-	217.516.380,00	85.783.000,00	620,09
147	SD NEGERI 4 MADUREJO	2.486,05	151.440.514,00	-	-	-	89.218.360,00	62.223.994,00	646,05
148	SD NEGERI 4 MENDAWAI	5.883.096,35	112.916.904,00	-	-	-	86.547.467,00	32.093.000,00	159.533,35
149	SD NEGERI 4 PASIR PANJANG	8.841.632,00	141.458.368,00	-	-	-	105.323.587,00	44.965.632,00	10.781,00
150	SD NEGERI 4 RAJA	7.188,00	113.998.979,00	-	-	-	96.547.250,00	17.450.000,00	8.917,00
151	SD NEGERI 4 SIDOREJO	8.288,58	176.394.591,00	-	-	-	135.736.412,00	40.666.000,00	467,58
152	SD NEGERI 5 BARU	44.462,63	141.800.480,00	-	-	-	120.523.318,00	21.321.300,00	324,63
153	SD NEGERI 5 MADUREJO	289.059,48	193.210.941,00	80.000.000,00	-	-	170.345.086,00	103.138.394,00	16.520,48
154	SD NEGERI 5 MENDAWAI	2.266,58	128.672.444,00	-	-	-	91.574.543,00	37.100.000,00	167,58

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
155	SD NEGERI 5 RAJA	3.003.771,00	141.743.269,00	-	-	-	119.601.374,00	20.755.000,00	4.390.666,00
156	SD NEGERI 5 SIDOREJO	332,00	50.399.668,00	-	-	-	30.700.000,00	19.700.000,00	-
157	SD NEGERI 6 BARU	65.668,35	78.465.000,00	-	-	-	48.957.700,00	29.572.000,00	968,35
158	SD NEGERI 6 MADUREJO	137.101,76	173.797.769,00	-	-	-	121.312.120,00	52.587.000,00	35.750,76
159	SD NEGERI 6 MENDAWAI	450.946,13	135.449.054,00	-	-	-	98.317.258,00	37.504.000,00	78.742,13
160	SD NEGERI 6 RAJA	618,00	157.499.870,00	-	-	-	120.216.988,00	37.283.500,00	-
161	SD NEGERI 7 BARU	2.018.170,16	62.781.830,00	-	-	-	49.129.688,00	15.669.999,00	313,16
162	SD NEGERI 7 MADUREJO	17.960,20	235.995.680,00	-	-	-	180.830.621,00	55.183.000,00	19,20
163	SD NEGERI 7 MENDAWAI	142.575,40	131.360.545,00	-	-	-	98.745.000,00	32.699.996,00	58.124,40
164	SD NEGERI 7 RAJA	73.782,39	149.139.167,00	-	-	-	81.162.949,00	68.050.000,00	0,39
165	SD NEGERI 8 MADUREJO	1.394.972,00	273.104.928,00	-	-	-	171.085.926,00	103.144.941,00	269.033,00
166	SD NEGERI 8 MENDAWAI	203.402,81	151.344.219,00	-	-	-	125.553.231,00	25.980.000,00	14.390,81
	Jumlah	104.208.074,38	21.172.128.356,00	560.000.000,00	-	-	16.103.735.640,00	5.699.274.101,00	33.326.689,37

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
1	SMP NEGERI 1 ARUT SELATAN	24.767.029,00	586.345.236,00	-	-	27.500.000,00	429.787.233,00	153.824.764,00	268,00
2	SMP NEGERI 2 ARUT SELATAN	22.565.764,00	840.868.498,00	-	-	235.800.000,00	429.094.787,00	194.700.800,00	3.838.675,00
3	SMP NEGERI 3 ARUT SELATAN	-	154.000.000,00	-	-	9.000.000,00	115.514.605,00	29.485.395,00	-
4	SMP NEGERI 4 ARUT SELATAN	200,00	408.500.512,00	-	-	123.000.000,00	216.155.984,00	67.493.700,00	1.851.028,00
5	SMP NEGERI 5 ARUT SELATAN	-	71.000.000,00	1	-	-	34.260.000,00	36.740.000,00	-
6	SMP NEGERI 6 ARUT SELATAN	5.258.012,00	338.817.112,00	1	ı	57.600.000,00	262.340.413,00	23.250.000,00	884.711,00
7	SMP NEGERI 7 ARUT SELATAN	306.640,00	739.993.360,00	120.000.000,00	-	228.135.000,00	421.424.920,00	202.777.700,00	7.962.380,00
8	SMP NEGERI 8 ARUT SELATAN	-	57.200.000,00	-	-	12.000.000,00	37.200.000,00	8.000.000,00	-
9	SMP NEGERI 9 ARUT SELATAN	6.331.484,00	126.270.656,00	1	-	52.800.000,00	52.231.174,00	24.171.700,00	3.399.266,00
10	SMP NEGERI 10 ARUT SELATAN	-	31.900.000,00	1	1	-	23.088.920,00	8.665.400,00	145.680,00
11	SMP NEGERI 11 ARUT SELATAN	5.778.215,00	401.873.860,00		-	122.760.000,00	165.101.249,00	113.142.992,00	6.647.834,00
12	SMP NEGERI 12 ARUT SELATAN	1.875.000,00	188.425.814,00	120.000.000,00	1	70.140.000,00	127.649.000,00	112.511.800,00	14,00
13	SMP NEGERI SATAP 1 ARUT SELATAN	-	37.300.000,00	ı	ı	13.920.000,00	18.120.000,00	5.040.000,00	220.000,00
14	SMP NEGERI 1 KUMAI	-	457.600.000,00	1	ı	72.000.000,00	269.963.450,00	115.636.550,00	-
15	SMP NEGERI 2 KUMAI	1.673.724,00	579.261.901,00	1	ı	125.000.000,00	295.396.983,00	159.789.000,00	749.642,00
16	SMP NEGERI 3 KUMAI	82.432,00	145.111.948,00	1	ı	18.600.000,00	97.171.692,00	29.355.000,00	67.688,00
17	SMP NEGERI 4 KUMAI	43.114,00	184.756.886,00	ı	-	24.000.000,00	120.610.253,00	40.115.500,00	74.247,00
18	SMP NEGERI 5 KUMAI	-	103.274.250,00	1	1	3.500.000,00	76.722.500,00	23.050.000,00	1.750,00
19	SMP NEGERI 6 KUMAI	-	136.400.000,00	1	1	56.250.000,00	52.002.440,00	28.140.300,00	7.260,00
20	SMP NEGERI SATAP 1 KUMAI	-	66.000.000,00	1	1	30.000.000,00	20.189.400,00	15.810.600,00	-
21	SMP NEGERI SATAP 2 KUMAI	-	37.400.000,00		-	8.640.000,00	28.760.000,00	-	-
22	SMP NEGERI SATAP 3 KUMAI	11.000,00	76.651.100,00	-	-	1.650.000,00	66.068.890,00	8.200.000,00	743.210,00
23	SMP NEGERI SATAP 4 KUMAI	-	23.100.000,00	ı	ı	6.000.000,00	14.300.000,00	2.800.000,00	-
24	SMP NEGERI SATAP 5 KUMAI	-	18.700.000,00	-	-	-	18.700.000,00	-	-
25	SMP NEGERI 1 PANGKALAN LADA	5.664,80	387.194.336,00	-	-	105.700.000,00	223.619.957,80	56.993.000,00	887.043,00
26	SMP NEGERI 2 PANGKALAN LADA	2.895.144,00	192.904.856,00	-	-	84.000.000,00	89.340.130,00	22.451.272,00	8.598,00
27	SMP NEGERI 3 PANGKALAN LADA	45.522,00	115.454.478,00	-	-	39.000.000,00	59.196.462,00	14.600.000,00	2.703.538,00

			Р	enerimaan 2022			Pengeluaran 2022		Soldo 2022
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOS Reguler	BOS Afkin	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
28	SMP NEGERI 4 PANGKALAN LADA	2.344.615,00	187.105.725,00	-	1	24.900.000,00	134.775.029,00	29.760.000,00	15.311,00
29	SMP NEGERI 5 PANGKALAN LADA	768.200,00	130.131.800,00	-	15.400.000,00	64.800.000,00	60.987.450,00	20.192.450,00	320.100,00
30	SMP NEGERI 1 ARUT UTARA	99.000,00	168.201.000,00	-	-	8.400.000,00	149.819.000,00	10.070.000,00	11.000,00
31	SMP NEGERI 2 ARUT UTARA	224.000,00	64.905.400,00	-	-	24.000.000,00	35.124.000,00	6.000.000,00	5.400,00
32	SMP NEGERI SATAP 1 ARUT UTARA	225.030,00	59.419.970,00	-	-	16.200.000,00	35.064.030,00	8.375.000,00	5.970,00
33	SMP NEGERI SATAP 2 ARUT UTARA	3.734.221,00	45.765.779,00	-	-	9.438.000,00	40.004.221,00	-	57.779,00
34	SMP NEGERI 1 PANGKALAN BANTENG	11.172.110,00	429.927.890,00	-	-	81.840.000,00	267.431.260,00	91.802.600,00	26.140,00
35	SMP NEGERI 2 PANGKALAN BANTENG	2.587.770,00	107.840.121,00	-	-	28.800.000,00	71.782.943,00	9.700.000,00	144.948,00
36	SMP NEGERI 3 PANGKALAN BANTENG	81.500,35	219.807.500,00	-	-	50.400.000,00	115.105.300,35	52.796.200,00	1.587.500,00
37	SMP NEGERI 4 PANGKALAN BANTENG	1.320.992,00	77.578.828,00	-	-	28.800.000,00	42.720.932,00	7.170.500,00	208.388,00
38	SMP NEGERI 5 PANGKALAN BANTENG	137.620,00	90.108.380,00	-	-	-	57.858.620,00	32.386.999,00	381,00
39	SMP NEGERI SATAP 1 P. BANTENG	-	88.000.000,00	-	-	15.000.000,00	64.245.000,00	8.755.000,00	-
40	SMP NEGERI 1 KOTAWARINGIN LAMA	-	115.436.225,00	120.000.000,00	-	33.000.000,00	116.896.887,00	85.536.663,00	2.675,00
41	SMP NEGERI 2 KOTAWARINGIN LAMA	973,00	190.300.000,00	-	-	66.600.000,00	101.049.973,00	22.651.000,00	-
42	SMP NEGERI 3 KOTAWARINGIN LAMA	-	60.569.000,00	-	-	-	60.540.000,00	-	29.000,00
43	SMP NEGERI 4 KOTAWARINGIN LAMA	10.500,00	135.289.500,00	-	-	42.000.000,00	83.787.500,00	9.500.000,00	12.500,00
44	SMP NEGERI 5 KOTAWARINGIN LAMA	390.000,00	97.510.000,00	-	-	36.000.000,00	44.600.000,00	17.300.000,00	-
45	SMP NEGERI SATAP 1 KOLAM	-	67.100.000,00	-	-	12.000.000,00	49.100.000,00	6.000.000,00	-
46	SMP 10 BEST AGRO	-	164.841.350,00	-	-		164.841.350,00	-	-
47	SMP ALAM BINA INSAN	-	130.900.000,00	-	-		130.900.000,00	-	-
48	SMP ASTRA AGRO LESTARI	-	170.400.000,00	-	-		170.400.000,00	-	-
49	SMP INDAH MAKMUR	-	192.500.000,00	-	-		192.500.000,00	-	-
50	SMP PESANTREN DARUL ULUM P. KOBAR	-	201.293.000,00	-	-		201.293.000,00	-	-
51	SMP PESONA ASTRA	-	-	120.000.000,00	-		120.000.000,00	-	-
52	SMP KATOLIK SANTA MARIA	-	84.700.000,00	-	-		84.700.000,00	-	-
	Jumlah	94.735.476,15	9.785.936.271,00	480.000.000,00	15.400.000,00	2.069.173.000,00	6.359.536.938,15	1.914.741.885,00	32.619.924,00

Lampiran 5.7 Penerimaan dan Pengeluaran Dana BOP PAUD dan Pendidikan Kesetaraan (Kas Lainnya) Tahun 2022

	Calcalah		ı	Penerimaan 2022					
No.	Sekolah	Saldo 2021	BOP Reguler	BOP Kinerja	Pendapatan Lainnya	Belanja Pegawai	Belanja Barang/Jasa	Belanja Modal	Saldo 2022
1	TKN PEMBINA PANGKALAN BANTENG	1	12.000.000,00	60.000.000,00	-	1	63.993.301,00	8.000.000,00	6.699,00
2	TKN PEMBINA PANGKALAN LADA	-	45.000.000,00	-	-	-	45.000.000,00	-	ı
3	TKN PEMBINA KOTAWARINGIN LAMA	-	30.000.000,00		-		30.000.000,00	-	
4	SKB KOTAWARINGIN BARAT	-	346.818.000,00	-	-	-	346.818.000,00	-	-
	Jumlah	•	433.818.000,00	60.000.000,00	-	-	485.811.301,00	8.000.000,00	6.699,00

## Lampiran 5.8 Daftar Aset Tanah Bermasalah Tahun 2022

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	31.095	932.900.000,00	SHM	Ahli waris H. Panudi	Kantor Sekretariat DPRD	Jl. H M Rafii Kel. Madurejo Kec. Arsel	Tercatat di Sekretariat DPRD, luas tanah 31.095 m2 tahun 1985, nilai perolehan Rp. 932.900.000,00, asal usul Pemda melakukan dengan memberikan ganti rugi ke pemilik tanah asal, bukti-bukti pembayaran lengkap. Ada 1 bukti kepemilikan asli berupa SHM dari pemilik atas tanah yang masih dikuasai oleh ahli waris an.Panudi.
								Ahli waris telah menemukan sertifikat tanah, dan menggugat tanah tersebut kepada Pemda, namum Pemda mempunyai dan bisa menunjukkan bukti pembarayan atas tanah tersebut kepada ahli waris dan ahli waris telah mencabut gugatannya, sudah dilakukan rapat bantuan hukum oleh Pemda tanggal 11 Oktober 2019 dan dalam rapat Pemda menjelaskan bahwa tanah tersebut telah dibeli dengan buktibukti yang sah.  Akan tetapi sampai saat ini bukti kepemilikan asli (SHM) atas tanah
								tersebut tidak diserahkan kepada Pemda oleh salah satu ahli waris, masuk Surat Kuasa Khusus (SKK) Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat dan telah di diberikan Somasi ke 2.
2	Tanah Bangunan Pasar	39.777	62.500.000,00	SHP. 1	Ahli waris H. Taib an. Rudy	Pasar Sayangan Pandu Senjaya	Jl. A. Yani Km 40 Kec. Pangkalan Lada	Tanah tersebut dengan luas 39.777 m2 dengan bukti kepemilikan SHP No. 1 Tahun 2004.
								Dokumen asli kepemilikan berupa SHP dikuasai oleh masyarakat an. Rudy Hartono yang mengklaim bahwa tanah tersebut adalah tanah orang tuanya yang bernama M. Thayib.
								Telah dilakukan upaya penyelesaian pada tahun 2014 oleh Bupati Kotawaringin Barat dengan dibuatnya Surat Kuasa Khusus kepada 3 Orang Pegawai untuk mewakili Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat terkait permasalahan penguasaan tanpa hak atas sebidang tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, namum upaya tersebut tidak membuahkan hasil, SHP asli masih dipegang masyarakat tersebut.
								Dilokasi pasar tersebut oleh ahli waris M. Thayib pernah dipasang plang nama tanah yang menyatakan bahwa tanah tersebut telah diserahkan ke DAD (Dewan Adat Dayak).
								Berdasarkan surat Bupati Kotawaringin Barat No. 130/17/Pem Tanggal 3 Agustus 2017 yang ditujukan kepada Kepala Desa Pandu Sanjaya yang berisi penegasan bahwa Pasar Sayangan merupakan aset Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat sehingga pengamanan, pemeliharaan dan pemanfaatan terhadap tanah tersebut kewenangan

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								penuh Pemerintah Kab. Kotawaringin Barat, bagi pihak yang mengklaim dipersilahkan menempuh jalur hukum.
								Penggugat melalui Kuasa Hukum mengajukan tuntutan hukum Perdata dengan Putusan Sela Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor: 20/Pdt.G/2021/PN. Pbu tanggal 07 Oktober 2021 dengan amar putusan Mengadili:
								Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II;
								Menyatakan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tidak berwenang mengadili perkara ini;
								Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.385.000,-
								Berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 472.12/024/PS-PL/XII/2021 Tanggal 10 Desember 2021 ahli waris an. Rudy Hartono meninggal dunia pada tanggal 3 Desember 2021, selanjutnya Ahli Waris selaku Penggugat mengajukan perkara ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) di Palangka Raya dengan Perkara 4/G/2022/PTUN.PLK dengan Putusan dalam Eksepsi : Menyatakan Eksepsi tergugat dan Tergugat Intervensi II tidak diterima untuk seluruhnya; Dalam Pokok Sengketa:  1) Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; 2) Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 492.000,-pada saat beberapa kali sidang oleh hakim dan tergugat intervensi sempat ditanyakan kepada ahli waris lainnya tentang keberadaan sertipikat asli tersebut namun ahli waris menyatakan sejak Rudy Hartono meninggal seluruh ahli waris tidak mengetahui keberadaan SHP asli tersebut.  Ahli Waris selaku Penggugat mengajukan Banding perkara ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT.TUN) di Jakarta dengan Nomor putusan banding: 160/B/2022/PT.TUN.JKT dengan Amar
								Putusan Banding:  Menerima permohonan banding dari Pembanding;
								Menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor 4/G/2022/PTUN.PLK, tanggal 27 Mei 2022 yang dimohonkan banding;
								Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat Pengadilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp250.000.00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
								Sebagai tindaklanjut rapat bantuan hukum terkait perkara pasar sayangan di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 13 Oktober 2022, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengadakan rapat tindaklanjut pasca putusan banding dari PT.TUN Jakarta pada hari Kamis tanggal 3 November 2022 di Aula

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								Kecamatan Pangkalan Lada dalam rapat tersebut kembali ditanyakan keberadaan SHP asli tanah pasar sayangan dan seluruh Ahli Waris menyatakan tidak mengetahui keberadaan dokumen asli kepemilikan tanah Pasar Sayangan Desa Pandu Senjaya berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 1 Tahun 2004 an. Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas: 39.777M², ketidaktahuan ahli waris mengenai keberadaan SHP Nomor 1 Tahun 2004 dituangkan dalam Surat Pernyataan.
								Saat ini terhadap sertipikat yang hilang tersebut telah telah dilakukan pelaporan kehilangan sertipikat yang selanjutnya akan diproses penggantian sertipikat baru dan saat ini masih dalam proses.
3	Tanah Bangunan Puskesmas/ Posyandu	2.400	2.400.000.000,00	SKT	Masaidin	Puskesmas Arut Selatan	Jl. P. Antasari Kel. Raja Kec. Arsel	Untuk tanah Pemerintah Daerah dilokasi sekitar Puskesmas Arut Selatan, bahwa Pemerintah Daerah dalam proses peradilan mengalami kekalahan dengan Putusan Peninjuan Kembali kepada Kuasa Termohonan Peninjauan Kembali No. 14/Pdt.G/2010/PN.P.Bun.Jo No. 07/Pdt/2011/PT.PR,Jo No. 2679 K/Pdt/2011, Jo. No. 594/PK/Pdt/2013 tanggl 11 Februari 2016.
								Saat ini tanah tersebut rencana akan diklaim oleh ahli waris Bpk. Massaidin dan tanah akan diganti di lokasi lain, sedangkan pembangunan Puskesmas dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat.
								Telah dilakukan Rapat koordinasi bantuan hukum tanggal 30 September 2019 dengan kesepakatan : berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 11 dan dibuat sebagai alas hak pembuatan SPPFBT oleh Pengguna Barang dan Lurah bersedia menandatangani SPPFBT tersebut, namun sampai saat ini SPPFBT belum ditandatangani oleh Pengguna Barang.
4	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	53.888	666.666.667,00	SHP. 155	A. Julimson	SMPN 11 Pangkalan Bun, TK Pembina, Kantor BPBD	Jl. Cilik Riwut II Kel. Madurejo Kec. Arsel	Tanah tersebut sebagian telah kalah di pengadilan Mahkamah Agung dengan putusan No. 2899K/Pdt/2014 dan telah di eksekusi oleh pihak pemenang Tanggal 13 Juni 2017 sesuai BA Ekseskusi Real No: 1/B.Eks/Pdt.g/2013/PN Pbun dengan ukuran seluas 3.000 m2 (30 m x 100 m).
								Sebagian tanah tersebut dengan ukuran 30 x 100 m, yang telah kalah di peradilan MA, namun ditemukan bukti baru (Novum) berupa dokumen asli berupa SHM dan SKT yang telah diserahkan ke Bagian Hukum Setda Kab. Ktw. Barat bersama Surat No. 011/128/IV.I/BPKAD/2017 Tanggal 29 Mei 2017 Perihal. Penyampaian Novum/Bukti Baru Peninjauan Kembali, direncanakan menempuh jalur hukum Peninjauan Kembali (PK), namun sampai saat ini belum ada tindaklanjut dari Bagian Hukum Setda Kab. Ktw. Barat.
								Saat ini adanya klaim tanah dari masyarakat an. Ny. Marianen Sirait bulan Februari 2017 yang memiliki bukti kepemilikan tanah berupa Surat

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								Keterangan Tanah (SKT) Nomor: 50/DMR/1979 Tanggal 10 Juli 1979, dimana klaim tersebut juga pernah disampaikan tanggal 2 Pebruari 2013 dan telah ditindakanjuti oleh Pemda Kab. Kobar dengan mngirimkan surat No. 590/41/Pem-IV/2013 tanggal 30 April 2013 perihal tanggapan terhadap permasalahan tanah di jalan Tembalu Kel. Madurejo Kecamatan Arut Selatan Pangkalan Bun dan pokok surat tersebut agar yang bersangkutan menyelesaikan melalui jalur hukum/pengadilan. Adapun lokasi tanah yang di klaim di sebelah SMPN 11 Pangkalan Bun. Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut Penyelesaianya dimana Novum baru yang telah disampaikan belum ditindaklanjuti dengan menyampaikan PK ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, sedangkan rencana pengembalian batas tanah sedang berproses di BPN Pangkalan Bun.  Telah dilakukan Pengembalian batas tanah oleh Tim dengan Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat tanggal 6 September 2018
								tanpa bidang tanah yang telah dimenangkan oleh masyarakat.
					B. Marianen Sirait	SMPN 11 Pangkalan Bun, TK Pembina, Kantor BPBD	Jl. Ahmad Wongso Kel. Madurejo Kec. Arsel	Pada Tahun 2017, Ny. Marianen Sirait / Panjaitan menyampaikan surat tanggal 27 Januari 2017 Perihal : Permohonan Penyelesaian sebidang tanah secara damai, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa Madurejo Nomor : 50/DRM/1979 tanggal 10 Juli 1979 yang diketahui dan dibenarkan oleh Camat Arut Selatan dengan No.54/13/1979 dengan lokasi tanah Jalan Tembalu Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan, Luas 2000 M² (dua ribu meter persegi) dengan batas -batas sbb:
								o Sebelah Utara dengan perbatasan : Jalan setapak
								o Sebelah Selatan dengan perbatasan : Tanah Rawa
								o Sebelah Timur dengan perbatasan : Tanah kosong
								o Sebelah Barat dengan perbatasan : Achmad S.
								Terdapat Surat Bupati Kotawaringin Barat Nomor : 032/473.a/IV.II/BPKAD/2018 Tanggal 18 April 2018 Perihal : Tanggapan terhadap permasalahan Tanah Berlokasi di Samping SMPN 11 Arut Selatan yang isinya yaitu :
								Menanggapi surat dari Ny. Marianen Sirait tanggal 9 November 2017, mengenai permohonan persetujuan terhadap tenah yang terletak di kawasan SMPN 11 Arut Selatan dengan SKT Nomor : 50/DMR/ 1979 tanggal 10 Juli 1979 An. Sirait, maka dengan ini disampaikan sebagai berikut :
								1). Berdasarkan data yang Saudara sampaikan, bahwa lokasi lahan/tanah yang dipermasalahkan dengan ukuran 20x100M dengan luas 2.000 M² yang terletak di Samping SMPN 11 Arut Selatan Pangkalan Bun, lokasi tersebut adalah milik Pemerinteh Kabupaten

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								Kotawaringin Barat dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 155 Tahun 1999 dengan luas 53.888 M²
								2) Untuk penyelesaian permasalahan tersebut diserankan kepada Saudara melalui supaya menempuh jalur hukum/pengadilan untuk mendapatkan keputusan hukum yang tetap atas tanah tersebut.
								Selanjutnya Ny. Marianen Sirait mengajukan Perkara Perdata ke Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, dengan alas hak Surat Keterangan Nomor: 50/DMR/ 1979 tanggal 10 Juli 1979 An. Sirait. Dalam Surat Keterangan tersebut diberikan dengan ketentuan dan syarat-syarat:
								Bahwa atas tanah tersebut tidak termasuk hak-hak orang lain dan bila mana terdapat hak orang lain maka Surat Keterangan ini menjadi batal;
								Bahwa atas tanah tersebut harus benar-benar dipelihara dan digarap dengan sebaik-baiknya dan apabila sipemilik menelantarkannya maka surat keterangan ini akan batal secara hukum;
								Bahwa dipemilik tersebut harus menaati ketentuan perundangan Pemerintah yang berlaku mengenai hukum pertanahan.
								Mengingat di atas tersebut berasal dari Sugiyo Chandra (1), Sugiyo Chandra (2) dan Yanto merupakan satu hamparan yang diperoleh dari Nyoto dengan SHM Nomor 421 Tahun 1988 Surat Ukur Tanggal 10 Juli 1986 Nomor 931/86 Luas 26.058 M² dengan alas Hak SK. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah Tanggal 10
								Desember 1975 Nomor: DA.347/D.I.1/XII-1975, dan diperoleh melalui pembelian maka Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat menguasai Tanah dengan Sertipikat Hak Pakai Nomor 155 Tahun 1999 dengan luas 53.888 M² sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
5	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	7.115	1.423.000.000,00	SHP. 24	Marnali bin Usir	Kantor Kelurahan Madurejo	JL. Iskandar No. 65 Kelurahan Madurejo Kec. Arsel	Saat ini tanah tersebut diklaim secara perdata oleh Kelurga Roheman mantan Lurah Madurejo dan berdasarkan informasi dari Bagian Hukum sidang pengadilan tersebut telah dimenangkan oleh penggugat, namun putusan belum diterima. Hal ini merupakan kerugian bagi Pemda Kab. Kobar yang telah gagal membuktikan kepemilikan atas tanah yang telah digunakan bertahun-tahun, hasil kasasi di menangkan Pemda
								Saat ini penggungat menempuh jalur PK (peninjauan kembali)
6	Tanah Pariwisata	2.500	1.092.250,00	Akta Jual Beli	H. Saleh	Lokasi Pariwisata Kubu	Desa Kubu Kec. Kumai	Perolehan berasal dari hibah Pemerintah Prov Kalimantan Tengah, saat ini tanah dikuasai oleh H. Saleh.
7	Tanah kosong yang sudah diperuntukkan	243.080	425.390.000,00	Gambar Ukur	Wayan	Makam KBA	Desa Kumpai Batu Atas Kec. Arsel	Tanah rencana untuk lokasi makam Kumpai Batu Atas masih berupa lahan kosong

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								Menurut informasi dari masyarakat, lahan tersebut dimanfaatkan sebagai lahan kebun Jeruk oleh masyarakat atas nama Wayan
								Akan dilakukan pengecekan lapangan
8	Tanah kosong yang tidak diusahakan	462	60.000.000,00	SHP No. 27	Purnawan Andarta	Tanah Kosong / Kafe depan Gereja Imanuel	Jl. Hasanudin Kel. Sidorejo Kec. Arsel	Bukti SHP Nomor 27 tahun 1985 luas 462 M² telah dilakukan pengembalian batas tanah bersama tim dari Pemda dan BPN, hasil pengembalian batas terdapat sebagian bangunan ruko masuk ke tanah Pemda Telah dilakukan rapat koordinasi
9	Tanah Bangunan Pendidikan dan Latihan (Sekolah)	8.800	88.000.000,00	-	Gusti Umar Ali	SDN 3 Pasir Panjang	Jl. Bhayangkara Desa Pasir Panjang Kec. Arsel	Tanah merupakan fasilitas sosial BTN Griya Dian Ekawati Permai (perumahan pinang merah), dicatat pada tahun 2005 seluas 8.800 m2, dan berdiri bangunan SDN 3 Pasir Panjang.
								Saat ini tanah tersebut diklaim oleh pengembang perumahan pinang merah dan dijual, serta bangunan rumah dinas diatasnya telah dibongkar.
10	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	4.918	23.323.368,00	SHP. 5	Imbar, Parji, Agus dkk	BPP Karangmulya	Jl. A. Yani Km. 63 Ds. Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng	Tanah tercatat di Dinas TPHP, Bukti kepemilikan berupa SHP Nomor 05 tahun 2015 yang digunakan oleh BPP Karang Mulya dengan ukuran 28 x 35 m, sebelahnya ada bangunan pasar, barak masyarakat dan lainlain.
11	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	23.893	312.045.000,00	Sertifikat asal/ SKT	Iskandar/saleh	Tanah rencana perumahan Anggota DPRD	Jl. Raya Pasir Panjang Desa Batu Belaman Kumai	Sebelum proses pembelian tanah rencana rujab DPR telah dilakukan pengukuran lokasi lahan oleh pihak terkait saat itu, dibuktikan dengan gambar kasar atas lokasi tanah yang dibeli.
								Kemudian ada program PTSL, masyarakat (pihak pemilik awal tanah rencana rujab DPR) mensertifikatkan tanah yang tidak dibebaskan Pemda, namun penunjukkan lokasinya berada didalam area tanah yang telah dijual kepada Pemda dengan ukuran sama dengan tanah miliknya.
								Alas hak Pemda SKT tahun 1994 sedangkan alas hak masyarakat untuk PTSL adalah SKT tahun 2017.
								Kesimpulan sementara masyarakat salah menunjukkan tanah dalam proses pensertifkan (PTSL) atas tanah miliknya. Atas kasus tersebut telah dilakukan rapat bantuan hukum di tahun 2019, untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut Pemda telah menyampaikan surat ke BPN Kab. Kotawaringin Barat No. 032/272/IV.II/ BPKAD/2019 tanggal 17 Desember 2019 perihal mohon penyelesaian tanah Pemkab yang disertifikatkan masyarakat.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
12	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	839	167.800.000,00	SHP No. 31	Kerabat Kerajaan Kutaringin	Ex. Kantor PDAM	Jl. Diponegoro Kel. Raja Kec. Arsel	Saat ini tanah tersebut diklaim oleh ahli waris Bpk. J.C. Rangkap mantan Bupati Kotawaringin Barat dengan dokumen dan di lokasi tanah tersebut saat ini telah berdiri bangunan permanen dan semi permanen dan berdasarkan informasi diduduki oleh masyarakat, untuk masalah tersebut belum dilakukan inventarisasi yang memadai.
13	Tanah Kosong Lainnya	120.202	734.320.400,00	SHM dan SKT	Ahli Waris Rukui, Lunding dkk	Peti Kemas	Jl. Raya Pasir Panjang Desa Desa Pasir Panjang Arsel	Tanah terdiri dari 7 dokumen tanah (1 SKT dan 6 SHM) Terdapat 2 dokumen yang masih diakui oleh masyarakat
14	Tanah Bangunan Olah Raga	30.000	6.000.000,00	-	Kasiyanto dan A. Sugeng	Lapangan Desa Marga Mulya	Desa Marga Mulya Pangkalan Banteng	Bukti kepemilikkan SKT No. 593.21/83/PB/IX/2005 tanggal 22 September 2005, telah digugat oleh masayarakat yang memiliki SHM.
							J	Kemudian Kecamatan memberikan ganti rugi kembali atas klaim tersebut untuk 2 SHM dengan luas 4Ha sebesar Rp. 40.000.000
								Penelusuran terbaru 1 SHM di gadaikan ke Bank an. Kasiyanto, sedangkan an. Sugeng masih dalam penelusuran
								Hasil penelusuran bukti kepemilikan masyarakat memiliki SHM PTSL tahun 2017
15	Tanah Kosong Lainnya	112.700	56.400.000,00	SHP. 2	Sukirman	SMKN 1 Pangkalan Lada dan tanah kas desa	Dusun Sumber Agung, Kec. Pangkalan Lada	Tanah sebagian ± 5.05 Ha digunakan oleh SMKN 1 Pangkalan Lada Sisa ± 6 Ha masih ditelusuri batas-batasnya
16	Tanah Kosong Lainnya	49.728	12.500.000,00	SHP.46	Harto dkk	Tanah eks. kalimati baru	Desa Pasir Panjang Kec. Arsel	Tanah merupakan lokasi eks. Kalimati baru (lokasisasi) Setelah penutupan lokalisasi area masih terdapat bangunan/rumah yang dikuasai warga setempat
17	Tanah Kosong Lainnya	2.439	292.700.000	SHP. 39	H. Hasan, dkk	Mebel Firdaus	Jl. Kawitan Kel. Sidorejo Kec. Arsel	Telah dilakukan cek lokasi tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat yang dilaksanakan pada tanggal 11 Januari 2018, dengan hasil pengecekan sebagai berikut :
								- Tanah tersebut tercatat pada KIB Sekretariat Daerah Kab. Kotawaringin Barat.
								- Pada lokasi tersebut terdapat rumah semi permanen dan rumah permanen milik 4 (empat) Orang warga/masyarakat dengan bukti kepemilikan berupa 1 (satu) buah Sertifikat Hak Milik (SHM) yang

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								diterbitkan oleh BPN Kab. Ktw. Barat dan 3 (tiga) buah SKT yang diterbitkan oleh Kelurahan Sidorejo.
								- Terhadap masyarakat yang menguasai tanah tersebut, dulu pernah
								dilakukan rapat musyawarah namun tidak mendapatkan kesepakatan Masyarakat yang menguasai tanah tersebut menginginkan Pemerintah
								Daerah melepaskan hak pakai tanah tersebut kepada mereka. Sesuai
								surat dari Supaat Hdi Sugiarto (mantan Lurah Sidorejo) Nomor: Lepas tanggal 18 April 2007 perihal Mohon Pelepasan Hak Pakai Sertipikat No.
								39 dan surat dari H. Hasan Afandi Nomor: Lepas tanggal 22 April 2008
								perihl Mohon Fasilitasi atas Penyelesaian Pelepasan Hak Pakai Nomor 39 Milik Pemda kepada kami.
								Untuk pengamanan aset dan pernyataan Pemda terhadap kepemilikan
								tanah Pemda Jl. Kawitan, maka akan dilakukan pengembalian batas
								terhadap SHP. No. 39 oleh BPN Kotawaringin Barat sesuai surat Sekretaris Derah Kab. Ktw. Barat No. 032/17.a/IV.III/BPKAD/2018
								tanggal 31 Januari 2018 perihal Permohonan Pengembalian Batas
								Tanah Milik Pemkab. Kotawaringin Barat SHP. No. 39 dan SHP No. 155 dan akan dilakukan pemasangan patok dan plang nama terhadap tanah
								tersebut. Namun hasil rapat pada tanggal 2 Juli 2019 yang dipimpin oleh
								Asisten I disepakati pengembalian batas dan pemasangan patok dapat dilaksanakan dengan dilakukan penelusuran dokumen dan telah
								dilakukan pembayaran ke Kas Negara (PNBP) dan akan dilaksanakan
								Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut penyelesaianya dimana masyarakat masih menduduki tanah pemda
								tersebut diharapkan setelah pengembalian batas dan pemasangan
								patok dan plang nama ada tindakan tegas dari pemerintah daerah terhadap warga yang menguasai tanah tersebut.
								Tanah tersebut dengan luas 540.325 m2 dengan dokumen kepemilikan
18	Hutan Untuk Penggunaan	540.325	589.175.070,00	Sertifikat Asal /	H. Jamaluddin /	Hutan Kota	Desa Purbasari Kec. Pangkalan	berupa: - Sertipikat Hak Pakai sebanyak 1 buah dengan luas 36.625 m2
	Khusus Lainnya		,,,,,	SKT	PT. Dona Doni		Lada	- SKT sebanyak 11 buah
								- SHM sebanyak 56 buah Tanah untuk Lokasi Hutan Kota di Desa Purbasari dibebaskan
								Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dengan luas 540.325 m2 dengan rincian sebagai berikut:
								- Tahun 2002 untuk Kebun PKK seluas 36.625 m2.
								- Tahun 2005 seluas 14.200 m2
								- Tahun 2006 seluas 142.500 m2
								- Tahun 2007 seluas 337.100 m2
								- Tahun 2008 seluas 9.900 m2

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
		, ,						Tanah untuk Hutan Kota sampai saat ini perlu dilakukan pengamanan fisik maupun peningkatan bentuk dokumen kepemilikan, karena lokasi tersebut dikuasai oleh masyarakat an. H. Jamaludin dan telah ditanami sawit sampai saat ini.
								Telah dilakukan upaya penyelesaian sejak tahun 2009 s.d 2010 namun belum menemukan jalan keluar, karena disebabkan H. Jamaludin tidak pernah hadir ketika Pemerintah Daerah mengundang untuk hadir dalam rapat sehingga permasahan tersebut tidak selesai dan berlarut-larut.
								Diperlukan tindakan lanjut dari Pemerintah Daerah untuk penyelesaian tanah tersebut.
19	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	9.739	1.460.900.000,00	SHP. 129	Jumadin dkk	Kantor KB	Jl. Iskandar No. 5 Madurejo Arut Selatan	Hasil pengembalian batas tanah tahun 2017ditemukan masalah yang serupa dengan tanah di Bundaran Pancasila yaitu:
								Terdapat 4 (empat) buah rumah permanen dan semi permanen milik masyarakat/ warga yang dibangun diatas tanah Pemerintah Daerah.  Untuk bangunan yang semi permanen milik masyarakat tidak memiliki
								dokumen, tetapi bangunan permanen memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT) dan SHM.
								Pada Kegiatan Pengembalian Batas Tanah tahun 2017 di Lokasi Belakang DP3A&PB, dilakukan pemasangan patok tanah sebanyak 2 (dua) buah dan plang nama tanah sebanyak 1 (satu) buah.
								Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut penyelesaianya dimana masyarakat masih menduduki tanah pemda yang telah dipasang patok dan plang nama tersebut.
20	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	50.000	160.000.000,00	SHP No. 133	Gitonoyo, dkk	Kantor Bappeda, SDN 8 Madurejo	Jl. H. M. Rafi'l Kel Madurejo Kec. Arsel	Untuk lokasi di belakang Bappeda terdapat rumah permanen dan semi permanen milik masyarakat/ warga yang dibangun diatas tanah Pemerintah Daerah bahkan saat ini ada yang sedang membangun, Namun dari informasi dilapangan, sebagian masyarakat yang menduduki tanah Pemda memiliki surat kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik yang diterbitkan oleh BPN Kotawaringin Barat. Berdasarkan hasil koordinasi dengan BPN Kotawaringin Barat didapati sertipikat tersebut salah penguasaan oleh masyarakat dimana seharusnya tanah masyarakat berlokasi dibelakang tanah Pemerintah Daerah, hal ini dikarenakan kekeliruan pemilik asal tanah menunjukan batas tanah.
								Tanah di belakang kantor Bappeda, pada bagian ujung terdapat tembok permanen yang dibangun warga, dimana tanah tersebut masuk wilayah Tanah milik Pemerintah Daerah  Untuk lokasi di samping Pangkalan Bun Park, bangunan yang semi
								permanen milik masyarakat, kebanyakan tidak memiliki dokumen dan

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								menyadari bahwa tanah tersebut milik Pemda, tetapi sebagian ada yang memiliki dokumen berupa Surat Keterangan Tanah (SKT).
								Pada tahun 2017 dilakukan Pengembalian Batas Tanah di Lokasi Bundaran Pancasila dan sekitarnya telah dilakukan pemasangan patok tanah sebanyak 18 (delapan belas) buah dan plang nama tanah sebanyak 7 (tujuh) buah, hal ini dilakukan untuk mengamankan aset tanah dan mensosialisasikan bahwa tanah tersebut milik Pemda Kab. Ktw. Barat.
								Tanah disamping Universitas Antakusuma, yang dahulu pernah digugat secara perdata oleh masyarakat an. Suhardjono pensiunan PNS AURI dan melalui beberapa kali sidang di Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, kasus tersebut dimenangkan oleh Pemda Kab. Ktw. Barat berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun No. 01/Pdt.G/PN P. Bun tanggal 9 Juni 2014. Pada tahun 2019 diadakan beberapa kali pertemuan/rapat dengan masyarakat dan disepakati bulan Januari 2020 masyarakat akan membongkar/mengosongkan lokasi tersebut, saat ini lokasi tersebut telah dikosongkan oleh masyarakat, namun pada saat akan dikosongkan dan dibersihkan menggunakan alat berat ditemukan dokumen baru yaitu pengembalian batas Universitas Antakusuma dan lokasi bundaran Pancasila pada tahun 2004, terjadi perbedaan batas tanah milik Pemda dengan masyarkaat di Jl. HM. Rafi'i dengan pengembalian batas tahun 2017. Perbedaan tersebut adalah tahun 2004 RM. Kita Jua masuk tanah Pemda sedangkan pengembalian batas tahun 2017 tidak masuk. Saat ini sedang ditelusuri dokumennya. Saat ini RM Kita Jua telah dikuasai Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat dan telah dilakukan mekanisme pemanfaatan dalam bentuk sewa
								Sampai saat ini terhadap permasalahan tersebut belum ada tindak lanjut penyelesaiannya dimana masyarakat masih menduduki tanah pemda yang telah dipasang patok dan plang nama tersebut.
21	Tanah Kosong Lainnya	20.000	2.060.000.000,00	SHP. 43	Moko, Syahrani, Gitonoyo dkk	Pembibitan Karet	Jl. Lijo Kel. Madurejo Kec. Arsel	Telah ditemukan bukti kepemilikan tanah yaitu dokumen asli berupa SHP, dimana SHP tersebut tidak diketahui keberadannya dan tanah tersebut belum tercatat sebagai aset Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, tanah tersebut berlokasi dibelakang Taman Makam Pahlawan Kelurahan Madurejo Pangkalan Bun.
								Tanah tersebut adalah Balai Pembibitn pada Dinas Perkebunan, hal ini berdasarkan Surat Perjanjian Pemberian Pekerjan dari Kepala Dinas Perkebunan Rakyat Kabupaten Kotawaringin Barat No. 018/BD.III/DPKT-KB/1974 tanggal 7 Januari 1975 kepada Lidjo Markidi.  Tanah tersebut telah digugat oleh ahli waris Lidjo Markidi dengan Surat No: Lepas, Tanggal 10 Oktober 2001, dan telah diupayakan penyelesaiannya dengan melibatkan BPN Kotawaringin Barat, namun permasalahan tersebut belum dapat diselesaikan sampai saat ini.

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
								Berdasarkan Surat Bupati Kotawaringin Barat kepada Kepala Dinas Perkerbunan No. 509/85/Pem tanggal 1 Maret 2003 Perihal Penyelesaian Masalah Tanah Dinas Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat di Jalan Palagan Sambi Pangkalan Bun yang intinya bahwa untuk penyelesaian dilakukan melalui jalur hukum (pengadilan).
								Telah dilakukan konsultasi ke Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 15 Februari 2018 terkait ditemukannya SHP Asli tanah tersebut, dan hasil konsultasi tersebut disarankan oleh Kepala Bidang Aset Badan Keungan Daerah Provinsi Kalteng untuk mencatat aset tersebut karena telah diserahkan kewenangannya dari Provinsi ke Kabupaten.
								Saat ini diperlukan dokumen P3D (penyerahan aset dari Provinsi kepada Kabupaten) berupa Berita Acara No. 127/1303/PEM tanggal 2 September 1996 sebagai dasar hukum pencatatan aset sebagai langkah antisipasi gugatan dari berbagai pihak.
								Telah dilakukannya RDP dengan DPRD sebanyak 2 Kali pada tanggal 26 April 2021 dan RDP Terakhir tanggal 24 Oktober 2022 yang dihadiri Pj. Bupati Kotawaringin Barat dimana PJ. Bupati memutuskan untuk melepaskan tanah tersebut ke Masyarakat.
								Tindak lanjut RDP dilakukannya Rapat Koordinasi tanggal 28 Oktober 2022 dengan kesimpulan Rapat bahwa Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengajukan permohoan Pendapat Hukum (LO) ke Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat serta berkoorinasi ke BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah dan BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah, Setelah ketiganya mendapatkan jawaban barulah hasilnya dilaporkan ke Pj. Bupati.
								Saat ini yang telah memberikan jawaban adalah BPKP Perwakilan Kalimantan Tengah yang isinya pelepasan tanah melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap/Inkracht, dan jawaban dari BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah hasilnya bahwa pelepasan tanah milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat mengacu pada regulasi yang telah diatur yaitu Peraturan Daerah Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah sedangkan jawaban LO dari Kejaksaan saat ini sedang berproses di Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangka Raya.
22	Tanah Bangunan Tempat Kerja Lainnya	97.092	7.961.544.000,00	SK. Gubernur DA.07/D.I.5/IV- 1974	Ahli waris Brata Ruswanda	Tanah Pertanian	Jl. Padat Karya Kel. Baru	Sesuai putusan Mahkamah Agung No. 3120 K/Pdt/2014 tanggal 28 Agustus 2015 dimana dalam putusan memenangkan Pemerintah Daerah, hal ini berarti tanah tersebut milik Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, sampai saat ini putusan tersebut belum diterima oleh ahli waris dimana ahli waris mempidanakan 4 ASN, dan perkara pidana tersebut diputus oleh MA dengan 4 ASN dibebaskan murni.  Sampai saat ini Dokumen SK Gubernur yang asli belum ditemukan, hal
								ini disebabkan dokumen tersebut hilang karena adanya pencurian pada

NO	NAMA ASET	LUAS (m2)	NILAI PEROLEHAN	HAK PEROLEHAN	PARA PIHAK	PENGGUNAAN	LOKASI TANAH	KRONOLOGIS
		(112)	LIGELIAN	TENGLEMAN			Tanan	tanggal 17 Februari 1996, dibuktikan dengan Surat Tanda Penerimaan Laporan No.POL:STPL/73/II/1996/PAMAPTA dari Kepolisian Resort Kotawaringin Barat.  Telah dilakukan dua kali pemasangan plang pada tanggal 6 Juli 2018 namun beberapa jam kemudian dihilangkan oleh pihak lain (diduga dilakukan oleh Ahli Waris) dan pada tanggal 24 September 2018 untuk pengamanan agar tidak dicabut/hilang dilakukan penjagaan dari BPKAD, Satpol PP, TNI AD selama satu minggu yang berujung dilaporkannya Bupati Kotawaringin Barat ke Bareskrim dengan tuduhan memasuki pekarangan tanpa ijin dan memalsukan dokumen untuk kasus
								ini para pegawai juga telah Bareskim ke Jakarta, dan Bareskim sudah 4 x ke Pangkalan Bun.  Juga telah dilakukan pemasangan patok didampingi Pengacara
								Pada awal Januari 2020 Pemda baru mengetahui adanya instalasi PDAM yang terpasang diatas tanah tersebut an. Kuncoro, hasil koordinasi dengan pihak PDAM dan penjelasan bahwa tanah tersebut milik Pemda akhirnya instalasi tersebut dicabut oleh PDAM.
								Setelah instalasi PDAM dicabut pada tanggal 17 Maret ahli waris kembali memasang plang baru diatas tanah tersebut.
								Berdasarkan surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: HK.03.01/704/V/2022 Tanggal 25 Mei 2022 Hal: Permasalahan Pelayanan Pendaftaran Hak Atas Tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat, saat ini Pemkab telah mengajukan pendaftaran pensertipikatan tanah tersebut dengan Surat No. 032/1034/IV.II/BPKAD/2022 Tanggal 19 Agustus 2022 Perihal Permohonan Hak Atas Tanah Balai Benih Pertanian Jalan Padat Karya Pangkalan Bun.
								Terhadap permohonan pensertipikatan tanah tersebut Pihak Kantor Pertanahan Kotawaringin Barat menindaklanjutinya dengan dikirimkannya surat dari Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Barat ke Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Surat Nomor: 100/600/62.01/IX/2022 Tanggal 13 September 2022 Perihal: Mohon Petunjuk terhadap Permohonan Hak Atas Tanah Balai Benih Pertanian Jalan Padat Karya Pangkalan Bun, namun sampai saat ini permohonan hak tersebut belum ditindaklanjuti menunggu balasan surat dari Kanwil Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.
		1.450.992	19.896.256.755,00					dari Kanwii Pertanahan Provinsi Kalimantan Tengah.

Lampiran 5.9 Daftar Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2022

	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
DINAS PEN	DIDIKAN DAN KEBUDAYAA	N	•					•		623.884.098,72	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	JI. P. Diponegoro No. 26	10/11/2014	11/PJ-XI/DIKDAS/2014	Hak pakai	APBD	49.027.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SMPN 1 Arut Selatan
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Jl. Abdul Aziz	10/11/2014	05/PJ-XI/DIKDAS/2014	Hak pakai	APBD	49.280.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SDN 1 Kumai Hulu
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Jl. Sukma Aryaningrat RT. 08	10/11/2014	08/PJ-XI/DIKDAS/2014	Hak pakai	APBD	48.917.000,00	Perencanaan Teknis Revitalisasi SDN 1 Baru
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Jln Pramuka No 07	01/02/2016	03/SPK.Rec.01- 02.03/2016	Hak pakai	APBD	23.694.000,00	Perencanan Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Jln Pramuka No 07	01/07/2016	03/SP.Was.01- 02.03/2016		APBD	14.371.500,00	Pengawasan Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tingkat	Beton	0,00	Jln Pramuka No 07	01/07/2016	03/SP.Kont.01- 02.03/2016		APBD	434.600.773,72	Konstruksi Pembangunan Aula Dinas Dikpora Tahap I
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	SDN 1 Pangkalan Dewa	09/04/2020	-	Tanah Pemda	APBD	2.550.000,00	Pembayaran: Perencanaan, No.BAST:002.1.l/PjPHP/Dikbud/2020, Tanggal 09 April 2020, Pekerjaan: Termyn 100% atas perencanaan Pembangunan WC dan Sanitary SDN 1 Pangkalan Dewa
8,	( Bangunan Gedung Kantor Permanen )	Tidak	Beton	0,00	SMPN 9 ARUT SELATAN		02.12/101/SPK/DPK.IV /Dikbud/2022		APBD	1.443.825,00	termyn 100% Pembangunan Jamban beserta sanitasinya Tahun Anggaran 2022
DINAS KES	EHATAN									2.071.756.166,00	
1.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	493	Jl.Pemuda Kumai Hilir Kec. Kumai	03/12/2015	440/903/KD.H	-	APBD	1.095.381.986,00	Peningkatan Pembangunan Puskesmas rawat Inap (perawatan) Kumai Kec. kumai. CV. EL YASSIN + Penambahan daya bangun puskesmas perawatan Kumai dari 900 menjadi 2200 Va CV.Jaya Raya No.440/037/KD.H
2.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	84,5	jln cilik riwut II	05/10/2017	440/490/kd.h	-	APBD	213.359.700,00	Pembayaran: Pelunasan, No.BAST: 440/10700/KD.A, Tanggal 18 Desember 2017, Pekerjaan: Pembangunan Sekretariat IBI kec Arut selatan ( CV MYTA)
3.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0	desa berambai makmur	08/04/2019	-	Milik Pemda	APBD	2.090.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Pustu desa Berambai Makmur (PT MEGASURYA KONSULTAN)
4.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	130	dasa sungai pulau	11/04/2019	-	Milik Pemda	APBD	2.086.000,00	Perencanaan Teknis Rehab Pustu Sungai Pulau (PT MEGASURYA KONSULTAN)
5.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0	desa pangkalan dewa	18/04/2019	-	Milik Pemda	APBD	4.180.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung lama pkm Desa pangkalan dewa (PT MEGASURYA KONSULTAN)

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
6.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	desa sungai pulau	30/08/2019		Milik Pemda	APBD	69.900.000,00	Rehab Pustu Sungai pulau (CV WAHYU A)
7.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0	DESA BERAMBAI MAKMUR	11/11/2019	-	Milik Pemda	APBD	2.794.000,00	Pengawasan Teknis rehab pustu desa berambai makmur (CV TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
8.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	DESA BERAMBAI MAKMUR	12/11/2019	-	Milik Pemda	APBD	69.980.000,00	Rehab Pustu desa Berambai makmur ((CV PRATAMA JASA PUTRA)
9.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0	DESA SEI PULAU	18/11/2019	-	Milik Pemda	APBD	2.795.440,00	Pengawasan teknis rehab pustu sungai pulai (CV TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
10.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0	pkm pangkalan lada	06/12/2019	-	Milik Pemda	APBD	5.599.000,00	Pengawasan teknis rehabilitasi gedung lama puskesmas desa pangkalan dewa (CV TIKA KREATIF DESAIN KONSULTANT)
11.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	pkm pangkalan lada	06/12/2019	-	Milik Pemda	APBD	139.963.000,00	Rehabilitasi Gedung lama Puskesmas desa Pangkalan Dewa (CV LIRA NUSANTARA)
12.	( PERENCANAAN TEKNIS )			0	PKM Ipuh Bangun jaya				APBD	2.266.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Puskesmas Ipuh Bangun Jaya (PT MEGASURYA KONSULTAN)
13.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	Pkm Pangkalan Lada				APBD	2.849.000,00	Perenvcanaan teknis lanjutan rehab gedung puskesmas lama menjadi gedung pertemuan pkm Pangkalan Lada(PT MEGASURYA KONSULTAN)
14.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	PKM PANGKALAN LADA				APBD	42.810.000,00	Lanjutan Rehab Gedung lama pkm Pangkalan Lada ( CV SAMPURNA JAYA)
15.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	DESA PANGKALAN DEWA				APBD	4.268.000,00	Pengawasan teknis lanjutan gedung lama menjadi gedung pertemuan pkm lada (CV TIKA KREATIF DESAIN KONSULTAN)
16.	( bangunan )			0	desa pangkalan dewa				APBD	99.890.000,00	Lanjutan rehab gedung puskesmas lama menjadi gedung pertemuan puskesmaspangkalan lada (DID tAMBAHAN)(CV SAMPURNA JAYA)
17.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	PKM SUNGAI RANGIT				APBD	2.701.440,00	Retribusi daerah untuk Pembuatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) Puskesmas Sungai Rangit
18.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	desa gandis	05/05/2021	800/068/KD.B. Konsultan	tanah milik pemda	APBD	5.643.000,00	perencanaan teknis pembangunan pustu desa Gendis (CV. PRIMA CIPTA DESIGN). BASTHP: 800/3457/KD.A/2021 tanggal 11 mei 2021
19.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0	desa gandis	06/07/2021	800/279/KD.B. KONSTRUKSI	tanah milik pemda	APBD	189.753.500,00	Pembangunan Pustu Desa Gandis (CV RAHMAH) Basthp no : 800/7252/KD.B/2021 Tanggal 1 Oktoberr 2021
20.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	DESA gandis	06/07/2021	800/285/KD.B. KONSULTAN.P	tanah milik pemda	APBD	3.806.000,00	Pengawasan teknis pembangunan pustu gandis (CV EMPIRIS TRITECH DESIGN) Basthp no : 800/7262/KD.B/2021 tanggal 1 oktober 2021
21.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	desa sungai pulau	20/04/2022	800/085/KD.B. Konsultan	tanah milik pemda	APBD	3.270.000,00	Perencanaan Teknis Lanjutan rehab berat pustu sungai pulau (CV TIKA KREATIF

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
											DESAIN KONSULTAN ) BASTHP NO : 800/2969/KD.B/2022 tanggal : 9 mei 2022
22.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	desa sungai pulau	05/07/2022	800/0228/KD.B. KONAULTAN.P	tanah milik pemda	APBD	2.120.100,00	Pengawasan Teknis lanjutan Rehab Berat Pustu sungai Pulau (CV WIDYA GRAHA PRATAMA) BASTHP: 800/6742/KD.B/2022 tanggal 2 September 2022
23.	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0	desa sungai pulau	05/07/2022	800/223/KD.B. Konstruksi	tanah milik pemda	APBD	104.250.000,00	Lanjutan Rehab Berat Pustu sungai Pulau (CV KHAYRA CIPTA MANDIRI) BASTHP: 800/6737/KD.B/2022 tanggal 2 September 2022
RUMAH SAH	KIT UMUM DAERAH									384.300.000,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	86,97	JL.SUTAN SYAHRIR NO.17	26/09/2019	RS/S.19.09.994.III.2		APBD	384.300.000,00	GEDUNG PEMULASARAN JENAZAH(TAHAP 1)
Dinas Peker	jaan Umum dan Penataan R	uang								121.865.798.558,97	
1,	( Jembatan Beton Kabupaten/Kota )			0,00	Kec. Arsel	23/07/2013	600/48-SP/BM- 2013/PUD		APBD	798.589.922,00	Triple box culvert 3x3 S.Bengaris pada ruas jalan Kumpai Batu Atas - Sebuai tahap 1 (Arsel)
2,	( Jembatan Beton Kabupaten/Kota )			0,00	Kec. Kumai	22/04/2015	600/049-SP/BM- 2015/PUD		APBD	563.853.900,00	Jembatan Tipe Komposit pada ruas Jalan Sei. Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap I) (Kumai), Rp. 450.000.000,- BAST No. 80/SH- PB/IX/2015, Tgl. 18 Sep 2015, + Perenc. Teknis Rp. 98.962.600,- + Pengawasan Teknis Rp. 14.891.000,-
3,	( Jalan Kabupaten Kelas III )			0,00		13/08/2015	600/215-SP/BM- 2015/PUD		APBD	99.170.500,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Tahun 2016
4,	( Jalan Kabupaten Kelas III )			0,00		18/08/2015	600/318-SP/BM- 2015/PUD		APBD	123.981.000,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jalan Tahun 2016
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		Tidak	0,00		19/11/2015	600/446-SP/BM- 2015/PUD		APBD	82.392.200,00	Perencanaan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 2) (Kumai), Kegiatan Pembangunan Jembatan Tahun 2016 (ABT)
6,	( Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Permanen )			0,00	Kec. Arsel	25/11/2015	600/33-SPK/TRKP- 2015/PUD		APBD	49.335.000,00	Perencanaan teknis Prasarana TPA Trans LIK Desa pasir Panjang
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	24/04/2015	600/045-SP/BM- 2015/PUD		APBD	5.944.666.000,00	Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap I (Arsel) Rp. 4.606.595.000- BAST No. 001/PT.KJM/XII/2015, Tgl. 02 Desember 2015, + Perenc. Teknis Rp. 793.067.000,- + Pengawasan Teknis Rp. 148.850.000,- + Penyelidikan tanah Rp. 396.154.000,-
8,	( Jembatan Beton Kabupaten/Kota )			0,00		31/12/2015	600/216-SP/BM- 2015/PUD		APBD	119.823.000,00	Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaan Jembatan Tahun 2016

NO.	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	VETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		1127.11	0,00		31/12/2015	600/32-SPK/TRKP- 2015/PUD		APBD	24.000.000,00	Perencanaan Teknis TPST di Kecamatan Arut Selatan
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		Tidak	0,00		28/01/2016	600/037-SP/BM- 2016/PUD		APBD	1.627.118.000,00	Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 2) (Kumai), Rp. 1.580.000.000,- BAST No. 70/SH- PB/VII/2016, Tgl. 25 Juli 2016, Pengawasan Rp.47.118.000,-
11,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		11/11/2016	600/143-SP/BM- 2016/PUD		APBD	197.840.500,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 19, Rp. 197.840.500,-
12,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		11/11/2016	600/140-SP/BM- 2016/PUD		APBD	205.964.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 16, Rp. 205.964.000,- BAST No. 303/PT.MKBUN/XII/2016, Tgl. 20 Des2016
13,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/144-SP/BM- 2016/PUD		APBD	241.626.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 20, Rp. 241.626.000,-, BAST No. 523/BNP-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
14,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/153-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Masuk Vihara Natai Raya (Arsel) + Jalan AMPI Candi - Sungai Tendang (Kumai) + Jalan Yuka Candi (Kumai) (Dana DP2D2), Rp.48.620.000,-, BAST No. 104/CV.SMC
											/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
15,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		10/06/2016	600/028-SP/BM- 2016/PUD		APBD	3.582.202.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Rungun - Kondang - Batas Lamadau (Kolam) + Jalan Beji (Kolam) + Jalan Sagu Suka Mulya-Batas Pangkalan Muntai (Kolam) (Dana DP2D2), BAST No. 192/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
16,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		Tidak	0,00		30/11/2016			APBD	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Rungun - Kondang - Batas Lamadau (Kolam) + Jalan Beji (Kolam) + Jalan Sagu Suka Mulya-Batas Pangkalan Muntai (Kolam) (Dana DP2D2), BAST No. 192/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
17,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/148-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Kumai Hulu - Sp. Pelabuhan Roro - Sp. Pelabuhan CPO (Kumai) (Dana DP2D2), BAST No.193/PCD.P.BUN/ XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
18,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/149-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.620.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang - Sebuai Barat (Arsel + Kumai) (Dana DP2D2), BAST No.101/CV/SMC/ XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
19,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/150-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.235.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Pelita (Kumai) + Jalan DPRD 1 (Kumai) (Dana DP2D2), BAST No. 98/CV.SMC/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
20,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/165-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan A. Wongso- Jalan Pramuka (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.862.000,- BAST No. 308/PT.MK- P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
21,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/158-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.834.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Natai Arahan (arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.834.500,- BAST No. 202/CV.BEC-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
22,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/159-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.807.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Akasia 2 + Jalan Perumahan Pasir Panjang Permai+ JI. Sudirman (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.807.000,- BAST No. 36/CV.EBP- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
23,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/160-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.834.500,00	Perencanaan Jalan Sp. Bumi Harjo - Pangkalan Satu (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.834.500,- BAST No. 202/CV.BEC- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
24,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/168-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Natai Kerbau (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 202/CV.BEC- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
25,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/161-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	49.109.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Marga Mulya (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.109.500,- BAST No. 200/CV.BEC- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
26,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/162-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Negara KM. 53- Sungai Bengkoang (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 40/CV.EBP-PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
27,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/163-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sido Mulyo- Sungai Kuning (P. Banteng) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No.42/CV.EBP- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
28,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/164-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	49.137.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Beringin- Sungai Rangit Jaya (P. Lada) (Dana DP2D2), Rp. 49.137.000,- BAST No. 38/CV.EBP- PB/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
29,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/156-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Meden (Kumai) (Dana DP2D2), Rp. 48.785.000,-, BAST No. 353/BPC-
											P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
30,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/157-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.290.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Martapada RT 12 Kelurahan Kumai Hilir + Jalan Keramat Kelurahan Kumai Hilir + Jalan Berlian (Kumai) (Dana DP2D2), Rp48.290.000,-,

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	RETERANGAN
											BAST No. 429/BPC- P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
31,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/152-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.785.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Salip - Sungai Dau (Aruta) (Dana DP2D2), Rp. 48.785.000,-, BAST No. 191/PCD.P.BUN/XII/2016, Tgl. 14 Des 2016
32,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/136-SP/BM- 2016/PUD		APBD	205.026.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 12, Rp 205.026.000,- BAST No.08/CV.KPK/XII/2016, Tgl. 20 Desember 2016
33,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/138-SP/BM- 2016/PUD		APBD	198.793.760,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 14, Rp. 198.793.760,-, BAST No.23/CV.KBMK/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
34,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		11/11/2016	600/139-SP/BM- 2016/PUD		APBD	205.964.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 15, Rp. 205.964.000,-
35,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/141-SP/BM- 2016/PUD		APBD	205.975.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 17, Rp. 205.975.000,- BAST No. 200/CV.TKDK-PRY/XII/2016, Tgl. 20 Desember 2016
36,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/142-SP/BM- 2016/PUD		APBD	201.322.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 18, Rp. 201.322.000,-, BAST No.133/ARG-PB/XII/2016, Tgl. 20 Des 2016
37,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/145-SP/BM- 2016/PUD		APBD	241.719.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 21, Rp. 241.719.000,- BAST No. 483/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des2016
38,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/146-SP/BM- 2016/PUD		APBD	241.527.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 22, Rp. 241.527.000,- BAST No. 524/BNP-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des2016
39,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/135-SP/BM- 2016/PUD		APBD	98.494.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 23, Rp. 98.494.000,- BAST No. 299/BPC-P.BUN/XII/2016, Tgl. 20 Des2016
40,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/166-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Bhayangkara (Arsel) (Dana DP2D2), Rp. 48.862.000,-
41,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/167-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.862.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Jalan H.M. Idris - Al Huda (Kumai) (Dana DP2D2) Rp. 48.862.000,-
42,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/155-SPK/BM- 2016/PUD		APBD	48.895.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Makarti Jaya- Sp. Suka Jaya (Kolam) (Dana DP2D2), Rp. 48.895.000,-
43,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/151-SPK/BM- 2106/PUD		APBD	34.375.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Type Box Culvert Jalan Sidorejo - Kumpai Batu Bawah (Arsel) + Jembatan Type Box Culvert pada ruas Jl. Mihau (Arsel) + Jembatan Type Box Culvert pada ruas Jalan Sungai Bengkoang-Sido Mulyo- Semanggang (P. Banteng)
44,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		30/11/2016	600/137-SP/BM- 2016/PUD		APBD	203.929.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Paket 13, Rp. 203.929.000,-

	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI	D	OKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	VETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M <sup>2</sup> )	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
45,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			190,00	Kec. Kumai				APBD	556.424.400,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
46,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.581.091.568,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
47,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	23.599.400,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
48,	( Jembatan Cable Stayed )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	796.633.200,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
49,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	596.169.000,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei. Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap 3) (Kumai)
50,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.800.000,00	Perencanaan Teknis Pembuatan Jembatan Layanan Usaha Tani DIR Sulung Kec. Arut Selatan
51,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	834.636.600,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
52,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	94.397.600,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III
53,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			367,82	Kec. Arut Selatan				APBD	605.441.232,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap III (Arsel)
54,	( Pengawasan Teknis )			0,00					APBD	59.442.000,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 3) (Kumai)
55,	( Pengawasan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	6.300.000,00	Pengawasan Teknis Pembuatan Jembatan Layanan Usaha Tani DIR Sulung Kec. Arut Selatan
56,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	27.698.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Kel. Pangkut, Kec. Arut Selatan
57,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Iskandar + Jalan Pasir Panjang - Kumai
58,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kotawaringin Lama				APBD	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Sagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan
59,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kotawaringin Lama				APBD	49.390.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama + Jalan Sumber Mukti - Batas Sukamara
60,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng & Kumai				APBD	49.142.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Sp. Dinamika - Pangkalan Banteng + Jalan DPRD Kumai

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI	I	DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	RETERANGAN
61,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	49.093.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Umpang - Pandu Sanjaya + Jalan Logging Pangkalan Tiga
62,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Pangkalan Lada				APBD	49.225.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Purbasari - Pangkalan Durin - Sungai Rangit Jaya
63,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	49.142.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Struktur Jalan Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas Sungai Bedaun (Pangkalan Banteng)
64,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Peyombaan - Pandau (Aruta)
65,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Pangkut - Kerabu (Aruta)
66,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Sp. Penyombaan - Sambi (Aruta)
67,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Kerabu - Penyombaan (Aruta)
68,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	49.648.500,00	Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pembangunan Jalan Pandau - Riam - Panahan (Aruta)
69,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	35.717.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Kel. Baru, Kec. Arut Selatan
70,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	34.792.000,00	Pengawasan Teknis Peningkatan Pelayanan PDAM Desa Sei Pakit Kec. Pangkalan Banteng
71,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	600.000.000,00	Pembayaran Uang Muka 20 % atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 (Arsel)
72,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	17.991.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4
73,	(Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai))			0,00	Kec. Kumai				APBD	12.000.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
74,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	597.711.000,00	Pembayaran Uang Muka 30 % atas Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
75,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	1.920.000.000,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 (Arsel)

	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI	D	OKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
76,	(Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai))			0,00	Kec. Kumai				APBD	48.000.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
77,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	767.062.450,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
78,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	71.964.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4
79,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			418,00	Kec. Arut Selatan				APBD	480.000.000,00	Pekerjaan Pembangunan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 4 ( Arsel)
80,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	98.100.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Ahmad Wongso - Jalan Pramuka + Jalan Sp. Kadipi Atas - Makarti Jaya
81,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan + Kec. Kumai				APBD	98.000.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Kumai / Gerilya - Sungai Tendang + Jalan Samari - Stadion - Pinang Merah
82,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Pangakalan Banteng				APBD	98.800.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan A. Yani Karang Mulya (Pangkalan Banteng) + Jalan Km. 53 - Sungai Bengkoang
83,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	82.214.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Sp. Penyombaan - Sambi -Sp. Salip + Jalan Pangkalan Tiga-Batas Sungai Bengkoang (GSDI)
84,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	229.122.550,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei. Kakap Tahap 4) (Kumai)
85,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			1.224,00	Kec. Kumai				APBD	398.474.000,00	Pekerjaan Jembatan Type Komposit Pada Ruas Jalan Sei Tendang - Pangkalan Satu (Jembatan Sei Kakap Tahap 4) (Kumai)
86,	( Jembatan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	630.580.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 (Arsel)
87,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	23.529.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5
88,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	25.047.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
89,	( Jembatan Baja )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	585.940.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
90,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	756.696.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 1 (Arsel)

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
91,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	100.188.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
92,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	468.752.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
93,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	94.116.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5
94,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Perwira + Jalan P. Antasari + Jalan Rangga Santrek + Jalan PRA. Kusumayudha)			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	36.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Perwira + Jalan P. Antasari + Jalan Rangga Santrek + Jalan PRA. Kusumayudha
95,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	98.947.200,00	Perencanaan Teknis Jalan Diponegoro + Jalan Pakunegara + Jalan Iskandar
96,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan Dan Kec. Kumai				APBD	98.956.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Natai Raya - Pelabuhan RoRo (Tempenek) + Jalan Natai Raya - Batas Sungai tending - Batas Natai Raya
97,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Samari - Stadion - Pinang Merah )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	23.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Samari - Stadion - Pinang Merah
98,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	10.500.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Pasir Panjang - Kumai
99,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			31,00	Kec. Arut Selatan				APBD	1.765.624.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap I
100,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	703.128.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
101,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kec. Arut Selatan	15/04/2019	600/275-SP/CK- 2019/PUPR		APBD	8.271.421.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
102,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	49.594.600,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Bundaran Misbar Kec. Arsel
103,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Kec. Arut Selatan Dan Kec. Arut Utara				APBD	98.032.000,00	Pekerjaan Perencanaan IPAL Kec. Arut Selatan Dan Kec. Arut Utara
104,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kec. Arut Selatan	02/05/2019	600/273-SP/CK- 2019/PUPR		APBD	9.789.698.000,00	Pekerjaan Pembangunan Gedung Serba Guna Stadion Sport Center Pangkalan Bun
105,	( Jembatan Type Cable Stayed )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	1.171.880.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 5 (Arsel)
106,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	99.000.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Rehabilitasi Sedang/berat Gedung Arsip Dan Mushola
107,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Gg. Purali RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Gg. Purali RT. 10, Kel. Madurejo, Kec. Arsel

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KONSTRU BANGUN		LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ (M²) TIDAK	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
108,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Samping Masjid Miftahul Hidayah, Desa Bumi Harjo, Kec. Kumai )		0,0	) Kec. Kumai				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Samping Masjid Miftahul Hidayah, Desa Bumi Harjo, Kec. Kumai
109,	( Perencanaan Teknis Penataan Estetika Jalan Pangeran Antasari, Kec. Arsel )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	44.879.400,05	Perencanaan Teknis Penataan Estetika Jalan Pangeran Antasari, Kec. Arsel
110,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 15 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 15 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
111,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 32 Kel. Baru, Kec. Arsel )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 32 Kel. Baru, Kec. Arsel
112,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	3.316.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 24 Dan RT. 25, Kel. Madurejo, Kec. Arsel
113,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	5.500.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Perum. Graha Mas Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
114,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 16 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
115,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	0				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Akasia Permai Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
116,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Lanjutan Pembangunan Drainase Lingkungan Beringin Rindang Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
117,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Kumai				APBD	2.960.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Melati, Desa Batu Belaman, Kec. Kumai
118,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	) Kec. Kumai				APBD	4.700.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Sehati, Gg. Kelapa, Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai
119,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai )		0,0	) Kec. Kumai				APBD	9.636.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai
120,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		0,0	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	24.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Salak Desa Karang Mulya Kec. Pangkalan Banteng

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG E	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
121,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Utara				APBD	27.000.000,00	Perencanaan Teknis Jembatan Triple Box Culvert Sungai Boyun 1
122,	(Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rumbia RT. 17 Perbatasan Kel. Raja dan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel)			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	7.705.770,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rumbia RT.17 Perbatasan Kel. Raja dan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
123,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sangalang RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Sangalang RT. 19 Kel. Sidorejo Kec. Arsel
124,	(Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Alpukat RT. 02 Kel. Madurejo, Kec. Arsel)			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.400.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Alpukat RT.02 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
125,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan JI. Pondok Pesantren Al-Hidayah Desa Sidomulyo, Kec. P. Banteng )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pondok Pesantren Al- Hidayah Desa Sidomulyo, Kec. P. Banteng
126,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Uka 3 RT.10 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
127,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg.Mangga Kel. Madurejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Permukiman Gg. Mangga RT. 20 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
128,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kancil RT. 25 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kancil RT.25 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
129,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apomala RT. 15 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.900.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Apomala RT.15 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
130,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Sepakat Dusun Karang Anyar Kel. Mendawai, Kec. Arsel
131,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Penghubung RT. 07 Desa Mulya Jadi, Kec. P. Banteng

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
132,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 08 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
133,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan RT. 20 Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
134,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.238.230,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Graha Asri Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
135,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Bhayangkara RT. 07 Pasir Panjang, Kec. Arsel
136,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Gaharu Desa Pasir Panjang, Kec. Arsel
137,	( Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju Kantor Desa Sei Tendang, Kec. Kumai )			0,00	Kec. Kumai				APBD	2.610.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Menuju Kantor Desa Sei Tendang, Kec. Kumai
138,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Kumai				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pasir Putih RT. 10 Desa Kapitan, Kec. Kumai
139,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Samari II Desa Pasir Panjang Kec. Arsel
140,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Asmar Ujung Kel. Madurejo Kec. Arsel
141,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Bata RT.11 Menuju MTSN Korindo Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
142,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Jeruk Kel. Madurejo, Kec. Arsel
143,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kecambah Kel. Baru, Kec. Arsel
144,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Kepiting I Kel. Baru, Kec. Arsel
145,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Matoa RT.16 Belakang SMP 2 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
146,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Mufakat RT.14 Kel. Madurejo, Kec. Arsel

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI	I	DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	RETERANGAN
147,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Palapa RT. 09 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
148,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Piranha Kel. Baru Kec. Arsel
149,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Gg. Rinjani Kel. Madurejo, Kec. Arsel
150,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	4.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Jelawat RT. 34 Kel. Baru, Kec. Arsel
151,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ketapang Kencana RT. 10 Kec. Madurejo, Kec. Arsel
152,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	1.600.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Mangga RT. 20 Kel. Madurejo, Kec. Arsel
153,	(Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Padat Karya Gg. Kemiri RT. 03 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan)			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Padat Karya Gg. Kemiri RT. 03 Kel. Sidorejo, Kec. Arut Selatan
154,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.200.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Pesantren Kel. Mendawai Seberang Kec. Arsel
155,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.000.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Jl. Ratu Mangku Gg. Nangka Kec. Arsel
156,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Mendawai Seberang, Kec. Arsel
157,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.778.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Kel. Raja Seberang, Kec. Arsel
158,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Damai 1 RT. 09, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Damai 1 RT. 09, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
159,	(Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Menuju SMK 1 Kec. Kotawaringin Lama)			0,00	Kec. Kotawaringin Lama				APBD	5.500.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Menuju SMK 1 Kec. Kotawaringin Lama
160,	( Perencanaan Jaringan Perpipaan Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai )			0,00	Kec. Kumai				APBD	40.000.000,00	Perencanaan Jaringan Perpipaan Desa Pangkalan Satu Kec. Kumai

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		ıs	LETAK/LOKASI	1	DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ (M	2)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
161,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan RTH Lapangan Termili Kel. Raja, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.982.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan RTH Lapangan Termili Kel. Raja, Kec. Arsel
162,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.320.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 10, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
163,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Mentawa Kel. Raja, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Mentawa Kel. Raja, Kec. Arsel
164,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Cilik Riwut 1 RT. 14 Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
165,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Jendral Sudirman RT. 15, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
166,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan RT. 06, Kel. Raja, Kec. Arsel
167,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Jl. Terong RT. 19, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
168,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.850.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Bekicot Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
169,	( Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rusa 4 Dan Rusa 5 RT. 27, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	2.711.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Drainase Lingkungan Gg. Rusa 4 dan Rusa 5 RT. 27, Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
170,	( Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Amin Jaya, Kec. P. Banteng )			0,00	Kec. Pangkalan Banteng				APBD	59.110.000,00	Perencanaan Perluasan Jaringan Perpipaan Desa Amin Jaya, Kec. P. Banteng
171,	( Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Toilet Umum Pangkalan Bun Park )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	11.275.000,00	Pekerjaan Perencanaan Pembangunan Toilet Umum Pangkalan Bun Park
172,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lingkungan IPLT )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	8.360.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lingkungan IPLT
173,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan TPU SKIP (Kristen Dan Muslim) Dan Bangunan Pelengkap )			0,00	Kec. Arut Selatan				APBD	3.503.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan TPU SKIP (Kristen Dan Muslim) Dan Bangunan Pelengkap

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		S LET	TAK/LOKASI	ı	DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ (M²		ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
174,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Gapura Selamat Datang Kota Manis Pangkalan Bun Kec. Arsel )		(		c. Arut latan				APBD	3.965.500,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Gapura Selamat Datang Kota Manis Pangkalan Bun Kec. Arsel
175,	( Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Raja, Kec. Arsel )				c. Arut latan				APBD	3.300.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Raja, Kec. Arsel
176,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lapangan Sampuraga Lama )		(		c. Arut latan				APBD	39.699.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Peningkatan Lapangan Sampuraga Lama
177,	( Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Sungai Buun Pangkalan Bun )		(		c. Arut latan				APBD	19.800.000,00	Pekerjaan Perencanaan Teknis Penataan Kawasan Sungai Buun Pangkalan Bun
178,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(		c. Arut latan				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Madurejo, Kec. Arsel
179,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(		c. Arut latan				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Sidorejo, Kec. Arsel
180,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(		c. Arut latan				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Mendawai, Kec. Arsel
181,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(	,00 Ked	c. Kumai				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Jl. P. Bendahara Kel. Kumai Hilir, Kec. Kumai
182,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(	,00 Ked	c. Kumai				APBD	3.800.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Drainase Lingkungan Kel. Kumai Hulu, Kec. Kumai
183,	( Gedung Bangunan )		(		c. Arut latan				APBD	2.870.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Sport Center Dan Fasilitas Penunjang
184,	( Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center )		(		c. Arut latan				APBD	118.934.200,00	Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center
185,	( Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan )		(		c. Arut latan				APBD	55.490.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan
186,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		(		c. Arut latan				APBD	1.346.259.900,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
187,	( Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park )		(	(1()	c. Arut latan				APBD	186.120.000,00	Pengawasan Teknis Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
188,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		512	(1()	c. Arut latan				APBD	5.942.280.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan (Paket 2)
189,	( Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center )				c. Arut latan				APBD	475.736.800,00	Pengawasan Teknis Pembangunan GOR Sport Center

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	VETERANGANI
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
190,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			1.740,00	Kec. Arut Selatan				APBD	791.446.493,92	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
191,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			958.160,0 0	Kec. Arut Selatan				APBD	9.057.720.000,00	Pekerjaan Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan (Paket 1)
192,	( Bangunan Olah Raga )			4.661,00	Kec. Arut Selatan				APBD	8.130.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung Sport Center Dan Fasilitas Penunjang
193,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00					APBD	3.350.000.000,00	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Gedung serbaguna Sport center dan fasilitas penunjang
194,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00					APBD	516.720.000,00	Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan
195,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00					APBD	2.349.826.606,08	Pekerjaan Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park
196,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	1.180.129.000,00	Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 2 Kec. Arut Selatan
197,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	446.380.000,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 6 Kec. Arut Selatan
198,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Kotawaringin Lama	25/01/2021	600/079-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	6.511.628,00	Perencanaan Teknis Jalan Tempayung - Sumber mukti Kec. Kotawaringin Lama
199,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		18/02/2021	600/66-SPK/CK- 2021/PUPR		APBD	3.256.000,00	Perencanaan Teknis Peningkatan Jalan Lingkungan Pemukiman Jl. Akhmad RT.15 Kel. Sidorejo Kec. Arsel
200,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Pangkalan Banteng	13/08/2021	600/149-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	40.080.700,00	Perencanaan Teknis Jalan Negara KM. 53 - Sungai Bengkuang
201,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	05/08/2021	600/150-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	40.084.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Baru - Pangkalan Bungur
202,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Kec. Arut Selatan	05/08/2021	600/151-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	39.968.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Tanjung Terantang - Tanjung Putri
203,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Kumai	05/08/2021	600/152-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	39.952.000,00	Perencanaan Teknis Jalan Teluk Bogam - Keraya - Sebuai Timur - Sebuai - Batas Tanjung Putri
204,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Pangkalan Banteng	05/08/2021	600/153-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	39.924.500,00	Perencanaan Teknis Jalan Sp. Sagu Suka Mulya - Suka Makmur - Ipuh Bangun Jaya - Palih Baru - Batas Kenawan
205,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	07/06/2021	600/031-SP/BM- 2021/PUPR		APBD	27.615.500,00	Pengawasan Teknis Pembangunan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 3 = 27.615.500,00
206,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	20/05/2021	600/030-SP/BM- 2021/PUPR		APBD	83.569.750,00	Pengawasan Teknis Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 7 = 83.569.750
207,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	23/02/2021	600/4-SP/CK- 2021/PUPR		APBD	10.428.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Gedung Lama Pangkalan Bun Park
208,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	1.500,00	Kec. Arut Selatan	19/01/2021	600/37-SP/CK- 2021/PUPR		APBD	4.505.786.998,92	Lanjutan Pembangunan Pangkalan Bun Park = 4.327.784.998,92 + Pengawasan Teknis = 178.002.000
209,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/160-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.178.750,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 1 = 99.178.750

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	RETERANGAN
210,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/162-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	19.077.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Tipe Box Culvert Jalan Desa Natai Baru Menuju Desa Kadipi Atas Kec. Arsel = 19.077.000
211,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Pangkalan Lada	21/10/2021	600/162-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Pembangunan Box Culvert Desa Melawen (Pangkalan Lada) = 20.000.000
212,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Utara	21/10/2021	600/162-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Boyun (Arut Utara) = 20.000.000
213,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Kumai	21/10/2021	600/162-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Kakap (Kumai) = 20.000.000
214,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	21/10/2021	600/162-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	20.000.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Jembatan Paket 2 Pek. Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 4 (Arut Selatan) = 20.000.000
215,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/154-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 1
216,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/155-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 2
217,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/156-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 3
218,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/157-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.495.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 4
219,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		21/10/2021	600/158-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.261.800,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 5
220,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		21/10/2021	600/159-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	99.471.900,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 6
221,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		21/10/2021	600/160-SPK/BM- 2021/PUPR		APBD	98.340.000,00	Perencanaan Teknis Rekonstruksi Jalan Paket 7
222,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	4.378,00	Kec. Arut Selatan	23/06/2021	600/016-SP/BM- 2021/PUPR		APBD	697.800.000,00	Pembangunan Jembatan Sungai Arut Desa Umpang Tahap 3 = 697.800.000 - Pemancangan Tiang Pancang Baja
223,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	1.521,00	Kec. Arut Selatan	20/05/2021	600/017-SP/BM- 2021/PUPR		APBD	2.038.780.000,00	Jembatan Sungai Arut Type Cable Stayed Tahap 7 = 2.038.780.000 - Pemancangan Tiang Pancang Baja
224,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	25/10/2021	600/6-SPK/CK- 2021/PUPR		APBD	25.630.000,00	Perencanaan Teknis Penataan Lapangan Sepak Bola Standar Nasional Sport Center
225,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kec. Arut Selatan	25/10/2021	600/5-SPK/CK- 2021/PUPR		APBD	24.035.000,00	Perencanaan Teknis Penataan RTH eks Pasar Kampung Baru
226,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00		26/10/2021	600/70-SPK/SDA- 2021/PUPR		APBD	34.056.000,00	Perencanaan Teknis Rehabilitasi Kanal Banjir
227,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	0,00	Kec. Arut Selatan	18/02/2021	600/38-SP/CK- 2021/PUPR		APBD	19.964.060.000,00	Lanjutan Pembangunan Gedung Serbaguna Sport Center dan Fasilitas Penunjang = 19.211.000.000 + Pengawasan Teknis = 753.060.000

No	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
228,	( DED Kajian )			0,00	Kec. Arsel	14/07/2022	600/075-SPK/BM- 2022/PUPR		APBD	99.422.700,00	DED Jalan GM. Arsyad = 99.422.700,00
229,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		14/07/2022	600/076-SPK/BM- 2022/PUPR		APBD	99.256.200,00	DED Jalan Kumpai Batu Atas - Batas Pasir Panjang Sebuai Barat = 99.256.200,00
230,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kotawaringin Lama	14/07/2022	600/078-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.256.200,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp.Diung-Danau Gatal
231,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/070-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.256.200,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan DPRD
232,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/073-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	98.967.600,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sebuai-Batas Pasir Panjang
233,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/071-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.023.100,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Pasir Panjang- Kumpai Batu Atas-Dukuh Mola
234,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/063-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.189.600,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Pasir Panjang- Kumpai Batu Atas-Kumpai Batu Bawah
235,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/065-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.145.200,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Tanjung Terantang-Tanjung Putri
236,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/061-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.189.600,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Baru-Pangkalan Bungur
237,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/081-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.422.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Tanjung Putri- Batas Sebuai Barat
238,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/082-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.422.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sungai Tendang- Batas Natai Raya
239,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/08/2022	600/062-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.256.200,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sungai Tendang- Pangkalan Satu
240,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/083-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.422.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Teluk Bogam- Keraya-Sebuai Timur-Sebuai-Batas Tanjung Putri
241,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/074-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.056.400,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp.Kadipi Atas- Batas Natai Baru
242,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/064-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.417.150,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED jalan Sp.Pelabuhan Cpo- Pangkalan Satu
243,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Arut Selatan	14/07/2022	600/068-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.616.950,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Matnoor
244,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/079-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.583.650,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp Bumi Harjo- Pangkalan Satu

NO	JENIS BARANG / NAMA BARANG B	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	VETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
245,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kotawaringin Lama	14/07/2022	600/077-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.089.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp.Danau Gatal- Lalang
246,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kumai	14/07/2022	600/067-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	98.967.600,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp.Sungai Tendang-Pelabuhan Roro
247,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Kotawaringin Lama	14/07/2022	600/066-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.422.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp diung-Kinjil
248,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng	14/07/2022	600/072-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.539.250,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sp Berambai-Natai Kerbau - Mulya Jadi
249,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng Kab.Kobar	14/07/2022	600/069-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.539.250,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Mulya Jadi - Sungai Pulau - Batas sungai Bedaun
250,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng	14/07/2022	600/080-SPK/BM- 2022/PUPR	Tanah Milik Pemda	APBD	99.422.700,00	Pembayaran Termyn 100% Atas Pekerjaan DED Jalan Sido Mulyo-Sungai Kuning
Dinas Perur	nahan Rakyat dan Kawasan	Permukiman								2.137.666,67	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			17,68	Makam Giri Loyo Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada				APBD	2.137.666,67	Perencanaan Teknis Pembangunan Pagar Makam (2) Giri Loyo Desa Purbasari Kec. Pangkalan Lada
Satuan Poli	si Pamong Praja dan Pemad	am Kebakaran		•	<b>-</b>					75.839.500,00	
1,	(Perencanaan Pembangunan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama))			0,00	Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama				APBD	2.717.000,00	Perencanaan Pembangunan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)
2,	( Pengawasan Pengawasan Pos Pantau ( Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama) )			0,00	Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama				APBD	2.722.500,00	Pengawasan Pos Pantau (Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama)
3,	( pengadaan sarana dan prasarana pencegahan bahaya kebakaran )			0,00	Jalan Pangkalan Bun - Kotawaringin Lama				APBD	70.400.000,00	pengadaan sarana dan prasarana pencanaan bahaya kebakaran/belanja pebangunan pekerjaan pembangunan pos pantau jalan pangkalanbun - kotawaringin lama
Badan Pena	nggulangan Bencana Daera	h								389.121.892,00	
1,	( Perencanaan Teknis papan nama kantor )			0,00					APBD	-	Perencanaan Teknis papan nama kantor
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	-	Perencanaan Pembangunan Gedung Lantai II (Lanjutan)
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	-	Perencanaan Pembangunan Pintu Gerbang Kantor

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	4.319.892,00	Perencanaan Pembangunan Menara Pantau Pengadaan Nomor : 24.04.09.03.2020.000023
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	8.437.000,00	Perencanaan Pembangunan Gedung Sayap Kiri/Kanan (Lanjutan)
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	2.981.000,00	Perencanaan Pembangunan Garasi dan Cucian Mobil
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng	29/10/2021	008/16.4/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	44.800.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Arga Mulya
8,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng	29/10/2021	008/16.4/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	30.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sidomulyo 2
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Kumai	29/10/2021	008/16.5/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	32.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Keraya I
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Kumai	29/10/2021	008/16.5/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	42.492.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sebuai
11,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Selatan	29/10/2021	008/16.3/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	38.723.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Terantang III
12,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Selatan	29/10/2021	008/16.3/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	36.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Tanjung Terantang I
13,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Selatan	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	22.466.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Primer I Desa Kumpai Batu Bawah
14,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Selatan	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	24.640.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Bedara Desa Kumpai Batu Bawah
15,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Selatan	29/10/2021	008/16.1/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	27.650.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Penghubung Desa Kumpai Batu Bawah- Kumpai Batu Atas
16,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Pangkalan Banteng	29/10/2021	008/16.2/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	39.000.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Hijau
17,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kecamatan Arut Utara	29/10/2021	008/16.2/PA.BPBD.IV.3 /X/2021	-	APBD	35.613.000,00	Perencanaan Pembangunan Jembatan Sungai Deraman Desa Riam
Dinas Sosia	ıl									10.373.000,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	60,00	Jl.Iskandar Pangkalan Bun	15/04/2021	760/729/Dinsos.I/2021	-	APBD	10.373.000,00	Rehabilitasi Taman Makam Pahlawan
Dinas Lingk	ungan Hidup				<u> </u>					1.815.893.558,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		04/08/2011	600/508-SPK/PUD		Mutasi	66.826.100,00	Penataan Taman Pertigaan Jl. H.M.Rafii - Pasir Panjang - Kumpai Batu Atas (Persentase 90 %)
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		14/08/2011	600/505-SPP/PUD		Mutasi	297.010.800,00	Penataan Bundaran Sport Center, Kec. Arsel (Persentase 42 %)
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		02/07/2012	600/47-SP/TRKP-2012 /PUD		Mutasi	200.439.211,00	Penataan Bundaran Sport Center Tahap II (Persentase 45 %)
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		02/07/2012	600/42-SP/TRKP-2012 /PUD		Mutasi	319.693.048,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran Kumai (Persentase 35,64 %)

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN	
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN	
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		12/07/2012	600/46-SP/TRKP-2012 /pud		Mutasi	115.058.942,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran GM. Arsyad (Persentase 52,72 %)	
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		02/07/2012	600/48-SP/TRKP/2012 /PUD		Mutasi	150.249.724,00	Penataan Taman Kawasan Bundaran SMA 3, Kelurahan Madurejo (Persentase 35,42 %)	
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		02/07/2012	600/49-SP/TRKP-2012 /PUD		Mutasi	200.348.733,00	Penataan Plankson Jalan Menuju Soprt Center (Persentase 90 %)	
8,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		24/04/2014	600/21-SPK/TRKP-20 14/PUD		Mutasi	197.928.000,00	Lanjutan Penataan Bundaran Kumai Kec. Kumai Rp. 194.040.000,00, BA. Penyerahan Pertama Pek. No. 033/SDP- PB/VIII/2014, Tgl. 13 Ags 2014, CV. SAKA DUTA PERSADA + Pengawasan Teknis Rp.3.888.000, CV. PRIMA CIPTA DESIGN (Persentase 64.36 %)	
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00		14/05/2014	600/23-SPK/TRKP-20 14/PUD		Mutasi	197.818.000,00	Lanjutan Penataan Taman Kawasan Bundaran GM. Arsyad Kec. Arut Selatan, Rp.193.930.000,00, BA. Penyerahan Pertama Pek. No. 13/MP-KM/VIII/2014, Tgl. 14 Ags 2014, CV. MAWARNA PERDANA + Pengawasan Teknis Rp.3.888.000, CV. PRIMA CIPTA DESIGN (Persentase 82,5)	
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	70.521.000,00	Perencanaan Pembangunan Pusat Daur Ulang Kab. Kotawaringin Barat	
Dinas Pemb	perdayaan Masyarakat dan D	esa								48.675.000,00		
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00					APBD	48.675.000,00	Perencanaan Teknis	
Dinas Perhi	ubungan									70.706.500,00		
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Pangkalan Bun	21/01/2016	15/KPA-LLAJ/2016		APBD	6.457.000,00	Perencanaan Teknis Pengadaan Rambu Tiang F Tahun 2016	
2,	( Perencanaan Teknis )			0,00	Pangkalan Bun				APBD	2.589.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.01 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pembelian Gedung kantor, Perencanaan teknis peningkatan gedung kantor balai PKB pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000015	
3,	( Perencanaan Teknis )	Tidak	Tidak	0,00	Kumai	17/03/2020	550/06/DPHB-Pras	-	APBD	4.389.000,00	Perencanaan teknis pembangunan halte MTSN Kumai	
4,	( Perencanaan Teknis )			0,00					APBD	1.424.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/pembelian Pelabuhan, Perencanaan teknis rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000029	

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	VETERANGANI
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
5,	( Rehab WC pelabuhan Penyeberangan kumai )			0,00					APBD	49.769.000,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pembelian Pelabuhan, Belanja modal rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000031
6,	( Pengawasan teknis )			0,00					APBD	1.226.500,00	2.09.2.09.01.17.02 : Pembangunan Sarana Prasarana dan Fasilitas Perhubungan; 5.2.3.24.19 : Belanja modal Pengadaan konstruksi/ pembelian Pelabuhan, Pengawasan teknis rehab WC pelabuhan penyeberangan kumai pada Dinas Perhubungan Kab. Ktw. Barat TA. 2020 Pengadaan Nomor : 24.04.06.01.2020.000036
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun	15/04/2021	551/45/DISHUB-PRAS	-	APBD	4.851.000,00	Perencanaan Pembangunan Halte SMK Muhammadiyah Pangkalan Bun
Dinas Komu	ınikasi, Informatika, Statistik	dan Persandian								254.243.000,00	
1,	( PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP 1 )			163,00	DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KTW BARAT				APBD	7.436.000,00	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP 1
2,	( PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP I )			163,00	DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KAB. KTW BARAT				APBD	66.594.000,00	UANG MUKA 30 % PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB I
3,	( BANGUNAN GEDUNG KANTOR )			163,00	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN				APBD	99.891.000,00	TERMIN 75% PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAP. I
4,	( PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB. I )			163,00	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN				APBD	10.428.000,00	PENGAWASAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB. I
5,	( TERMIN 100 % PEMBANGUANGEDUNG KANTOR TAHAB. I )			163,00	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN				APBD	55.495.000,00	TERMIN 100 % PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB. I
6,	( PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB II )			163,00	DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN				APBD	14.399.000,00	PERENCANAAN PEMBANGUNAN GEDUNG KANTOR TAHAB II
Dinas Perin	dustrian, Perdagangan, Kop	erasi, Usaha Kecil	l dan Mener	ngah						42.438.000,00	

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Pasar Kumai				APBD	42.438.000,00	Perencanaan Revitalisasi Pasar Cempaka Kumai
Dinas Kepe	mudaan dan Olahraga									2.358.445.151,00	
1,	( PERENCANAAN REHABILITASI AULA KANTOR TH 2020 )			179,07	Pangkalan Bun Kec. Arut Selatan			Hak Pakai	APBD	3.982.000,00	PERENCANAAN REHABILITASI AULA KANTOR TH 2020
2,	( PENGAWASAN REHABILITASI AULA KANTOR DISPORA TH 2020 )	Tidak	Beton	179,07	KEC. ARUT SELATAN			Hak Pakai	APBD	5.995.000,00	PENGAWASAN REHABILITASI AULA KANTOR DISPORA TH 2020
3,	( Rehabilitasi pembangunan aula kantor Dispora th 2020 )	Tidak	Beton	179,07	KEC. ARUT SELATAN			Hak Pakai	APBD	189.753.000,00	Rehabilitasi pembangunan aula kantor Dispora th 2020
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	179,07	Jl. Sutan Syahrir no 60 Kec. Arsel	10/05/2021	SPK No. 05/Keg.Ukp.Dispora/20 21	Hak Pakai	APBD	6.715.000,00	PERENCANAAN REHABILITASI AULA KANTOR TH 2021 (Tahap2)
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	179,07	Jl. Sutan Syahrir no 60 Kec. Arsel	12/07/2021	20/Keg.Ukp.Dispora/20 21	Hak Pakai	APBD	195.000.000,00	Rehap Aula Dispora tahun 2021 tahap 2
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	179,07	Jl. Sutan Syahrir no 60 Kec. Arsel	12/07/2021	17/KEG.UKP.DISPOR A/2021	Hak Pakai	APBD	7.722.000,00	PENGAWASAN REHAP AULA KANTOR DISPORA TAHAP 2 TH 2021
7,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Tidak	Beton	900,00	JL. MERPATI KELURAHAN SIDOREJO	15/03/2022	225/SPK/III/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	32.467.500,00	PERENCANAAN REHAB SEDANG/ BERAT GEDUNG KONI TAHUN 2022 NO.SPK: 225/SPK/IV/DISPORA/2022 NO.BA:244/BASTP/IV/DISPORA/2022
8,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Bertingkat	Beton	1.080,00	JL. SUTAN SYAHRIR	17/03/2022	229/SPK/III/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	24.053.700,00	PERENCANAAN REHAB SEDANG/ BERAT LAPANGAN SAMPURAGA TAHUN 2022 NO.SPK: 229/SPK/III/DISPORA/2022 NO.BASTP:240/BASTP/IV/DISPORA/2022
9,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Tidak	Beton	17.907,00	Jl.Sutan Syahrir No. 60	15/03/2022	11/Keg.ukp.dispora/202 2	HAK PAKAI	APBD	6.882.000,00	PERENCANAAN REHAB AULA TAHAP 3 TAHUN 2022
10,	( Kontruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	17.907,00	Jl.Sutan Syahrir No. 60	09/05/2022	20/keg.ukp.dispora/202 2	HAK PAKAI	APBD	196.469.951,00	REHAB AULA TAHAP 3 TAHUN 2022
11,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Tidak	Beton	17.907,00	Jl.Sutan Syahrir No. 60	09/05/2022	27/keg.ukp.dispora/202 2	HAK PAKAI	APBD	7.659.000,00	PENGAWASAN REHAB AULA TAHAP 3 TAHUN 2022
12,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	1.080,00	Jl. sutan Syahrir	05/08/2022	278/SP/VIII/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	551.200.000,00	TERMIN 80% REHAB SEDANG/ BERAT LAPANGAN SAMPURAGA TAHUN 2022 NO. SP: 278/SP/VIII/DISPORA/2022, NO. BAKP: 309/BAKP/X/DISPORA/2022
13,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	1.080,00	JL. SUTAN SYAHRIR	05/08/2022	278/SP/VIII/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	137.800.000,00	TERMIN 100% REHAB SEDANG/ BERAT LAPANGAN SAMPURAGA TAHUN 2022 NO. SP: 278/SP/VIII/DISPORA/2022, NO. BAKP: 319/BAKP/XI/DISPORA/2022, NO. BASTP: 320/BASTP/X/DISPORA/2022, NO. BAP: 321/BAP/XI/DISPORA/2022
14,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Bertingkat	Beton	1.080,00	JL. SUTAN SYAHRIR	05/08/2022	282/SPK/VIII/DISPORA /2022	HAK PAKAI	APBD	27.883.200,00	PENGAWASAN REHAB SEDANG SEDANG/ BERAT LAPANGAN SAMPURAGA TAHUN 2022 NO.SPK: 282/SPK/VIII/DISPORA/2022

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	RETERANGAN
											NO.BASTP:323/BASTP/XI/DISPORA/2022 NO.BAP: 24/BAP/XI/DISPORA/2022
15,	( Kontruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	900,00	JL. MERPATI KELURAHAN SIDOREJO	01/08/2022	270/SP/VIII/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	278.310.000,00	TERMIN 30% REHAB SEDANG/ BERAT GEDUNG KONI TAHUN 2022 NO. SP: 270/SP/VIII/DISPORA/2022
16,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak		900,00	JL. MERPATI KELURAHAN SIDOREJO	01/08/2022	270/SP/VIII/DISPORA/ 2022	HAK PAKAI	APBD	649.390.000,00	TERMIN 100% REHAB SEDANG/ BERAT GEDUNG KONI TAHUN 2022 NO. SP: 270/SP/VIII/DISPORA/2022 NO.BASTP: 347/BASTP/XII/DISPORA/2022 NO. BAP: 351/BAP/XII/DISPORA/2022
17,	( Konstruksi Dalam pengerjaan )	Tidak	Beton	900,00	JL. MERPATI KELURAHAN SIDOREJO	01/08/2022	274/SPK/VIII/DISPORA /2022	HAK PAKAI	APBD	37.162.800,00	PENGAWASAN REHAB SEDANG/ BERAT GEDUNG KONI TAHUN 2022 NO.SPK: 274/SPK/VIII/DISPORA/2022
											NO.BASTP: 350/BASTP /XII/DISPORA/2022 NO. BAP: 351/BAP /XII/DISPORA/2022
Dinas Pariw	visata									4.628.000,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kumai	15/03/2017	930/PPHP-DISPAR /5/III/2017		APBD	3.000.000,00	Perencanaan Rehab Jembatan, pergola, mainan, KM,Shelter Tj.Harapan Lanjutan Plaza Kuliner Gazebo Sebuai Timur (Perencanaan Shelter Tj. Harapan)
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Keraya	27/03/2020	930/PPHP-DISPAR /02.1/III/2020	Pemda	APBD	1.628.000,00	Perencanaan pembangunan tempat pembuangan sampah (Keraya)
Dinas Tana	man Pangan, Hortikultura da	ın Perkebunan								158.095.500,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	JALAN A YANI	11/02/2015	-	HAK PAKAI	Pembelian	49.940.000,00	PERENCANAAN TEKNIS REHAB BERAT PEMBANGUNAN KANTOR DISTANAK GEDUNG 1
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	PANGKALAN BUN	11/02/2015	-	-	Pembelian	24.860.000,00	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JUT 2016
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	PANGKALAN BUN	07/08/2015	-	-	Pembelian	56.892.000,00	PERENCANAAN TEKNIS BALAI BENIH HORTIKULTURA
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	KEL MENDAWAI SEBERANG	19/08/2017	-	Milik Pemda	APBD	3.500.000,00	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN USAHA TENI RT 1 KEL MENDAWAI SEBERANG (PT MEGA SURYA)
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Candi RT 8	19/12/2017		Milik Pemda	APBD	1.823.000,00	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN ULIN DI RT 8 KEL. CANDI (PT. MEGA SURYA)
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	RT 1 KEL. MENDAWAI SEBERANG	03/12/2017	-	Milik Pemda	APBD	5.100.000,00	PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JALAN USAHA TANI RT 1 KEL MENDAWAI SEBERANG (CV. TIKA KREATIF DESIN KONSULTAN)
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Candi RT 8	03/12/2017		Milik Pemda	APBD	2.720.000,00	PENGAWASAN TEKNIS PEMBANGUNAN JEMBATAN KAYU ULIN RT 8 KEL. CANDI (CV TIKA KRETAIF DESAIN KONSULTAN)

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN	
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN	
8,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	BPP KOTAWARINGI N LAMA	11/03/2020			APBD	1.600.500,00	PERENCANAAN TEKNIS PEMBANGUNAN PAGAR BPP KOTAWARINGIIN LAMA OLEH PT. MEGA SURYA KONSULTAN	
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	BPP KOTAWARINGI N LAMA	11/03/2020		HAK PAKAI	APBD	2.860.000,00	PERENCANAAN TEKNIS REHAB SEDANG BERAT KANTOR BPP KOTAWARINGIN LAMA OLEH PT. MEGA SURYA KONSULTAN	
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	BPP PANGKALAN BANTENG	21/03/2020		HAK PAKAI	APBD	8.800.000,00	PERENCANAN TEKNIS REHAB SEDANG BERAT BPP PANGKALAN BANTENG OLEH PT. MEGA SURYA KONSULTAN	
Dinas Peter	nakan dan Kesehatan Hewa	n								9.427.000,00		
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Jl. Padat Karya	15/09/2014	UKP.1430/632/EX/201 4	Tanah Pemda	Pembelian	9.427.000,00	Perencanaan Teknis Rumah Potong Unggas (RPU) PT. Megasurya Konsultan	
Sekretariat	Daerah									272.886.000,00		
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )		Beton	0,00	Kel. Candi Kecamatan Kumai	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra /V/2015		APBD	3.600.000,00	Perencanaan teknis Pembangunan pagar Makam gg. Mawar RT.10 Kel. Candi Kec. Kumai	
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Desa Bumi Harjo Kecamatan Kumai	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra /V/2015		APBD	3.600.000,00	Perencanaan teknis pemagaran makam desa bumiharjo kec kumai	
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Desa Sei Tendang Kecamatan Kumai	26/05/2015	03/Keg.Pmb.TPU/kesra /V/2015		APBD	3.600.000,00	Perencanaan Teknis Penataan kawasan makam muslim RT 02 Sei tendang kec Kumai	
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Jl. Pelita III RT.01/002 Desa Babuai Baboti, Desa Palih Baru dan desa Ipuh Bangun Jaya				APBD	15.555.833,33	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Kotawaringin Lama	
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	RT.01 s.d RT 09 desa Sungai Bakau dan desa Keraya Jalan Patih Mambang				APBD	7.775.166,67	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU di Kecamatan Kumai	
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Jalan Samari RT 19				APBD	9.542.500,00	Perencanaan Teknis Pengadaan tiang ornamen tiang Tangkai 2 Lanjutan Lampu PJU ready For Smart Lengkap dan Lampu Ready For Smart PJU Tiang oktagonal Bunsaran Sport Center	
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	desa SimpangBaramb ai Kec. Pangkalan Banteng				APBD	7.720.166,67	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan lampu PJU di Jalan Pariwisata Desa Simpang Barambai	

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
8,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Bundaran Pancasila dan Bundaran Pangkalan Lima				APBD	4.257.000,00	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU LED Ready For Smart di sekitaran segitiga Bundaran Pancasila dan Bundaran Pangkalan Lima
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	6 Kecamatan				APBD	6.568.833,33	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan PJU di 6 Kecamatan
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )			0,00	Area Pangkalan Bun Park				APBD	4.581.500,00	Perencanaan Teknis Pengadaan dan Pemasangan Lampu PJU LED Ready For Smart di Area Pangkalan Bun park
11,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Rujab Bupati Kobar	02/06/2021	027/SP.04 /Fsk/BU.III/2021	ı	APBD	206.085.000,00	Pembayaran 60% atas Pekerjaan Penataan Halaman dan Taman Rumah Jabatan Bupati Kotawaringin Barat TA. 2021
Kecamatan	Arut Selatan									885.325.500,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Raja Seberang	11/08/2015	027/58/PA- AS/VIII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	3.949.000,00	Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Balai Pertemuan Kelurahan Raja Seberang TA. 2015
2,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Tidak	0,00	Kelurahan Raja Seberang	11/08/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	59.818.500,00	Uang muka Termin 30% Pembangunan gedung balai pertemuan Kelurahan Raja Seberang TA. 2015
3,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	11/08/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	139.576.500,00	Pembayaran 100% pembangun gedung balai pertemuan kelurahan raja seberang TA. 2015
4,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	11/08/2015	027/58/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	5.929.000,00	Pengawasan Teknis Pembangunan gedung balai pertemuan gedung kelurahan raja seberang TA. 2015
5,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	11/08/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	3.960.000,00	Perencanaan teknis pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA. 2015
6,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	11/08/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	59.757.000,00	Uang muka termin 30 % pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA.2015
7,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	11/08/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	139.433.000,00	Pembayaran 100 % Pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang
8,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	11/08/2015	027/37/PA-AS/VII/2015	Tanah Pemda	Pembelian	5.929.000,00	Pengawasan teknis pembangunan gedung kantor kelurahan mendawai seberang TA. 2015
9,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	22/08/2016	050/458/VIII/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	5.841.000,00	Perencanaan teknis pembangunan balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
10,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	22/08/2016	050/457/VIII/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	5.852.000,00	Perencanaan teknis pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016
11,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	109.479.700,00	Pembangunan gedung balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
12,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	199.039.000,00	Pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016

NO	JENIS BARANG / NAMA	KONSTRU BANGUN		LUAS	LETAK/LOKASI		DOKUMEN	STATUS	ASAL-USUL	NILAI KONTRAK	KETERANGAN
NO	BARANG	BERTINGKAT/ TIDAK	BETON/ TIDAK	(M²)	ALAMAT	TANGGAL	NOMOR	TANAH	PEMBIAYAAN	(Rp)	KETERANGAN
13,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	29/09/2016	640/466/IX/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	89.574.300,00	Pembangunan balai pertemuan kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
14,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan mendawai Seberang	29/09/2016	760/467/IX/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	3.905.000,00	Pengawasan teknis pembangunan kantor kelurahan mendawai seberang (Tahap II) TA. 2016
15,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Kelurahan Raja Seberang	29/09/2016	760/468/IX/AS/2016	Tanah Pemda	Pembelian	3.883.000,00	Pengawasan teknis pembangunan kantor kelurahan raja seberang (Tahap II) TA. 2016
16,	( Taman Baca )	Tidak	Beton	20,00	Kelurahan Madurejo	18/11/2022	355/KMR/AS/XI/2022	Hak Pakai	APBD	49.399.500,00	Pembangunan Tahap 1 Taman baca kelurahan Madurejo Kecamatan Arut Selatan TA. 2022
Kecamatan	Arut Utara									2.100.000,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Tidak	Beton	0,00	Pangkut	31/12/2013			Pembelian	2.100.000,00	Perencanaan Teknis
Badan Pend	apatan Daerah									49.456.000,00	
1,	( Konstruksi Dalam Pengerjaan )	Bertingkat	Beton	0,00	KECAMATAN ARUT SELATAN	07/03/2022	027/01/SEKR- BAPENDA /PL/XII	MILIK PEMDA KOBAR	APBD	49.456.000,00	
					131.395.530.091,36						

Lampiran 5.10 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Penjelasan Selisih Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2022

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	136.507.529.343,38	135.827.341.019,32	680.188.324,06	-	-	-	-	122.095.227,20	5.519.999,93	22.350.000,00	830.153.551,19
	KIB B	67.430.672.655,42	67.054.783.334,87	375.889.320,55							22.350.000,00	398.239.320,55
	KIB C	68.364.631.028,98	68.471.873.391,61	(107.242.362,63)					122.095.227,20	5.519.999,93		20.372.864,50
	KIB D	712.225.658,98	300.684.292,84	411.541.366,14								411.541.366,14
2	Dinas Kesehatan	95.701.984.381,93	96.367.468.329,70	(665.483.947,77)	-	-	-	10.680.371,91	840.413.000,83	-	-	185.609.424,97
	KIB B	66.535.882.894,83	67.028.258.836,64	(492.375.941,81)					666.350.000,00			173.974.058,19
	KIB C	28.593.528.247,99	28.766.636.253,95	(173.108.005,96)				10.680.371,91	109.603.000,83			(52.824.633,22)
	KIB D	572.573.239,11	572.573.239,11	-					64.460.000,00			64.460.000,00
3	Rumah Sakit Umum Daerah	195.939.712.192,62	195.800.925.000,47	138.787.192,15	-	•	-	-	51.435.000,00	-	-	190.222.192,15
	KIB B	172.108.651.173,39	171.802.896.192,48	305.754.980,91								305.754.980,91
	KIB C	19.609.753.715,98	19.661.014.400,17	(51.260.684,19)					51.435.000,00			174.315,81
	KIB D	4.221.307.303,25	4.337.014.407,82	(115.707.104,57)								(115.707.104,57)
4	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	2.290.576.957.702,38	2.292.888.517.106,19	(2.311.559.403,81)	-	-	-	-	85.000.000,00	-	-	(2.226.559.403,81)
	KIB B	25.463.280.950,07	25.548.280.950,07	(85.000.000,00)					85.000.000,00			
	KIB C	15.361.530.345,92	17.216.962.784,08	(1.855.432.438,16)								(1.855.432.438,16)
	KIB D	2.249.752.146.406,39	2.250.123.273.372,04	(371.126.965,65)								(371.126.965,65)
5	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	63.203.842.141,90	63.003.978.893,22	199.863.248,68	1.086.701.524,50	-	150.000.000,00	-	-	-	-	(736.838.275,82)
	KIB B	900.409.849,30	1.050.246.880,87	(149.837.031,57)			150.000.000,00					162.968,43
	KIB C	2.633.358.042,23	2.283.657.761,98	349.700.280,25	1.086.701.524,50							(737.001.244,25)
	KIB D	59.670.074.250,37	59.670.074.250,37	-								
6	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	16.137.040.420,58	16.157.341.941,94	(20.301.521,36)	-	-	-	-	-	-	27.362.260,37	7.060.739,01

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
	KIB B	14.976.519.637,65	14.996.821.159,01	(20.301.521,36)							27.362.260,37	7.060.739,01
	KIB C	1.160.520.782,93	1.160.520.782,93	-								
	KIB D	-	-	-								
7	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	1.742.225.496,71	1.878.675.996,71	(136.450.500,00)	-	-	-	-	120.250.500,00	-	16.200.000,00	-
	KIB B	1.303.677.237,29	1.440.127.737,29	(136.450.500,00)					120.250.500,00		16.200.000,00	
	KIB C	438.120.740,03	438.120.740,03	-								
	KIB D	427.519,39	427.519,39	-								
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	20.778.457.867,51	20.536.276.249,78	242.181.617,73	13.310.000,00	-	-	-	-	-	-	228.871.617,73
	KIB B	15.889.587.714,74	15.647.406.097,01	242.181.617,73	13.310.000,00							228.871.617,73
	KIB C	606.441.469,14	606.441.469,14	-								
	KIB D	4.282.428.683,63	4.282.428.683,63	-								
9	Dinas Sosial	2.432.768.877,23	2.292.984.017,78	139.784.859,45	-	150.000.000,00	-	-	-	-	-	(10.215.140,55)
	KIB B	1.832.014.068,28	1.682.014.068,28	150.000.000,00		150.000.000,00						
	KIB C	600.754.808,95	610.969.949,50	(10.215.140,55)								(10.215.140,55)
	KIB D	-	-	-								
10	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	7.414.116.578,74	7.365.344.611,95	48.771.966,79	-	-	-	-	-	-	-	48.771.966,79
	KIB B	4.499.834.081,99	4.499.834.081,99	0,00								
	KIB C	1.957.462.616,13	1.949.354.669,17	8.107.946,96								8.107.946,96
	KIB D	956.819.880,62	916.155.860,79	40.664.019,83								40.664.019,83
11	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	4.193.959.925,75	4.196.786.239,03	(2.826.313,28)	-	-	-	2.826.313,28	-	-	-	-
	KIB B	3.462.897.874,41	3.465.724.187,69	(2.826.313,28)				2.826.313,28				
	KIB C	686.218.485,34	686.218.485,34	-								

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
	KIB D	44.843.566,00	44.843.566,00	-								
12	Dinas Ketahanan Pangan	1.652.904.361,36	1.652.904.361,36	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIB B	1.443.592.806,53	1.443.592.806,53	-								
	KIB C	209.311.554,83	209.311.554,83	-								
	KIB D	-	-	-								
13	Dinas Lingkungan Hidup	36.265.646.109,70	31.745.732.246,91	4.519.913.862,79	7.860.368.025,74	-	-	-	37.568.487,21	-	-	(3.302.885.675,74)
	KIB B	16.182.632.585,62	16.086.460.799,99	96.171.785,63								96.171.785,63
	KIB C	9.952.183.092,63	13.388.809.041,21	(3.436.625.948,58)					37.568.487,21			(3.399.057.461,37)
	KIB D	10.130.830.431,45	2.270.462.405,71	7.860.368.025,74	7.860.368.025,74							-
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3.927.475.116,95	3.922.260.808,25	5.214.308,70		-	-	-		-	-	5.214.308,70
	KIB B	3.051.103.322,94	3.049.938.706,11	1.164.616,83								1.164.616,83
	KIB C	867.371.794,01	867.371.794,01	0,00								0,00
	KIB D	9.000.000,00	4.950.308,13	4.049.691,87								4.049.691,87
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1.450.486.090,50	1.450.486.090,50	0,00		-	-	-		-	-	
	KIB B	1.165.231.609,91	1.165.231.609,91	1								
	KIB C	285.254.480,59	285.254.480,59	•								-
	KIB D	-	-	-								
16	Dinas Perhubungan	62.954.499.042,41	42.335.284.026,88	20.619.215.015,53	13.613.876.965,60	13.900.000,00	-	-	-	-	-	6.991.438.049,93
	KIB B	12.952.558.046,26	9.177.794.558,85	3.774.763.487,41		13.900.000,00						3.760.863.487,41
	KIB C	4.366.816.578,71	7.042.830.145,99	(2.676.013.567,28)								(2.676.013.567,28)
	KIB D	45.635.124.417,44	26.114.659.322,04	19.520.465.095,40	13.613.876.965,60							5.906.588.129,80
17	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian	5.186.444.995,92	4.778.487.041,12	407.957.954,80	-	-	-	-	-	-	-	407.957.954,80
	KIB B	4.997.803.817,80	4.488.324.330,22	509.479.487,58								509.479.487,58

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
	KIB C	188.641.178,12	188.641.178,12	-								-
	KIB D	-	101.521.532,78	(101.521.532,78)								(101.521.532,78)
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	19.962.545.652,09	20.140.069.250,03	(177.523.597,94)	-	-	-	-	124.586.423,54	50.214.935,18	-	(2.722.239,22)
	KIB B	4.353.215.405,90	4.353.215.405,90	0,00								(0,00)
	KIB C	15.223.898.489,91	15.401.422.087,85	(177.523.597,94)					124.586.423,54	50.214.935,18		(2.722.239,22)
	KIB D	385.431.756,28	385.431.756,28	-								-
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2.703.467.279,98	2.702.253.616,15	1.213.663,83	-		-	-	-	-	-	1.213.663,83
	KIB B	2.170.096.541,48	2.168.882.877,65	1.213.663,83								1.213.663,83
	KIB C	533.370.738,50	533.370.738,50	-								
	KIB D	-	-	-								
20	Dinas Kepemudaan dan Olah Raga	6.811.409.815,26	7.710.212.540,88	(898.802.725,62)	-	-	-	321.616.198,97	587.121.300,75	1.624.958,91	-	11.559.733,01
	KIB B	1.407.771.180,22	1.409.754.567,17	(1.983.386,95)				1.983.386,95				
	KIB C	5.351.878.404,65	6.248.697.743,32	(896.819.338,67)				319.632.812,02	587.121.300,75	1.624.958,91		11.559.733,01
	KIB D	51.760.230,39	51.760.230,39	-								
21	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3.509.505.762,94	3.509.505.762,94	0,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIB B	2.995.018.294,21	2.995.018.294,21	0,00								
	KIB C	514.487.468,73	514.487.468,73	-								
	KIB D	-	-	-								
22	Dinas Perikanan	31.767.821.788,91	31.637.833.446,13	129.988.342,78	-	-	20.438.639,63	-	180.757.000,00	-	10.532.500,00	341.716.482,41
	KIB B	23.437.622.971,83	23.673.945.490,78	(236.322.518,95)					180.757.000,00		10.532.500,00	(45.033.018,95)
	KIB C	3.906.843.676,30	3.924.374.395,95	(17.530.719,65)			20.438.639,63					2.907.919,98
	KIB D	4.423.355.140,78	4.039.513.559,40	383.841.581,38								383.841.581,38

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
23	Dinas Pariwisata	13.121.413.321,01	11.922.472.473,57	1.198.940.847,44	-	-	-	-	-	-	-	1.198.940.847,44
	KIB B	2.418.034.571,17	2.417.911.351,01	123.220,16								123.220,16
	KIB C	2.475.201.460,64	2.468.846.794,35	6.354.666,29								6.354.666,29
	KIB D	8.228.177.289,20	7.035.714.328,21	1.192.462.960,99								1.192.462.960,99
24	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	39.665.100.888,42	43.244.711.940,79	(3.579.611.052,37)	-	350.152.170,60	•	-	143.588.597,41	-	20.674.384,73	(3.765.500.240,83)
	KIB B	9.980.292.960,03	9.794.561.659,25	185.731.300,78		350.152.170,60			143.588.597,41		20.674.384,73	(157.887,68)
	KIB C	5.178.986.081,57	5.177.976.023,15	1.010.058,42								1.010.058,42
	KIB D	24.505.821.846,82	28.272.174.258,39	(3.766.352.411,57)								(3.766.352.411,57)
25	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan	11.116.907.896,09	11.072.276.518,91	44.631.377,18	-	-	-	-	-	-	-	44.631.377,18
	KIB B	7.385.571.591,90	7.385.119.907,55	451.684,35								451.684,35
	KIB C	3.000.078.017,63	3.000.082.207,61	(4.189,98)								(4.189,98)
	KIB D	731.258.286,56	687.074.403,75	44.183.882,81								44.183.882,81
26	Sekretariat Daerah	40.235.212.517,46	42.230.024.017,61	(1.994.811.500,15)	-	-	350.152.170,60	288.700.289,35	403.430.191,59	-	-	(952.528.848,61)
	KIB B	30.616.186.229,62	31.928.030.670,99	(1.311.844.441,37)			350.152.170,60	288.700.289,35	403.430.191,59			(269.561.789,83)
	KIB C	9.607.150.860,15	10.290.117.918,93	(682.967.058,78)								(682.967.058,78)
	KIB D	11.875.427,69	11.875.427,69	-								
27	Sekretariat DPRD	11.174.802.153,16	11.166.271.182,66	8.530.970,50	-	-	-	-	-	-	-	8.530.970,50
	KIB B	8.355.542.475,75	8.347.011.505,25	8.530.970,50								8.530.970,50
	KIB C	2.819.259.677,41	2.819.259.677,41	-								
	KIB D	-	-	-								
28	Kecamatan Arut Selatan	8.834.621.106,22	8.847.188.892,79	(12.567.786,57)	-	-	-	-	-	-	-	(12.567.786,57)
	KIB B	5.701.537.627,08	5.714.105.413,65	(12.567.786,57)								(12.567.786,57)
	KIB C	2.927.142.491,86	2.927.142.491,86	-								
	KIB D	205.940.987,28	205.940.987,28	-								
29	Kecamatan Arut Utara	2.663.039.054,63	2.663.403.786,21	(364.731,58)	-	-	-	-	-	-	-	(364.731,58)

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
	KIB B	1.340.931.146,40	1.341.295.877,98	(364.731,58)								(364.731,58)
	KIB C	1.131.838.596,32	1.131.838.596,32	-								
	KIB D	190.269.311,91	190.269.311,91	-								
30	Kecamatan Kumai	4.240.068.819,86	4.236.711.641,49	3.357.178,37	-	-	-	-	-	-	-	3.357.178,37
	KIB B	3.045.089.987,59	3.043.938.046,84	1.151.940,75								1.151.940,75
	KIB C	1.143.446.362,18	1.141.241.124,56	2.205.237,62								2.205.237,62
	KIB D	51.532.470,09	51.532.470,09	-								
31	Kecamatan Kotawaringin Lama	4.735.503.001,19	4.591.776.385,03	143.726.616,16	-	145.000.000,00	•	-	•	-	•	(1.273.383,84)
	KIB B	2.941.923.971,60	2.798.197.355,44	143.726.616,16		145.000.000,00						(1.273.383,84)
	KIB C	1.670.048.166,61	1.670.048.166,61	-								
	KIB D	123.530.862,98	123.530.862,98	-								
32	Kecamatan Pangkalan Lada	2.095.980.250,78	2.095.980.250,78	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	KIB B	1.352.468.336,26	1.352.468.336,26	-								
	KIB C	739.130.722,30	739.130.722,30	-								
	KIB D	4.381.192,22	4.381.192,22	-								
33	Kecamatan Pangkalan Banteng	2.607.449.851,55	2.582.814.465,18	24.635.386,37	-	-	•	-	•	-	•	24.635.386,37
	KIB B	1.723.305.183,84	1.723.305.183,84	0,00					•			
	KIB C	884.144.667,71	859.509.281,34	24.635.386,37								24.635.386,37
	KIB D	-	-	-								
34	Inspektorat Kabupaten	3.159.534.821,71	3.160.380.874,52	(846.052,81)	-	-	-	-	•	-	•	(846.052,81)
	KIB B	2.527.353.914,67	2.528.715.114,25	(1.361.199,58)								(1.361.199,58)
	KIB C	627.975.667,04	627.460.520,27	515.146,77								515.146,77
	KIB D	4.205.240,00	4.205.240,00	-								
35	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5.217.069.715,02	5.457.409.072,26	(240.339.357,24)	-	-	-	-	-	-	-	(240.339.357,24)
	KIB B	3.518.684.510,00	3.518.697.000,40	(12.490,40)								(12.490,40)
	KIB C	1.698.385.205,02	1.938.712.071,86	(240.326.866,84)								(240.326.866,84)

No.	SKPD/KIB	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Neraca)	Akumulasi Penyusutan Per 31 Desember 2022 (Hasil Perhitungan)	Selisih	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Mutasi Keluar	Pemanfaatan Oleh Pihak Lain	Akm. Peny. Barang yang Dilelang	Penghapusan	Pemusnahan	Perubahan Data Bmd (Tanggal Perolehan, Masa Manfaat, Mapping Akun)
	KIB D	-	-	-								
36	Badan Pendapatan Daerah	4.755.481.101,23	4.771.981.402,78	(16.500.301,55)	-	-	-	-	16.500.301,55	-	-	-
	KIB B	4.407.282.132,92	4.407.282.132,92	-								
	KIB C	348.198.968,31	364.699.269,86	(16.500.301,55)					16.500.301,55			
	KIB D	-	-	-								
37	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	8.342.863.841,28	8.352.810.535,16	(9.946.693,88)	-	-	-	-	-	12.080.330,78	-	2.133.636,90
	KIB B	7.116.150.142,17	7.115.309.313,76	840.828,41								840.828,41
	KIB C	1.218.430.239,90	1.229.217.762,19	(10.787.522,29)						12.080.330,78		1.292.808,49
	KIB D	8.283.459,21	8.283.459,21	-								
38	Pejabat Pengelola Keuangan Daerah	1.245.686.860,43	1.653.026.166,43	(407.339.306,00)	-	20.438.639,63	158.900.000,00	268.466.796,97	411.148,66	-	-	-
	KIB B	872.500.000,00	1.299.866.796,97	(427.366.796,97)			158.900.000,00	268.466.796,97				
	KIB C	190.486.860,43	170.459.369,46	20.027.490,97		20.438.639,63			411.148,66			
	KIB D	182.700.000,00	182.700.000,00	0,00								
39	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan	5.624.202.642,14	5.312.945.550,35	311.257.091,79	-	-	-	-	141.625.000,00	-	-	452.882.091,79
	KIB B	5.002.189.381,48	4.690.932.289,69	311.257.091,79					141.625.000,00			452.882.091,79
	KIB C	622.013.260,66	622.013.260,66	-								
	KIB D	-	-	-								
	JUMLAH	3.179.655.738.786,93	3.161.262.853.753,76	18.392.885.033,17	22.574.256.515,84	679.490.810,23	679.490.810,23	892.289.970,48	2.854.782.178,74	69.440.224,80	97.119.145,10	(267.739.963,55)

## Lampiran 5.11 Rincian Akumulasi Penyusutan Properti Investasi

NO	KODE BARANG	REGISTER	JENIS / OBJEK / NAMA BARANG	KETERANGAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI	ATRIBUSI/	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D	BEBAN PENYUSUTAN	AKUMULASI PENYUSUTAN S.D	NILAI BUKU
			27.110.1110			PEROLEHAN	PENAMBAHAN	<b>TAHUN 2021</b>	<b>TAHUN 2022</b>	<b>TAHUN 2022</b>	
40:00:00	1.3.3.01.01.12.001	1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Kantor Kas Bank (disewa BPD)	17/10/2015	209.039.000,00	-	25.948.169,06	4.177.804,02	30.125.973,08	178.913.026,92
49:00:00	1.3.3.01.01.12.001	1	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	BLUD (DISEWA KANTOR KAS BRI)	01/08/2017	143.000.000,00	-	12.630.544,23	2.858.120,67	15.488.664,90	127.511.335,10
50:00:00	1.3.3.01.01.12.001	2	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA / BANGUNAN GEDUNG PERTOKOAN/KOPERASI/PASAR / Gedung Pertokoan/Koperasi Pasar Permanen	Gedung ATM Center	27/09/2017	148.842.000,00	-	12.681.970,90	2.974.883,92	15.656.854,82	133.185.145,18
	Jumlah						-	51.260.684,19	10.010.808,61	61.271.492,80	439.609.507,20

## Lampiran 5.12 Rincian Utang Belanja Tahun 2022

No.	SKPD/Uraian	Nilai
1.	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.136.176.975,00
	Kekurangan Gaji dan Tunjangan Lainnya berdasarkan perubahan gaji ub. Agustus s.d Desember 2022 untuk 69 Orang Pegawai	50.486.005,00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Tenaga Pendidik dan Kependidikan Dinas Dikbud ub. Desember 2022	1.353.148.132,00
	Kekurangan Pembayaran BPJS 4% TPP Guru Ub Juni s.d Desember 2022	373.432.200,00
	Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Dikbud, Cabdis Arsel, Cabdis Kumai, Cabdis Kolam, Cabdis Pangkalan Lada, Cabdis Pangkalan Banteng, Cabdis Aruta ub. Desember 2022	345.708.698,00
	Kekurangan Pembayaran BPJS 4% TPP Dinas Dikbud dan 6 Cabdis Ub Desember 2022	13.075.540,00
	Pembayaran Tagihan Air untuk TK Negeri Pembina Arut Selatan, TKN Pembina Arut Utara, TKN Pembina Kotawaringin Lama ub Desember 2022	147.600,00
	Belanja Tagihan Air Korwil Ktw Lama, Korwil Arut Utara, Korwil Pangkalan Banteng Kab. Ktw. Barat Ub. Desember Tahun 2022	178.800,00
2.	DINAS KESEHATAN	1.573.513.353,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Dinas Kesehatan Ub. Desember 2022	332.290.550,00
	IWP 4% TPP Dinas Kesehatan ub. Desember 2022	12.680.556,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Puskesmas selain wilayah Kotawaringin Lama Ub. Desember 2022	431.297.700,00
	IWP 4% TPP Puskesmas selain wilayah Kotawaringin Lama Ub. Desember 2022	17.251.908,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Puskesmas wilayah Kotawaringin Lama Ub. Desember 2022	75.717.500,00
	IWP 4% TPP Puskesmas wilayah Kotawaringin Lama Ub. Desember 2022	3.028.700,00
	Kekurangan TPP ub.mei s/d juli 2022 An.lka Peronika Bello	4.181.700,00
	IWP 4% TPP ub.mei s/d juli 2022 An.lka Peronika Bello	167.268,00
	Kekurangan TPP ub.juli 2022 An.drg Suliyati	327.400,00
	IWP 4% TPP ub.juli 2022 An.drg Suliyati	13.096,00
	Kekurangan TPP ub.september 2022 An. Dahlia	209.900,00
	IWP 4% TPP ub.september 2022 An. Dahlia	8.396,00
	IWP 4% TPP Puskesmas dan insentif dokter tahun 2022	148.011.841,00
	Rapelan kenaikan pangkat Ub. April s/d Desember 2022	27.426.047,00
	Rapelan kenaikan pangkat Ub. Oktober s/d Desember 2022	41.822.448,00
	Rapelan tunjangan fungsional ub. November s/d Desember 2022	7.480.000,00
	Klaim non kapitasi BPJS Puskesmas Tahun 2022	140.620.000,00
	Jasa Pelayanan Kesehatan atas Dana Kapitasi JKN Tahun 2022	87.899.644,00
	Pengembalian 50% Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas dan Labkesda Ub. Setoran pelayanan Desember 2022	186.524.000,00
	Jasa Pelayanan Kesehatan atas Dana Kapitasi JKN Tahun 2020	56.554.699,00
3.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	12.296.589.903,00
	Utang Jasa Pelayanan Tahun 2022	3.616.430.522,00
	Utang Rapelan/Kekurangan Gaji Tahun 2022	26.616.398,00
	Utang Farmasi (Obat-obatan) Per 31 Desember 2022	3.414.671.181,00
	Utang Farmasi (BAKHP) Per 31 Desember 2022	2.008.079.096,00
	Utang Farmasi (obat dan BHP) Per 31 Desember 2022	1.618.777,00
	Utang Radiologi Per 31 Desember 2022	1.650.000,00
	Utang Laboratorium Per 31 Desember 2022	1.460.147.063,00
	Utang Instalasi Gizi Per 31 Desember 2022	121.590.400,00
	Utang Tagihan PDAM Bulan Per 31 Desember 2022	5.507.350,00
	Utang Bank Darah Per 31 Desember 2022	301.500.000,00
	Utang Tagihan Gas Medis Per 31 Desember 2022	1.334.929.116,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Utang Instalasi Kamar Jenazah Per 31 Desember 2022	3.850.000,00
4.	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	290.948.977,05
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	805.556,00
	Tambahan Penghasilan PNS	289.625.461,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Air	10.000,00
	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	507.960,05
5.	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	130.857.589,00
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	2.148.776,00
	Tambahan Penghasilan PNS	112.285.165,00
	Kekurangan Gaji An. Sapiudin (Berkala 4 Bulan)	908.244,00
	Utang Belanja Jaminan Kesehatan PNS (4%) TPP Ub. Sptember Rp3.832.440,00, Oktober Rp3.794.076,00, November (Rp 3.825.576) dan Desember (Rp 3.807.912,00)	15.260.004,00
	Utang Belanja Jasa Kantor - Air	255.400,00
6.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN	298.075.758,00
	Hutang TPP ub. Desember 2022	280.383.038,00
	BPJS 4% TPP ub. Desember 2022	10.553.616,00
	Hutang pembayaran BPJS 4% bagi 55 orang tenaga kontrak (Banpol PP dan Damkar) dan 3 orang cleaning servis ub. Desember 2022	7.139.104,00
7.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	149.478.062,00
	Belanja Air (PDAM) pada Badan Kesbangpol ub. Desember 2022	396.200,00
	Pembayaran IW 4% TPP PNS pada Badan Kesbangpol ub. Oktober 2022	4.694.292,00
	Pembayaran IW 4% TPP PNS pada Badan Kesbangpol ub. November 2022	4.785.780,00
	Pembayaran IW 4% TPP PNS pada Badan Kesbangpol ub. Desember 2022	4.751.004,00
	Pembayaran Uang Tambahan Penghasilan PNS pada Badan Kesbangpol ub. Desember 2022	133.667.678,00
	Pembayaran Uang Tambahan Penghasilan PNS Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada Badan Kesbangpol ub. Desember 2022 Pembayaran IWP 4% Uang Tambahan Penghasilan PNS Plt. Kasubag Umum dan Kepegawaian pada	1.137.604,00
	Badan Kesbangpol ub. Desember 2022	45.504,00
8.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	164.593.616,00
	Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. Desember 2022	139.918.526,00
	Pembayaran IWP 4% TPP pada BPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. Desember 2022	5.000.340,00
	Utang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	19.674.750,00
9.	DINAS SOSIAL	156.262.035,00
	Utang belanja air Ub. Desember 2022	854.900,00
	Utang belanja air Posko TARUNA Ub. Desember 2022	217.500,00
	Utang Kekurangan Gaji dan Tunjangan Lainnya tahun 2022	4.500.465,00
	Utang Tambahan Penghasilan Pegawai Ub. Desember 2022	150.689.170,00
10.	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	155.283.685,00
	Tagihan Rekening Air	1.529.150,00
	Tambahan Penghasilan PNS (TPP)	148.398.431,00
	Tagihan IWP 4% Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS Disnakertrans Kobar ub. Desember 2022	5.356.104,00
11.	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	193.463.218,00
	Perhitungan Kekurangan Gaji DP3AP2KB sampai dengan bulan Desember 2022 an. Retno Widya Ningsih	1.395.000,00
	Kekurangan Gaji 13 TA 2022	1.891.300,00
	Kekurangan Gaji 14 TA 2022	1.891.300,00
	Rapel TPP 2022	27.942.397,00
	TPP ub. Desember 2022	158.924.838,00
	Kekurangan Pembayaran TPP Plt TA 2021	910.083,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Kekurangan Pembayaran Gaji Berkala TA 2021	508.300,00
12.	DINAS KETAHANAN PANGAN	173.381.863,00
	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat, rincian 23 orang PNS ub. Desember 2022 (beban kerja Rp43.445.610,00 Prestasi kerja Rp69.660.760,00)	113.106.369,00
	Pembayaran luran Jaminan Kesehatan 4% atas Tambahan Penghasilan PNS (TPP) pada Kantor Dinas Ketahanan Pangan Kab.Kobar Ub. Desember 2022	4.288.336,00
	Pembayaran 20% Plt Kadis dan Plt Kabid Konsumsi pada Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Kotawaringin Barat, rincian 2 orang PNS Plt Kadis DKP An. Ir.H.AKHMAD YADI,MM (TMT ub. November 2021 s.d Desember 2022) Rp37.935.926,00 dan Plt Kabid Konsumsi Pangan An.Adi Budiarto,SP (TMT Januari s.d Desember 2022) Rp18.041.232,00	55.977.158,00
	Pembayaran Belanja Air bulan Desember 2022 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	10.000,00
13.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	246.698.532,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	68.847.021,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN-Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	103.270.531,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN- luran Jaminan Kesehatan PNS	6.309.040,00
	Utang Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas	68.271.940,00
14.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	161.344.688,00
	Pembayaran Tambahan Penghasilan ASN ub. Desember 2021	152.852.120,00
	Pembayaran BPJS Kesehatan IW 4% komponen Tambahan Penghasilan ASN ub. Desember 2021	5.782.868,00
	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan ASN ub. Desember 2022, a.n. RODY ISKANDAR, S.Sos, M.Si (Plt Kepala Dinas)	2.709.700,00
15.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	159.486.133,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS ub Desember 2022	59.764.365,00
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS ub Desember 2022	89.646.546,00
	Belanja BPJS Kesehatan 4% ub. Desember 2022	5.960.184,00
	Rapelan PLT Tambahan Penghasilan PNS DPMD ub. Desember 2022 an. Anto Setiawan, SP, MM dan Eki Hidayanti, SP	3.006.872,00
	Rapelan Naik Pangkat TMT 1 Oktober 2022 an. Aji Wahyudi, S.IP, M.A.P ub. Oktober s/d Desember 2022	566.016,00
	Belanja Air Bulan Desember 2022	542.150,00
16.	DINAS PERHUBUNGAN	165.830.938,00
	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ub Desember TA 2022	156.881.788,00
	Belanja IWP4 TPP ub Desember Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ub Desember TA 2022	5.807.968,00
	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PLT pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat ub Desember TA 2022	2.112.832,00
	BelanjaTelepon dan Internet pada Dermaga Inderasari TA 2022	463.550,00
	Belanja Air pada Dermaga Inderasari TA 2022	114.800,00
	Belanja Air pada Pelabuhan Penyeberangan Kumai TA 2022	450.000,00
17.	DISKOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KTW. BARAT	198.557.690,00
	Utang Air	361.450,00
	luran BPJS 4% ASN Diskominfo	7.009.400,00
	Utang Belanja Pegawai (TPP)	191.186.840,00
18.	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KAB. KOTAWARINGIN BARAT	217.516.702,00
	Pembayaran kekurangan gaji pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Kotawaringin Barat ub. April s/d September 2022 An. RETNO LESTARI, ST, MT dkk.	7.308.012,00
	Pembayaran TPP ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi , UKM Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. DESEMBER 2022.	202.710.562,00
	Pembayaran iuran BPJS kesehatan 4% TPP ASN Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Barat Ub. DESEMBER 2022.	7.498.128,00
19.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	172.455.308,00
	Kekurangan Gaji dan Tunjangan untuk Tunjangan Fungsional Umum ub. Desember 2022 an. Dewi Viliyanti, S.IP, an. Sri rahayu Fitriyati, A.Md dan Nur Ikhsaniyah	555.000,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Pembayaran Tunjangan Plt . Kepala Bidang PTSP an. Ir. Heppy Septiana ub. Januari sd Maret 2021	3.608.247,00
	Tagihan Rekening Air ub. Desember 2022	1.000.850,00
	TPP ub. Desember 2022	161.450.739,00
	luran Jaminan Kesehatan 4% atas TPP Ub. Desember 2022	5.840.472,00
20.	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	125.957.678,00
	Hutang Pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Dinas Kepemudaan dan Olahraga Ub Desember 2022 sebanyak 26 ( Dua Puluh Enam ) pegawai	125.411.078,00
	Kekurangan Gaji dan Tunjangan PNS Atas Kenaikan Pangkat PNS DISPORA AN. HASIM SAHRONI, SH Ub. Oktober-Desember 2022	546.600,00
21.	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	205.238.348,00
	Kekurangan pembayaran gaji pokok a.n.M.Rosihan Pribadi	169.000,00
	Kekurangan pembayaran gaji pokok/naik pangkat a.n.RIBUT	323.200,00
	Kekurangan pembayaran gaji pokok/naik pangkat a.n.Ratna Nurhayu.K	254.800,00
	Kekurangan pembayaran gaji pokok/naik pangkat a.n.Ricka Ayu.R	382.200,00
	Kekurangan pembayaran gaji berkala a.n.Aldrin	430.500,00
	Kekurangan pembayaran gaji berkala a.n.Asadin	81.300,00
	Kekurangan pembayaran gaji berkala a.n.lmelda	110.800,00
	Pembayaran BPJS TPP ASN DPK Ub.Oktober 2022	5.963.708,00
	Pembayaran BPJS TPP ASN DPK Ub.Nopember 2022	5.073.980,00
	Pembayaran BPJS TPP ASN DPK Ub.Desember 2022	5.878.340,00
	Kekurangan Pembayaran TPP ASN DPK Ub.Nopember 2022 (PK=Rp994.142 dan BK=Rp7.988.281)	8.982.423,00
	Pembayaran TPP ASN DPK Ub.Desember 2022	162.097.689,00
	Pembayaran Plt TPP a.n.Susiati (PK=4.510.308 dan BK=3.006.872)	7.517.180,00
	Pembayaran Plt TPP a.n.Deby.S (PK=2.047.687 dan KK=1.365.125)	3.412.812,00
	Pembayaran Plt TPP a.n.Imelda (PK=2.730.250 dan BK=1.820.166)	4.550.416,00
	Utang PDAM ub. Desember 2022	10.000,00
22.	DINAS PERIKANAN	148.898.060,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bulan Desember 2022	143.201.316,00
	Iuran Jaminan Kesehatan PNS 4% TPP bulan Desember 2022	5.161.544,00
	Utang Air Desember 2022	535.200,00
23.	DINAS PARIWISATA	161.146.991,00
20.	Belanja Air Ub. Desember 2022	199.750,00
	Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat An. Bambang S.P dan Kartina W Tahun 2022	989.952,00
	Kekurangan TPP (Plt. Sekretaris) An. Febri Sri Hartini, S.PT, M.A.P. Ub. Desember 2022	1.944.622,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Ub. Desember 2022	•
	luran 4% BPJS Kesehatan TPP PNS DISPAR Ub. Desember 2022	152.457.483,00 5.555.184,00
24.	DINAS TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN	540.434.711,00
24.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	Tagihan Rekening Air PDAM Ub. Desember 2022  Kekurangan Gaji dan Tunjangan lainnya karena kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan fungsional dari	1.067.150,00
	Komponen Gaji 14 sebanyak 9 orang (1 bulan)  Kekurangan Gaji dan Tunjangan lainnya karena kenaikan pangkat dan kenaikan tunjangan fungsional dari	3.952.500,00
	Komponen Gaji 13 sebanyak 9 orang (1 bulan)	3.892.250,00
	Utang Tunjangan Pegawai / Tambahan Penghasilan Pegawai Ub. Desember Tahun 2022	513.143.723,00
	luran Jaminan Kesehatan 4% dari Komponen Tunjangan Pegawai / Tambahan Penghasilan Pegawai Ub.  Desember Tahun 2022	18.379.088,00
25.	DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN	208.043.529,00
	Belanja air ub. Desember 2022	10.000,00
	Belanja tambahan penghasilan pegawai/ TPP ub. Desember 2022	199.120.822,00
	Belanja iuran jaminan kesehatan 4% tambahan penghasilan pegawai/ TPP ub. Desember 2022	8.289.880,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Belanja Kekurangan Gaji Ub. Oktober s/d Desember 2022 Kekurangan Gaji an. Ahmad Nahrowi	622.827,00
26.	SEKRETARIAT DAERAH	465.959.131,00
	Kekurangan Gaji Kenaikan Pangkat TMT 1 Oktober 2022 a.n TENGKU JAYADI, SH	715.203,00
	Kekurangan Pembayaran TPP berdasarkan prestasi kerja ub. Desember 2022	270.962.049,00
	Kekurangan Pembayaran TPP berdasarkan beban kerja ub. Desember 2022	165.882.076,00
	Kekurangan Pembayaran BPJS Kesehatan 4% Tambahan Penghasilan PNS (TPP) ub. Desember 2022	14.773.104,00
	Rapel Tunjangan Plt TPP di lingkungan Sekretariat daerah Tahun 2022 a.n TENGKU JAYADI, dkk berdasarkan prestasi kerja	7.000.639,00
	Rapel Tunjangan Plt TPP di lingkungan Sekretariat daerah Tahun 2022 a.n TENGKU JAYADI, dkk berdasarkan beban kerja	4.667.092,00
	Kekurangan Pembayaran luran BPJS Kesehatan 4%Pembayaran Rapel TPP SETDA Tahun 2022	155.568,00
	Belanja Tagihan Air ub. Desember 2022	1.803.400,00
27.	SEKRETARIAT DPRD	92.840.986,00
	Pembayaran Tambahan Penghasilan PNS (TPP) Berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja Pegawai Sekretariat DPRD Kab. Kobar. Ub. Desember Tahun 2022.	89.733.906,00
	Pembayaran iuran BPJS 4% berdasarkan TPP bulan Desember 2022 pegawai Sekretariat DPRD Kab.Kobar	3.107.080,00
28.	KECAMATAN ARUT SELATAN	312.900.176,00
	Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kecamatan dan Kelurahan ub. Desember 2022	296.708.988,00
	Pembayaran IW 4% atas Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kecamatan dan Kelurahan ub. Desember 2022	11.790.668,00
	Pembayaran Gaji Berkala Ub. September s/d Desember 2022 an. Hestiyanto Budi Widodo	678.828,00
	Pembayaran Gaji Berkala Ub. April s/d Desember 2022 an. Sulaiman, A.Md	1.097.064,00
	Pembayaran Kenaikan Pangkat Ub. Oktober s/d Desember 2022 an. Surani, S.AP	529.578,00
	Tagihan Rekening Air Ub. Desember 2022	1.465.050,00
	Tagihan Internet Kelurahan Raja Seberang Ub. Desember 2022	365.000,00
	Tagihan Internet Eldigi Hotspot Kelurahan Kelurahan Mendawai Seberang Ub. Desember 2022	265.000,00
29.	KECAMATAN ARUT UTARA	113.514.020,00
	Gaji pokok PNS/uang representasi	1.756.500,00
	Tunjangan keluarga	199.044,00
	BPJS Kesehatan KEKURANGAN GAJI	78.221,00
	JKK	4.224,00
	JKM	12.655,00
	Pembulatan gaji	439,00
	BPJS Kesehatan TPP Ub. DESEMBER 2021	3.840.088,00
	Tambaha Penghasilan Pegawai berdasarkan Prestasi Kerja	61.798.436,00
	Tambaha Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja	37.498.613,00
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas	8.325.800,00
30.	KECAMATAN KUMAI	184.121.664,00
	TPP Kecamatan Kumai Ub. Desember 2022	91.778.797,00
	TPP Kelurahan Candi Ub. Desember 2022	25.646.418,00
	TPP Kelurahan Kumai Hulu Ub. Desember 2022	28.321.082,00
	TPP Kelurahan Kumai Hilir Ub. Desember 2022	30.905.469,00
	IWP 4% TPP Kecamatan Kumai, Kelurahan Kumai Hulu, Kelurahan Kumai Hilir dan Kelurahan Candi Ub. Desember 2022	6.978.352,00
	Hutang PDAM Ub. Desember 2022	264.600,00
	Gaji Pokok PNS	226.946,00
31.	KECAMATAN KOTAWARINGIN LAMA	145.399.171,00
	Utang tagihan rekening air ub. Desember 2022	303.400,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Utang TPP SKPD Kec. Kotawaringin Lama ub. Desember 2022	139.694.003,00
	Utang IW 4% TPP ub. Desember 2022 SKPD Kec.Kotawaringin Lama	5.401.768,00
32.	KECAMATAN PANGKALAN LADA	67.957.280,00
	Tambahan Penghasilan PNS ub. Desember 2022	65.522.936,00
	IWP 4% TPP PNS ub. Desember 2022	2.434.344,00
33.	KECAMATAN PANGKALAN BANTENG	89.328.926,00
	Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	33.322.317,00
	Utang Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN	49.983.482,00
	Utang Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	3.184.864,00
	Utang Belanja Air	2.838.263,00
34.	INSPEKTUR DAERAH	250.547.320,00
	Utang TPP Ub. Desember 2022	240.286.544,00
	Utang Jaminan Kesehatan Pembayaran (IWP 4%)TPP Ub. Desember 2022	8.924.576,00
	Utang kekurangan Gaji Tahun 2022 An. Sri mulyati, dkk	1.336.200,00
35.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	252.210.713,00
	Rapel Kekurangan Pembayaran Gaji TA. 2022 (Kenaikan Pangkat)	2.571.133,00
	Rapel Kekurangan Pembayaran Gaji TA. 2022 (Tunjangan Fungsional)	22.204.540,00
	Rapel Kekurangan Pembayaran Gaji TA. 2022 (Gaji 13)	4.759.450,00
	Rapel Kekurangan Pembayaran Gaji TA. 2022 (Gaji 14)	4.780.400,00
	Rapel Kekurangan Tambahan Penghasilan Pegawai An. Dr.Ir.Juni Gultom, ST.,MTP Ub. November 2022 (Prestasi Kerja)	1.878.731,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Plt TA. 2022 (Beban Kerja)	8.898.104,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Plt TA. 2022 (Prestasi Kerja)	13.347.156,00
	IWP 4% TPP Plt TA. 2022	1.022.604,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Ub. Desember 2022 (Beban Kerja)	72.265.374,00
	Tambahan Penghasilan Pegawai Ub. Desember 2022 (Prestasi Kerja)	110.659.425,00
	IWP 4% TPP Ub. Desember 2022	6.622.880,00
	Belanja Tagihan Listrik Ub. Desember 2022	3.200.916,00
36.	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	214.653.455,00
	Gaji dan Tunjangan	705.223,00
	Utang Rapelan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ub. Maret s.d. April 2022 an. RETNO WIDOWATI,SP	3.889.244,00
	Tambahan Penghasilan Ub. Desember 2022	183.232.512,00
	Tunjangan BPJS Kesehatan atas TPP ub.September 2022	6.623.764,00
	Tunjangan BPJS Kesehatan atas TPP ub.Oktober 2022	6.764.160,00
	Tunjangan BPJS Kesehatan atas TPP ub.November 2022	6.749.716,00
-	Tunjangan BPJS Kesehatan atas TPP ub.Desember 2022	6.678.836,00
	Belanja air	10.000,00
37.	BADAN PENDAPATAN DAERAH	384.147.854,00
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN (Rapel Kenaikan pangkat)	1.312.134,00
	Tambahan Penghasilan PNS	163.268.205,00
	luran BPJS Kesehatan 4% dari TPP	6.061.124,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Insentif Pemungutan Pajak Daerah) Rriwulan IV	96.853.241,00
	Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Insentif Pemungutan Pajak Daerah) Triwulan III Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN (Insentif	64.500.000,00

No.	SKPD/Uraian	Nilai
	Utang Belanja Jasa Kantor - Air	403.150,00
38.	BADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	163.297.834,00
	Tagihan Air Ub. Desember 2021	16.750,00
	Pembayaran TPP pada BKPP ub. Desember 2022	150.183.310,00
	Pembayaran IW 4% dari Komponen TPP ub. Desember 2022	5.436.220,00
	Kekurangan Pembayaran Tagihan Listrik ub. Desember 2022	228.632,00
	Pembayaran Kekurangan Gaji PNS	902.638,00
	Pembayaran Rapel Plt. TPP Tahun 2022	6.530.284,00
39.	PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH	3.591.457.800,00
	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	570.703.100,00
	Utang Transfer Bagi Hasil Retribusi Daerah	203.594.000,00
	Utang Transfer Bantuan Keuangan	2.817.160.700,00
	Total Saldo Utang 2022	26.758.570.672,05

Lampiran 5.13 Rekapitulasi Laporan APBDes Lampiran 5.14 Laporan Keuangan BUMD